BADAN POM

WBBM WBK

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

BALAI BESAR POM DI PADANG



TRIWULAN II
2025

REVISI

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum wr wb.

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan anugerah-Nya sehingga Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAPKIN) Triwulan II Tahun 2025 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.



Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAPKIN) Triwulan II Tahun 2025 mengacu pada Keputusan Kepala BPOM NO 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Surat Edaran Sekretaris Utama No. PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi yang disusun dalam bentuk pertanggungjawaban keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAPKIN) Triwulan II Tahun 2025 ini tertuang Perjanjian Kinerja Triwulan II Tahun 2025, pengukuran capaian kinerja terhadap target triwulan II Tahun 2025, membandingkan realisasi kinerja dan capaian kinerja terhadap target tahunan dan target akhir periode Renstra 2025-2029.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Perubahan target indikator kinerja Triwulan II tahun 2025 tertuang pada revisi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Padang Tahun 2025.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAPKIN) Triwulan II Tahun 2025 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi acuan dalam upaya perbaikan secara berkesinambungan berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang pada periode selanjutnya

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dan dapat memberikan sumbangan bagi peningkatan kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang pada periode berikutnya.

Padang, 21 Juli 2025
Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang



Aria Bogorianti, S.Si., Apt.

Tim Penyusun

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG NOMOR HK.02.02.3A.04.25.64 Tahun 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG



Penanggungjawab : Aria Bogorianti, S.Si., Apt.
Ketua : Elyunaida, S.Si., Apt., M.Farm
Sekretaris : Vera Sribanon, S.Si., Apt.

ANGGOTA :

1. Linda Gusrini F, S.Si., Apt., M.Farm.
2. Dra. Patria Dehelen, Apt.
3. Fitra Yelli, S.Farm., Apt., M.Farm
4. Rina Syukrina, S.Farm., Apt.
5. Azfrianty, STP., M.Farm.
6. Fitria, S.Si., Apt.
7. Reni Sepriyanti, S.Farm., Apt.
8. Yelvina, S.Si., Apt.
9. Thudesy Cameryta, S.Farm., Apt., M.Farm
10. Mutiara Yulanda, S.Farm., Apt.
11. Ade Cahyana, S.Si., Apt., M.Pharm
12. Dilla Shavera, S.Si, Apt. M.Biomed
13. Nining, S.Farm., Apt
14. Vera Sribanon, S.Si., Apt.
15. Bambang Hermanto, S.M., M.M.
16. Airin Muchlis, S.E.
17. Sony Aulia Dwita AM, S.E.
18. Nery Revisa, S.E., M.Sc

EDITOR :
Yuni Tri Wahyuni, S.Kom., M.Eng
Taruna Wadi, S.Kom.

Daftar Isi

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Tim Penyusun iii

Daftar Isi iv

Daftar Gambar vi

Daftar Tabel vii

Daftar Lampiran xiv

Ringkasan Eksekutif xv

Highlight xix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI 2

1.3 STRUKTUR ORGANISASI 4

1.4 ISU STRATEGIS 5

1.4.1. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI 5

1.4.2 ISU STRATEGIS PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 14

1.4.3 PERMASALAHAN UTAMA 23

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 URAIAN SINGKAT RANCANGAN RENCANA STRATEGIS 2025-2029 25

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2025 30

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 32

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 35

2.5. KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR 40

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi **42**

3.1.1 Pencapaian Sasaran Kegiatan I **46**

3.1.2 Pencapaian Sasaran Kegiatan II **105**

3.1.3 Pencapaian Sasaran Kegiatan III **110**

3.1.4 Pencapaian Sasaran Kegiatan IV **117**

3.1.5 Pencapaian Sasaran Kegiatan V **140**

3.1.6 Pencapaian Sasaran Kegiatan VI **147**

3.1.7 Pencapaian Sasaran Kegiatan VII **152**

3.1.8 Pencapaian Sasaran Kegiatan VIII **157**

3.1.9 Pencapaian Sasaran Kegiatan IX **159**

3.2. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI **166**

3.3. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA **213**

3.4. REALISASI ANGGARAN **220**

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN **236**

4.2 RENCANA PERBAIKAN KINERJA **240**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	4
Gambar 1.2.	Profil SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan umur	8
Gambar 1.3.	Peta Wilayah Sumatera Barat	12
Gambar 3.1.	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan II Tahun 2025	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Profil SDM Berdasarkan Golongan	8
Tabel 1.2.	Profil SDM Berdasarkan Pendidikan	8
Tabel 1.3.	Tabel Jumlah Sarana Distribusi dan Sarana Produksi Obat dan Makanan	13
Tabel 2.1.	Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	30
Tabel 2.2.	Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran2024	33
Tabel 2.3.	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Triwulan I Tahun 2025	36
Tabel 2.4.	Kriteria Pencapaian NPSS	36
Tabel 2.5.	Kriteria Capaian Kinerja Hasil Perbandingan dengan Target Triwulan	40
Tabel 2.6.	Kriteria Capaian Kinerja Hasil Perbandingan dengan Target Tahunan	41
Tabel 3.1.	Capaian Kinerja per Sasaran Kegiatan Triwulan II Tahun 2025	42
Tabel 3.2.	Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama TW II – 2025	43
Tabel 3.3.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan I.	47
Tabel 3.4.	apaian Persentase Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang triwulan II tahun 2025	49
Tabel 3.5.	Hasil Perhitungan Realisasi IKU Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	49
Tabel 3.6.	Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tw II tahun 2025 terhadap tw I tahun 2025	50
Tabel 3.7.	Perbandingan Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra	51
Tabel 3.8.	Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	53
Tabel 3.9.	Capaian Indikator Kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2025	53
Tabel 3.10.	Perbandingan realisasi dan capaian kinerja persentase makanan yang memenuhi syarat tw III Triwulan I Tahun 2025 terhadap tw I dan tw II Triwulan I Tahun 2025	54
Tabel 3.11.	Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Sampel Pangan Olahan berisiko	58

yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tw II tahun 2025 terhadap tw I tahun 2025

Tabel 3.12. Perbandingan Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra 58

Tabel 3.13. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 60

Tabel 3.14. Capaian Indikator Kinerja Persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji Sesuai Standar Triwulan II Tahun 2025 62

Tabel 3.15. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji Sesuai Standar tw II tahun 2025 terhadap tw I tahun 2025 63

Tabel 3.16. Perbandingan Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra 64

Tabel 3.17. CEfisiensi Anggaran pada Indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar 65

Tabel 3.18. Capaian Indikator Kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2025 68

Tabel 3.19. Hasil Perhitungan Realisasi IKU Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II 2025 68

Tabel 3.20. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tw II tahun 2025 terhadap tw I tahun 2025 69

Tabel 3.21. Perbandingan Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra 69

Tabel 3.22. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 72

Tabel 3.23. Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder di Wilayah Kerja BBPOM di Padang TW 2 Tahun 2025 74

Tabel 3.24. Hasil Perhitungan Realisasi IKU Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder triwulan II 2025 75

Tabel 3.25. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan 75

	Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder tw II tahun 2025 terhadap tw I tahun 2025	
Tabel 3.26.	Perbandingan Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra	76
Tabel 3.27.	Efisiensi Anggaran pada Indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	77
Tabel 3.28.	Capaian Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II tahun 2025	79
Tabel 3.29.	Hasil Perhitungan Realisasi IKU Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II 2025	80
Tabel 3.30.	Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tw II tahun 2025 terhadap tw I tahun 2025	80
Tabel 3.31.	Perbandingan Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra	81
Tabel 3.32.	Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82
Tabel 3.33	Capaian Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II tahun 2025	84
Tabel 3.34	Hasil Perhitungan Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II 2025	85
Tabel 3.35	Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tw II tahun 2025 terhadap tw I tahun 2025	85
Tabel 3.36	Perbandingan Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra	86
Tabel 3.37	Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87
Tabel 3.38	Capaian Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2025	89
Tabel 3.39	Hasil Perhitungan Realisasi IKU Persentase sarana distribusi Sediaan	90

	Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II tahun 2025	
Tabel 3.40	Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tw II tahun 2025 terhadap tw I tahun 2025	90
Tabel 3.41	Perbandingan Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra	91
Tabel 3.42	Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92
Tabel 3.43	Capaian Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II tahun 2025	94
Tabel 3.44	Hasil Perhitungan Realisasi IKU Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II Tahun 2025	94
Tabel 3.45	Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tw II tahun 2025 terhadap tw I tahun 2025	95
Tabel 3.46	Perbandingan Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan ketentuan Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra	96
Tabel 3.47	Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97
Tabel 3.48	Capaian Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025	99
Tabel 3.49	Hasil Perhitungan Realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Triwulan II tahun 2025	100
Tabel 3.50	Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan tw II tahun 2025 terhadap tw I tahun 2025	101
Tabel 3.51	Perbandingan Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra	101
Tabel 3.52	Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	103
Tabel 3.53	Capaian Persentase Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025	106

Tabel 3.54	Hasil Perhitungan Realisasi Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II tahun 2025	107
Tabel 3.55	Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tw II tahun 2025 terhadap tw I tahun 2025	107
Tabel 3.56	Perbandingan Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II -2025 terhadap Target Akhir Renstra	108
Tabel 3.57	Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	109
Tabel 3.58	Capaian Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium triwulan II tahun 2025	112
Tabel 3.59	Hasil Perhitungan Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Triwulan II 2025	113
Tabel 3.60	Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium tw II tahun 2025 terhadap tw I tahun 2025	114
Tabel 3.61	Perbandingan Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra	114
Tabel 3.62	Efisiensi Anggaran pada Indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	116
Tabel 3.63	Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan IV	117
Tabel 3.64	Capaian Indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan TW II Tahun 2025	119
Tabel 3.65	Perhitungan realisasi Tingkat Efektifitas KIE Triwulan II Tahun 2025	119
Tabel 3.66	Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan TW II Tahun 2025 terhadap TW I Tahun 2025	120
Tabel 3.67	Perbandingan Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra	121
Tabel 3.68	Efisiensi Anggaran pada Indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	123
Tabel 3.69	Capaian Indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan Triwulan II Tahun 2025	125
Tabel 3.70	Progres IKU Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan	125

	Pangan Triwulan I 2025	
Tabel 3.71	Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan tw II tahun 2025 terhadap tw I tahun 2025	126
Tabel 3.72	Perbandingan Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra	126
Tabel 3.73	Efisiensi Anggaran pada Indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	128
Tabel 3.74	Capaian Indikator Kinerja Jumlah Desa Pangan Aman Triwulan II Tahun 2025	130
Tabel 3.75	Progres IKU Jumlah Desa Pangan Aman Triwulan II Tahun 2025	130
Tabel 3.76	Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Jumlah desa pangan aman tw I tahun 2025 terhadap tw I tahun 2025	131
Tabel 3.77	Perbandingan Jumlah desa pangan aman Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra	131
Tabel 3.78	Efisiensi Anggaran pada Indikator Jumlah desa pangan aman	134
Tabel 3.79	Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Triwulan I Tahun 2024	135
Tabel 3.80	Progres IKU Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas TW II - 2025	136
Tabel 3.81	Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas tw II tahun 2025 terhadap tw I tahun 2025	136
Tabel 3.82	Perbandingan Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra	137
Tabel 3.83	Efisiensi Anggaran pada Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	139
Tabel 3.84	Pencapaian Indikator Kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	142
Tabel 3.85	Hasil Perhitungan Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan pada triwulan II 2025	142
Tabel 3.86	Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan tw II tahun 2025 terhadap tw I tahun 2025	143
Tabel 3.87	Perbandingan Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra	144
Tabel 3.88	Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase UMKM yang didampingi dan	145

	memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	
Tabel 3.89	Capaian Indikator Kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT Triwulan II Tahun 2025	148
Tabel 3.90	Hasil Perhitungan Realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT Triwulan II tahun 2025	148
Tabel 3.91	Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan tw II tahun 2025 terhadap tw I tahun 2025	149
Tabel 3.92	Perbandingan Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra	149
Tabel 3.93	Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	151
Tabel 3.94	Capaian Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar triwulan II tahun 2025	153
Tabel 3.95	Hasil Perhitungan Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Triwulan II tahun 2025	153
Tabel 3.96	Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar tw II tahun 2025 terhadap tw I tahun 2025	154
Tabel 3.97	Perbandingan Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra	154
Tabel 3.98	Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	155
Tabel 3.99	Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Bulan April sd Juni 2025	166
Tabel 3.100	Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Triwulan II Tahun 2025	221
Tabel 3.101	Realisasi Anggaran per Indikator Triwulan II Tahun 2025	222
Tabel 3.102	Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Triwulan II Tahun 2025	225
Tabel 3.103	Realisasi Anggaran per Kegiatan Triwulan II Tahun 2025	226
Tabel 3.104	Realisasi Anggaran per Rincian Output Triwulan II Tahun 2025	226
Tabel 3.105	Nilai Efisiensi Indikator Kinerja Triwulan II Tahun 2025	230
Tabel 3.106	Nilai Efisiensi Sasaran Kegiatan Triwulan II Tahun 2025	232

DAFTAR LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Padang Tahun 2025
2. Matriks Kinerja dan Pendanaan Renstra 2025-2029
3. SK IKU tahun 2025
4. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Padang Tahun 2025
5. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Padang Tahun 2025 Revisi
6. Nilai Pencapaian Organisasi (NKO) Balai Besar POM di Padang Triwulan II Tahun 2025
7. Capaian RAPK Balai Besar POM di Padang Bulan April Tahun 2025
8. Capaian RAPK Balai Besar POM di Padang Bulan Mei Tahun 2025
9. Capaian RAPK Balai Besar POM di Padang Bulan Juni Tahun 2025
10. Capaian Realisasi Anggaran Per-Output Balai Besar POM di Padang Bulan April 2025
11. Capaian Realisasi Anggaran Per-Output Balai Besar POM di Padang Bulan Mei 2025
12. Capaian Realisasi Anggaran Per-Output BBPOM di Padang Bulan Juni Tahun 2025
13. Capaian Realisasi Anggaran Per-IKU BBPOM di Padang Bulan April 2025
14. Capaian Realisasi Anggaran Per-IKU BBPOM di Padang Bulan Mei 2025
15. Capaian Realisasi Anggaran Per-IKU BBPOM di Padang Bulan Juni Tahun 2025
16. Capaian tingkat Efisiensi per-IKU Triwulan II Tahun 2025
17. Capaian tingkat Efisiensi per-Sasaran Strategis Triwulan II Tahun 2025
18. Capaian Realisasi Anggaran Per-Sasaran Strategis Balai Besar POM di Padang TriwuIan II Tahun 2025
19. Kertas Kerja Realisasi IKU Triwulan II 2025
20. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Bulan April s.d Juni Tahun 2025
21. Surat Keputusan Kepala BBPOM di Padang tentang Tim Laporan Kinerja Tahun 2025

Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang telah melakukan tugas dan fungsi sebagai pengawas produk sediaan farmasi dan pangan olahan untuk mewujudkan visi dan misi BPOM. Hasil kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Triwulan II Tahun 2025 telah dituangkan dalam Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Triwulan II Tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan pada rencana strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang periode tahun 2025-2029.

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 menjelaskan kemajuan capaian target kinerja berdasarkan hasil Evaluasi Internal Triwulan II tahun 2025, beserta kendala/hambatan dan rencana tindak lanjut. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) ditunjukkan oleh hasil Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan yang merupakan hasil seluruh realisasi indikator kinerja. Nilai NKO Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang pada Triwulan II tahun 2025 sebesar 106,15% dengan kriteria Istimewa.



Capaian Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Triwulan II Tahun 2025 diwujudkan dalam 9 (sembilan) sasaran kegiatan dengan 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja Kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tahun 2025. Dari 9 sasaran kegiatan, maka 4 sasaran kegiatan memperoleh capaian “Sangat Baik”, 1 sasaran kegiatan memperoleh capaian “Baik”, dan 2 sasaran kegiatan dengan capaian “Tidak Dapat Disimpulkan”.

Kesembilan sasaran kegiatan tersebut :

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan nilai capaian sasaran kegiatan 106,76% (Sangat baik)
2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan nilai capaian sasaran kegiatan 158,73% dinormalisasi menjadi 110% (Tidak dapat disimpulkan)
3. Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan nilai capaian sasaran kegiatan 106,25% (Sangat Baik).
4. Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dengan nilai capaian sasaran kegiatan 103,71% (Sangat Baik).
5. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan tandar keamanan dan mutu, nilai capaian sasaran kegiatan 108,08% (Sangat baik).
6. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dengan nilai capaian sasaran kegiatan 116,28 dinormalisasi menjadi 110% (Tidak dapat dsimpulkan).
7. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dengan nilai capaian sasaran kegiatan 100,00% (Baik)
8. Layanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang prima, capaian belum dihitung pada Triwulan II 2025.
9. Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal capaian belum dihitung pada Triwulan II 2025.

Capaian kinerja terhadap 19 IKU yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

a. Indikator dengan kriteria Sangat Baik (dengan capaian 100% $<$ x $\leq$ 110%) sebanyak 6 Indikator Kinerja Utama, yaitu :

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 107,61%
2. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 106,13%
3. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 103,99%
4. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan capaian 106,25%
5. Jumlah desa pangan aman dengan capaian 105,56%
6. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan dengan capaian 108,08%

b. Indikator dengan kriteria Baik (dengan capaian 90% < x ≤ 110%) sebanyak 5 IKU yaitu:
1. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar dengan capaian 100%
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dengan capaian 99,87%
3. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dengan capaian 99,28%
4. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dengan capaian 100%
5. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar dengan capaian 100%

Indikator dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan (dengan capaian > 110%) sebanyak 8 Indikator Kinerja Utama, yaitu :
1. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 114,87%
2. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 117,65%
3. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 117,65%
4. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 117,65%
5. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dengan capaian 123,15%
6. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 158,73%
7. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dengan capaian 116,67%
8. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT dengan capaian 116,28%

Persentase capaian target indikator kinerja BBPOM di Padang pada Triwulan II Tahun 2025 berkisar antara 99,28% sampai dengan 158,73%. Persentase capaian indikator kinerja terendah pada indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, sedangkan persentase capaian indicator yang tertinggi adalah Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
Rendahnya nilai capaian indikator tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Olahan di wilayah kerja UPT karena masih ada peserta yg belum dapat mengingat pesan KIE yang disampaikan dan masih terdapat peserta belum dapat menjelaskan kembali materi KIE yang sudah diterima. Hal ini disebabkan peserta KIE bersama Tomas yang sangat beragam dengan karakteristik demografi, latar belakang pendidikan, umur dan sosial budaya yang berbeda-beda dan keterbatasan kemampuan narasumber dalam memahami karakteristik peserta yang sangat beragam serta terbatasnya media KIE yang dapat digunakan untuk pelaksanaan KIE secara masif karena terdampak efisiensi anggaran.

Untuk mencapai target Indeks Efektifitas KIE Obat dan Makanan, beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain mengoptimalkan KIE melalui media sosial dan meningkatkan kerja sama dengan stakeholder terkait penyebaran informasi keamanan Obat dan Makanan, Pada saat pemberian informasi perlu peningkatan pemahaman peserta dengan meningkatkan interaksi dengan peserta KIE antara lain dengan mengadakan kuis, tanya jawab, menggunakan alat peraga seperti contoh produk, poster dan brosur serta kegiatan lainnya.

IKU Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mendapat capaian tertinggi (158,73%) disebabkan penetapan target Indikator Kinerja yang kurang tepat, dimana target yang ditetapkan terlalu rendah sedangkan sarana produksi pangan produksi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sesuai dengan defenisi operasional sudah dapat dipenuhi 100%. Penetapan target yang kurang tepat ini disebabkan karena pemahaman awal terhadap desfenisi operasional yang belum sesuai, pada defenisi operasional realisasi diperoleh dari jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dibagi dengan Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT dengan tidak memperhitungkan apakan sarana yg diperiksa memenuhi ketentuan atau produknya memenuhi syarat. Dengan tercapainya realisasi 100%, maka target indikator ini tidak relevan lagi sehingga perlu dilakukan reviu target pada periode Renstra 2025-2029

Sarana pangan olahan fortifikasi yang berada di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang ada 5 sarana yang terdiri dari 3 sarana Minyak Goreng Sawit dan 2 sarana produksi Garam kategori UMKM. Semua sarana ini telah dilakukan pemeriksaan dan semua telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan sehingga mendapatkan realisasi 100% dengan target sebesar 63% mendapat capaian sebesar 158,73 dengan kategori tidak dapat disimpulkan.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja 9 (sembilan) sasaran kegiatan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan telah menyerap anggaran DIPA Balai Besar POM di Padang sampai tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 8.234.697.639 (Delapan milyar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuah enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) atau sebesar 22,41% dari total pagu anggaran Tahun 2025 awal yaitu sebesar RP. 36.739.481.000 (Tiga puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan 34,03% dari total pagu anggaran setelah blokir yaitu sebesar Rp. 24.195.467.000 (Dua puluh empat milyar seratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) per 30 Juni 2025.

Dari perhitungan efisiensi penggunaan anggaran apabila dibandingkan capaian persentase realisasi anggaran masing-masing sasaran strategis dengan persentase capaian masing-masing sasaran strategis BBPOM di Padang maka diperoleh kegiatan yang dilakukan BBPOM di Padang telah efisien dengan nilai capaian efisiensi sebesar 92%.

Highlight

Forum Konsultasi Publik Untuk Kualitas Pelayanan Yang Lebih Baik

Forum Konsultasi Publik (FKP) dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025 di Aula lantai 3 gedung BBPOM di Padang. Dihadiri 25 orang peserta yang terdiri dari penerima layanan, stakeholder, organisasi masyarakat, akademisi dan media. Kegiatan ini dibuka oleh Plt Kepala BBPOM di Padang, Hilda Murni. Pada kegiatan ini juga diperkenalkan inovasi terbaru "Simpelin Aja" yang diperuntukkan bagi kemudahan pelaku usaha dalam penyiapan Dokumen Cara Produksi Pangan Olahan yang baik (CPPOB). Kegiatan penyiapan dokumen yang biasanya dikerjakan hingga 3 hari dapat dipersingkat menjadi setengah jam melalui aplikasi ini. Akhir acara, dilakukan penandatanganan Berita Acara FKP oleh perwakilan undangan, yang nantinya akan menghasilkan Standar Pelayanan Publik yang bermanfaat bagi masyarakat.



KIE Cegah Stunting di Nagari Lubuak Aluang



Pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) bertema "Cegah Stunting dengan Konsumsi Pangan Aman dan Gizi Seimbang" kembali digelar BBPOM di Padang. Kali ini kegiatan berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman yang diadakan di Aula Puskesmas Sikabu tanggal 5 Mei 2025 di locus stunting Nagari Lubuak Alung dengan plevalensi sebesar 21,47%.

Salah satu upaya pencegahan stunting melalui KIE dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keamanan pangan dan gizi seimbang dalam pola makan sehari-hari. Pemaparan materi disampaikan oleh Kepala Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Elia Munawwari, S.KM, M.Kes., PFM Ahli Madya BBPOM di Padang Azfrianty dan PFM Ahli Muda BBPOM di Padang Novita Normasari.

Bimtek Penerapan CPPOB UMK Pangan Olahan



Berkolaborasi dengan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan (PMPUPO) dalam program SAPA UMK, BBPOM di Padang melaksanakan melaksanakan Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) Program Orang Tua Angkat Pemberdayaan UMK Pangan Olahan. SAPA UMK merupakan program yang memberikan fasilitasi dalam rangka percepatan pengembangan kewirausahaan bagi UMK yang disinergikan dengan Program Orang Tua Angkat (OTA) yang pada kesempatan ini difasilitasi oleh PT. Niramas Utama.

Sinergi program ini diharapkan dapat mencapai visi yang sama untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMK sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Hasil pendampingan Bimtek ini yaitu diselesaikan pendaftaran akun dan pendaftaran produk untuk mendapatkan sertifikat IPCPPOB. Diharapkan pelaku usaha mampu membuat dokumen desain GMP, CPPOB dan SSOP untuk sarana produksi pangan olahan sehingga percepatan penerbitan Izin Penerapan CPPOB dapat segera dilaksanakan.

Bimbingan Teknis Keamanan Pangan Di SMA N 2 Gunung Talang



Bimbingan Teknis Keamanan pangan Bagi Sekolah yang dintervensi dilaksanakan di Aula SMA N 2 Gunung Talang, Kamis tanggal 15 Mei 2025. SMA ini merupakan Sekolah yang diintervensi BBPOM di Padang sebagai Locus Intervensi program Prioritas nasional. Peserta Kegiatan di bekali dengan Materi tentang "Kebijakan Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan, dan Nutrisi Seimbang Untuk Sdm Unggul, Materi 5 Kunci Mengolah Pangan dan Implementasi Keamanan Pangan di Kantin Sekolah, Peran Kader Keamanan Pangan Sekolah (KPS). Harapannya, Program ini dapat menjadi penggerak dalam implementasi keamanan pangan di sekolah dan mencetak kader keamanan pangan.

Bimtek Kader Keamanan Pangan



Tahapan selanjutnya dari Rangkaian Program Prioritas Nasional untuk Desa/Nagari Pangan Aman setelah Advokasi adalah Pelatihan Kader Keamanan Pangan. Tiga Nagari yang diintervensi oleh BBPOM di Padang pada tahun 2025 ini berasal dari Kecamatan Gunung Talang yaitu Nagari Aie Batumbuak, Nagari Batang Barus dan Nagari Koto Gaek Guguk. Bertempat di Kantor Wali Nagari Batang Barus, Jorong Lubuk Selasih, tanggal 15 Mei 2025, kegiatan dihadiri oleh 1 orang Wali Nagari dan 5 orang kader dari masing-masing Nagari.

IN HOUSE TRANING Awareness Training & Workshop Occupational Health and Safety Management System Based on ISO 45001:2018



Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pengetahuan personil laboratorium mengenai pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium, maka pada tanggal 26 - 27 Mei 2025 BBPOM di Padang mengadakan *Awareness Training & Workshop Occupational Health and Safety Management System Based on ISO* 45001:2018. Pelatihan yang diberikan oleh Lembaga Yura Training Center ini diadakan secara luring dengan materi pemahaman mendasar mengenai konsep, prinsip, dan persyaratan ISO 45001 serta memahami terkait implementasi standar K3. Penting bagi laboratorium untuk menerapkan ISO 450001: 2018 untuk meminimalisir Kecelakaan kerja dan kesehatan yang muncul selama aktivitas bekerja ,mengurangi hingga menghilangkan risiko K3, meningkatkan reputasi organisasi hingga mendapatkan pengakuan dari pihak ketiga berupa sertifikat ISO 45001 : 2018

Pelatihan Interpretasi Sertifikat Kalibrasi dan Verifikasi Alat



Pelatihan interpretasi sertifikat kalibrasi dan verifikasi alat bertujuan untuk membekali perserta dengan pegetahuan dan keterampilan dalam memahami dan mengevaluasi hasil kalibrasi alat ukur serta memastikan keabsahan sertifikat kalibrasi. Pelatihna ini relevan untuk berbagai sektor industri dan laboratorium yang memerlukan pengukuran yang akurat.
Untuk memastikan keakuratan alat ukur, BBPOM di Padang mengadakan pelatihan Interpretasi Sertifikat Kalibrasi dan Verifikasi Alat pada 24 - 26 Juni 2025. Kegiatan ini diikuti oleh semua personel laboratorium pengujian. Melalui pelatihan ini, peserta dibekali pengetahuan membaca sertifikat kalibrasi, memahami hasil verifikasi, hingga mengaplikasikannya dalam pengendalian mutu di lapangan.

BPOM Kawal Makan Bergizi Gratis (MBG) Bersama Lintas Sektor



Pada tanggal 16 Mei 2025 bertempat di rumah walikota Padang, BBPOM di Padang ikut bersama-sama dengan lintas sektor mengikuti rapat koordinasi bersama wakil walikota Padang Maigus Nasir di posko Makan Bergizi Gratis (MBG) Jl. A Yani Padang. Pada kesempatan ini maigus Nasir menyampaikan pentingnya koordinasi dan Sinergi lintas sektor dalam rangka pengawalan MBG. Maigus Nasir wakil Walikota Padang menyampaikan baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat bersinergi mensukseskan program MBG ini. Hilda Murni sebagai Plt. Kepala BBPOM di Padang menyampaikan BBPOM di Padang siap mengawal program MBG .

BBPOM di Padang Kawal Program Makan Bergizi Gratis (MBG)



BBPOM di Padang ikut serta pada kegiatan *launching* perdana Makan bergizi gratis untuk SMP 8 Padang pada tanggal 3 Juni 2025. Hadir walikota Padang bersama pimpinan OPD, BGN, dan instansi vertikal lainnya. pengujian terhadap MBG sebelum diserahkan kepada siswa sekolah dilakukan pengujian terhadap bahan berbahaya dahulu oleh tim pengujian BBPOM Padang. Berdasarkan hasil pengujian tidak ditemukan bahan berbahaya sampling dinyatakan bahwa pangan yang disajikan memenuhi persayarat dari bahn berbahaya

DPD RI jemput Aspirasi tentang TBC dan pengawasan makanan



Bertempat di kantor DPD RI Perwakilan Sumatera Barat pada tanggal 16 Juni 2025 bapak Jelita Donal sebagai anggota DPD RI, menjemput aspirasi tentang makanan bersama OPD tingkat provinsi maupun kota Padang termasuk BBPOM di Padang. Pada kesempatan ini Hilda Murni sebagai Plt. Kepala BBPOM di Padang menyampaikan bahwa pengawasan terhadap makanan yang mengandung gula berlebih selalu diawasi secara rutin baik pre market maupun post market dalam program kegiatan sampling, pemeriksaan sarana, pembinaan pelaku usaha maupun edukasi terhadap masyarakat. Sinergi hasil pengawasan makan bersama pemda selalu dilakukan baik dalam kegiatan rutin maupun kegiatan khusus, untuk memastikan masyarakat terllindungi.

Penandatanganan Perjanjian Kerja P3K Tahap 1



Tanggal 28 Mei 2025 BPOM RI telah melaksanakan kegiatan Penyerahan SK pengangkatan CPNS dan Penandatanganan Perjanjian Kerja PPPK BPOM serentak diseluruh Indonesia. Acara diadakan hybrid secara luring untuk Pusat dan daring untuk seluruh UPT BPOM se Indonesia. BBPOM di Padang dalam waktu yang sama melakukan penandatanganan perjanjian kerja PPPK tahap I sebanyak 10 orang. Penandatanganan ini di dampingi oleh plt. Kepala Balai Besar POM di Padang, Hilda Murni. Dengan adanya pengangkatan CASN ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja BPOM dan siap berkontribusi di berbagai aspek khususnya di bidang Pengawasan Obat dan Makanan.

Kunjungan Edukatif SD IT Dambaan Ummat Nagari Paninggahan



BBPOM di Padang menerima kunjungan edukatif dari siswa/i SDIT Dambaan Ummat Nagari Paninggahan dalam rangka membudayakan keamanan pangan sejak usia dini. Kegiatan KIE ini dibuka secara resmi oleh Plt. Kepala BBPOM di Padang yang diwakili oleh Bapak Yon Firman, bersama Kepala Sekolah SDIT Dambaan Ummat Bapak Jefrizal. Melalui kegiatan ini siswa diharap menjadi konsumen yang cerdas melalui perubahan sikap dan prilaku dalam memilih pangan yang aman. Selain itu siswa juga diharapkan dapat menjadi calon kader keamanan pangan junior yang akan membudayaan keamanan pangan di SD IT Dambaan Ummat.

Minum Jamu Bersama Di Car Free Day Kota Padang



Dalam rangka menyambut pekan Jamu Nasional yang bertemakan Jamu: Kearifan Lokal untuk Indonesia Sehat, BBPOM di Padang mengadakan acara Penyebaran Informasi melalui Car Free Day (CFD) . Diadakan aksi minum jamu bersama dengan pengunjung CFD Kota Padang pada Minggu (25/5) bertempat di area CFD Jalan Jendral Sudirman No.54. mulai pukul 07.00 WIB s/d pukul 10.00 WIB. Agent of Change (AOC) BBPOM di Padang berkolaborasi dalam acara ini dengan mengusung program GREBEK (Gerakan Edukasi Bareng Konsumen) di CFD. Kegiatan berupa grebek tas pengunjung. Jika dalam tas tersebut ditemukan Obat, Kosmetik dan Makanan terkemas maka dijelaskan penggunaan BPOM Mobile untuk melihat keaslian izin edar yang tertera di kemasan.

Pembukaan Pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) kota Pariaman



BBPOM di Padang membuka pelayanannya di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Pariaman (02/05). Diawali dengan sambutan dari Plt Kepala BBPOM di Padang, Hilda Murni mengatakan bahwa pembukaan pelayanan di MPP ini dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan Naker), Gusniyetti Zaunit, menyambut baik Pelayanan BBPOM Padang di MPP Kota Pariaman dengan harapan pelayanan yang diberikan bermanfaat bagi masyarakat Kota Pariaman terutama bagi pelaku usaha yang membutuhkan izin BPOM.

UMKM Solok Selatan Naik Kelas Bersama BBPOM di Padang



Program UMKM Naik Kelas merupakan salah satu misi Pemerintah Daerah Kab. Solok Selatan Tahun 2025-2030, yang diwujudkan oleh Disperindagkop dan UKM Kabupaten Solok Selatan dengan mengadakan Pelatihan Diversifikasi Produk Olahan Makanan Ringan Berbahan Dasar Umbi-Umbian untuk Pelaku IKM dan Sentra IKM Olahan Makanan Ringan dan Pelatihan Kemitraan bagi Pelaku UMKM dalam Rangka Akselerasi UMKM Naik Kelas (10/6) di Padang Aro Kabupaten Solok Selatan. Acara dibuka oleh Wakil Bupati Solok Selatan, Yulian Efi, dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Staf Ahli, dan sejumlah Kepala OPD di Kabupaten Solok Selatan. BBPOM di Padang hadir sebagai Narasumber dengan materi tentang pangan aman.

Penindakan Terhadap Peredaran Obat-Obat Tertentu (OOT) Ilegal



Menindaklanjuti informasi dari masyarakat mengenai adanya pengiriman paket yang diduga berisi sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu di Kota Padang, PPNS BBPOM di Padang melakukan penindakan terhadap pelaku. Pada operasi penindakan tersebut dilakukan penyitaan terhadap Obat-Obat Tertentu (OOT) Ilegal sebanyak 500 Strip dengan nilai ekonomi Rp. 25.000.000,-. Berdasarkan fakta yang ditemukan dalam penyidikan dapat disimpulkan perkara tersebut telah memenuhi unsur pidana pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Dengan tindaklanjut yang telah dilakukan oleh BBPOM di Padang tersebut, diharapkan masyarakat tidak lagi menjual/mengedarkan sediaan farmasi ilegal.

PENGHARGAAN



BADAN POM

PIAGAM PENGHARGAAN

No. HM.09.1.3.01.25.01

Piagam ini dengan bangga diberikan kepada

Balai Besar POM di Padang

Atas kontribusi aktif dalam mengoordinasikan
Lintas Sektor dengan Jumlah Terbanyak ke-1
dalam kegiatan Semarak Aksi Nyata Pengendalian Resistensi
Antimikroba pada 29 November 2024

Jakarta, 02 Januari 2025
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Prof. dr. Taruna Ikrar, MD, M.Biomed, PhD

Kontribusi Aktif dalam mengkoordinasikan Lintas Sektor dengan Jumlah Terbanyak ke-1 dalam kegiatan Semarak Aksi Nyata Pengendalian Resistensi Antimikroba pada 29 November 2024

PENGHARGAAN


BADAN POM

SERTIFIKAT

KP.09.04.61.06.25.97

DIBERIKAN KEPADA

BALAI BESAR POM DI PADANG

SEBAGAI

BALAI BESAR TERBAIK 1

PADA KATEGORI TINDAK LANJUT REKOMENDASI
CEGAH TANGKAL KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN
KAN PADA FORUM KOMUNIKASI PENCEGAHAN KEJAHATAN OBAT DAN MA
UATAN STRATEGI CEGAH TANGKAL KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DALAM
MELINDUNGI KESEHATAN MASYARAKAT"

30 JUNI 2025

DIREKTUR CEGAH TANGKAL

I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si, Apt, MPPM

Terbaik 1 pada Kategori Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan


BADAN POM

SERTIFIKAT

KP.09.04.61.06.25.30

DIBERIKAN KEPADA

BALAI BESAR POM DI PADANG

SEBAGAI

BALAI BESAR TERBAIK 2

DA KATEGORI PENYUSUNAN ANALISIS KEJAHATAN OBAT DAN MAKAN
IBERIKAN PADA FORUM KOMUNIKASI PENCEGAHAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANA
"PENGUATAN STRATEGI CEGAH TANGKAL KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DALAM UPAY
MELINDUNGI KESEHATAN MASYARAKAT"

30 JUNI 2025

DIREKTUR CEGAH TANGKAL

I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si, Apt, MPPM

Terbaik 2 pada Kategori Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan

BAB I

Pendahuluan

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Tugas dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah melakukan pengawasan *pre-market* dan *post-market* produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar di seluruh wilayah Indonesia. Di Propinsi Sumatera Barat terdapat 3 unit pelaksana teknis yang memiliki cakupan wilayah pada 19 Kabupaten/Kota. Salah satunya Balai Besar POM di Padang, memiliki 9 kabupaten/kota yang menjadi wilayah yang diawasi dalam peredaran obat dan makanan sesuai dengan aturan yang berlaku. Koordinasi dengan stakeholder di daerah terkait dengan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi dilaksanakan secara berkesinambungan. Sedangkan peningkatan pengawasan terhadap produk-produk tanpa izin edar dan produk-produk yang tidak memenuhi syarat di peredaran menjadi tantangan tersendiri bagi Balai Besar POM di Padang.

Balai Besar POM di Padang memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk memastikan bahwa obat-obatan dan makanan yang beredar di pasaran aman dikonsumsi oleh masyarakat dan memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang obat dan makanan yang aman. Pengawasan Terhadap Iklan dan label produk obat dan makanan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat sesuai dengan produk yang akan dikonsumsi. Dengan adanya Balai Besar POM di Padang, penduduk Sumatera Barat atau masyarakat pada 9 Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kerja Balai Besar POM di Padang memiliki keyakinan bahwa obat dan makanan yang mereka konsumsi telah melewati proses pengawasan dan memenuhi standar keselamatan dan kualitas yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Padang Tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi sampai akhir Tahun 2025 yang merupakan tahun kesatu atau tahun pertama Renstra 2025-2029 dan dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi organisasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Laporan Kinerja berisi penjelasan yang memadai atas pencapaian setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja termasuk aspek

keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh. Selain itu, Laporan Kinerja juga menjelaskan tentang keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target kinerja. Capaian kinerja dianalisis dengan membandingkan target dan realisasi dari setiap indikator yang tercantum pada Perjanjian Kinerja. Evaluasi atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa mendatang dan Penetapan Renstra selanjutnya. Oleh karena itu, pada penyusunan Laporan kinerja, harus mengikuti prinsip- prinsip yang lazim, yaitu laporan harus disusun jujur, obyektif, akurat, dan transparan.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, laporan kinerja juga merupakan amanat PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta sebagai bentuk Implementasi Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor 85 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan menjelaskan bahwa Badan Pengawas Obat da Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Untuk melaksanakan fungsi pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia, Badan POM memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Sehubungan dengan hal tersebut, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis BPOM diatur sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Untuk melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sumatera Barat selain Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang masih terdapat 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis lainnya yaitu Balai Pengawas Obat dan Makanan di Payakumbuh dan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung.

Wilayah pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 19 (Sembilan belas) Kabupaten/Kota dengan pembagian wilayah kerja pengawasan obat dan makanan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang meliputi 9 Kabupaten/Kota yang terdiri dari Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok.

Untuk 10 Kabupaten/Kota lainnya menjadi wilayah kerja UPT Badan Pengawas Obat dan Makanan lainnya yaitu:

1. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Payakumbuh**,** dengan wilayah kerja Kota Payakumbuh, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat.
2. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung, dengan wilayah kerja Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung dan Kota Sawahlunto.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang merupakan Unit Pelaksana Teknis dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas: Melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing – masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Fungsi:

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan *sampling* Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan obat dan makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang pengawasan obat dan makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran obat dan makanan melalui siber;

11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang adalah sebagai berikut :

Susunan organisasi Balai Besar POM terdiri atas:

a. Kepala Balai;
b. Kepala Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

Sesuai dengan struktur organisasi, kegiatan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. **Kepala Bagian Tata Usaha**

   Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan, kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu

   Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b. Pelaksanaan pengelolaan keuangandan barang milik negara;
c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
d. Pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
e. Pelaksanan urusan pengelolaan kepegawaian;
f. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
g. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan jabatan pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan. Dalam pelaksanaan tugas ditetapkan koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan tinggi Pratama, jabatan Adminstrator dan jabatan pengawas masing-masing. Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsioanal sesuai dengan bidang tugas masing-masing

1.4 ISU STRATEGIS

1.4.1 Aspek Strategis Organiasi

Balai Besar POM di Padang sebagai UPT Badan POM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada wilayah kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Strategi Pengawasan Obat dan Makanan 2025-2029 BBPOM di Padang untuk melaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan BBPOM di Padang.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi

untuk mendorong daya saing.

4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi, termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang telah menyusun Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 yang memuat visi, misi, program, dan kegiatan berikut target *output* yang akan dicapai.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan perannya, BPOM mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan efikasi yang ketat. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk obat dan makanan yang tersedia di pasar. Tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut BPOM bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Balai Besar POM di Padang sebagai UPT BPOM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2025-2029 yaitu melaksanakan program pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (*post-market*) di seluruh wilayah kerjanya meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundangundangan yang berlaku, sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan serta penyidikan dan penegakan hukum.

Balai Besar POM di Padang sebagai UPT BPOM, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sebelum beredar (*pre-market*) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan *pasca* beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di wilayah kerjannya;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Padang dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan perlu didukung dengan peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan kesehatan masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap produk-produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berisiko terhadap kesehatan serta mendorong pelaku usaha dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan mampu menerapkan kaidah-kaidah cara produksi yang baik dan cara distribusi yang baik sehingga produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar di masyarakat memenuhi aspek keamanan, mutu maupun kemanfaatannya.

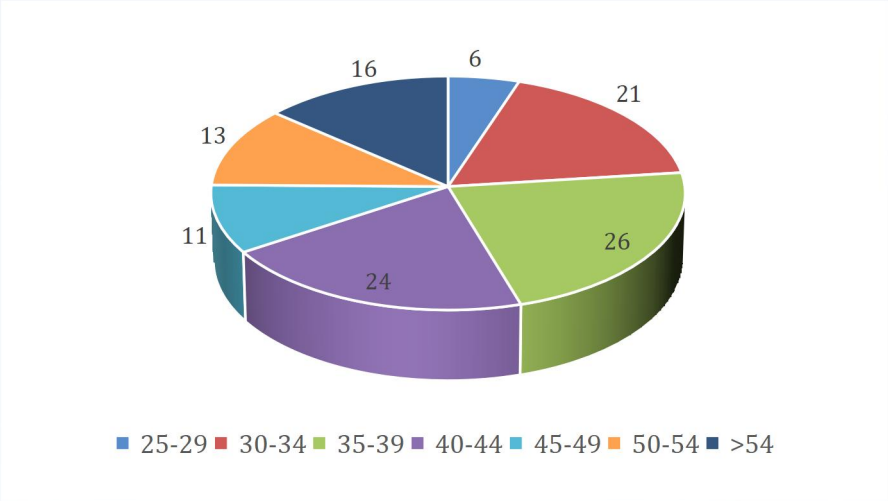
A. Analisis Lingkungan Strategis Internal

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah ASN (PNS dan PPPK) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang per 31 Juni 2025 adalah 117 orang, dengan rincian jumlah berdasarkan umur, golongan dan pendidikan:

a. **Umur**

Grafik ASN berdasarkan kelompok Umur



Gambar 1.2. Profil SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan umur

b. **Golongan**

Tabel 1.1. Profil SDM Berdasarkan Golongan

NO.	GOLONGAN	JUMLAH
1	Golongan II b	2
2	Golongan II c	5
3	Golongan III a	7
4	Golongan III b	25
5	Golongan III c	14
6	Golongan III d	23
7	Golongan IV a	18
8	Golongan IV b	3
9	Golongan IV c	2
10	Golongan IX	15
11	Golongan VII	3
Total		**117**

c. **Latar belakang pendidikan**

Tabel 1.2. Profil SDM Berdasarkan Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2 Farmasi	8
2	S2 Teknologi Pangan	1
3	S2 Biomedik	1

4	S2 Kesehatan Masyarakat	1
5	S2 Kimia	1
6	S2 Hukum	2
7	S2 Manajemen	2
8	S2 Teknik Elektro	1
9	S2 Akuntansi	1
10	Apoteker	27
11	S1 Farmasi	3
12	S1 Biologi	7
13	S1 Kimia	11
14	S1 Hukum	7
15	S1 Ekonomi/ Akuntansi	12
16	S1 lainnya	7
17	D3 Analis Farmasi/ Kimia/ Gizi	12
18	D1	1
19	SMF	5
20	SMAK	1
21	SLTA Umum	6
Total		**117**

Berdasarkan perhitungan Analisis Beban Kerja, total kebutuhan SDM di BBPOM di Padang adalah 135 orang, dengan demikian masih terdapat kekurangan SDM sebesar 19 orang. Pada 1 Juni 2025, BBPOM di Padang mendapatkan tambahan 10 orang PPPK yang sebelumnya adalah PPNPN.

2. Gedung

Sarana dan Prasarana tanah dan bangunan gedung Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang seluas 3687 m2 sejak tahun 2018 sudah memiliki sertifikat hak milik atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq Badan pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di Jakarta. Untuk pengembangan gedung kantor, luas tanah sudah tidak memungkinkan lagi karena masing-masing sisi sudah berbatasan langsung dengan jalan raya dan kantor Pemerintahan Kota Padang. Salah satu solusi pengembangan bangunan Balai Besar POM di Padang adalah dengan renovasi bangunan menjadi bertingkat atau pindah lokasi. Saat ini bangunan kantor BBPOM di Padang yang digunakan seluas 3687 m2.

Rumah dinas Kepala Balai Besar POM di Padang terletak tidak jauh dari lokasi kantor dengan luas 147,1 m2. Tanah yang digunakan untuk membangun rumah dinas tersebut sejak tahun 2018 juga telah bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq Badan pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di Jakarta.

3. Sarana Komunikasi dan Informasi

Setiap tahunnya dilakukan pengadaan alat pengolah data dan komunikasi untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur TIK di Balai Besar POM di Padang. Peningkatan *e-government* setiap tahun menuntut pekerjaan berbasis teknologi informasi menggunakan beberapa aplikasi/sistem informasi yang dibangun baik oleh internal Balai Besar POM di Padang sendiri ataupun dari eksternal, dan terus di *update*. Hal ini menyebabkan kebutuhan internet pun makin tinggi. Oleh karena itu pada tahun 2017, Balai Besar POM di Padang menambah jaringan internet menggunakan ISP (*Internet Service Provider*) *Speedy Indihome* 100 Mbps.

Pada Tahun 2019, Pusdatin memutus langganan VPN untuk semua BB/BPOM, dan menyerahkan kepada masing-masing BB/BPOM untuk berlangganan internet ke ISP yang tersedia di daerah masing-masing. BBPOM di Padang sendiri pada tahun 2021 berlangganan internet ISP Lintas Arta dengan kapasitas bandwidth 20 Mbps dan 1 IP Publik, dan pada tahun 2023 di upgrade menjadi 35 Mbps dan 5 IP publik. Pada Tahun 2024, langganan internet pindah ke Fibernet dengan kapasitas bandwidth 80Mbps dengan 5 IP Publik. Tahun 2025, karena kebutuhan internet yang cukup tinggi, Balai Besar POM di Padang berlangganan internet ke ISP icon plus dengan kapasitas bandwidth 100 Mbps dengan 5 IP publik, dan layanan cloud server. Balai Besar POM di Padang juga memiliki beberapa server diantaranya *Storage Server, Network Management Sistem (NMS) Server* dan *MRTG Web Server* yang berada di ruang server dan dikelola oleh tim TI BBPOM di Padang.

Pasca Pandemi, BBPOM di Padang lebih banyak menggunakan aplikasi *zoom meeting* untuk berkomunikasi atau pertemuan dengan BPOM pusat, ataupun stakeholder terkait dan digunakan sampai sekarang untuk kegiatan daring ataupun *hybrid*. Selain itu BBPOM di Padang juga mempunyai media sosial seperti Instagram, twitter, Facebook dan Youtube untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dan pada Tahun 2021 BBPOM di Padang membangun aplikasi Galamai (Galeri Layanan Masyarakat dan Informasi) untuk kebutuhan layanan publik agar bisa diakses oleh *customer* BBPOM di Padang dimana saja dan kapan saja. Sampai saat ini aplikasi Galamai terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan kemajuan Teknologi Informasi diantaranya menu Buku Tamu Elektronik, Form Kaji Ulang Permintaan Tender dan Kontrak untuk Pengujian Sampel Pihak ke-3, Sistem Mutu. Pada Tahun 2022 Galamai dikembangkan dengan menu Pengukuran Kinerja SDM dan pengukuran kinerja Lapkin.

4. Sumber Daya Energi

Untuk penerangan digunakan listrik PLN dengan daya 54,7 KVA. Pada tahun 2011 dilakukan penambahan daya listrik menjadi 105 KVA dengan penambahan alat-alat laboratorium dan pada tahun 2012 dinaikkan lagi menjadi 147 KVA. Untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dilengkapi dengan generator dengan kapasitas 100 KVA dan pada tahun 2017 telah ditambah lagi 1 generator dengan kapasitas 150 KVA.

5. Sarana Laboratorium

Balai Besar POM di Padang senantiasa berkomitmen untuk memberikan hasil pengujian laboratorium yang absah, didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana laboratorium yang memadai, terutama peralatan laboratorium yang merupakan salah satu unsur penunjang utama pengujian selain personil yang kompeten dan metode analisa yang valid. Pada tahun 2025 untuk pemenuhan standar laboratorium, terdapat pengadaan peralatan laboratorium melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa sebanyak 21(dua puluh satu) unit

6. Pagu Anggaran Tahun 2025

Anggaran pada awal tahun yang disediakan untuk kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 No SP DIPA-063.01.2.432810/2025 tanggal 2 Desember 2024 sebesar Rp. 36.739.481.000 yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 9.087.481.000.,- Belanja Barang Rp. 22.525.838.000,- dan Belanja Modal Rp. 5.126.162.000,- . Pada triwulan I terjadi efisiensi anggaran pada Badan POM, hal ini berdampak pada pemblokiran anggaran dan kemudian pada awal triwulan II BBPOM di Padang mendapat pembukaan blokir relaksasi anggaran sehingga total dana yang diblokir sebesar Rp. 12.544.014.000,- dan pagu anggaran Balai Besar POM di Padang menjadi Rp. 24.195.467.000, - terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 9.087.481.000,- Belanja Barang Rp. 10.864.956.000,- dan Belanja Modal Rp. 4.243.030.000,-

B. Analisis Lingkungan Strategis Eksternal

1. Data Umum Provinsi Sumatera Barat Wilayah Kerja

   Luas Wilayah Sumatera Barat : 42.252,24 km^2, yang merupakan *catchment area* dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Payakumbuh, dan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Sijunjung.



Kota

- Padang
- Pariaman
- Padang Panjang
- Bukittinggi
- Payakumbuh
- Solok
- Sawahlunto

Kabupaten

- Padang Pariaman
- Agam
- Sijunjung
- Pesisir selatan
- Mentawai
- Solok
- 50 kota
- Tanah Datar
- Pasaman Barat
- Pasaman Timur
- Solok Selatan
- Dharmasraya

Gambar 1.3. Peta WilayahSumatera Barat

Sebelah barat pulau Sumatera, berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia, Provinsi Riau, Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Utara. Daerah Sumatera Barat dilewati garis Khatulistiwa sehingga Provinsi Sumatera Barat tergolong beriklim tropis dengan suhu udara dan kelembaban yang tinggi, ketinggian permukaan Sumatera Barat bervariasi, sebagian daerahnya pada dataran tinggi kecuali Kabupaten Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Agam, Pasaman dan Kota Padang.

Pola Transportasi

Pada umumnya transportasi yang digunakan untuk menjangkau seluruh wilayah kerja adalah melalui jalan darat dengan menggunakan kendaraan umum yang cukup tersedia, sedangkan untuk Kepulauan Mentawai menggunakan transportasi laut berupa kapal

penumpang umum dengan jadwal keberangkatan minimal 2 kali dalam seminggu atau dengan pesawat udara.

2. Jumlah Sasaran Pengawasan

Pengawasan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, terhadap 9 (sembilan) Kabupaten/Kota dengan jumlah sarana yang diawasi target tahun ini sebagai berikut:

Tabel 1.3. Tabel Jumlah Sarana Distribusi dan Sarana Produksi Obat dan Makanan

Sarana Distribusi		Jumlah
1.	PBF	17
2.	Instalasi Farmasi Kesehatan	10
3.	Pusat Kesehan Masyarakat	45
4.	Rumah Sakit	33
5.	Klinik	45
6.	Apotek	99
7.	Toko Obat	25
8.	Distributor OT	74
9.	Distributor SK	28
10.	Distributor Kosmetik	97
11.	Klinik Kecantikan	15
12.	Distributor Makanan	194
TOTAL SARANA DISTRIBUSI		**682**
Sarana Produksi		
1.	Industri Obat	0
2.	Industri OT	1
3.	UMOT	1
4.	UKOT	1
5.	Industri Kosmetik	3
6.	Industri Makanan (MD)	36
7.	Industri RT (PIRT)	9
8.	Industri Makanan Fortifikasi (MD)	5
TOTAL SARANA PRODUKSI		**51**

1.4.2 Isu Strategis Pengawasan Obat dan Makanan

1. **Pengawalan Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG)**

   Program Makan Bergizi gratis sudah dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2025 secara nasional dan juga dilaksanakan juga di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang. Dalam pelaksanaanya MBG dievaluasi langsung oleh Badan Gizi Nasional. MBG menjadi isu strategis bagi Badan POM karena ditugasi untuk pengawalan sampling dan pengujian kimia dan mikrobiologi makanan yang akan di bagikan kepada siswa sekolah dan memberikan edukasi tentang pangan yang aman dan bermutu, disamping itu dilakukan juga inspeksi pada rantai distribusi pasokan makanan. BBPOM di Padang juga menjadi narasumber terkait makanan pada kegiatan program nasional ini dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, dan koordinasi dengan perwakilan Badan Gizi Nasional di Sumatera Barat.

   Dalam pengawalan ini telah dilakukan sampling dan pengujian di Kota Pariaman dan Kabupaten Pesisir Selatan yang menjadi titik lokasi kegiatan di Sumatera Barat. Untuk kota Padang sudah dilakukan koordinasi dengan Pemda serta Badan Gizi Nasional serta Balai Besar POM Padang telah masuk dalam tim keamanan MBG kota Padang. Pada tingkat pemerintah Provinsi telah dilakukan rapat koordinasi dengan lintas sektor terkait dan melakukan sinergi antar OPD.

2. **Efisiensi Belanja Dalam Pelaksaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara**

   Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Surat Menteri Keuangan Nomor S37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, serta berdasarkan hasil rapat koordinasi pimpinan yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2025, maka seluruh unit kerja di lingkungan BPOM baik di Pusat dan UPT melakukan pemblokiran secara mandiri dan mencantumkan dalam halaman IV DIPA sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan untuk masing-masing unit kerja. Akibat kebijakan efisiensi anggaran ini maka Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang perlu mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan melakukan penyesuaian target dalam pelaksanaan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di sembilan Kab/Kota yang menjadi wilayah kerja. Hal ini mempengaruhi perubahan prioritas sampling dan pengawasan sarana produksi dan distribusi, target kegiatan penyidikan, dan pelaksanaan kegiatan komunikasi informasi dan edukasi dari luring menjadi daring. Kemudian juga

penyederhanaan pelaksanaan kegiatan pembinaan Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah Aman, Desa Pangan Aman, dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Dengan kondisi kebijakan efisiensi anggaran ini maka akan mempengaruhi ketercapaian target terkhususnya target prioritas nasional yang telah ditetapkan pada DIPA Tahun Anggaran 2025.

Pada akhir Maret terdapat relaksasi anggaran sesuai dengan surat dari Sekretaris Utama Nomor B-PR.05.03.2.03.25.171tanggal 21 Maret 2025 tentang Revisi Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025 sehingga perlu diajaukan revisi pembukaan blokir anggaran 100% untuk 7 rincian output priotas nasional yaitu: Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Padang, Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT, Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT, Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT, Layanan Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa oleh UPT, dan Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT. Namun, pengesahan DIPA atas diajukan revisi buka blokir baru ditetapkan pada tanggal 09 April 2025, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk penyesuaian rencana pelaksanaan kegiatan pada triwulan 1 sesuai anggaran relaksasi. Jadi penyesuaian rencana pelaksanaan kembali kegiatan 7 prioritas nasional tersebut dapat dilaksanakan pada triwulan 2, tentunya dengan usaha yang lebih maksimal untuk mengejar tercapainya target.

3. **Peran UPT Pencapaian WHO Listed Authority (WLA)**

Badan POM terus mengupayakan untuk memperoleh level pengakuan sebagai otoritas regulator obat dan makanan kelas dunia melalui status WHO Listed Authority (WLA). Sejak November 2023, BPOM telah memulai persiapan menuju perolehan status WLA tersebut. Dengan pengakuan WLA, BPOM dapat sejajar dengan otoritas regulatori obat negara maju, seperti United States Food and Drug Administration (US FDA), European Medicines Agency (EMA) Uni Eropa, Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) United Kingdom, Health Canada, dan Pharmaceutical and Medical Devices Agency (PMDA) Jepang. Ini bukan hanya tentang kredibilitas, tetapi juga memastikan produk farmasi Indonesia dapat bersaing di pasar internasional.

Kantor perwakilan daerah atau Unit Pelaksanan Teknis (UPT) Badan POM memainkan peran krusial dalam membuktikan bahwa sistem regulasi Badan POM berfungsi efektif hingga level operasional di daerah. Tahapan WHO penilaian lapangan, mengirim tim

evaluator internasional untuk melakukan *assessment* langsung ke kantor pusat dan kantor perwakilan daerah. Tim evaluator akan melakukan wawancara dengan manajemen dan teknisi, tinjau pelaksanaan di lapangan (inspeksi, sampling, pengujian) dan cek kesesuaian praktik dengan standar WHO. Balai Basar POM harus mempersiapkan seluruh tahapan evaluasi lapangan apabila dijadikan perwakilan yang akan dikunjungi Tim evaluator WHO.

4. Renstra Baru 2025 - 2029

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) BPOM untuk periode 2025 -2029 diinisiasi sebagai respons terhadap tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan obat dan makanan yang tertuang dalam dokumen RPJPN dan RPJMN. Renstra BPOM dirancang untuk tidak hanya menanggapi tantangan saat ini tetapi juga untuk mengantisipasi perubahan masa depan dalam industri obat dan makanan. Perencanaa ini memungkinkan BPOM untuk tetap relevan dan efektif dalam menjalankan tugasnya, mengingat cepatnya inovasi dan perubahan dalam sektor ini. Strategi yang diambil harus mampu menjawab kebutuhan layanan publik yang berkualitas dan mengantisipasi ancaman kesehatan yang akan muncul, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan. Melalui pendekatan yang holistik dan kolaboratif, BPOM diharapkan tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan produk obat dan makanan, tetapi juga berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

Dalam upaya mewujudkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan BPOM untuk periode 2025-2029, disusun indikator yang akan menjadi kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dalam pengawasan obat dan makanan di wilayah kerjanya di Sumatera Barat. Indikator Kinerja merupakan turunan dari sasaran strategis Badan POM, sasaran program dan sasaran kegiatan unit pengampu pusat berdasarkan metode penyusunan berdasarkan kerangka logis kinerja (*logframe*). Indikator kinerja memuat target-target yang telah disepakati antara Kepala UPT dan Kepala Badan POM yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja terdiri dari 9 sasaran kegiatan dan 25 indikator turunan dari sasaran kegiatan tersebut. Setiap indikator dan target yang tercantum dalam perjanjian kinerja merupakan pengukuran yang menggambarkan hasil akhir yang ingin diraih Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang selama periode yang ditetapkan.

5. **Penyimpangan penyaluran obat yang sering disalahgunakan**

Banyaknya pelanggaran penyaluran obat merupakan suatu tantangan bagi BBPOM di Padang dalam melakukan pengawasan di sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian. Obat-obat yang berpotensi disalahgunakan adalah Obat-Obat Tertentu (OOT) antara lain dekstrometorfan, ketamin, dan Misoprostol. Adanya peningkatan jumlah peredaran belum diimbangi dengan pengelolaan yang baik oleh fasilitas distribusi dan pelayanan, bahkan menfasilitasi penyimpangan ini sehingga berdasarkan data Badan POM, banyak ditemukan pelanggaran pengelolaan OOT dan Ketamin selama tahun 2022 sampai 2024. Selain ini, pengawasan juga lebih diperketat terhadap bahan kimia obat yang sering disalahgunakan dicampurkan ke dalam obat tradisional maupun kosmetik. Beberapa BKO yang pernah disebutkan dalam public warning antara lain Sildenafil Sitrat dan turunannya, Parasetamol, Tadalafil, Dexametason, Sibutramine Hidroklorida, Fenilbutazon, Natrium Diklofenak, dan Piroksikam (Obat Tradisional), Hydroquinone, Tretinoin, Cilndamycin dan Mometasone (Kosmetik). Sehubungan dengan trend ini, BBPOM di Padang memiliki target melakukan pemeriksaan sarana berdasarkan analisa resiko dan potensi tinggi pelanggaran peraturan perundan-undangan di bidang obat dan makanan.

6. **Stategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting**

Sesuai dengan Perpres 72 tahun 2021 BPOM ditugaskan untuk mendukung pemerintah daerah melaksanakan kegiatan *konvergensi* dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan dan kualitas intervensi gizi di tingkat pusat dan daerah. Badan POM juga ditugaskan untuk mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas fortifikasi pangan. Sesuai dengan tugas yang di berikan pemerintah kepada BPOM pada strategi Nasional percepatan penurunan stunting, Balai Besar POM di Padang mengimplementasikannya dalam sasaran kegiatan terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan indikator kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat. Selain itu juga diimplementasikan pada sasaran kegiatan meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan indikator kinerja Efektifitas KIE, Jumlah sekolah dengan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan dengan target sekolah di tahun 2025 sebanyak 14 sekolah, Jumlah desa pangan aman dengan target 6 desa ditahun 2025 dan Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dengan target 1pasar ditahun 2025

Masih ditemukan produk pangan fortifikasi yang tidak sesuai standar di wilayah kerja BBPOM di Padang sehinga tidak tersedianya pangan fortifikasi yang sesuai standar untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah peningkatkan pembinan dan pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi, KIE - Langsung maupun KIE Media dan penanganan melibatkan pendekatan komprehensif dengan lintas sektor terkait.

Balai Besar POM di Padang senantiasa mengedukasi masyarakat melalui media sosial (Intagram, Facebook dan Tiktok: @bpom.padang; X: @bbpompadang; subsite: padang.pom.go.id; Galamai: bbpompadang.id) dengan konten "Cegah Stunting" series setiap bulannya. Pelaksanaan KIE Langsung dengan tema "Cegah Stunting" pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 35%. Kegiatan direncanakan akan diselenggarakan pada 2 *locus* stunting yang ada di Wilayah kerja Balai Besar POM di Padang dengan plevalensi stunting yang tinggi yaitu: Kelurahan Koto Panjang Kota Solok dan Nagari Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.

7. Penggunaan Antibiotik Tidak Rasional

Penggunaan antibiotik yang tidak rasional dapat menjadi masalah serius dalam kesehatan, beberapa data melaporkan peningkatan resistensi antibiotik akibat penggunaan yang tidak terkendali. Resistensi ini bisa membuat antibiotik menjadi tidak efektif dalam mengobati infeksi, yang pada gilirannya dapat memperburuk kondisi kesehatan dan meningkatkan biaya perawatan medis. Masalah antibiotic kompleks dan melibatkan beberapa pihak, solusi yang efektif biasanya melibatkan pendekatan yang holistik, termasuk edukasi publik yang lebih baik, penegakan regulasi yang ketat, serta kerjasama antara semua pihak terkait untuk mengurangi penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Sehubungan dengan adanya kebijakan nasional tahun 2020 – 2024 mengacu pada Inpres No. 4 tahun 2019 dan PMK No. 7 tahun 2021 telah diupayakan pengendalian kejadian resistensi antimikroba di Indonesia yang melibatkan multi sektor yaitu manusia, hewan dan lingkungan. Bentuk kegiatan yang dilakukan antara lain pembinaan dan pengawasan terhadap sarana pelayanan kesehatan yang terlibat seperti puskesmas, rumah sakit, klinik, dan apotek. Beberapa kegiatan KIE juga secara rutin dilakukan kepada masyarakat baik melalui KIE dengan menghadirkan tokoh masyarakat maupun melalui penyebaran informasi, terakhir dilaksanakan menghadirkan selebgram profesional, Rahmat Hidayat, Apt, B. Pharm, M.Sc sebagai narasumber. Selain itu juga diperlukan pengawasan penggunaan antibiotik di sektor hewan melalui join inspection dengan lintas sektor terkait. Untuk kegiatan ini Badan POM dan Kementerian Pertanian

telah membuat pedoman pemeriksaan bersama terhadap rantai distribusi antimikroba antara sektor kesehatan manusia dan kesehatan hewan. Balai Besar POM di Padang telah melakukan pendekatan ke Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat, Balai Veteriner Bukittinggi dan Dinas Pertanian Kota Padang Bidang Kesmavet. Melalui kegiatan koordinasi ini telah disepakati akan melakukan pemeriksaan bersama pada sektor kesehatan hewan dan ke depannya diharapkan kegiatan ini dapat dilakukan sesuai perencanaan.

8. Ayo Buang Sampah Obat (ABSO) dengan Benar

Sampah obat merupakan salah satu jenis sampah yang dapat berasal dari penggunaan obat-obatan yang tidak maksimal maupun peresepan yang irasional, sehingga menyebabkan adanya obat sisa, tidak terpakai, kemudian menjadi kedaluwarsa. Sampah obat berpotensi menimbulkan dampak serius bagi lingkungan hidup, kesehatan maupun kelangsungan makhluk hidup. Tanpa disadari, menyimpan sampah obat di rumah dapat membahayakan kesehatan karena obat dapat terurai menjadi membentuk senyawa lain. Oleh karena itu, sampah obat harus dikelola dengan baik. Gerakan Ayo Buang Sampah Obat dengan Benar telah diluncurkan oleh Badan POM mulai pada tahun 2019. Balai Besar POM di Padang telah melakukan kegiatan KIE ABSO ini baik kepada pelaku usaha maupun masyarakat supaya tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu dan untuk menjaga lingkungan dan kesehatan. Melalui Program Ayo Buang Sampah Obat dengan Benar, masyarakat diberikan edukasi dan diajak untuk melakukan pemusnahan sampah obat secara mandiri sesuai ketentuan. Masyarakat yang tidak dapat memusnahkan sampah obatnya secara mandiri diberikan edukasi dengan tidak membuang sampah obat secara sembarangan.

9. Pendampingan UMKM

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai posisi strategis dalam perekonomian nasional dan sektor UMKM tetap menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. BBPOM di Padang selalu mendukung percepatan perkembangan UMKM pangan, obat tradisional dan kosmetik melalui bimbingan teknis dan pendampingan serta berbagai program yang melibatkan pemangku kepentingan bersinergi dengan lintas sektor sesuai dengan amanat Inpres Nomor 3 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018.

Target BBPOM di Padang dalam pendampingan UMKM tahun 2025 adalah 11 UMKM Pangan, 1 UMKM Kosmetik dan 1 UMKM Obat Tradisional. Pendampingan dimulai dari penyiapan denah bangunan ruang produksi, bimbingan terhadap penerapan

CPPOB/CPKB/CPOTB hingga proses pendaftaran produk UMKM di aplikasi. Pendampingan ini dilaksanakan dengan menerapkan SI JEMPOL (Siap Jemput Bola) sehingga layanan dapat dipercepat dan pelaku usaha merasa puas karena petugas akan langsung melakukan pembinaan ke sarana produksi.

Bimbingan teknis CPPOB dilaksanakan berkolaborasi dengan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan (PMPUPO) dalam program SAPA UMK, yang memberikan fasilitasi dalam rangka percepatan pengembangan kewirausahaan bagi UMK yang disinergikan dengan Program Orang Tua Angkat (OTA). Sinergi program ini diharapkan dapat mencapai visi yang sama untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMK sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Permasalahan UMKM yang di rasakan petugas di lapangan terkait ketersediaan dana UMKM untuk persiapan ruang produksi, implementasi penerapan cara produksi yang baik dan keterbatasan personil dalam memenuhi dokumen penerapan CPPOB, kemampuan pelaku usaha dalam penggunaan perangkat dan aplikasi pendaftaran. Serta budaya kerja UMKM yang belum memiliki keinginan kuat untuk meningkatkan kapasitas dan nilai dari produk yang di produksi, masih terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

10. Tren Penjualan Obat dan Makanan llegal Secara Online

Terjadinya pergeseran pola distribusi dan promosi sediaan farmasi dan pangan olahan secara online telah menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk menglariskan produknya. Penjualan secara online menggunakan media sosial seperti instagram, facebook, tiktok dan platform *e-commerce.* Untuk itu, penertiban produk ilegal yang dipasarkan secara *online* menjadi salah satu target pengawasan BPOM berdasarkan analisis risiko. BPOM telah melakukan patroli siber secara berkesinambungan untuk mencegah dan menelusuri praktik peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal dan hasil patroli siber ini dilaporkan ke Direktorat Siber BPOM yang telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital RI dan Indonesia E-commerce Association (idEA) untuk dilakukan penurunan konten/*takedown* terhadap link yang teridentifikasi menjual produk TIE. Apabila ditemukan indikasi pidana maka akan dilakukan proses Pro justitia oleh PPNS BPOM.

11. Penjualan Obat dan Makanan Secara Daring

Peraturan Badan POM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring menyatakan bahwa produk yang dapat diedarkan secara daring meliputi obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Semua komoditi tersebut harus memiliki nomor izin edar sesuai ketentuan dan diedarkan oleh sarana yang memiliki perizinan sesuai ketentuan . Terdapat larangan untuk mengedarkan secara daring untuk obat dan kosmetika tertentu secara langsung kepada masyarakat yaitu obat golongan Narkotika dan Psikotropika, sediaan injeksi dan implan KB sedangkan untuk kosmetika adalah yang mengandung Alpha hidroxy acid (AHA) diatas 10 %, pemutih gigi mengandung dan/atau melepaskan Hydrogen peroxide diats 6% dan Kosmetika isi ulang. Terdapat jenis obat yang dibatasi dalam peredaran daring ini yaitu prekursor farmasi, obat keras golongan Obat-obat tertentu, obat disfungsi ereksi.

12. Optimalisasi Fungsi Media Sosial sebagai jembatan Komunikasi dengan masyarakat

Untuk pengelolaan Media Sosial yang baik Badan POM telah mengeluarkan Pedoman Pengelolaan Media Sosial BPOM melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor 432 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pada saat ini semakin penting pengelolaan media sosial yang strategis dan bertanggung jawab, terlebih bagi instansi pemerintahan seperti BPOM, untuk dapat menyampaikan kebijakan maupun informasi strategis kepada masyarakat secara tepat sasaran.

Tak bisa dipungkiri, saat ini media sosial telah menjadi kekuatan baru saluran informasi. Pengguna media sosial di Indonesia yang semakin bertambah pada akhirnya mampu mengikis sekat dan batas seperti waktu, lokasi, maupun demografis dengan lembaga pemerintah, termasuk BPOM. Apabila realitas digital ini tidak disadari dan media sosial tidak dikelola dengan baik dan bijak, penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi publik dapat membawa dampak negatif. Potensi netizen alih-alih turut membangun kepercayaan terhadap BPOM, malah sebaliknya dapat memberikan sentimen negatif terhadap citra BPOM. Media sosial memungkinkan BPOM untuk menyampaikan kebijakan dan informasi penting dengan cara yang transparan dan akuntabel. Selain itu, media sosial juga menjadi alat untuk melawan misinformasi dengan menyediakan klarifikasi yang cepat dan tepat.

Balai Besar POM di Padang aktif menggunakan media sosial dalam rangka mengedukasi masyarakat. Akun media sosial Balai Besar POM di Padang, antar lain: Subbsite (https://padang.pom.go.id), Instagram (@bpom.padang), Facebook bpom.padang), Youtube (bpom.padang), X (bbpompadang) dan Galamai (https://bbpompadang.id). Melalui akun tersebut Balai Besar POM di Padang mengedukasi masyarakat dengan konten yang sesuaiakan dengan agenda settingan bulanan yang ditetapkan Badan POM, konten kinerja Balai Besar POM di Padang, konten edukasi, konten pelayanaan publik dankonten lain yang dirasa penting.

13. Peningkatan efektifitas pengawasan obat dan makanan melaui sinergitas UPT BPOM dan Pemerintah Daerah

Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan yang difokuskan pada perluasan cakupan dan kualitas pengawasan pre dan post market obat dan pangan berisiko yang didukung oleh peningkatan kompetensi SDM pengawas dan penguatan laboratorium dan balai pengawas obat dan makanan; peningkatan riset; percepatan dan perluasan proses layanan publik termasuk registrasi; perluasan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan obat dan makanan; peningkatan kepatuhan dan kemandirian pelaku usaha dalam penerapan sistem manajemen mutu dan pengawasan produk; peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan; dan perluasan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat dan makanan;

Peningkatan efektifitas pengawasan obat dan makanan merupakan salah satu upaya yang dilaksanakan pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Peningkatan efektifitas pengawasan obat dan makanan dapat dicapai melalui sinergitas pengawasan antara kementerian/ lembaga serta pemerintah daerah. Pada inpres 03 tahun 2017, presiden mengamanatkan kepada BPOM untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan obat dan makanan. Pembagian kewenangan pada urusan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman antara pemerintah pusat dan daerah yang diatur pada undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah dan pemerintah daerah.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang (BBPOM di Padang) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM yang berada di wilayah Sumatera Barat. Sesuai dengan PerBPOM No. 19 tahun 2023 wilayah keja BBPOM di Padang meliputi 9 kabupaten/Kota di Sumatera Barat, yaitu : Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Solok, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman,

Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten solok dan Kabupaten Solok Selatan. Sebagai UPT BBPOM di Padang mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja BBPOM di Padang. Dalam pelaksanaan tugasnya BBPOM di Padang menyelenggarakan beberapa fungsi salahsatunya "**pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan".** Untuk itu pada tahun 2025 ini BBPOM di Padang menargetkan terlaksananya advokasi terhadap pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota diwilayah kerja BBPOM di Padang.

1.4.3 Permasalahan Utama

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja antara lain :

a. Ketentuan pelaksanaan sampling sesuai pedoman sampling yang terbaru (berbasis risiko) mengharuskan adanya evaluasi terlebih dahulu atas pemenuhan penilaian risiko terhadap produk obat yang ada di sarana sesuai pedoman sampling. Pedoman ini mengakibatkan sulitnya untuk mendapatkan sampling yang memenuhi kriteria sesuai perencanaan pada sarana yang dikunjungi sehingga mengharuskan sampling dilakukan pada sarana lain yang memenuhi kriteria risiko yang berdampak pada diperlukannya lebih banyak waktu untuk penyelesaian sampling. Hal ini menyebabkan meningkatnya pembiayaan untuk pembelian sampel karena harus memenuhi target kategori yang telah ditetapkan sesuai pedoman sampling.
b. Kurangnya petugas yang memiliki kompetensi inspektur pangan dan inspektur CDOB menyebabkan kinerja pengawasan di sarana produksi dan sarana distribusi pangan, serta sarana distribusi ONPP tidak maksimal, dimana dalam melakukan pemeriksaan tidak semua petugas memiliki kompetensi tersebut. Solusi yang dilakukan adalah dengan Mengusulkan kepada PPSDM pelatihan tambahan yang dilakukan secara IHT di BBPOM di Padang.
c. Tingginya pelanggaran terkait pendistribusian obat antara lain maraknya Apotek distributor, penjualan antibiotik tanpa resep dokter serta adanya dispensing. Untuk itu perlunya perkuatan pengawasan dari hulu ke hilir berbasis resiko di Balai Besar POMdi Padang.
d. Efisiensi dan relaksasi anggaran mengakibatkan perubahan pada pelaksanaan kegiatan pengujian, yaitu berdampak pada menumpuknya sampel pada triwulan 2 dan 3, sehingga meningkatnya beban pengujian hal ini mempengaruhi waktu penyelesaian pengujian

e. Luas ruang laboratorium yang terbatas, menghambat pengembangan laboratorium termasuk perencanaan penambahan alat laboratorium
f. Terbatasnya media KIE yang dapat digunakan untuk pelaksanaan KIE secara masif karena terdampak efisiensi anggaran
g. Terdapat Definisi operasional Indikator Kinerja Kegiatan yang masih belum final, dan masih kurangnya pemahaman terhadap indikator sehingga terdapat kesalahan data dalam perhitungan RHPK. Untuk itu perlu pemahaman tentang DO dan tata cara pengisian kertas kerja serta segera melakukan perbaikan apabila ada kesalahan data sesuai dengan prosedur perbaiakan data kinerja.

BAB II

Perencanaan Kinerja

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 URAIAN SINGKAT RANCANGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

Dalam rangka mendukung pencapaian program-program Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan (UPT BPOM) dan Satuan Kerja (satker) sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya telah menyusun Rancangan Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang mengacu kepada Rancangan Rencana Strategis Badan POM Tahun 2025-2029.

Renstra Balai Besar POM di Padang Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan penjabaran Rancangan Rencana Strategis Badan POM Tahun 2025-2029 yang telah selaras dengan dokumen RPJMN dan disesuaikan dengan tugas pokok Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang sebagai Satuan Kerja dan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM di wilayah Sumatera Barat. Sasaran Kegiatan dan indikator-indikatornya merupakan turunan dari Sasaran Strategis Badan POM dan Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Unit Pengampu pusat berdasarkan penyusunan kerangka logis kinerja (*logframe*) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang serta melihat latar belakang dan perubahan lingkungan yang dinamis.

Dengan memperhatikan RPJMN 2025-2029, maka kedudukan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

Sejalan dengan visi dan misi dalam RPJMN 2025-2029, maka BPOM telah menetapkan Visi BPOM 2025-2029 yaitu:

> ***"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"***

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat.

   Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan

kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.

   BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.

   Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

   Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip *good governance* dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025-2029 adalah:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:

   Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.

2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:

   Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.

3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM

   Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

   Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.

5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima

   Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip- prinsip tata kelola yang baik, responsif,

dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima. Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang Obat dan Makanan sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan *pre-post market* dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, serta perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:

   Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BBPOM di Padang mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin

2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*:

   Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BBPOM di Padang meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik *online* maupun *offline*.

3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM:

   BBPOM di Padang fokus pada peningkatan *regulatory assistance* untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui *reliance* serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BBPOM di Padang mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.

4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:

   Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.

5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:

   BBPOM di Padang memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di Propinsi maupan Pemerinta Kota/Kabupaten, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BBPOM di Padang dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BBPOM di Padang .

6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisisnkebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan :

   BBPOM di Padang berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik:

   BBPOM di Padang memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan obat dan makanan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab

   Strategi Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 2025-2029 BBPOM di Padang untuk melaksanakan arah kebijakan tersebu berdasarkan Analisa SWOT BBPOM antara lain:

   1. Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
   2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
   3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi

untuk mendorong daya saing.

4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2025

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan Balai Besar POM di Padang untuk periode 1 (satu) tahun dan akan dilaksanakan melalui pelaksanaan operasional kegiatan tahunan. RKT meliputi sasaran kegiatan, indikator , dan target yang ingin dicapai dalam tahun 2025.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar POM di Padang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Padang NOMOR HK.02.3A.09.24.266 tanggal 20 September 2024 tentang Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Padang Tahun 2025. RKT 2025 merupakan penjabaran dari Sasaran Startegis Badan POM dan Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan unit pengampu pusat berdasarkan penyusunan kerangka logis kinerja (*logframe*). RKT disusun dengan tujuan sebagai pedoman/acuan pelaksanaan bagi Balai Besar POM di Padang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai sasaran yang telah ditetapkan dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	96,70
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	14
		Jumlah desa pangan aman	6
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	96,83
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	91
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90
		Nilai AKIP UPT BPOM	81,97
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	90
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,2

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Perjanjian kinerja berisi indikator kinerja yang terukur tertentu yang dapat menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu unit kerja. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun sumber dana(anggaran).

Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan, antara lain:

a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima danpemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberi penghargaan dansanksi;

d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerimaamanah;

e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,75 Persen
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persen
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persen
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 Persen
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persen
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89,5 Persen
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persen
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persen
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92 Persen
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai	85 Persen

			ketentuan	
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	81,09 Persen
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	63 Persen
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77 Nilai
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88 Persen
		2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	14 Jumlah
		3	Jumlah desa pangan aman	6 Jumlah
		4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Jumlah
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80 Persen
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	90 Persen

7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persen
8	Layanan Publik UPT yang prima	1	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7 Indeks
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)	90 Nilai
		2	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	82 Nilai
		3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,95 Indeks

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Untuk memantau pencapaian Perjanjian Kinerja secara berkala maka telah ditetapkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai Besar POM di Padang. RAPK memuat target kinerja per bulan dengan anggaran per indikator kinerja. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 Balai Besar POM di Padang sudah 3 kali mengajukan usulan revisi RAPK dan telah mendapatkan tanggapan dan persetujuan usulan tersebut dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM dan RAPK revisi terakhir telah ditetapkan oleh Plt Kepala Balai Besar POM di Padang pada tanggal 1 Juli 2025.

Revisi target RAPK terhadap Indikator Kinerja Utama Sebagai berikut :

a. Revisi 1

Berdasarkan Surat Kepala BBPOM di Padang nomor B-PR.02.01.3A.04.25.179 tanggal 17 April 2025 perihal usulan revisi target indikator kinerja utama bulanan serta dijawab dengan surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan tanggal 21 April 2025 nomor B-PR.02.01.21.04.25.102 tentang Tanggapan terhadap Usulan Revisi Target RAPK Tahun 2025 BBPOM di Padang, maka Balai Besar POM di Padang telah melakukan revisi RAPK pada tanggal 21 April 2025 dengan perubahan target triwulan 1 2025 terhadap 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 yaitu:

1. Persentase cakupan sarana produksi fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
2. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

3. Jumlah desa pangan aman
4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Penyebab dilakukan revisi untuk Indikator Persentase cakupan sarana produksi fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan karena frekuensi target yang disusun pada awal tahun bersifat flat atau sama setiap bulan, sementara sesuai defenisi operasional frekuensi bersifat komulatif yaitu berdasarkan jumlah sarana yang telah diperiksa dan diselesaikan sampai dengan periode pelaporan. Pada triwulan I terdapat 2 sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sementara pada bulan April terdapat 3 sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti dari total 5 sarana sehingga semua sarana telah dilakukan pemeriksaan dan dutindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2025

Untuk IKU Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, Jumlah desa pangan aman dan Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas, revisi target disebabkan karena adanya perubahan jadwal kegiatan masing-masing program oleh unit pengampu sehingga progress kegiatan berubah.

b. Revisi 2

Revisi kedua dilakukan terhadap Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sedian Farmasi dan Pangan Olahan di UPT sesuai surat usulan revisi Kepala BBPOM di Padang No B-PR.02.01.3A.05.25.223 tanggal 2 Mei 2025 yang mendapat tanggapan persetujuan dari Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai Surat No B-PR.07.21.05.25.139 tanggal 14 Mei 2025. Revisi ini dilakukan karena terdapatnya perubahan cara perhitungan penetapan target, dimana pada awalnya target disusun berdasarkan perhitungan terhadap 1 perkara, yaitu jumlah target perkara setelah adanya efisiensi anggaran. Setelah relaksasi anggaran maka terjadi perubahan target perkara menjadi sama dengan target POK awal yaitu 4 perkara dan 1 perkara carry over, sehingga perlu dilakukan perhitungan kembali target bulanan sampai November 2025.

c. Revisi 3

Revisi ketiga terhadap Indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dan Jumlah desa pangan aman, sesuai Surat usulan Revisi Kepala BBPOM di Padang No B-PR.02.01.3A.05.25.319 tanggal 26 Mei 2025 yang mendapat tanggapan persetujuan dari Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai Surat No B-PR.07.21.05.25.139 tanggal 14 Mei 2025.

Justifikasi usulan perubahan target bulanan ini disebabkan perhitungan target selama ini adalah berdasarkan jumlah sekolah dan desa yang dapat dilaksanakan intervensi oleh BBPOM di Padang sesuai dengan anggaran setelah efisiensi, yaitu sebanyak 7 sekolah dan 3 desa. Oleh karena sesuai arahan dari pengampu bahwa progress RHPK tetap harus berdasarkan target

awal rancangan RENSTRA 2025-2029 maka perlu dilakukan revisi target bulanan berdasarkan perhitungan terhadap target jumlah sekolah dan desa sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ytiu sebanyak 14 sekolah dan 6 desa.

Tabel 2.3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,75	86,75	86,75	86,75	86,75	86,75	86,75	86,75	86,75	86,75	86,75	86,75
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85

		6	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85

		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	81,09	81,09	81,09	81,09	81,09	81,09	81,09	81,09	81,09	81,09	81,09	81,09
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	40	40	40	63	63	63	63	63	63	63	63	63
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			76,7	76,7	76,7	76,8	76,8	76,8	76,9	76,9	76,9	77
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerjaUPT	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
		2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan			5	25	47,5	47,5	50	60	70	88	93	14
		3	Jumlah desa pangan aman			5	25	37,5	45	45	55	73	83	95	6

		4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas			5	25	50	60	100	100	100	100	100	1
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	4,16	10,33	14,5	23,32	30,84	43,33	52,5	60	68,5	71	79,17	80
6	Terlaksanya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	42,5	42,5	42,5	42,5	43	43	45	65	70	80	83	90
7	Terlaksanya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90,00

8	Layanan Publik UPT yang prima	1	Indeks Pelayanan Publik UPT												4,7
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)												90
		2	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)												82
		3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5
		4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2,95

2.5 KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas, dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dan disahkan.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja.

$$\%\ \boldsymbol{Capaian} = \frac{\boldsymbol{Realisasi}}{\boldsymbol{Target}}\ \boldsymbol{x}\ \mathbf{100\%}$$

Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

a. Normalisasi capaian perjanjian kinerja

Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

1. Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%; dan
2. Jika capaian kinerja setiap indikator ≤110% maka tidak dilakukan normalisasi.

b. Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Tabel 2.4. Kategori Capaian IKU tahun 2025

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	
Kurang	<60%	

NILAI KINERJA ORGANISASI

1) Jenis Nilai Kinerja Organisasi

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di lingkungan BPOM terdiri dari:

a) NKO Periodik

NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai.

b) NKO tahunan

NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai.

2) Predikat NKO

Hasil NKO dikelompokan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut.

Tabel. 2.5. Prediket Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2025

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	> 100	
Baik	80% < x ≤ 100%	
Butuh Perbaikan	60% < x ≤ 80%	
Kurang	20% < x ≤ 60%	
Sangat Kurang	0% ≤ x ≤ 20%	

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2025 No. HK.02.3A.09.24.266 tanggal 20 September 2024 dan Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Padang tanggal 12 Februari 2025. Penetapan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tahun 2025 telah direalisasikan pada Triwulan II Tahun 2025 dengan baik yang terdiri dari 9 (sembilan) sasaran kegiatan.

Kinerja Balai Besar POM di Padang mengacu kepada Hasil perhitungan/pengukuran kinerja dilakukan analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja. Pembahasan dan analisis capaian kinerja mengacu pada Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Padang yang mengacu pada Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar POM di Padang 2025-2029. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Triwulan II tahun 2025 Balai Besar POM di Padang adalah 106,15% mendapatkan kategori **Istimewa.** Untuk meningkatkan pencapaian nilai NKO ini perlu dilakukan perencanaan kegiatan yang optimal dan memaksimalkan pemanfaatan pemantauan rencana aksi dan laporan kinerja dalam rangka evaluasi kinerja. Upaya perbaikan perlu dilaksanakan dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan dan peningkatan data kinerja yang mampu terukur dan andal juga harus dilakukan serta dilengkapi data dukung yang akurat.

Pencapaian sasaran strategis diperoleh dari capaian sembilan sasaran kegiatan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang triwulan II tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Capaian Kinerja per Sasaran Kegiatan Triwulan II Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	NILAI CAPAIAN SASARAN (%)	NILAI CAPAIAN SASARAN NORMALISASI	KATEGORI
1.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	110,86	106,76	Sangat baik
2.	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	158,73	110	Tidak dapat disimpulkan
3.	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	106,25	106,25	Sangat Baik

4.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	105,38	103,71	Sangat Baik
5.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	108,08	108,08	Sangat Baik
6.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	116,28	110,00	Tidak dapat disimpulkan
7.	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	100,00	100,00	Baik
8.	Layanan Publik UPT yang prima	-	-	-
9.	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	-	-	-

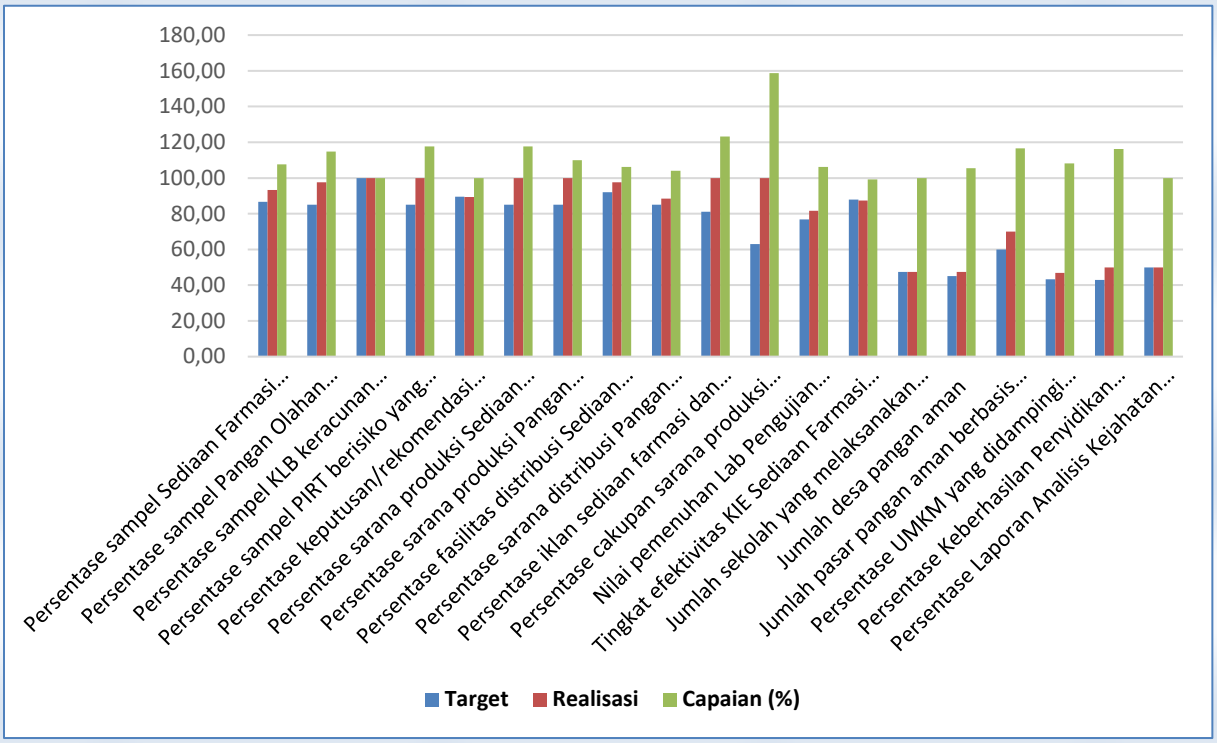
Sasaran kegiatan yang ditetapkan diukur dengan 25 indikator kinerja utama. Secara lengkap perbandingan target, realisasi dan capaian setiap indikator kinerja utama dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2. Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama TW II 2025

NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025	TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN THD TARGET JUNI (%)	CAPAIAN THD TARGET TAHUNAN (%)	CAPAIAN NORMALISASI (%)
SS1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	86.75	86.75	93,35	107,61	107,61	107,61
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	%	26	-	-			
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	85.00	85.00	97.64	114.87	114.87	110.00
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	85.00	85.00	100.00	117.65	117.65	110.00

		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	%	89.50	89.50	89.38	99.87	99.87	99.87
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	85.00	85.00	100.00	117.65	117.65	110.00
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	85.00	85.00	100	117,65	117,65	110,00
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	92.00	92.00	97.64	106.13	106.13	106.13
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	85.00	85.00	88.39	103.99	103.99	103.99
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	%	81.09	81.09	99.86	123.15	123.15	110.00
SS2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan SaranaProduksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuaiketentuan	%	63.00	63.00	100.00	158.73	158.73	110.00
SS3	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasidan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai	77.00	76.80	81.60	106.25	105.97	106.25
SS4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai	88.00	88.00	87.37	99.28	99.28	99.28
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Sekolah	14.00	47.50	47.50	100.00	47.50	100.00
		16	Jumlah desa pangan aman	Desa	6.00	45.00	47.50	105.56	47.50	105.56
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Pasar	1.00	60.00	70.00	116.67	70.00	110,00

SS5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	%	80.00	43.33	46,83	108,08	46,83	108,08
SS6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	%	90.00	43.00	50.00	116.28	55,56	110
SS7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	%	90.00	50.00	50.00	100.00	55,56	100.00
SS8	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	%						
SS9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)	Nilai						
		23	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	Nilai						
		24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Nilai						
		25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	%						



Gambar 3.1. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan II Tahun 2025

Dari 25 (dua puluh lima) indikator kinerja utama (IKU) terdapat 8 indikator dengan kategori tidak dapat disimpulkan , 6 indikator dengan kategori sangat baik dan 5 indikator , dengan kategori baik,. Sebanyak 6 indikator belum dapat dihitung pencapaiannya karena belum ada realisasi pada periode Triwulan II Tahun 2024. Analisa tentang capaian ini akan dibahas secara rinci dalam uraian pencapaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja berikut.

3.1.1 PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN I

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA UPT

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 11 indikator kinerja utama, dari hasil capaian tiap indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 110,72% dengan capaian normalisasi sebesar 106,62% dengan kategori sangat baik.

Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan I.

NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025	TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN TERHADAP TARGET JUNI (%)	CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUNAN (%)	CAPAIAN NORMALISASI (%)
SS1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	86.75	86.75	92.18	106.26	106.19	106.19
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	%	26	-	-			
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	85.00	85.00	97.64	114.87	114.87	110.00
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	85.00	85.00	100.00	117.65	117.65	110.00
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	%	89.50	89.50	89.38	99.87	99.87	99.87
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	85.00	85.00	100.00	117.65	117.65	110.00
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	85.00	85.00	100	117.65	117.65	110.00
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	92.00	92.00	97.64	106.1304	106.13	106.13
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	85.00	85.00	88.39	103.99	103.99	103.99

		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	%	81.09	81.09	99.86	123.15	123.15	110.00

Penjelasan mengenai capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke-I sebagai berikut :

A. **PERSENTASE SAMPEL SEDIAAN FARMASI BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN**

Pada IKU ini yang dimaksud Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan sampling, pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil. Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku.

Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait .

Cara Perhitungan Dan Formula

Perhitungan realisasi kinerja IKU Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dari rata-rata capaian kinerja masing-masing komoditi, dengan formula sebagai berikut :

= (A + B + C + D)/ 4

A. Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
B. Persentase Sampel Obat Bahan Alam dan Obat Kuasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
C. Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
D. Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Masing-masing komoditi memiliki cara perhitungan yang berbeda-beda, secara garis besar aspek yang dinilai adalah persentase sampel berbasis risiko yang diselesaikan sesuai ketentuan dibandingkan terhadap target yang telah direncanakan per bulan, Perhitungan untuk bulan berikutnya dihitung secara kumulatif.

Tabel 3.4 Capaian Persentase Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang triwulan II tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET TW II	REALISASI	CAPAIAN VS TARGET TW		NORMALISASI CAPAIAN TRIWULAN	CAPAIAN VS TARGET TAHUNAN	
	2025			(%)	KATEGORI		(%)	KATEGORI
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.75	86.75	93,35	107,61	Sangat Baik	107,61	107,61	Tercapai/melampaui

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025

Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan II tahun 2025 adalah 93,35% bila dibandingkan dengan target 86.75%, maka capaian yang diperoleh adalah 107,61% mendapatkan kategori Sangat baik.

Capaian indikator kinerja pada TW II ini masih dipengaruhi adanya kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada penurunan target sampling pada bulan April dan Mei jika dibandingkan dengan target yang disusun pada awal tahun, sehingga timeline sampling, timeline pengujian dan timeline pelaporan sampai dengan TW II dapat dicapai melebihi target yang ditetapkan. Begitu juga dalam pemenuhan parameter uji pada TW II ini masih dapat dipenuhi oleh laboratorium kimia dan laboratorium mikrobiologi BBPOM di Padang.

Tabel 3.5 Hasil Perhitungan Realisasi IKU Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target Sampel Sediaan Farmasi	Target Indikator (%)	% Sampel Obat Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (Bobot 60%)	% Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Kosmetik Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi (%)
April	182,00	86.75	96,30	96,43	95,61	96,17	96,13
Mei	338,00	86.75	97,66	83,22	100,00	95,64	94,13
Juni	481,00	86.75	98,72	85,73	92,65	91,61	92,18

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target akhir Tahun 2025

Realisasi Persentase Sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan II tahun 2025 adalah 93,35 % bila dibandingkan dengan target akhir tahun 2025 sebesar 86,75%, maka capaian yang diperoleh adalah sama yaitu sebesar 107,61% dengan kategori tercapai/melampaui.

3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 terhadap Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Tabel 3.6. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tw II tahun 2025 terhadap tw I tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TW II 2025			TW I 2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.75	92.18	106.26	86.75	96.38	111.10

Bila dibandingkan dengan realisasi Sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan I tahun 2025 yaitu sebesar 96,38% maka terjadi penurunan realisasi sebesar 4,20% dan bila dibandingkan dengan persentase capaian Triwulan I tahun 2025 yaitu sebesar 110,10% maka terjadi penurunan capaian capaian sebesar 4,84%. Dapat disimpulkan realisasi yang dicapai pada TW II tahun 2025 lebih mendekati pada target yang telah ditetapkan pada awal tahun dibandingkan dengan realisasi yang dicapai pada TW I tahun 2025. Hal ini disebabkan karena target kinerja disusun berdasarkan target output sebelum adanya kebijakan efisiensi anggaran dengan mempertimbangkan faktor-faktor resiko yang dapat mempengaruhi realisasi kinerja. Efisiensi anggaran yang berdampak pada penurunan target output kegiatan pada TW I, dimana target output pada TW I jauh dibawah kapasitas laboratorium dan kapasitas pelaksanaan sampling, sehingga faktor resiko yang telah diidentifikasi sebelumnya dapat diatasi dengan mudah. Namun dengan adanya kebijakan relaksasi anggaran pada pertengahan bulan April berdampak pada normalisasi kembali target output pengawasan sediaan farmasi dan terjadinya peningkatan target output pada Mei dan Juni, sehingga realisasi kinerja yang diperoleh lebih mendekati target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2025.

4. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra 2025-2029**

Tabel 3.7 Perbandingan Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI TW I 2025	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,75	92,18	98,33%	Akan tercapai

Target akhir Renstra (Tahun 2029) Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang adalah 93,75%, maka realisasi Triwulan II Tahun 2025 belum mencapai target akhir Renstra 2025-2029 dengan capaian 98,33% termasuk kategori Akan tercapai. Untuk ini perlu dilakukan upaya peningkatan untuk tahun -tahun berikutnya dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap capaian indikator kinerja, serta menetapkan langkah-langkah tindak lanjut untuk mengatasi setiap kendala atau permasalahan yang berdampak pada pencapaian indikator kinerja.

5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Analisis Penyebab Keberhasilan atau peningkatan kinerja :

Keberhasilan pencapaian target kinerja pada TW II disebabkan karena :

a. Perencanaan sampling dan pengujian yang disusun secara bersama oleh tim sampling dan tim pengujian telah mempertimbangkan kapasitas laboratorium dan kapasitas pelaksanaan sampling
b. Adanya komunikasi yang efektif antara tim sampling dan tim laboratorium dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan sampling dan pengujian
c. Pelaksanaan sampling dan pengujian yang mengacu pada pedoman sampling dan pengujian tahun 2025 yang telah ditetapkan
d. Adanya monitoring terhadap pelaksanaan sampling dan pengujian meliputi ketepatan waktu (pemenuhan time line) dan kesesuaian pelaksanaan (kategori sampling, pemilihan parameter uji dan keakuratan pengambilan kesimpulan)

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) :

Realisasi yang dicapai sd TW II belum dapat sepenuhnya dijadikan patokan keberhasilan untuk pencapaian target tahunan karena realisasi tersebut hanya menggambarkan ±30% dari target pengawasan. Jika dibandingkan sisa target pengawasan produk sediaan farmasi yang harus dilaksanakan sampai dengan akhir tahun yaitu sebanyak ±70 %, dengan waktu yang tersedia untuk pelaksanaan sekitar 6 bulan atau 50 % dari waktu setahun, maka target pengawasan jauh lebih tinggi dari waktu yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan. sehingga perlu upaya lebih untuk menjaga agar realisasi kinerja dapat mencapai target yang telah ditetapkan, upaya yang dilaksanakan meliputi :

a. Melakukan revisi terhadap perencanaan pelaksanaan sampling dan pengujian perbulan, dengan mempertimbangkan kapasitas laboratorium dalam melaksanakan pengujian.
b. Melaksanakan sampling dan pengujian sesuai dengan target bulanan yang telah disusun pada perencanaan sampling dan pengujian
c. Melakukan percepatan pengadaan alat laboratorium, reagensia, suku cadang dan alat gelas untuk mendukung terlaksananya pengujian
d. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pemenuhan masing-masing komponen penilain, meliputi :
    - Kesesuaian pelaksanaan sampling dengan kategori sampling yang telah ditetapkan pada pedoman sampling dan pengukuran tahun 2025
    - Kesesuaian pemilihan parameter uji dengan parameter uji yang telah ditetapkan pada pedoman sampling dan pengujian tahun 2025
    - Waktu pelaksanaan sampling (maksimal 10 HK), pengujian (maksimal 15 HK) dan pelaporan (maksimal 5 HK)
    - Ketepatan pengambilan kesimpulan hasil pengujian dan penilaian penandaan
    - Ketepatan pelaporan hasil sampling dan pengujian pada SIPT
    - Pelaksanaan Tindak lanjut hasil pengawasan produk sediaan farmasi sesuai dengan surat edaran masing-masing kedeputian
e. Melakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi dan menetapkan rencana atau langkah-langkah perbaikan segera, apabila realisasi tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

6. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program / kegiatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja meliputi :

a. Kegiatan pengadaan reagensia, suku cadang, alat gelas serta alat laboratorium, karena kegiatan ini sangat berpengaruh pada pelaksanaan pengujian
b. Kegiatan peningkatan kompetensi SDM yang melaksanakan sampling dan pengujian, agar pelaksanaan sampling dan pengujian terlaksana sesuai dengan pedoman sampling dan pengujian
c. Penyesuaian anggaran untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja sediaan farmasi yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan berbasis risiko, penyesuaian anggaran diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan anggaran untuk pengadaan reagensia, suku cadang, alat gelas dan perbaikan peralatan laboratorium.
d. Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala terhadap realisasi output dan capaian indikator kinerja.

7. Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.8. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN (RPD) TW II	REALISASI ANGGARAN TW II	% REALISASI ANGGARAN TW II	% CAPAIAN INDIKATOR TW II	% CAPAIAN TINGKAT EFISIENSI	KRITERIA
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	183.586.257	132.601.639	72,23	107,61	92	Efisien

Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar. Sebagai capaian output adalah capaian masing-masing IKU sedangkan inputnya adalah pesentase realisasi anggaran yang mendukung IKU terkait dengan menggunakan target anggaran adalah data Rencana Penarikan Dana (RPD) RO terkait.

Target anggaran TW II pada IKU ini adalah total dari Rencana Penarikan Dana (RPD) bulan Januari-Juni yang berasal dari rincian output QIA.002 dengan persentase dukungan anggaran sebesar 100%. Persentase realisasi anggaran TW II adalah perbandingan realisasi anggaran dengan target anggaran TW II sehingga nilai persentase realisasi anggaran dipengaruhi oleh

ketepatan dalam menetapkan rencana anggaran dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Maka berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran untuk pencapaian indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan termasuk efisien (92%) karena persentase realisasi anggaran (72,23%) lebih rendah daripada persentase capaian indikator (107,61%). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran untuk kegiatan sampling dan pengujian sediaan farmasi telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan menghasilkan capaian indikator kinerja yang tinggi.

B. PERSENTASE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG TELAH MELAPORKAN KTD/ESO KE BPOM

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan. KIE Farmakovigilans adalah kegiatan Bimbingan Teknis Farmakovigilans yang dilaksanakan oleh UPT BPOM kepada Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai wilayah kerjanya. KIE ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan kesadaran tenaga kesehatan dalam hal pelaporan KTD/ESO, dan diharapkan dapat meningkatkan jumlah dan kualitas pelaporan KTD/ESO oleh tenaga kesehatan yang nantinya dapat digunakan untuk mengevaluasi profil keamanan obat beredar di Indonesia.

Fasilitas pelayanan kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, klinik yang telah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan. Satu tenaga kesehatan/tenaga medis mewakili satu fasilitas pelayanan kesehatan. Setiap tenaga kesehatan/tenaga medis diberikan Sertifikat sebagai bukti mengikuti KIE Farmakovigilans.

Cara Perhitungan dan Formula :

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM = (A / B) x 100%

IKU Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM diukur pada akhir tahun sehingga belum terdapat realisasi pada Triwulan 2 2025.

Setelah pelaksanaan KIE farmakovigilans pada tanggal 26 Februari 2025 dilaksanakan pemantauan pelaporan KTD/ESO melalui subsite https://e-meso.pom.go.id/ADR setiap bulan dan dilaporkan ke Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif. Pelaporan hingga Bulan Juni 2025 baru 5 sarana pelayanan kesehatan yang melaporkan KTD/ESO.

C. PERSENTASE SAMPEL PANGAN OLAHAN BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya.

Cara Perhitungan Dan Formula =

20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan :

(A1 + A2) /2

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kadaluarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

Untuk UPT yang tidak melakukan pengujian hanya melakukan perhitungan A

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

Parameter uji dilakukan sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman sampling. Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

C.Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Kesimpulan pangan olahan yang aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/ label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE, rusak dan kadaluarsa dapat disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan bermutu. Ketepatan pengambilan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak/ jumlah sampel yang diperiksa) x 100%

E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Pelaporan sampling dan pengujian yang tepat waktu sesuai pedoman sampling, yaitu tanggal 15 di bulan berikutnya.

F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan :

((Jumlah sampel yang ditindaklanjuti/ total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)) x 100%

Tabel 3.9 Capaian Indikator Kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET TW II	REALISASI	CAPAIAN VS TARGET TW (%)			CAPAIAN VS TARGET TAHUNAN	
	2025			CAPAIAN	NORMALISASI	KATEGORI	(%)	KATEGORI
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	85,00	97,64	114,87	110	Tidak dapat disimpulkan	114,87	Tercapai/ Melampaui

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025

Realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II tahun 2025 adalah 97,64% , bila dibandingkan dengan target 85,00%, maka capaian adalah 114,87 % dengan kategori tidak dapat disimpulkan.

Pada triwulan II 2025 ini, IKU Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sudah dapat mencapai target yang telah ditetapkan oleh pusat dengan realisasi sebesar 97.64% dan capaian 114.87%. tercapainya realisasi dan capaian yang terpenuhi ini dikarenakan adanya tindak lanjut hasil pengujian sampel yang diuji dan dilaporkan sesuai time line dan ditindaklanjuti sehingga perhitungan untuk formula F (tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya) sehingga 100 % yang berpengaruh pada total perhitungan realisasi dan capaian pada triwulan I ini. Hasil pengujian pada TW 2 dapat langsung ditindaklanjuti pada Triwulan 2 juga.

Tabel 3.10 Hasil Perhitungan Realisasi IKU Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II tahun 2025

Bulan	Target Sampel Pangan Olahan	Target Indikator (%)	Kesesuaian Target Sampel (Bobot 20%)	Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (Bobot 20%)	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot 10%)	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (Bobot 10%)	TL sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya (Bobot 20%)	Realisasi (%)
April	111,00	85,00	76,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	95,21
Mei	161,00	85,00	87,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,49
Juni	231,00	85,00	88,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,64

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target akhir Tahun 2025

Realisasi Persentase Sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan II tahun 2025 adalah 97,64% bila dibandingkan dengan target akhir tahun 2025 sebesar 85%, maka capaian yang diperoleh adalah sama yaitu sebesar 114,87% dengan kategori akan tercapai/melampaui target .

3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 terhadap Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Tabel 3.11 Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tw II tahun 2025 terhadap tw I tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TW II 2025			TW I 2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	97.64	114.87	85.00	78.90	92.82

Bila dibandingkan dengan realisasi Sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan I tahun 2025 yaitu sebesar 79,80% maka terjadi kenaikan realisasi sebesar 18,74% dan bila dibandingkan dengan persentase capaian Triwulan I tahun 2025 yaitu sebesar 92,82% maka terjadi kenaikan capaian sebesar 22,05%, dapat disimpulkan bahwa adanya intervensi terhadap surat tindak lanjut hasil pengujian menjadi daya ungkit terhadap capaian kinerja pangan olahan dan meningkatnya koordinasi internal antar fungsi menjadi bagian penting dalam pengawasan pangan olahan.

4. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra 2025-2029**

Tabel 3.12 Perbandingan Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI TW II 2025	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	97,64	92,82	Akan tercapai

Target akhir Renstra (Tahun 2029) Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang adalah 93%, maka realisasi Triwulan II Tahun 2025 belum mencapai target akhir Renstra 2025-2029 dengan capaian 92,82% termasuk kategori akan tercapai. Untuk itu diperlukan langkah-langkah strategis setiap tahunnya dalam mencapai target pangan olahan yang berisiko yang ditindaklanjuti sehingga target akhir Renstra (Tahun 2029) dapat tercapai.

5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Analisis Penyebab Keberhasilan atau peningkatan kinerja :

a. Terjalinnya koordinasi dan komunikasi internal yang efektif antara tim sampling dan tim pengujian dalam menindaklanjuti perubahan perencanaan sampling dan pengujian yang telah direlaksasi oleh Badan POM dengan mengembalikan sesuai dengan target awal tahun 2025 sehingga tim sampling dan tim pengujian menyusun kembali langkah-langkah strategis untuk TW 2 ini dengan mempertimbangkan kesesuaian kategori dengan sarana dan prasarana laboratorium (reagen, baku banding dan suku cadang)
b. Koordinasi dengan tim pengadaan agar melakukan percepatan kebutuhan reagensia terutama untuk persediaan yang indent.
c. Monitoring dan evaluasi secara berkala yang berkelanjutan terhadap capaian sampling dan pengujian
d. Meningkatkan kompetensi petugas melalui pelatihan yang diadakan oleh Pusat dan pelatihan mandiri

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) :

a. Peningkatan dan penyempurnaan atas kepatuhan pada :
b. Percepatan realisasi penggunaan anggaran pengawasan yang berhubungan dengan sampling dan pengujian sesuai dengan DIPA.
c. Perencanaan sampling dan pengujian (jumlah target, kategori) sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian sehingga pemenuhan realisasi dan capaiannya akan selalu memenuhi target.
d. Melakukan pengaturan teknis pemakaian alat yang dibutuhkan antara laboratorium dengan target sampel normal

e. Melakukan koordinasi dan meningkatkan kerjasama antara fungsi pemeriksaan dan pengujian
f. Melakukan percepatan realisasi anggaran terutama anggaran yang berhubungan dengan sampling dan sarana prasarana pengujian laboratorium
g. Melakukan percepatan ritme penyelesaian sampling dan pengujian dengan waktu yang lebih cepat dari timeline yang telah ditetapkan pada Juknis dan SOP.
h. Meningkatkan kompetensi dari petugas fungsi pemeriksaan dan fungsi pengujian tentang pemahaman pedoman sampling dan pengujian

6. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

a. Melakukan sosialisasi oleh ketua tim masing-masing fungsi untuk meningkatkan pemahaman terkait pedoman sampling pengujian serta petunjuk teknis
b. Mengikuti pelatihan mandiri oleh semua staf fungsi pemeriksaan dan fungsi pengujian seperti pelatihan yang telah disediakan pada aplikasi IDEAS
c. Memperbanyak pelatihan teknis beserta praktikum terutama untuk inovasi dan ilmu metode analisa yang upto date
d. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan pada setiap triwulan

7. Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.13. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN (RPD) TW II	REALISASI ANGGARAN TW II	% REALISASI ANGGARAN TW II	% CAPAIAN INDIKATOR TW II	% CAPAIAN TINGKAT EFISIENSI	KRITERIA
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	122.521.351	264.928.442	216,23	114,87	-	Tidak Efisien

Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar. Sebagai capaian output adalah capaian masing-masing IKU sedangkan inputnya adalah pesentase realisasi anggaran yang mendukung IKU terkait dengan menggunakan target anggaran adalah data Rencana Penarikan Dana (RPD) RO terkait. Target anggaran TW II pada IKU ini adalah total dari Rencana Penarikan Dana (RPD) bulan Januari-Juni 2025 yang berasal dari rincian output QIA.001 dengan persentase dukungan anggaran sebesar 85%. Persentase realisasi anggaran TW II adalah

perbandingan realisasi anggaran dengan target anggaran TW II sehingga nilai persentase realisasi anggaran dipengaruhi oleh ketepatan dalam menetapkan rencana anggaran dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Maka berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran untuk pencapaian indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan termasuk tidak efisien karena persentase realisasi anggaran (216,23%) lebih tinggi daripada persentase capaian indikator (114,87%). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran untuk kegiatan sampling dan pengujian pangan olahan telah dilaksanakan melebihi dari rencana terlihat dari realisasi anggaran lebih besar dari rencana penarikan dana. Ketidaktepatan dalam hal perencaaan dan pelaksanaan kegiatan menyebabkan indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak efisien walaupun capaian indikator tercapai di atas 100%. Penyebab signifikan adalah pengadaan reagensia yang dilakukan pembayaran pada bulan Mei dengan realisasi anggaran (241 Juta) lebih besar dari rencana anggaran (46 Juta).

D. PERSENTASE SAMPEL KLB KERACUNAN PANGAN YANG DIUJI SESUAI STANDAR

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM.

Sesuai standar berdasarkan:

1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan,

2) Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023

Dalam melakukan pemeriksaan sampel KLB Keracunan Pangan yang berasal dari Dinas Kesehatan sebelum diuji terlebih dahulu dilakukan pengecekan kelengkapan surat pengantarnya. Untuk dugaan pangan KLB Keracunan Pangan bersumber dari pangan olahan terkemas maka dilakukan pemeriksaan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Pengujian laboratorium terhadap sampel pangan dugaan KLB Keracunan Pangan yang disampling oleh UPT atau yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan atau instansi terkait dengan parameter uji sampel yang sesuai dengan hasil investigasi dan mengacu pada pedoman sampling pangan

Tabel 3.14 Capaian Indikator Kinerja Persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji Sesuai Standar Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET TW II	REALISASI	CAPAIAN VS TARGET TW		CAPAIAN VS TARGET TAHUNAN	
	2025			(%)	KATEGORI	(%)	KATEGORI
Persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji Sesuai Standar	100	100	100	100	Baik	100	Tercapai/ Melampaui

1. **Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025**

Realisasi Persentase Persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji Sesuai Standar Triwulan II tahun 2025 adalah 100% , bila dibandingkan dengan target 100%, maka capaian adalah 100% dengan kategori baik.

Pada Triwulan II ini Sampel KLB yang diterima dan diuji di Balai Besar POM di Padang sebanyak 3 (tiga) sampel. Pengaduan kasus keracunan pangan terjadi pada bulan Mei sebanyak 1(satu) kasus dengan 3 (tiga) jenis sampel yang diuji di laboratorium. Pada bulan April dan Juni tidak terdapat kasus pengaduan keracunan pangan. Laporan KLB KP Sate yang diterima dari Dinas Kesehatan Kab. Dharmasraya dengan hasil investigasi epidemiologinya diduga penyebab keracunan adalah bakteri Salmonella, Bacillus C, Staphylococcus A. dan E Coli. Dari 3 (tiga) sampel yang diuji, 1 (satu) sampel terkonfirmasi mengandung Staphylococcus aureus, Bacillus cereus dan E.coli, sampel yang lain juga mengandung Staphylococcus aureus dan 1

(satu) sampel lainnya Memenuhi Syarat (MS) karena tidak mengandung bakteri yang diduga tsb.

Target IKU Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar telah ditetapkan yaitu 100%. Pada Triwulan 2 ini kasus KLB KP yang ditindaklanjuti tercapai 100% karena hasil investigasi dan yang terkonfirmasi diselesaikan melalui pengujian sesuai standar dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target akhir Tahun 2025

Realisasi Persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji Sesuai Standar di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan II tahun 2025 adalah 100% bila dibandingkan dengan target akhir tahun 2025 sebesar 100%, maka capaian yang diperoleh adalah sama yaitu sebesar 100% dengan kategori baik.

3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 terhadap Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Tabel 3.15. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji Sesuai Standar tw II tahun 2025 terhadap tw I tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TW II 2025			TW I 2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji Sesuai Standar ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100	-	-

Bila dibandingkan dengan realisasi Persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji Sesuai Standar ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan I tahun 2025 maka pada triwulan I realisasi belum dilaporkan, realisasi baru dihitung pada triwulan II dengan realisasi 100%.

4. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra 2025-2029**

Tabel 3.16 Perbandingan Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI TW II 2025	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji Sesuai Standar ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	Tercapai/ Melampaui

Target akhir Renstra (Tahun 2029) Persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji Sesuai Standar ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang adalah 100%, maka realisasi Triwulan II Tahun 2025 telah mencapai target akhir Renstra 2025-2029 dengan capaian 100% termasuk kategori tercapai/melampaui.

5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Analisis Penyebab Keberhasilan atau peningkatan kinerja :

a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kotamadya yang ada di wilayah Sumatera barat dalam menindaklanjuti kasus KLB
b. Mengadakan kegiatan advokasi terhadap pemerintah daerah , petugas kesehatan dan pelaku usaha dalam menghadapi kasus KLB
c. Meningkatkan koordinasi internal dalam menindaklanjuti sampel KLB
d. Meningkatkan kompetensi petugas tentang penanganan KLB
e. Melakukan monitoring pelaporan sampel KLB sesuai timeline

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) :

a. Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut kasus KLB dengan bekerjasama dengan lintas sektor
b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap masukan pengaduan dan kebutuhan Pemerintah Daerah tentang langkah-langkah yang harus dilakukan jika terjadi KLB
c. Meningkatkan intensitas koordinasi eksternal KLB antar lintas sektor dalam menindaklanjuti segera sampel pentingnya
d. Melakukan peningkatan kompetensi petugas tentang KLB

6. **Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Keberhasilan penanganan KLB sangat ditentukan oleh terjalinnya koordinasi ekternal dan internal yang baik dalam menindaklanjutinya.

7. **Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja**

Tabel 3.17. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN (RPD) TW II	REALISASI ANGGARAN TW II	% REALISASI ANGGARAN TW II	% CAPAIAN INDIKATOR TW II	% CAPAIAN TINGKAT EFISIENSI	KRITERIA
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	10.089.994	21.817.636	216,23	100	-	Tidak Efisien

Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar. Sebagai capaian output adalah capaian masing-masing IKU sedangkan inputnya adalah pesentase realisasi anggaran yang mendukung IKU terkait dengan menggunakan target anggaran adalah data Rencana Penarikan Dana (RPD) RO terkait.

Target anggaran TW II pada IKU ini adalah total dari Rencana Penarikan Dana (RPD) bulan Januari-Juni 2025 yang berasal dari rincian output QIA.001 dengan persentase dukungan anggaran sebesar 7%. Persentase realisasi anggaran TW II adalah perbandingan realisasi anggaran dengan target anggaran TW II sehingga nilai persentase realisasi anggaran dipengaruhi oleh ketepatan dalam menetapkan rencana anggaran dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran untuk pencapaian indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar termasuk tidak efisien karena persentase realisasi anggaran (216,23%) lebih tinggi daripada persentase capaian indikator (114,87%). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran untuk kegiatan sampling dan pengujian sampel pangan olahan telah dilaksanakan melebihi dari rencana terlihat dari realisasi anggaran lebih besar dari rencana penarikan dana. Ketidaktepatan dalam hal perencaaan dan pelaksanaan kegiatan menyebabkan indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar tidak efisien walaupun capaian indikator tercapai 100%. Penyebab signifikan adalah pengadaan reagen yang dilakukan pembayaran pada bulan Mei dengan realisasi anggaran (241 Juta) lebih besar dari rencana anggaran (46 Juta).

E. PERSENTASE SAMPEL PIRT BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

. Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan).

Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

Cara Perhitungan Dan Formula

= 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan :

(A1 + A2) /2

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kadaluarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

Untuk UPT yang tidak melakukan pengujian hanya melakukan perhitungan A1

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

Parameter uji dilakukan sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman sampling. Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Kesimpulan pangan olahan yang aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/ label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa dapat disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan bermutu. Ketepatan pengambilan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak/jumlah sampel yang diperiksa) x 100%

E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Pelaporan sampling dan pengujian yang tepat waktu sesuai pedoman sampling, yaitu tanggal 15 di bulan berikutnya.

F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan :

((Jumlah sampel yang ditindaklanjuti/ total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)) x 100%

Tabel 3.18 Capaian Indikator Kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET TW II	REALISASI	CAPAIAN VS TARGET TW (%)			CAPAIAN VS TARGET TAHUNAN	
	2025			Capaian	Normalisasi	KATEGORI	(%)	KATEGORI
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	85,00	100	117,65	110	Tidak dapat disimpulkan	117,65	Tercapai/ Melampaui

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025

Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II tahun 2025 adalah 100% , bila dibandingkan dengan target 85,00%, maka capaian adalah 117,65% dengan kategori tercapai/melampaui.

Pada triwulan II ini, realisasi dapat dicapai karena adanya beberapa hasil pengujian sampel yang diuji dan dilaporkan pada triwulan I yang belum termasuk time line waktu tindak lanjut dilakukan tindak lanjut sehingga sehingga perhitungan untuk formula F (tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya) terpenuhi diatas 100 % yang berpengaruh pada total perhitungan realisasi dan capaian pada triwulan II ini. Hasil pengujian pada TW II dapat langsung ditindaklanjuti pada Triwulan 2 juga. Pada TW II ini, seluruh target PIRT untuk satu tahun telah terealisasi semuanya sehingga pada TW III dan TW IV, tidak dilakukan lagi sampling dan pengujian untuk kategori PIRT.

Tabel 3.19 Hasil Perhitungan Realisasi IKU Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II 2025

Bulan	Target Indikator (%)	% Pemenuhan Target Sampel PIRT (Bobot 20%)	% Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	% Ketepatan pengambilan kesimpulan (Bobot 20%)	% Ketepatan waktu pengambilan sampel (Bobot 10%)	% Ketepatan waktu pelaporan (Bobot 10%)	% Tindak lanjut sampel PIRT (Bobot 20%)	Realisasi (%)
April	85,00	72,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	94,44
Mei	85,00	87,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,50
Juni	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

2. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target akhir Tahun 2025**

Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan II tahun 2025 adalah 100% bila dibandingkan dengan target akhir tahun 2025 sebesar 85%, maka capaian yang diperoleh adalah sama yaitu sebesar 117,65% dengan kategori tercapai/melampaui target.

3. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 terhadap Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025**

Tabel 3.20 Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tw II tahun 2025 terhadap tw I tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TW II 2025			TW I 2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	100,00	117,65	85,00	78,75	92,65

Bila dibandingkan dengan realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I tahun 2025 yaitu sebesar 78,75% maka terjadi kenaikan realisasi sebesar 21,25% dan bila dibandingkan dengan persentase capaian Triwulan I tahun 2025 yaitu sebesar 92,65% maka terjadi kenaikan capaian sebesar 25%, dapat disimpulkan bahwa kenaikan ini diperoleh karena telah menindaklanjuti hasil sampling dan pengujian sesuai timeline.

4. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra 2025-2029**

Tabel 3.21 Perbandingan Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI TW II 2025	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	100	105,26%	Tercapai/ terlampaui

Target akhir Renstra (Tahun 2029) Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang adalah 95%, maka realisasi Triwulan II Tahun 2025 telah mencapai target akhir Renstra 2025-2029 dengan capaian 105,26% termasuk kategori tercapai/terlampaui, untuk itu perlu dilakukan reviu terhadap target 2026-2029 agar dalam pencapaian target sesuai trend yang diperoleh dari tahun sebelumnya hal ini dalam rangka antisipasi target renstra dalam rentang kendali yang sesuai standar.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Analisis Penyebab Keberhasilan atau peningkatan kinerja :

a. Terjalinnya koordinasi dan komunikasi internal yang efektif antara tim sampling dan tim pengujian dalam menindaklanjuti perubahan perencanaan sampling dan pengujian yang telah dilakukan relaksasi anggaran oleh Badan POM dengan mengembalikan anggaran sesuai dengan target awal tahun 2025 sehingga tim sampling dan tim pengujian menyusun kembali langkah-langkah strategis untuk TW 2 ini dengan mempertimbangkan kesesuaian kategori dengan sarana dan prasarana laboratorium (reagen, baku banding dan suku cadang)
b. Semakin meningkatnya pembinaan terhadap pelaku usaha PIRT oleh pemerintah daerah dengan menggunakan anggaran DAK Badan POM sehingga mempunyai daya ungkit terhadap pemahaman pelaku usaha dalam memproduksi pangan PIRT sesuai ketentuan.
c. Peningkatan koordinasi pengawasan makanan bersama lintas sektor terkait dalam program dana DAK membuat pemerintah daerah mempunyai anggaran dalam pengawasan makanan di wilayah kerja masing-masing.
d. Peningkatan penyuluhan keamanan pangan bagi pelaku usaha dapat meningkatkan pengetahuannya dalam malakukan produksi pangan olahan yang baik
e. Koordinasi dengan Tim Pengadaan Barang/Jasa agar melakukan percepatan pengadaan reagensia terutama untuk persediaan yang indent.
f. Monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan terhadap capaian sampling dan pengujian

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) :

a. Peningkatan dan penyempurnaan atas kepatuhan pada :
   - Percepatan realisasi penggunaan anggaran pengawasan yang berhubungan dengan sampling dan pengujian sesuai dengan DIPA.
   - Perencanaan sampling dan pengujian (jumlah target, kategori) sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian sehingga pemenuhan realisasi dan capaiannya akan selalu memenuhi target.

b. Melakukan pengaturan teknis pemakaian alat yang dibutuhkan antara laboratorium dengan target sampel normal

c. Melakukan koordinasi dan meningkatkan kerjasama antara fungsi pemeriksaan dan pengujian

d. Melakukan percepatan ritme penyelesaian sampling dan pengujian dengan waktu yang lebih cepat dari timeline yang telah ditetapkan pada Juknis dan SOP.

e. Meningkatkan kompetensi petugas fungsi pemeriksaan dan fungsi pengujian untuk memahami pedoman sampling dan pengujian

6. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

a. Perencanaan sampling yang matang dan menyesuaikan dengan kebutuhan awal sarana dan prasarana pengujian di laboratorium dengan mengusulkan perencanaan kebutuhan alat , reagensia dan suku cadang serta melibatkan koordinasi dengan laboratorium regional

b. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan pada setiap triwulan

c. Melakukan sosialisasi oleh ketua tim masing-masing fungsi untuk meningkatkan pemahaman terkait pedoman sampling pengujian serta petunjuk teknis

d. Mengikuti pelatihan mandiri oleh semua staf fungsi pemeriksaan dan fungsi pengujian seperti pelatihan pada aplikasi IDEAS

e. Memperbanyak pelatihan teknis beserta praktikum terutama untuk inovasi dan ilmu metode analisa yang upto date

f. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan pada setiap triwulan

7. Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.22 Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN (RPD) TW II	REALISASI ANGGARAN TW II	% REALISASI ANGGARAN TW II	% CAPAIAN INDIKATOR TW II	% TINGKAT EFISIENSI	KRITERIA
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	11.531.421	24.934.442	216,23	117,65	-	Tidak Efisien

Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar. Sebagai capaian output adalah capaian masing-masing IKU sedangkan inputnya adalah pesentase realisasi anggaran yang mendukung IKU terkait dengan menggunakan target anggaran adalah data Rencana Penarikan Dana (RPD) RO terkait. Target anggaran TW II pada IKU ini adalah total dari Rencana Penarikan Dana (RPD) bulan Januari-Junin2025 yang berasal dari rincian output QIA.001 dengan persentase dukungan anggaran sebesar 8%. Persentase realisasi anggaran TW II adalah perbandingan realisasi anggaran dengan target anggaran TW II sehingga nilai persentase realisasi anggaran dipengaruhi oleh ketepatan dalam menetapkan rencana anggaran dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Maka berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran untuk pencapaian indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan termasuk tidak efisien karena persentase realisasi anggaran (216,23%) lebih tinggi daripada persentase capaian indikator (117,65%). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran untuk kegiatan sampling dan pengujian sampel PIRT telah dilaksanakan melebihi dari rencana terlihat dari realisasi anggaran lebih besar dari rencana penarikan dana. Ketidaktepatan dalam hal perencaaan dan pelaksanaan anggaran untuk kegiatan menyebabkan indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak efisien walaupun capaian indikator tercapai 100%. Penyebab signifikan adalah pengadaan reagensia yang dilakukan pembayaran pada bulan Mei dengan realisasi anggaran (241 Juta) lebih besar dari rencana anggaran (46 Juta).

F. PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DITINDAKLANJUTI OLEH STAKEHOLDER.

Pada IKU ini yang dimaksud Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
- Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

Tindak lanjut ini dapat berupa tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan (CAPA) dari pelaku usaha ataupun lintas sektor terkait agar ketidaksesuaian tidak berulang lagi. Untuk ini kepada pelaku usaha diberikan waktu selama 21 hari kerja sebagai batas waktu maksimal dalam mengirimkan data dukung CAPA yang telah dilakukan. Terhadap CAPA ini akan dilakukan evaluasi oleh petugas sehingga temuan ketidaksesuaian dapat dinyatakan telah sesuai dan selesai ditindaklanjuti atau masih belum sesuai ditindaklanjuti. Jika belum sesuai, maka kepada pelaku usaha diminta lagi memperbaiki sampai semua temuan dinyatakan telah sesuai dan selesai ditindaklanjuti.

Cara Perhitungan Dan Formula

= (A+B)/2

A. **Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha** *x* 100%
B. **Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor** *x* 100%

Tabel 3.23 Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder di Wilayah Kerja BBPOM di Padang TW II Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	TARGET TW II	REALISASI	CAPAIAN VS TARGET TW		CAPAIAN VS TARGET TAHUNAN	
				(%)	KATEGORI	(%)	KATEGORI
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89,50	89,50	89,38	99,87	Baik	99,87	Akan tercapai

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan II tahun 2025 adalah 89,38% bila dibandingkan dengan target 89,50%, maka capaian yang diperoleh adalah 99,87% dan mendapatkan kategori Baik.

Nilai 89,38% diperoleh sebagai rata-rata dari nilai % rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha (91,25%) dan % rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor (87,50%). Nilai 91,25% diperoleh dari persentase CAPA yang masuk dari pelaku usaha (73 CAPA) dari 80 keputusan/ rekomendasi yang dikirimkan kepada pelaku usaha. Sedangkan nilai 33,33% diperoleh dari persentase CAPA yang masuk dari lintas sektor (7 CAPA) dari 8 keputusan/ rekomendasi yang dikirimkan kepada lintas sektor terkait.

Tabel 3.24 Hasil Perhitungan Realisasi IKU Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder triwulan II 2025

Bulan	Target Indikator (%)	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Realisasi (%)
April	89,50	100,00	66,67	83,33
Mei	89,50	100,00	66,67	83,33
Juni	89,50	91,25	87,50	89,38

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target akhir Tahun 2025

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan II tahun 2025 adalah 89,38% bila dibandingkan dengan target akhir tahun 2025 sebesar 89,50%, maka capaian yang diperoleh adalah sama yaitu sebesar 99,87% dengan kategori akan tercapai

3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 terhadap Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Tabel 3.25 Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder tw II tahun 2025 terhadap tw I tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TW II Tahun 2025			TW I Tahun 2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89,50	89,38	99,87	89,50	39,88	44,56

Bila dibandingkan dengan realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder pada Triwulan I tahun 2025 yaitu sebesar 39,88% maka terjadi kenaikan realisasi sebesar 49,50% dan bila dibandingkan dengan persentase capaian Triwulan I tahun 2025 yaitu sebesar 44,56% maka terjadi kenaikan capaian sebesar 55,31%, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan realisasi yang signifikan pada triwulan II tahun 2025.

4. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra 2025-2029**

Tabel 3.26 Perbandingan Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI TW I 2025	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91,50	89,38	97,68%	Akan tercapai

Target akhir Renstra (Tahun 2029) Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang adalah 91,50%, maka realisasi Triwulan II Tahun 2025 belum mencapai target akhir Renstra 2025-2029 dengan capaian 97,68% termasuk kategori akan tercapai. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk memenuhi target IKU ini sehingga target pada akhir tahun Renstra 2025-2029 dapat tercapai.

5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Analisis Penyebab Kegagalan atau penurunan kinerja :

Nilai capaian kinerja ini masih belum tercapai 100% sesuai target, disebabkan pelaku usaha yang mengirimkan CAPA masih belum sesuai target dimana terjadi peningkatan signifikan jumlah sarana yang diperiksa selama triwulan II sehingga secara linier meningkatkan jumlah sarana yang diberikan keputusan rekomendasi tindak lanjut. Sedangkan untuk tindak lanjut dari lintas sektor masih sedang berproses namun telah terjadi peningkatan di triwulan II ini walaupun masih belum memenuhi target.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) :

Untuk mencapai target kinerja ini, diperlukan upaya:

a. Pengawalan secara rutin dan berkala kepada pelaku usaha dan lintas sektor terkait, agar segera melakukan tindakan perbaikan atau pencegahan sesuai dengan rekomendasi keputusan tindak lanjut yang diberikan.

b. Selalu mengingatkan petugas sarana terkait agar melakukan komunikasi secara terus menerus dengan pelaku usaha untuk pengawalan pengiriman CAPA

c. Melaksanakan koordinasi dan jika diperlukan berkolaborasi dengan lintas sektor terkait agar segera melakukan pembinaan kepada pelaku usaha daerah binaannya. Pembinaan ini merupakan suatu output CAPA yang dapat dikirimkan lintas sektor terkait dan dapat dihitung sebagai respon tindak lanjut lintas sektor

6. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian target kinerja ini, dapat didukung oleh adanya:

a. Sistem yang dapat memastikan keputusan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana sampai ke pelaku usaha atau lintas sektor terkait secara tepat waktu. Sampai saat ini sistem yang ada dengan memanfaatkan secara maksimal jaringan komunikasi antara petugas dengan pelaku usaha melalui email atau whatsapp dan melalui surat yang dikirimkan hardcopy melalui ekspedisi.

b. Tersedianya softcopy CAPA dalam format word atau excel sehingga memudahkan pelaku usaha dalam menyusun CAPA dan dapat secara tepat waktu mengirimkan melalui link yang telah dicantumkan dalam surat keputusan

c. Kemampuan petugas dalam berkomunikasi dengan baik kepada pelaku usaha sehingga CAPA dapat diterima tepat waktu. Kemampuan petugas ini sangat dipengaruhi adanya pelatihan dan bimbingan teknis terkait kompetensi petugas dalam melakukan pemeriksaan sarana

d. Secara rutin berkolaborasi dengan lintas sektor terkait dalam memberikan pembinaan atau bimbingan teknis pentingnya cara produksi/ distribusi yang baik kepada pelaku usaha terkait obat dan makanan

7. Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

3.27. Efisiensi Anggaran pada Indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil**Tabel** pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN (RPD) TW II	REALISASI ANGGARAN TW II	% REALISASI ANGGARAN TW II	% CAPAIAN INDIKATOR TW II	% CAPAIAN TINGKAT EFISIENSI	KRITERIA
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang di TL oleh stakeholder	7.262.715	3.681.427	50,69	99,87	88	Efisien

Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar. Sebagai capaian output adalah capaian masing-masing IKU sedangkan inputnya adalah pesentase realisasi anggaran yang mendukung IKU terkait dengan menggunakan target anggaran adalah data Rencana Penarikan Dana (RPD) RO terkait. Target anggaran TW II pada IKU ini adalah total dari Rencana Penarikan Dana (RPD) bulan Januari-Juni 2025 yang berasal dari rincian output QIC.004 dengan persentase dukungan anggaran sebesar 3%. Persentase realisasi anggaran TW II adalah perbandingan realisasi anggaran dengan target anggaran TW II sehingga nilai persentase realisasi anggaran dipengaruhi oleh ketepatan dalam menetapkan rencana anggaran dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Maka berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran untuk pencapaian indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder termasuk efisien (88%) karena persentase realisasi anggaran (50,69%) lebih rendah daripada persentase capaian indikator (99,87%). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran untuk kegiatan tindaklanjut keputusan/rekomendasi sampel dan sarana sediaan farmasi dan pangan olahan belum dilaksanakan sesuai dengan rencana dan capaian indikator juga belum tercapai namun karena persentase capaian indiikator lebih tinggi daripada persentase realisasi anggaran sehingga masih terhitung efisien.

G. PERSENTASE SARANA PRODUKSI SEDIAAN FARMASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Sarana produksi sediaan farmasi yaitu meliputi:

1) Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
2) Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan
3) Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan

tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada : regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait. Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait

Jumlah target sarana produksi sediaan farmasi BBPOM di Padang selama tahun 2025 adalah sebanyak 6 sarana, antara lain 1 sarana IOT, 1 sarana UKOT, 1 sarana UMOT dan 3 sarana IKOS. Sarana industri obat tidak lagi menjadi target karena sejak akhir tahun 2024, sarana tersebut tidak lagi melakukan kegiatan operasional produksi obat.

Cara Perhitungan Dan Formula

= rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

% Sarprod Obat = Rata-rata (A+B+C)

% Sarprod OBA dan SK = Rata-rata (A+B+C+D)

% Sarprod Kosmetik = Rata-rata (A+B+C+D)

Parameter penilaian sarana produksi OBA dan kosmetik dilakukan berdasarkan parameter pemeriksaan yang meliputi persentase pelaksanaan inspeksi, persentase kelengkapan dan kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi, persentase akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi dan persentase kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana.

Tabel 3.28 Capaian Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET TW II	REALISASI	CAPAIAN VS TARGET TW		CAPAIAN NORMALISASI	CAPAIAN VS TARGET TAHUNAN	
	2025			(%)	KATEGORI		(%)	KATEGORI
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	100	117,65	Tidak dapat disimpulkan	110	117,65	Tercapai/ melampaui

1. **Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025**

Realisasi Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan II tahun 2025 adalah 100% bila dibandingkan dengan target 85%, maka capaian yang diperoleh adalah 117,65% dinormalisasi menjadi 110% dan mendapatkan kategori Tidak dapat disimpulkan. Nilai 100% diperoleh karena semua sarana yang diperiksa yaitu sarana industri obat kuasi dan industri kosmetik, telah ditindaklanjuti sesuai parameter pemeriksaan sarana secara tepat waktu sehingga setiap parameter bernilai 100%.

Tabel 3. 29 Hasil Perhitungan Realisasi IKU Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II 2025

Bulan	Target	% Sarprod Obat	% Sarprod OBA & SK	% Sarprod Kosmetik	% Sarprod SF
Januari	85.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Februari	85.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Maret	85.00	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00	100

2. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target akhir Tahun 2025**

Realisasi Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan II tahun 2025 adalah 100% bila dibandingkan dengan target akhir tahun 2025 sebesar 85%, maka capaian yang diperoleh adalah sama yaitu sebesar 117,65% dengan kategori tercapai/melampaui

3. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 terhadap Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025**

Tabel 3.30 Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tw II tahun 2025 terhadap tw I tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TW II Tahun 2025			TW I Tahun 2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	100,00	117,65	85,00	100,00	117,65

Bila dibandingkan dengan realisasi Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan I tahun 2025 yaitu sebesar 100% maka tidak terjadi kenaikan realisasi dan capaian. Hal ini menunjukkan capaian kinerja indikator ini masih dalam batas pemenuhan kriteria pengawasan BBPOM di Padang.

4. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra 2025-2029**

Tabel 3.31 Perbandingan Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI TW I 2025	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109,89%	Tercapai/ Melampaui

Target akhir Renstra (Tahun 2029) Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang adalah 91%, maka realisasi Triwulan I Tahun 2025 telah mencapai target akhir Renstra 2025-2029 dengan capaian 109,89% termasuk kategori Tercapai/ Melampaui . Untuk ini perlu dilakukan reviu terhadap target kinerja tahun 2026-2029 dimana target tahun 2025 dapat dinaikkan dari target saat ini menjadi 90-100%.

5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Analisis Penyebab Keberhasilan atau peningkatan kinerja :

Tercapainya kinerja ini disebabkan terpenuhinya dengan baik semua parameter penilaian dalam pemeriksaan sarana yang dilakukan, antara lain:

a. Pelaksanaan inspeksi yang dilakukan terealisasi sebanyak 100 persen dari jumlah yang ditargetkan
b. Persentase kelengkapan dan kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi, dimana seluruh sarana yang diperiksa telah dilaporkan tepat waktu melalui SIPT
c. Persentase akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi dimana kesimpulan yang diberikan petugas telah sesuai dengan pedoman cara produksi kosmetik yang baik

d. Persentase kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana dimana semua sarana yang diperiksa 100% telah disurati dalam batas waktu yang ditentukan

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) :

Untuk penyempurnaan kinerja ke depan, diperlukan komitmen petugas yang ditunjuk agar semua parameter pemeriksaan terpenuhi secara konsisten. Selain itu diperlukan kerjasama tim yang solid agar pelaksanaan pemeriksaan sarana dapat dilaksankan dengan baik dan sesuai dengan pedoman pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi.

6. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian kinerja ini sangat didukung oleh:

a. Program pelatihan teknis inspektur pemeriksaan yang dilakukan secara berkelanjutan sehingga dapat memastikan tersedianya personil yang kompeten dan berkomitmen melaksanakan pemeriksaan sarana sesuai dengan perencanaan dan pedoman yang ditetapkan
b. Kepatuhan pelaku usaha dan bekerjasama mengikuti semua proses pemeriksaan sehingga inspeksi dapat berjalan dengan lancar
c. Tersedianya jaringan internet yang memadai dan kondisi server Srikandi dan SIPT yang tidak bermasalah sehingga proses pembuatan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pelaporan dapat dilaksanakan dengan lancar

7. Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.32. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN (RPD) TW II	REALISASI ANGGARAN TW II	% REALISASI ANGGARAN TW II	% CAPAIAN INDIKATOR TW II	% CAPAIAN TINGKAT EFISIENSI	KRITERIA
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	428.400	1.327.500	309,87	117,65	-	Tidak Efisien

Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar. Sebagai capaian output adalah capaian masing-masing IKU sedangkan inputnya adalah pesentase realisasi anggaran yang mendukung IKU terkait dengan menggunakan target anggaran adalah data Rencana Penarikan Dana (RPD) RO terkait. Target anggaran TW II pada IKU ini adalah total dari rencana penarikan dana bulan Januari-Juni 2025 yang berasal dari rincian output QIC.001 dengan persentase dukungan anggaran sebesar 12%. Persentase realisasi anggaran TW II adalah perbandingan realisasi anggaran dengan target anggaran TW II sehingga nilai persentase realisasi anggaran dipengaruhi oleh ketepatan dalam menetapkan rencana anggaran dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Maka berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran untuk pencapaian indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan termasuk tidak efisien karena persentase realisasi anggaran (309,87%) lebih tinggi daripada persentase capaian indikator (117,65%). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran untuk kegiatan pengawasan sarana produksi sediaan faramsi telah dilaksanakan melebihi dari rencana, terlihat dari realisasi anggaran lebih besar dari rencana penarikan dana. Ketidaktepatan dalam hal perencaaan dan pelaksanaan anggaran untuk kegiatan menyebabkan indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak efisien walaupun capaian indikator tercapai 117,65%. Penyebab signifikan adalah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan pada bulan Mei dengan realisasi anggaran (3,9 Juta) lebih besar dari rencana anggaran (1,1Juta).

H. PERSENTASE SARANA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diukur dengan membandingkan jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan jumlah seluruh sarana yang diperiksa. Sarana yang diperiksa adalah Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain.

Indikator yang digunakan untuk menilai persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah dengan mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

1) Ketepatan waktu tindak lanjut

2) Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan

Cara Perhitungan dan Formula

% Jumlah Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

$$= \frac{\textit{Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\textit{Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa}} \times 100\%$$

Tabel 3.33 Capaian Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET TW II	REALISASI	CAPAIAN VS TARGET TW		CAPAIAN NORMALISASI	CAPAIAN VS TARGET TAHUNAN	
	2025			(%)	KATEGORI		(%)	KATEGORI
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	100	117,65	Tidak dapat disimpulkan	110	117,65	Tercapai/ melampaui

1. **Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025**

   Realisasi Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan II tahun 2025 adalah 100% bila dibandingkan dengan target 85%, maka capaian yang diperoleh adalah 117,65% dinormalisasi menjadi 110% dan mendapatkan kategori Tidak dapat disimpulkan.

Tabel 3. 34 Hasil Perhitungan Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II 2025

Bulan	Target Indikator	Jumlah sarana yang diperiksa tepat waktu	jumlah sarana yang diperiksa	% Ketepatan waktu	Jumlah sarana yang ditindaklanjuti dengan tepat	Jumlah sarana yang diperiksa	% Ketepatan tindak lanjut	Jumlah sarana yang diberikan grading dengan tepat	jumlah sarana yang diperiksa	% Evaluasi Ketepatan Grading	Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa	% Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
April	85,00	8,00	8,00	100,00	8,00	8,00	100,00	8,00	8,00	100,00	8,00	8,00	100,00
Mei	85,00	21,00	21,00	100,00	21,00	21,00	100,00	21,00	21,00	100,00	21,00	21,00	100,00
Juni	85,00	30,00	30,00	100,00	30,00	30,00	100,00	30,00	30,00	100,00	30,00	30,00	100,00

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target akhir Tahun 2025

Realisasi Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan II tahun 2025 adalah 100% bila dibandingkan dengan target akhir tahun 2025 sebesar 85%, maka capaian yang diperoleh adalah sama yaitu sebesar 117,65% dengan kategori tercapai/melampaui.

3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 terhadap Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Tabel 3.35. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tw II tahun 2025 terhadap tw I tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II 2025	REALISASI TW II 2025	CAPAIAN TW II 2025	TARGET TW I 2025	REALISASI TW I 2025	CAPAIAN TW I 2025
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	100	117,65	85,00	-	-

Bila dibandingkan dengan realisasi Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan I tahun 2025 maka pada Triwulan I realisasi IKU ini belum dilaporkan. Perhitungan realisasi Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan dimulai pada bulan Juni 2025. Pemeriksaan sarana telah

dilakukan hingga bulan Juni 2025 terhadap 30 sarana produksi pangan olahan yang terdiri dari 20 sarana produksi pangan dengan izin edar BPOM MD dan 10 sarana PIRT. Tindak Lanjut yang telah dilaksanakan terhadap sarana pangan tersebut telah sesuai dengan pedoman tindak lanjut. Penetapan grading telah sesuai dengan konversi hasil dan pelaporan hasil pemeriksaan sarana yang diinput oleh UPT melalui SIPT sudah tepat waktu

4. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra 2025-2029**

Tabel 3.36 Perbandingan Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI TW II 2025	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109,89%	Tercapai/ Melampaui

Target akhir Renstra (Tahun 2029) Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang adalah 91%, maka realisasi Triwulan I Tahun 2025 telah mencapai target akhir Renstra 2025-2029 dengan capaian 109,89% termasuk kategori Tercapai/ Melampaui . Untuk ini perlu dilakukan reviu terhadap target kinerja tahun 2026-2029.

5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Analisis Penyebab Keberhasilan atau peningkatan kinerja :

a. Perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi dilaksanakan secara konsisten sehingga realisasi kegiatan di Triwulan 2 dapat tercapai/melampaui.
b. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi pangan telah sesuai dengan ketentuan. Bagi sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan akan dilanjutkan dengan proses CAPA dan Closed CAPA.
c. Telah dilakukan bimbingan dan sosialisasi kepada pelaku usaha di saraana produksi pada saat proses audit.

d. Telah dilakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait sarana PIRT yang tidak memebuhi ketentuan.
e. Peningkatan kompetensi petugas melalui Pelatihan/Bimtek daring ataupun luring.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

a. Melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan secara konsisten dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap CAPA/perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha.
b. Memberikan bimingan kepada pelaku usaha agar dapat menerapkan CPPOB secara konsisten.
c. Peningkatan kompetensi petugas inspektur pangan dasar dan muda

6. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

a. Bimbingan teknis dan sosialisasi kepada pelaku usaha di sarana produksi terkait penerapan CPPOB.
b. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan di kabupaten/kota dalam penerapan CPPB-IRT di sarana industry rumah tangga.
c. Peningkatan kompetensi petugas inspeksi melalui Pelatihan/ bimbingan teknis/ Sosialisasi secara daring dan luring.

7. Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.37. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN (RPD) TW II	REALISASI ANGGARAN TW II	% REALISASI ANGGARAN TW II	% CAPAIAN INDIKATOR TW II	% TINGKAT EFISIENSI	KRITERIA
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	3.141.600	9.735.000	309,87	117,65	-	Tidak Efisien

Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar. Sebagai capaian output adalah capaian masing-masing IKU sedangkan

inputnya adalah pesentase realisasi anggaran yang mendukung IKU terkait dengan menggunakan target anggaran adalah data Rencana Penarikan Dana (RPD) RO terkait. Target anggaran TW II pada IKU ini adalah total dari Rencana Penarikan Dana (RPD) bulan Januari-Juni 2025 yang berasal dari rincian output QIC.001 dengan persentase dukungan anggaran sebesar 88%. Persentase realisasi anggaran TW II adalah perbandingan realisasi anggaran dengan target anggaran TW II sehingga nilai persentase realisasi anggaran dipengaruhi oleh ketepatan dalam menetapkan rencana anggaran dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Maka berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran untuk pencapaian indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan termasuk tidak efisien karena persentase realisasi anggaran (309,87%) lebih tinggi daripada persentase capaian indikator (117,65%). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran untuk kegiatan pengawasan sarana produksi pangan olahan telah dilaksanakan melebihi dari rencana, terlihat dari realisasi anggaran lebih besar dari rencana penarikan dana. Ketidaktepatan dalam hal perencaaan dan pelaksanaan anggaran untuk kegiatan menyebabkan indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak efisien walaupun capaian indikator tercapai 117,65%. Penyebab signifikan adalah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan pada bulan Mei dengan realisasi anggaran (3,9 Juta) lebih besar dari rencana angaran (1,1Juta).

I. PERSENTASE FASILITAS DISTRIBUSI SEDIAAN FARMASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

- Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian;
- Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;

- Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi

Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait

Cara perhitungan dan Formula

Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = (A+B+C)/3

Target IKU Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah ditetapkan, namun realisasi belum dapat dihitung karena sesuai arahan dari Pusat dikeluarkan dulu dari perhitungan capaian di triwulan I karena Defenisi Operasional nya masih dalam pembahasan unit pengampu.

Kegiatan yang telah dilakukan pada triwulan II adalah pemeriksaan sarana distribusi dan sediaan farmasi sesuai analisa resiko, penyusunan tindak lanjut sesuai dengan pedoman Tindak Lanjut dan pelaporan kedalam aplikasi SIPT sesuai dengan timeline.

Tabel 3.38 Capaian Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET TW II	REALISASI	CAPAIAN VS TARGET TW		CAPAIAN VS TARGET TAHUNAN	
	2025			(%)	KATEGORI	(%)	KATEGORI
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	92	97,64	106,13	Sangat baik	106,13	Tercapai/ Melampaui

1. **Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025**

Realisasi Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II tahun 2025 adalah 97,64% , bila dibandingkan dengan target 92,00%, maka capaian adalah 106,13 % dengan kategori sangat baik.

Tabel 3.39 Hasil Perhitungan Realisasi IKU Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II tahun 2025

Bulan	Target	% Sardis Obat	% Sardis OBA	% Sardis SK	% Sardis Kosmetik	% Sardis
April	92	96,11	100,00	100,00	100,00	99,03
Mei	92	95,36	96,59	100,00	97,79	97,44
Juni	92	95,27	96,67	100,00	98,61	97,64

2. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target akhir Tahun 2025**

Realisasi Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan II tahun 2025 adalah 97,64% bila dibandingkan dengan target akhir tahun 2025 sebesar 92%, maka capaian yang diperoleh adalah sama yaitu sebesar 106,13% dengan kategori telah tercapai.

3. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 terhadap Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025**

Tabel 3.40. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tw II tahun 2025 terhadap tw I tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II 2025	REALISASI TW II 2025	CAPAIAN TW II 2025	TARGET TW I 2025	REALISASI TW I 2025	CAPAIAN TW I 2025
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,00	97,64	106,1304	92	-	

Realisasi Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan I tahun 2025 belum dilaporkan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi triwulan II. Namun realisasi pada triwulan II tahun 2025 telah dihitung sesuai defenisi Operasional dan tercapai dengan kategori sangat baik.

4. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra 2025-2029

Tabel 3.41 Perbandingan Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI TW II 2025	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96	97,64	101,71	Tercapai/ melampaui

Target akhir Renstra (Tahun 2029) Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang adalah 96%, maka realisasi Triwulan II Tahun 2025 telah mencapai target akhir Renstra 2025-2029 dengan capaian 101,71% termasuk kategori tercapai/melampaui. Dengan telah tercapainya target akhir Renstra ini maka perlu dilakukan reviu terhadap target Renstra untuk dilakukan peningkatan target agar lebih menantang dan berkualitas.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Analisis Penyebab Keberhasilan atau peningkatan kinerja :

Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja dalam Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah:

a. Perencanaan kegiatan telah dilakukan dengan berbasis risiko
b. Penetapan tim pengawasan dengan mempertimbangkan kompetensi dan kemampuan dalam melaksanakan pengawasan secara komprehensif
c. Kedisiplinan dalam pembuatan tindak lanjut yang segera dilaksanakan setelah selesainya kegiatan dan komitmen dalam penyusunan tindak lanjut sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut

d. Ketepatan, kecermatan dan kelengkapan dalam pengisian laporan melalui SIPT serta komitmen dalam pemenuhan timeline
e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkesinambungan **.**

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) :

a. Peningkatan kompetensi petugas terkait pemeriksaaan sarana distribusi dan yanfar
b. Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor terkait dalam pengawasan dan pelaksanaan tindak lanjut yang didukung dengan surat edaran/MOU dengan Pemerintah Daerah terkait pengawasan obat dan makanan secara terpadu

6. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Penunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja : .

a. Kerjasama tim yang solid dalam mencapai target kinerja
b. Dukungan manajemen dalam pelaksanaan kegiatan
c. Kerjasama yang baik dengan lintas sektor terkait dalam pengawasan obat dan makanan

7. Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.42. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN (RPD) TW II	REALISASI ANGGARAN TW II	% REALISASI ANGGARAN TW II	% CAPAIAN INDIKATOR TW II	% TINGKAT EFISIENSI	KRITERIA
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	147.675.202	74.855.677	50,69	106,13	86	Efisien

Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar. Sebagai capaian output adalah capaian masing-masing IKU sedangkan inputnya adalah pesentase realisasi anggaran yang mendukung IKU terkait dengan menggunakan target anggaran adalah data Rencana Penarikan Dana (RPD) RO terkait.

Target anggaran TW II pada IKU ini adalah total dari Rencana Penarikan Dana (RPD) bulan Januari-Juni 2025 yang berasal dari rincian output QIC.004 dengan persentase dukungan anggaran sebesar 61%. Persentase realisasi anggaran TW II adalah perbandingan realisasi anggaran dengan target anggaran TW II sehingga nilai persentase realisasi anggaran dipengaruhi oleh ketepatan dalam menetapkan rencana anggaran dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Maka berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran untuk pencapaian indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan termasuk efisien (86%) karena persentase realisasi anggaran (50,69%) lebih rendah daripada persentase capaian indikator (106,13%). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran untuk kegiatan pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi belum dilaksanakan sesuai dengan rencana namun capaian indikator tercapai sehingga masih terhitung efisien.

J. PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI PANGAN OLAHAN YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

. Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan. Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:

1. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa
2. Ketepatan waktu pelaporan
3. Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

Cara Perhitungan Dan Formula

= Jumlah Sarana yang Diperiksa Sesuai Ketentuan/ Jumlah Sarana yang Diperiksa X100%

Keterangan:

Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT

Jumlah sarana yang diperiksa sesuai ketentuan adalah penjumlahan dari komponen-komponen sebagai berikut:

jumlah sarana yang diperiksa sesuai target, ketepatan waktu pelaporan, serta ketepatan tindak lanjut (A+B+C)

Tabel 3.43 Capaian Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	TARGET TW II	REALISASI	CAPAIAN VS TARGET TW		CAPAIAN VS TARGET TAHUNAN	
				(%)	KATEGORI	(%)	KATEGORI
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	88,39	103,99	Sangat baik	103,99	Tercapai/ melampaui

1. **Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025**

Realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan II tahun 2025 adalah 88,39%, bila dibandingkan dengan target 85%, maka capaian yang diperoleh adalah 103,99% dan mendapatkan kategori sangat baik.

Tabel 3.44 Hasil Perhitungan Realisasi IKU Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II Tahun 2025.

Bulan	Target	Jumlah Sarana yang Diperiksa	Target Jumlah Sarana yang Diperiksa sesuai Renlak	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 20%)	Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Ketepatan Tindak Lanjut (Bobot 70%)	Jumlah Sarana yang Diperiksa dan Dilaporkan Tepat Waktu	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 10%)	% Sardis PO
April	85	66	66	20,00	66	66	70,00	63	66	9,55	99,55
Mei	85	89	89	20,00	80	89	62,92	80	89	8,99	91,91
Juni		111	125	17,76	97	111	61,17	105	111	9,46	88,39

2. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target akhir Tahun 2025**

Realisasi Persentase Sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan II tahun 2025 adalah 88,39% bila dibandingkan dengan target akhir tahun 2025 sebesar 85%, maka capaian yang diperoleh adalah sama yaitu sebesar 103,99% dengan kategori tercapai/melampaui

3. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 terhadap Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025**

Tabel 3.45 Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tw II tahun 2025 terhadap tw I tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II 2025	REALISASI TW II 2025	CAPAIAN TW II 2025	TARGET TW I 2025	REALISASI TW I 2025	CAPAIAN TW I 2025
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	88,39	103,99	85,00	63,44	74,64

Bila dibandingkan dengan realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan I tahun 2025 yaitu sebesar 63,44% maka terjadi kenaikan realisasi sebesar 24,95% dan bila dibandingkan dengan persentase capaian Triwulan I tahun 2025 yaitu sebesar 74,64% maka terjadi kenaikan capaian sebesar 29,35%, dapat disimpulkan bahwa terdapat kenaikan realisasi yang signifikan dari triwulan I, hal ini menunjukkan peningkatan kinerja pengawasan sarana distribuasi pangan olahan yang dilakukan BBPOM di Padang

4. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra 2025-2029**

Tabel 3.46 Perbandingan Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan ketentuan Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI TW I 2025	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	88,39	93,04%	Akan tercapai

Target akhir Renstra (Tahun 2029) Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang adalah 95%, maka realisasi Triwulan II Tahun 2025 belum mencapai target akhir Renstra 2025-2029 dengan capaian 93,04% termasuk kategori akan tercapai. Untuk itu diperlukan perencanaan yang baik untuk periode selanjutnya supaya target kinerpa pada akhir Renstra ini dapat tercapai

5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Analisis Penyebab Keberhasilan atau peningkatan kinerja :

a. Terjalinnya koordinasi dan komunikasi internal yang efektif antara tim pengawasan dalam menindaklanjuti renlak (rencana pelaksanaa) kegiatan sesuai ketentuan .
b. Semakin meningkatnya pembinaan terhadap pelaku usaha distribusi pangan melalui pembinaan ditempat agar selalu cek klik sebelum menjual produk makanan
c. Peningkatan koordinasi pengawasan makanan bersama lintas sektor terkait dalam menjamin keamanan pangan di wilayah kerja masing-masing
d. Monitoring dan evaluasi secara berkala terkait tindak lanjut sarana distribusi pangan

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) :

a. Melakukan monitoring terhadap perencanaan pengawasan pangan sesuai target perencanaan
b. Melaksanakan pemeriksaan sarana distribusi pangan sesuai dengan target bulanan yang telah disusun pada perencanaan sarana distribusi pangan
c. Melakukan monitoring terhadap sarana yang ditindaklanjuti
d. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait hasil pengawasan pangan

6. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

a. Meningkatkan koordinasi tim pengawasan dalam melaksanakan renlak kegiatan dan menindaklanjuti sesuai ketentuan .
b. Meningkatkan pemahaman pelaku usaha distribusi pangan melalui pembinaan saat pengawasandengan memastikan produk yang dijual sesuai penyimpanan dan penyalurannya.
c. Pemberian edukasi terkait pangan aman di media sosial UPT
d. Peningkatan kompetensi SDM melalui bimtek internal dari Pusat dan pelatihan mandiri
e. Intensitas koordinasi pengawasan makanan bersama lintas sektor terkait dalam menjamin keamanan pangan di wilayah kerja masing-masing

2. Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.47. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN (RPD) TW II	REALISASI ANGGARAN TW II	% REALISASI ANGGARAN TW II	% CAPAIAN INDIKATOR TW II	% TINGKAT EFISIENSI	KRITERIA
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	79.889.863	40.495.694	50,69	103,99	86	Efisien

Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar. Sebagai capaian output adalah capaian masing-masing IKU sedangkan inputnya adalah pesentase realisasi anggaran yang mendukung IKU terkait dengan menggunakan target anggaran adalah data Rencana Penarikan Dana (RPD) RO terkait.

Target anggaran TW II pada IKU ini adalah total dari Rencana Penarikan Dana (RPD) bulan Januari-Juni 2025 yang berasal dari rincian output QIC.004 dengan persentase dukungan anggaran sebesar 33%. Persentase realisasi anggaran TW II adalah perbandingan realisasi anggaran dengan target anggaran TW II sehingga nilai persentase realisasi anggaran dipengaruhi oleh ketepatan dalam menetapkan rencana anggaran dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Maka berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran untuk pencapaian indikator Persentase fasilitas distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan termasuk efisien (86%) karena persentase realisasi anggaran (50,69%) lebih rendah daripada persentase capaian indikator (103,99%). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran untuk kegiatan pengawasan sarana distribusi pangan olahan belum dilaksanakan sesuai dengan rencana namun capaian indikator tercapai sehingga masih terhitung efisien.

K. PERSENTASE IKLAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DIAWASI SESUAI KETENTUAN

Iklan sediaan farmasi dan pangan olahan didefinisikan sebagai setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan. Balai Besar POM di Padang melaksanakan pengawasan iklan baik iklan komoditi sediaan farmasi maupun pangan olahan pada berbagai jenis media iklan sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pengampu masing-masing komoditi.

Tahapan pelaksanaan pengawasan iklan mencakup penetapan target, perencanaan, pelaksanaan pengawasan, pelaporan hasil pengawasan, evaluasi hasil pengawasan, serta pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan. Seluruh tahapan pelaksanaan pengawasan iklan ini didasarkan kepada berbagai regulasi atau peraturan terutama pedoman pelaksanaan pengawasan iklan untuk masing-masing komoditi. Pedoman pengawasan

tersebut yang dilengkapi dengan edaran terkait pengawasan iklan dari pengampu masing-masing komoditi sekaligus menjadi acuan dalam tertib pelaksanaan kegiatan pengawasan iklan di Balai Besar POM di Padang.

Kinerja pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan dipantau dan dievaluasi capaiannya setiap bulan berdasarkan laporan yang disampaikan melalui SIPT yang nilainya diperoleh melalui perhitungan menggunakan rumusan sebagai berikut:

Cara Perhitungan Dan Formula

= (A+B+C+D+E)/5

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan

B. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan

C. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai

D. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan Rerata

E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Berdasarkan rumusan perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa kualitas hasil pengawasan iklan pada masing-masing komoditi mempengaruhi nilai capaian kinerja pengawasan iklan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kinerja terbaik pada pengawasan iklan untuk setiap komoditi diperlukan untuk mendapatkan nilai capaian kinerja sesuai dengan atau melebihi target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.48 Capaian Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN VS TARGET TW		CAPAIAN NORMALISASI	CAPAIAN VS TARGET TAHUNAN	
	2025			(%)	KATEGORI		(%)	KATEGORI
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	81,09	81,09	99,86	123,15	Tidak dapat disimpulkan	110	123,15	Tercapai/ melampaui

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025

Target yang ditetapkan untuk kinerja pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan pada Balai Besar POM di Padang berupa Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan adalah sebesar 81,09%. Berdasarkan hasil evaluasi yang merupakan gabungan nilai capaian selama tiga bulan (April, Mei, dan Juni) di triwulan II tahun 2025, nilai capaian yang diperoleh sebesar 99,86%. Nilai capaian ini adalah 123,15% bila dibandingkan dengan target, yang jika dinormalisasikan sesuai dengan ketentuan menjadi sebesar 110% dengan memberikan kategori capaian sebagai Tidak dapat disimpulkan.

Rincian capaian hasil pengawasan berdasarkan penilaian data laporan yang disampaikan melalui SIPT setiap bulan selama triwulan II tahun 2025 untuk masing-masing komoditi dapat dilihat pada Tabel 3.23 Data pada tabel menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Padang dapat mencapai target pengawasan yang ditetapkan dengan nilai capaian sebesar 99,78% untuk semua komoditi pada bulan April, dan persentase capaian gabungan sebesar 99,83% pada bulan Mei dan 99,86% di bulan Juni.

Tabel 3. 49 Hasil Perhitungan Realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Triwulan II tahun 2025

Bulan	Target	% Iklan Obat	% Iklan Kos	% Iklan OBA	% Iklan SK	% Iklan PO	% Iklan SF dan PO
April	81,09	100,00	100,00	99,15	100,00	99,78	99,78
Mei	81,09	100,00	100,00	99,32	100,00	99,82	99,83
Juni	81,09	100,00	100,00	99,43	100,00	99,86	99,86

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target akhir Tahun 2025

Realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan II tahun 2025 adalah 99,86%. Nilai realisasi ini berubah secara dinamis pada setiap bulan sesuai dengan hasil evaluasi atas pelaporan pengawasan yang dilaksanakan setiap bulan. Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun 2025 sebesar 81,09%, maka nilai realisasi tersebut memberikan capaian kinerja sebesar 123,15% dengan kategori tercapai/melampaui.

3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 terhadap Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Tabel 3.50 Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan tw II tahun 2025 terhadap tw I tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II 2025	REALISASI TW II 2025	CAPAIAN TW II 2025	TARGET TW I 2025	REALISASI TW I 2025	CAPAIAN TW I 2025
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	81,09	99,86	123,15	81,09	99,78	123,05

Bila dibandingkan dengan realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada Triwulan I tahun 2025 yaitu sebesar 99,78% maka terjadi kenaikan realisasi sebesar 0,08% dan bila dibandingkan dengan persentase capaian Triwulan I tahun 2025 yaitu sebesar 123,05% maka terjadi kenaikan capaian sebesar 0,1%. Peningkatan capaian ini, didukung oleh konsistensi pelaporan yang tepat waktu dan pemenuhan terhadap jumlah pelaporan sesuai dengan target yang ditetapkan.

4. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra 2025-2029

Tabel 3.51 Perbandingan Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI TW I 2025	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89,09	99,86	112,09%	Tercapai/ Melampaui

Target akhir Renstra (Tahun 2029) Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang adalah 89,09%, maka realisasi Triwulan II Tahun 2025 telah mencapai target akhir Renstra 2025-2029 dengan capaian 112,09% termasuk kategori Tercapai/ Melampaui. Hingga saat ini sudah dilakukan reviu terhadap target kinerja untuk IKU Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan termasuk penetapan penyesuaian target untuk tiap tahun selama periode Renstra 2025-2029.

5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Analisis Penyebab Keberhasilan atau peningkatan kinerja :

Pemenuhan parameter yang menjadi kriteria penilaian kinerja Pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sangat menentukan kualitas capaian kinerja. Adanya peningkatan capaian pada triwulan II tahun 2025 ini tidak lepas dari adanya konsistensi pemenuhan terhadap kriteria tersebut terutama pada pemenuhan target jumlah dan ketepatan waktu pelaporan. Salah satu faktor yang turut menjadi pendorong ketepatan waktu pelaporan tersebut adalah dengan adanya perencanaan pelaksanaan kegiatan pengawasan yang baik, sehingga kegiatan pengawasan dapat berjalan dengan lebih efektif.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) :

Salah satu faktor yang dapat menjadi penyumbang tidak maksimalnya kinerja Pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan adalah ketepatan penilaian iklan terutama untuk iklan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi. Pengawasan iklan pada ketiga komoditi tersebut turut menyertakan ketepatan evaluasi iklan sebagai salah satu parameter penilaian. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi petugas dalam melakukan evaluasi atau penilaian kesesuaian iklan perlu ditingkatkan sehingga dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan adanya potensi perbedaan hasil penilaian antara petugas di balai dengan penilaian evaluasi di Pusat.

6. **Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Efektivitas pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sangat erat kaitannya dengan kualitas pelaksanaan pengelolaan anggaran, tata kelola teknologi informasi pendukung, serta manajemen sumber daya manusia. Efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan atau program terkait tersebut akan sangat membantu untuk memberikan kinerja yang terbaik pada pencapaian target pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan.

7. Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.52. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN (RPD) TW II	REALISASI ANGGARAN TW II	% REALISASI ANGGARAN TW II	% CAPAIAN INDIKATOR TW II	% TINGKAT EFISIENSI	KRITERIA
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	7.262.715	3.681.427	50,69	123,15	80	Efisien

Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar. Sebagai capaian output adalah capaian masing-masing IKU sedangkan inputnya adalah pesentase realisasi anggaran yang mendukung IKU terkait dengan menggunakan target anggaran adalah data Rencana Penarikan Dana (RPD) RO terkait. Target anggaran TW II pada IKU ini adalah total dari Rencana Penarikan Dana (RPD) bulan Januari-Juni 2025 yang berasal dari rincian output QIC.004 dengan persentase dukungan anggaran sebesar 3%. Persentase realisasi anggaran TW II adalah perbandingan realisasi anggaran dengan target anggaran TW II sehingga nilai persentase realisasi anggaran dipengaruhi oleh ketepatan dalam menetapkan rencana anggaran dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Maka berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran untuk pencapaian indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan termasuk efisien (80%) karena persentase realisasi anggaran (50,69%) lebih rendah daripada persentase capaian indikator (123,15%). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran untuk kegiatan pengawasan iklan sediaan faramasi dan pangan olahan belum dilaksanakan sesuai dengan rencana namun capaian indikator tercapai sehingga masih terhitung efisien.

PENILAIAN RISIKO TERHADAP SASARAN KEGIATAN MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA UPT

Pada sasaran kegiatan ini terdapat penilaian risiko yang teridentifikasi antara lain :

1. Pada kegiatan pengelolaan sampel terdapat risiko yang mungkin terjadi adalah Identitas dan jumlah sampel yang diserahkan TPS ke Pengujian tidak sesuai dengan data sampel yang tercantum pada SPU, sampel dalam kondisi rusak, tidak ditemukan data sampel dalam SIPT pada akun MT, jumlah sampel yang diterima tidak mencukupi untuk dilakukan pengujian, jenis/kategori sampel yang masuk ke laboratorium tidak sesuai dengan yang tertulis pada SPU, serta jumlah item sampel rutin yang masuk tidak sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.

   Aktifitas pengendalian yang dilakukan adalah verifikasi data sampel di TPS dijalankan sesuai prosedur, melakukan penanganan sampel sesuai prosedur, koordinasi antara TPS, tim sampling dan pengujian. Melakukan penginputan data sesuai kategori dan dilakukan verifikasi oleh TPS, monitoring terhadap kesesuaian jumlah item sampel yang masuk ke laboratorium dengan perencanaan yang telah disusun secara berkala.

2. Pelaksanaan pengujan Tidak sesuai Metoda Analisa/Instruksi Kerja/parameter uji yang ditetapkan pada pedoman sampling, belum tersedianya Metoda Analisa untuk sampel kasus, kerusakan alat laboratorium, personil laboratorium belum kompeten dalam melakukan pengujian sampel, penanganan alat laboratorium belum sesuai SOP, pelaksanaan pengujian sampel rutin dan sampel pihak ketiga tidak dapat diselesaikan tepat waktu, personil Laboratorium terpapar bahan kimia, pengambilan kesimpulan hasil uji yang tidak tepat pada SIPT dan tidak real time serta penginputan hasil uji pada SIPT tidak berjalan lancar.

   Aktifitas pengendalian yang dilakukan adalah melakukan kepenyeliaan kepada petugas oleh penyelia/MT, melakukan konsultasi dengan PPPOMN dalam pelaksanaan pengujian dan mengajukan kepada PPPOMN untuk membuat / Validasi Metoda analisa baru. Melakukan monitoring dan pencatatan pemeliharaan alat oleh penangung jawab alat, Memberikan sosialisasi kepada petugas tentang SOP penanganan alat laboratorium, Koordinasi dengan bagian pengadaan untuk mempercepat proses pengadaan reagen, suku cadang dan suku cadang. Melaksanakan protokol K3 di laboratorium dan pemenuhan kebutukan atribut K3 di Laboratorium.

3. Dalam kegiatan pengawasan sarana produksi dan distribusi uraian peristiwa risiko terdiri dari pembuatan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan Sarana/Fasilitas Produksi, Distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Lainnya belum optimal , Petugas pemeriksa sarana belum memiliki kompetensi yang dibutuhkan sesuai persyaratan, CAPA yang telah dibuat oleh Sarana belum sesuai dengan rekomendasi dan ketentuan yang berlaku, manipulasi hasil pemeriksaan sarana oleh petugas, petugas menerima suap dari pelaku usaha untuk mengurangi / menghilangkan ketidaksesuaian, Pelaporan iklan obat secara SIPT tidak sesuai dengan Timeline yang ditentukan, Conflict of Interest (Benturan Kepentingan) petugas inspeksi terhadap pelaku usaha yang diperiksa, untuk melakukan pemeriksaan, terjadi ketidaktepatan penentuan kriteria MK-TMK dan tindak lanjut.

   Aktifitas pengendalian yang dilakukan adalah : Meningkatkan kompetensi kepada petugas terkait tindak lanjut melalui sosialisasi dan pelatihan, sosialisasi dan desk CAPA kepada pelaku usaha, evaluasi dan monitoting hasil tindak lanjut pemeriksaan sarana oleh ketua tim. Sosialisasi pedoman tindak lanjut melalui pertemuan daring dan pembagian file pedoman tindak lanjut dan melakukan sosialisasi dan diseminasi terkait cara pelaporan iklan yang tidak memenuhi ketentuan. Memperkuat kesadaran dan komitmen petugas melalui pelatihan character building dan sosialisasi SMAP, pencantuman kalimat "Petugas tidak diperkenankan menerima gratifikasi dalam bentuk apapun, pengecekan harga pasar, dan identifikasi personil yang memiliki Benturan kepentingan,

3.1.2 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN II

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGAWASAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 indikator kinerja utama yaitu :

PERSENTASE CAKUPAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diukur dengan membandingkan Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT. Indikator ini mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak

goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar.

Sarana Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah Sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindak lanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan).

Setiap sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dilakukan sampling sejumlah 1 produk dengan mengacu pada Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 2025.

Cara Perhitungan dan Formula

Cara perhitungan Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan =

Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan / Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT X 100%

Keterangan: *Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah total jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti di tahun berjalan, serta dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.

*Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi keseluruhan yang berada di wilayah UPT menggunakan baseline data sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2023 yang memiliki nomor izin edar.

Tabel 3.53 Capaian Persentase Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET TW II	REALISASI	CAPAIAN VS TARGET TW (%)			CAPAIAN VS TARGET TAHUNAN	
		2025			CAPAIAN	NORMALISASI	KATEGORI	(%)	KATEGORI
1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	63	63	100	158,73	110	Tidak dapat disimpulkan	158,73	Tercapai/ terlampaui

1. **Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025**

Realisasi Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan II tahun 2025 adalah 100% bila dibandingkan dengan target 63%, maka capaian yang diperoleh adalah 158,73% dan mendapatkan kategori tidak dapat disimpulkan. Pemeriksaan terhadap sarana pangan fortifikasi telah dilakukan terhadap 3 industri Minyak Goreng Sawit di Kota Padang. Ketiga industri MGS ini telah melaksanakan perbaikan ketidaksesuaian terhadap sarana produksinya dengan dokumen CAPA yang telah dievaluasi dan telah memenuhi ketentuan

Tabel 3.54 Hasil Perhitungan Realisasi Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II tahun 2025

Bulan	Target	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT	% Cakupan Sarprod Fortif
April	3	5	5	100,00
Mei	5	5	5	100,00
Juni	5	5	5	100,00

2. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target akhir Tahun 2025**

Realisasi Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan II tahun 2025 adalah 100% bila dibandingkan dengan target akhir tahun 2025 sebesar 63,%, maka capaian yang diperoleh adalah sebesar 158,73% dengan kategori Tercapai/terlampaui.

3. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 terhadap Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025**

Tabel 3.55 Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tw II tahun 2025 terhadap tw I tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II 2025	REALISASI TW II 2025	CAPAIAN TW II 2025	TARGET TW I 2025	REALISASI TW I 2025	CAPAIAN TW I 2025
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	63,00	100,00	158,73	40,00	40,00	100,00

Bila dibandingkan dengan realisasi Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan I tahun 2025 yaitu sebesar 40% maka terjadi kenaikan realisasi sebesar 60% dan bila dibandingkan dengan persentase capaian Triwulan II tahun 2025 yaitu sebesar 100% maka terjadi kenaikan capaian sebesar 58,73%. Dapat disimpulkan bahwa terdapat kenaikan capaian yang signifikan, hal ini disebabkan oleh tingginya realisasi sedangkan target triwulan II rendah yaitu hanya 63%. Target ini sama dengan target tahunan. Sejumlah 3 sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa di Triwulan 2 adalah sarara produksi Minyak Goreng Sawit kategori besar, hasil pemeriksaan sarana telah menerapkan CPPOB dan dokumen mutu secara konsisten.

4. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra 2025-2029**

Tabel 3.56 Perbandingan Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II -2025 terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI TW I 2025	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	133,33%	Tercapai/ terlampaui

Target akhir Renstra (Tahun 2029) Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang adalah 75%, maka realisasi Triwulan II Tahun 2025 telah mencapai target akhir Renstra 2025-2029 dengan capaian 133,33% termasuk kategori tercapai/melampaui. Untuk itu perlu dilakukan reviu terhadap target Tahun 2025-2029

5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Analisis Penyebab Keberhasilan atau peningkatan kinerja :

a. Pembinaan dan pengawasan dilakukan secara konsisten sehingga mendorong pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan yang berlaku.
b. Pengawalan tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA) hasil pemeriksaan, sarana mendorong pelaku usaha agar mampu melakukan pengawasan secara mandiri.

c. Komunikasi yang baik secara langsung atau melalui media terkait regulasi produksi pangan olahan, sehingga pelaku usaha secara mandiri mampu menerapkan CPPOB secara konsisten

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) :

a. Melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan secara konsisten dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap CAPA atau perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha.
b. Memberikan bimbingan kepada pelaku usaha agar dapat menerapkan CPPOB secara konsisten.
c. Meningkatan kompetensi petugas inspektur pangan dasar dan muda

6. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

a. Konsultasi dan pendampingan kepada pelaku usaha dalam penyusunan tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA) hasil inspeksi.
b. Bimbingan teknis kepada pelaku usaha di sarana produksi pangan agar dapat menerapkan CPPOB secara konsisten.

7. Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.57. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN (RPD) TW II	REALISASI ANGGARAN TW II	% REALISASI ANGGARAN TW II	% CAPAIAN INDIKATOR TW II	% TINGKAT EFISIENSI	KRITERIA
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	2.040.000	1.700.000	83,33	158,73	88	Efisien

Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama

atau lebih besar. Sebagai capaian output adalah capaian masing-masing IKU sedangkan inputnya adalah pesentase realisasi anggaran yang mendukung IKU terkait dengan menggunakan target anggaran adalah data Rencana Penarikan Dana (RPD) RO terkait. Target anggaran TW II pada IKU ini adalah total dari Rencana Penarikan Dana (RPD) bulan Januari-Juni 2025 yang berasal dari rincian output QIC.003 dengan persentase dukungan anggaran sebesar 100%. Persentase realisasi anggaran TW II adalah perbandingan realisasi anggaran dengan target anggaran TW II sehingga nilai persentase realisasi anggaran dipengaruhi oleh ketepatan dalam menetapkan rencana anggaran dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Maka berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran untuk pencapaian indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan termasuk efisien (88%) karena persentase realisasi anggaran (83,33%) lebih rendah daripada persentase capaian indikator (158,73%). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran untuk kegiatan pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi belum dilaksanakan sesuai dengan rencana namun capaian indikator telah tercapai sehingga masih terhitung efisien.

PENILAIAN RISIKO TERHADAP SASARAN KEGIATAN MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA UPT

Risiko yang terdidentifikasi pada sasaran ini adalah CAPA yang telah dibuat oleh Sarana Produksi Pangan Fortifikasi belum sesuai dengan rekomendasi dan ketentuan yang berlaku.
Aktifitas pengendalian yang dilakukan adalah : Sosialisasi dan desk CAPA kepada pelaku usaha.

3.1.3 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN III

MENGUATNYA LABORATORIUM PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN MAKANAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA UPT

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 indikator kinerja utama :

NILAI PEMENUHAN LABORATORIUM PENGUJIAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN UPT SESUAI STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasarkan rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM.

Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1.

- Tingkat 4 Laboratorium Balai Regional.
- Tingkat 3 Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi:
- Tingkat 2 Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota:
- Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota.

Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM terdiri beberapa komponen:

- SKL tingkat 4 dan 3, terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap:
  1) Standar Ruang Lingkup;
  2) Standar Peralatan;
  3) Standar Kompetensi Laboratorium;
  4) Standar Metode yang terverifikasi.
- SKL tingkat 2 dan 1 terdiri 3 komponen yaitu:
  1) Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup;
  2) Standar Peralatan;
  3) Standar Kompetensi Laboratorium.

Untuk loka baru target akan dihitung setelah ada kesiapan sarana prasarana dan SDM (2027).

BBPOM di Padang sebagai laboratorium tingkat 3 dalam Region Medan, tahun 2025 menetapkan target Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium sebesar 77.

Pada penilaian tahun 2025 ini sudah digunakan Tools Monev SKL yang baru untuk tahun 2025-2029 dan Standar Kemampuan Laboratorium berpedoman pada Keputusan Kepala Badan POM Nomor 470 Tahun 2023, tentang Standar Kemampuan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan Balai Pengawas Obat dan Makanan.

A. Standar Ruang Lingkup

Pemenuhan Standar Ruang Lingkup untuk tahun 2025 ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang mengharuskan verifikasi untuk metoda analisa yang akan ditingkatkan kemampuan ujinya. Metoda analisa yang sudah bisa dinyatakan terpenuhi (dihitung penilaiannya) oleh P3OMN jika sudah terverifikasi metoda analisanya.

B. Standar Peralatan Laboratorium.

C. Standar Kompetensi Laboratorium.

Penilaian Standar Kompetensi Pengujian dilakukan dengan matriks yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun 2025 ini, standar kompetensi dinilai berdasarkan personil yang mampu melaksanakan pengujian (penguji pengampu) untuk metoda analisa yang sudah mampu uji berdasarkan jumlanya.

D. Standar Metoda Analisa yang Terverifikasi.

Cara Perhitungan Dan Formula

Cara perhitungan nilai Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM diperoleh dari agregasi sesuai tingkat (46 % x Rata-rata A) + (31 % x Rata-rata B) + (15% x Rata-rata C) + (8 % x Rata-rata D) → (Perhitungan rata-rata UPT Nasional)

A. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 4

B. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 3

C. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 2

D. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 1

Tabel 3.58 Capaian Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium triwulan II tahun 2025

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN VS TARGET TW		CAPAIAN VS TARGET TAHUNAN	
		2025			(%)	KATEGORI	(%)	KATEGORI
1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77	76,8	81,6	106,25	Sangat baik	106,25	Tercapai/ melampaui

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025

Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan II tahun 2025 adalah 81,60% bila dibandingkan dengan target 77%, maka capaian yang diperoleh adalah 106,25% dan mendapatkan kategori sangat baik

Capaian mendapat sangat baik disebabkan target yang direncanakan semuanya terealisasi dengan sangat baik. Hal ini didukung dengan pelaksanaan kegiatan pengujian yang baik dan kerja sama yang solid dari tim pengujian. Rencana pemenuhan SKL meliputi pemenuhan target Standar Ruang Lingkup (SRL) yang direncanakan 2 (dua) MA pada TW 2 ini oleh Laboratorium Kosmetik keduanya sudah terealisasi. Pemenuhan target SRL pada lab kosmetik ini disertai dengan peningkatan kompetensi seluruh personil laboratoriumnya karena dilaksanakan oleh seluruh personil yang ada. Selain itu capaian diperoleh melalui pemenuhan Standar MA yang Terverifikasi, dimana dari 2 target verifikasi MA pada TW 2 ini, terealisasi 1 (satu) Metoda Analisa hasil verifikasi laboratorium OBASKK, sedangkan 1 (satu) MA yang rencananya akan diverifikasi Lab Obat belum bisa dilaksanakan disebabkan pengadaan reagen yang dibutuhkan masih dalam proses.

Capaian target SKL juga didukung oleh pemenuhan standar peralatan laboratorium berupa Timbangan Mikro yang merupakan usulan laboratoeium Pangan yang sudah uji fungsi oleh user dan penyedia. Dari 4 (empat) alat yang masuk dalam standar peralatan yang akan diadakan tahun ini, baru 1 (satu) alat yang sudah dapat digunakan oleh laboratorium pengusul, sedangkan 3 (tiga) alat lainnya sedang proses instalasi oleh teknisi dan penandatangan kontrak oleh PPK.

Tabel 3.59 Hasil Perhitungan Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Triwulan II 2025

SRL	STANDAR PERALATAN	STANDAR KOMPETENSI LABORATORIUM	STANDAR METODE TERVERIFIKASI	NILAI PEMENUHAN SKL TW I
83,6	87	100	22,3	81,6

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target akhir Tahun 2025

Realisasi Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan I tahun 2025 adalah 81,60% bila dibandingkan dengan target akhir tahun 2025

sebesar 77,%, maka capaian yang diperoleh adalah sebesar 105,97% dengan kategori Tercapai/melampaui

3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 terhadap Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Tabel 3.60. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium tw II tahun 2025 terhadap tw I tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II 2025	REALISASI TW II 2025	CAPAIAN TW II 2025	TARGET TW I 2025	REALISASI TW I 2025	CAPAIAN TW I 2025
Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	76,80	81,60	106,25	76,70	81,20	105,87

Bila dibandingkan dengan realisasi Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada Triwulan I tahun 2025 yaitu sebesar 81,60% maka terjadi kenaikan realisasi sebesar 0,4% dan bila dibandingkan dengan persentase capaian Triwulan II tahun 2025 yaitu sebesar 94,99% maka terjadi kenaikan capaian sebesar 0,38%, maka dapat disimpulkan terdapat kenaikan realisasi pada triwulan II tahun 2025.

4. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra 2025-2029**

Tabel 3.61 Perbandingan Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI TW I 2025	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	85,90	81,60	94,99%	Akan tercapai

Target akhir Renstra (Tahun 2029) Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium di Wilayah Kerja

Balai Besar POM di Padang adalah 85,90%, maka realisasi Triwulan II Tahun 2025 belum mencapai target akhir Renstra 2025-2029 dengan capaian 94,99% termasuk kategori Akan tercapai. Untuk itu diperlukan upaya-upaya dari tim laboratorium pengujian untuk merencanakan target peningkatan aspek SKL seperti SRL, Standar Kompetensi, Standar Peralatan dan Verifikasi Metoda Analisa. Masing-masing laboratorium masih mempunyai target aspek SKL yang belum terpenuhi sehingga harus direncanakan setiap tahunnya sampai akhir Renstra 2029. Perencanaan dibuat tidak hanya untuk setiap aspek SKL yang belum tercapai, tetapi juga diikuti dengan penyusunan perencanaan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk memenuhi target SKL yang telah disusun seperti reagen, suku cadang dan peralatan laboratorium, agar memudahkan realisasi SKL dari rencana yang sudah disusun.

5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

   Analisis Penyebab Keberhasilan atau peningkatan kinerja :

   Tercapainya target SKL yang sudah direncanakan pada TW 2 ini dengan hasil yang telah melebihi target diperoleh atas kerja sama dan komitmen tim laboratorium pengujian untuk melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan secara tepat waktu dan realisasi kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan.

   Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) :

   Perencanaan target SKL per triwulan setiap tahunnya disusun berdasarkan kemampuan setiap laboratorium harus diiringi perencanaan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk mencapainya.

6. **Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

   Realisasi target SKL diupayakan tercapai dengan hasil sesuai perencanaan yang telah ditetapkan berdasarkan kemampuan laboratorium setiap tahunnya yang dituangkan per triwulan dengan diiringi perencanaan sarana prasarana seperti reagen, suku cadang dan peralatan laboratorium yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatannya.

7. Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.62. Efisiensi Anggaran pada Indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN (RPD) TW II	REALISASI ANGGARAN TW II	% REALISASI ANGGARAN TW II	% CAPAIAN INDIKATOR TW II	% TINGKAT EFISIENSI	KRITERIA
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1.130.331.995	802.143.240	70,97	106,25	92	Efisien

Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar. Sebagai capaian output adalah capaian masing-masing IKU sedangkan inputnya adalah pesentase realisasi anggaran yang mendukung IKU terkait dengan menggunakan target anggaran adalah data Rencana Penarikan Dana (RPD) RO terkait. Target anggaran TW II pada IKU ini adalah total dari Rencana Penarikan Dana (RPD) bulan Januari-Juni 2025 yang berasal dari rincian output PDD.001 dan RAB.001 dengan persentase dukungan anggaran sebesar 100%. Persentase realisasi anggaran TW II adalah perbandingan realisasi anggaran dengan target anggaran TW II sehingga nilai persentase realisasi anggaran dipengaruhi oleh ketepatan dalam menetapkan rencana anggaran dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Maka berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran untuk pencapaian indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium termasuk efisien (90%) karena persentase realisasi anggaran (70,97%) lebih rendah daripada persentase capaian indikator (106,25%). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran untuk kegiatan pemenuhan Laboraturium Pengujian sesuai Standar Kemampuan Laboratorium belum dilaksanakan sesuai dengan rencana namun capaian indikator telah tercapai sehingga masih terhitung efisien. Hal signifikan penyebab relaisasi angagran tidak sesuai rencana adalah pada pengadaan alat laboratorium (upgrade HPLC) yang direncanakan dilakukan pembayaran pada bulan Mei (172 Juta) belum dapat dilaksanakan karena software dan hardware belum datang (produk impor) sehingga belum dapat dilakukan pembayaran.

PENILAIAN RISIKO SASARAN NILAI PEMENUHAN LABORATORIUM PENGUJIAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN UPT SESUAI STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM

Risiko yang teridentifikasi dari sasaran kegiatan ini adalah : ketersediaan sarana prasarana laboratorium seperti reagen, suku cadang, peralatan laboratorium sering menjadi kendala dalam realisasi perencanaan target SKL. Untuk Standar Ruang Lingkup dan MA terverifikasi pengujian juga dipengaruhi oleh ketersediaan sampel yang ada di peredaran yang bisa disampling. Aktifitas pengendalian yang dilakukan adalah : Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan, usulan permintaan baku pembanding, penyusunan renlak sampling yang tertuang dalam PoA regionalisasi laboratorium dengan mempertimbangkan metoda analisa pengujian sampel yang akan dipenuhi kemampuan uji dan kompetensinya serta verifikasi metoda analisanya.

3.1.4 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN IV

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 4 indikator kinerja utama. Hasil capaian rata-rata keempat indikator tersebut adalah 105,38 dan setelah dinormalisasi menjadi 103,71% Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, dan persentase capaian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.63 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan IV

NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025	TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN THD TARGET JUNI (%)	CAPAIAN THD TARGET TAHUNAN (%)	CAPAIAN NORMALISASI (%)	KATEGORI
SS4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai	88,00	88,00	87,37	99,28	99,28	99,28	Baik
		2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Sekolah	14,00	47,50	47,50	100,00	47,50	100,00	Baik
		3	Jumlah desa pangan aman	Desa	6,00	45,00	47,50	105,56	47,50	105,56	Sangat Baik
		4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Pasar	1,00	60,00	70,00	116,67	70,00	110,00	Tidak dapat disimpulkan

Penjelasan mengenai capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke-IV sebagai berikut :

A. TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilaksanakan berdasarkan penerimaan audiens KIE terutama pada aspek sumber/narasumber/petugas, konten/informasi, pemahaman audiens dan manfaat KIE. Tingkat efektifitas KIE dihitung dengan menggunakan nilai indeks.

Jenis kegiatan KIE terbagi menjadi KIE Langsung/ Tatap Muka dan KIE Media (Tidak Langsung).

KIE Langsung/ Tatap Muka meliputi:

1. KIE bersama Tokoh Masyarakat,
2. Sosialisasi/ Penyuluhan,
3. Seminar, Webinar,
4. Talkshow,
5. Penyebaran informasi pada kegiatan Car Free Day (CFD) dan
6. Pameran.

KIE Media meliputi:

1. Media Sosial melalui kanal media sosial official Balai Besar POM di Padang antara lain: Facebook, Instafgram, X, Tiktok, Whatsapp dan Youtube.
2. KIE Non Media Sosial melalui media digital, media online, media elektronik, media cetak, media luar ruang.

Pengukuran dilakukan melalui aplikasi https://evaluasikie.pom.go.id yang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari s/d 30 Juni 2025. Survei dilakukan secara mandiri oleh petugas Balai Besar POM di Padang menggunakan instrumen yang terdiri dari 2 (dua) kuesioner yaitu: kuesioner KIE tatap muka dan kuesioner KIE media. Responden survei efektifitas KIE tatap muka yaitu peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan. Sedangkan responden survei efektifitas KIE media adalah masyarakat yang pernah mengakses saluran media KIE Balai Besar POM di Padang atau menerima produk informasi Balai Besar POM di Padang. Pengukuran dilakukan dengan 4 (empat) indikator pembentuk indeks efektivitas KIE, yaitu:

1. Sumber atau Narasumber KIE
2. Konten atau Informasi KIE
3. Pemahaman Audiens KIE
4. Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Cara Perhitungan Dan Formula

Indeks efektivitas KIE dihitung secara otomatis melalui rumus/ formula yang ditetapkan dan dapat dipantau melalui dashboard utama aplikasi https://evaluasikie.pom.go.id dengan akun Balai Besar POM di Padang. Cara perhitungan Indeks Efektifitas KIE dari rata-rata tertimbang (weighted mean score) sejumlah dimensi yang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari s/d 30 Juni 2025 terhadap responden yang pernah mengikuti KIE tatap muka dan/atau menerima KIE media.

Tabel 3.64 Capaian Indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan TW II Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	TARGET TW II	REALISASI	CAPAIAN VS TARGET TW		CAPAIAN VS TARGET TAHUNAN	
				(%)	KATEGORI	(%)	KATEGORI
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	88	88	87,37	99,28	Baik	99,28	Akan tercapai

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025

Total responden survei efektifitas KIE pada Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 309 orang yang terdiri dari 248 orang responden survei KIE tatap muka dan 61 orang responden survei KIE media. Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan II tahun 2025 adalah 87,37 dari target sebesar 88 sehingga capaian yang diperoleh sebesar 99,28% dengan kategori Baik.

Tabel 3.65 Perhitungan realisasi Tingkat Efektifitas KIE Triwulan II Tahun 2025

RESPONDEN				INDEKS			
UNIT PELAKSANA TEKNIS	Tatap Muka	Media	Total Responden	INDEKS TATAP MUKA	INDEKS MEDIA	INDEKS KIE	KATEGORI INDEKS
BBPOM Padang	248	61	309	86,34	88,39	87,37	Efektif

Berdasarkan hasil survei efektifitas KIE Triwulan II Tahun 2025, diperoleh capaian indeks efektifitas KIE sebesar 87,37 dengan kategori Efektif dengan rincian capaian indeks efektifitas KIE tatap muka sebesar 86,34 (kategori efektif) dan capaian indeks efektifitas KIE media dengan nilai lebih tinggi yaitu sebesar 88,39 (kategori efektif).

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target akhir Tahun 2025

Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan II tahun 2025 adalah 87,37, bila dibandingkan dengan target sebesar 88, maka capaian yang diperoleh sama yaitu sebesar 99,28% dengan kategori akan Tercapai.

Tahun 2025 merupakan periode awal menyusunan Restra 2025-2029 dengan target yang berbeda dari tahun sebelumnya. Untuk target tahun 2025 sebesar 88 dengan strategi yang tepat diharapkan dapat tercapai. Pada priode ini pelaksanaan KIE diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat serta mendorong sikap dan prilaku positif dalam menerapkan praktek keamanan Obat dan Makanan yang aman dalam kehidupan sehari-hari. KIE menggunakan Model Komunikasi *Source-Massage-Channel-Receiver* (SMCR) dan *Teori Taksonomi Bloom* .

3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 terhadap Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Tabel 3.66 Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan TW II Tahun 2025 terhadap TW I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II 2025	REALISASI TW II 2025	CAPAIAN TW II 2025	TARGET TW I 2025	REALISASI TW I 2025	CAPAIAN TW I 2025
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88,00	87,37	99,28	88,00	86,17	97,92

Bila dibandingkan dengan realisasi Tingkat Efektifitas KIE pada Triwulan I tahun 2025 yaitu sebesar 86,17 maka terjadi kenaikan realisasi sebesar 1,2% dan bila dibandingkan dengan persentase capaian Triwulan II tahun 2025 yaitu sebesar 97,92% maka terjadi kenaikan capaian sebesar 1,36 %. Dapat disimpulkan bahwa telah terdapat peningkatan target dan dengan program-program yang direncakan diharapkan target triwulan berikutnya dapat tercapai.

4. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra 2025-2029**

Tabel 3.67 Perbandingan Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI TW I 2025	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,52	87,37	95,47%	Akan tercapai

Target akhir Renstra (Tahun 2029) Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang adalah 91,52, maka realisasi Triwulan II Tahun 2025 belum mencapai target akhir Renstra 2025-2029 dengan capaian 95,47% termasuk kategori akan tercapai. Untuk itu diperlukan intervensi KIE yang lebih terarah dan adaptif agar pesan-pesan KIE tidak hanya tersampaikan dengan baik, tetapi juga benar-benar dapat dipahami dan diterapkan oleh masyarakat.

5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja:

Belum tercapainya target Indeks Efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Padang

pada Triwulan II Tahun 2025 di sebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

a. Masih ada peserta yg belum dapat mengingat pesan KIE yang disampaikan dan masih terdapat peserta belum dapat menjelaskan kembali materi KIE yang sudah diterima. Indikator yang memiliki kontribusi terendah terhadap indeks efektifitas KIE tatap muka adalah pemahaman audiens (83.216/ kategori efektif) dan terhadap indeks efektifitas KIE Media juga sama adalah pemahaman audiens (84.426/ kategori efektif).
b. Peserta KIE bersama Tomas yang sangat beragam dengan karakteristik demografi, latar belakang pendidikan, umur dan sosial budaya yang berbeda-beda
c. Keterbatasan kemampuan narasumber dalam memahami karakteristik peserta yang sangat beraga
d. Terbatasnya media KIE yang dapat digunakan untuk pelaksanaan KIE secara masif karena terdampak efisiensi anggaran
e. Terdapat efisiensi anggaran sehingga kegiatan belum bisa dilaksanakan secara optimal.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) :

Untuk mencapai target Indeks Efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Padang

sebesar 88.00, beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain:

a. Mengoptimalkan KIE melalui media sosial.
b. Meningkatkan kerja sama dengan stakeholder terkait dalam menyebarluaskan informasi keamanan Obat dan Makanan.
c. Meningkatkan kualitas materi yang akan disampaikan dengan melalukan reviu terhadap materi KIE.
d. Meningkatkan kompetensi petugas.
e. Meningkatkan interaksi dengan peserta KIE dengan mengadakan: kuis, tanya jawab, dsb.
f. Meningkatkan pemahaman peserta dengan menggunakan alat peraga seperti: contoh produk, poster, brosur, dll

6. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

a. Pelaksanaan KIE dan Realisasi nilai indeks efektifitas KIE Balai Besar POM di Padang pada Triwulan II Tahun 2025 belum optimal karena terjadinya efisiensi anggaran sehingga dilakukan penyesuaian perencanaan kegiatan.
b. KIE yang telah dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2025 antara lain:
   - KIE bersama Tokoh Masyarakat Ade Rizki Pratama sebanyak 8 kali pada Triwulan II Tahun 2025.
   - KIE Cegah Stunting di Kelurahan Koto Panjang Kota Solok pada tanggal 24 April 2025.
   - Penyebaran Informasi pada kegiatan *Car Free Day* bareng AoC pada 27 April 2025.
   - KIE Cegah Stunting di Nagari Sikabu Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 5 Mei 2025.
   - Penyebaran Informasi dalam rangka menerima Kunjungan SDIT Dambaan Ummat Kabupaten Solok pada tanggal 21 Mei 2025.
   - Penyebaran Informasi pada kegiatan *Car Free Day* bareng AoC dalam rangka "JAWARA" pada 25 Mei 2025.

- Penyebaran Informasi dalam rangka menerima Kunjungan Mahasiswa STIFARM Padang pada tanggal 13 Juni 2025.
- Penyebaran Informasi pada kegiatan *Car Free Day* bareng AoC dalam rangka memperingati "Hari Kemanan Pangan Sedunia" pada 22 Juni 2025.
- KIE melalui Media Sosial setiap hari (Facebook, Instagram, X, Tiktok, Whatsapp dan Youtube)
- KIE melalui Non Media Sosial (Website, Leaflet/Brosur, Poster, Running Teks dan Videotron).
- KIE Tatap Muka melalui layanan pengaduan dan informasi serta PPID pada Balai Besar POM di padang, Mal Pelayanan Publik Kota Padang dan Mal Pelayanan Publik Kota Pariaman.

7. Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.68. Efisiensi Anggaran pada Indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN (RPD) TW II	REALISASI ANGGARAN TW II	% REALISASI ANGGARAN TW II	% CAPAIAN INDIKATOR TW II	% TINGKAT EFISIENSI	KRITERIA
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	319.753.997	513.915.125	160,72	99,28	-	Tidak Efisien

Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar. Sebagai capaian output adalah capaian masing-masing IKU sedangkan inputnya adalah pesentase realisasi anggaran yang mendukung IKU terkait dengan menggunakan target anggaran adalah data Rencana Penarikan Dana (RPD) RO terkait. Target anggaran TW II pada IKU ini adalah total dari Rencana Penarikan Dana (RPD) bulan Januari-Juni 2025 yang berasal dari rincian output BDC.001 dan BMB.001 dengan persentase dukungan anggaran sebesar 100%. Persentase realisasi anggaran TW II adalah perbandingan realisasi anggaran dengan target anggaran TW II sehingga nilai persentase realisasi anggaran dipengaruhi oleh ketepatan dalam menetapkan rencana anggaran dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Maka berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran untuk pencapaian indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi

dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT termasuk tidak efisien karena persentase realisasi anggaran (160,72%) lebih tinggi daripada persentase capaian indikator (99,28%). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran untuk kegiatan KIE telah dilaksanakan melebihi dari rencana terlihat dari realisasi anggaran lebih besar dari rencana penarikan dana. Ketidaktepatan dalam hal perencaaan dan pelaksanaan anggaran untuk kegiatan KIE menyebabkan indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT tidak efisien dan capaian indikator juga belum tercapai. Penyebab signifikan adalah pelaksanaan kegiatan KIE Tomas yang dilaksanakan pada bulan Mei dengan realisasi (287 Juta) lebih besar dari rencana (128 Juta) karena awalnya untuk pelaksanaan kegiatan KIE Tomas direncanakan untuk 2 titik (kali) kegiatan namun terlakasana 4 titik (kali) kegiatan).

B. JUMLAH SEKOLAH YANG MELAKSANAKAN PEMBUDAYAAN KEAMANAN PANGAN

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah/madrasah. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah, dan Pengawalan sekolah yang sudah diintervensi.

Cara perhitungan dan formula

Dihitung dari jumlah sekolah yang memiliki kategori Sekolah yang melakukan pembudayaan keamanan pangan. Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan program berdasarkan bobot masing-masing :

- Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah = 25%
- Sosialisasi Keamanan Pangan = 20%
- Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah = 25%
- Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan = 25%
- Pengawalan = 5%

Tabel 3.69. Capaian Indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	TARGET TW II	REALISASI	CAPAIAN VS TARGET TW		CAPAIAN VS TARGET TAHUNAN	
				(%)	KATEGORI	(%)	KATEGORI
Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	14	47,5%	47,5%	100.00	Baik	47,5	Perlu upaya keras

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025

Realisasi Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan II tahun 2025 adalah 47,5% dari target sebesar 47,5% sehingga capaian yang diperoleh sebesar 100% dengan kategori Baik. Pada Triwulan II dengan target 47,5% untuk kegiatan Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah, Sosialisasi Keamanan Pangan Sekolah dan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah. Pelaksanaan kegiatan program baru dapat dilakukan untuk 7 sekolah/madrasah dari target awal 14 sekolah/madrasah karena kondisi efisiensi anggaran sehingga persentase tahapan program Sosialisasi Keamanan Pangan dan Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan baru dapat dihitung setengah dari tahapan yang telah dilaksanakan dengan bobot total capaian 47,5%.

Tabel 3.70. Progres IKU Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan Triwulan I 2025 :

Bulan	Target	Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	Sosialisasi Keamanan Pangan (Sesuai Batch)	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah (Sesuai Batch)	Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Pengawalan	Realisasi
April	25	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Mei	47,5	25,00	10,00	12,50	0,00	0,00	47,50
Juni	47,5	25,00	10,00	12,50	0,00	0,00	47,50

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 terhadap Target akhir Tahun 2024

Realisasi Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan pada Triwulan I tahun 2025 adalah 47,5%, bila dibandingkan dengan target tahunan sebesar 14 (100%) maka diperoleh capaian sebesar 47,5% kategori Perlu upaya keras karena pembobotan bersifat kumulatif sehingga realisasi capaian target 100% dapat diperoleh pada akhir tahun setelah semua tahapan program terlaksana sesuai target.

3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 terhadap Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Tabel 3.71. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan tw II tahun 2025 terhadap tw I tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II 2025	REALISASI TW II 2025	CAPAIAN TW II 2025	TARGET TW I 2025	REALISASI TW I 2025	CAPAIAN TW I 2025
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	47,50	47,50	100,00	5,00	5,00	100,00

Bila dibandingkan dengan realisasi Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan pada Triwulan I tahun 2025 yaitu sebesar 5% maka terjadi kenaikan realisasi sebesar 42,50% dan bila dibandingkan dengan persentase capaian Triwulan II tahun 2025 yaitu sebesar 100% maka dapat disimpulkan target triwulan II dapat tercapai sesuai target.

4. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra 2025-2029**

Tabel 3.72 Perbandingan Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI TW I 2025	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	21	47,5%	-	-

Target akhir Renstra (Tahun 2029) Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang adalah 21, maka realisasi

Triwulan II Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan target akhir Renstra 2025-2029 karena target bulanan berupa progress dari tahapan yang telah dilaksanakan, sedangkan target Renstra adalah jumlah sekolah intervensi yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Analisis Penyebab Keberhasilan atau peningkatan kinerja :

a. Melakukan Audiensi dan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait dengan pelaksanaan program yang dilanjutkan dengan Advokasi Keamanan Pangan terpadu untuk menjalin komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan program.
b. Menjalin komunikasi yang baik dengan dinas terkait seperti Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok dan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Solok dalam pemilihan sekolah/madrasah yang akan diintervensi.
c. Tahapan program yang melibatkan perwakilan dinas terkait diharapkan dapat sekaligus mengawal pelaksanaan program.
d. Pembentukan grup whatsapp sebagai salah satu media komunikasi kepada sekolah/madrasah intervensi, dinas terkait dan pendampingan langsung dari petugas BBPOM di Padang.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) :

a. Koordinasi dan komunikasi yang baik senantiasa diupayakan kepada Pemerintah Daerah, Dinas terkait dan sekolah/madrasah intervensi agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
b. Pengawalan pelaksanakan program senantiasa dapat ditingkatkan agar kader keamanan pangan sekolah dapat melaksanakan sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas sekolah/madrasah.
c. Menggali potensi dan inovasi sekolah yang nantinya dapat bersinergi dengan program sekolah yang membudayakan keamanan pangan.

6. **Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Target Triwulan II dapat tercapai sesuai dengan target melalui hal berikut :

a. Terlaksananya Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah pada bulan April 2025 menjadi titik awal pelaksanaan program yang dihadiri oleh pimpinan daerah yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Kab. Solok beserta perwakilan OPD terkait dan sekolah yang diintervensi.
b. Sosialisasi keamanan pangan dilakukan secara daring (zoom meeting) yang dihadiri oleh perwakilan sekolah intervensi (kepala sekolah, guru dan siswa) dan didampingi oleh Dinas Pendidikan Kab. Solok, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Solok Raya dan Kantor Kementrian Agama Kab. Solok.
c. Pelaksanaan tahapan selanjutnya Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah yang dilaksanakan secara luring di Aula SMAN 2 Gunung Talang yang diikuti oleh 3 orang peserta dari setiap sekolah/madrasah intervensi.
d. Pemberian paket edukasi keamanan pangan berupa banner, poster, buku, permainan ular tangga keamanan pangan, celemek, topi, penjepit dan bahan ajar berupa materi dan video edukasi diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh sekolah/madrasah intervensi dalam melakukan sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas sekolah.
e. Dalam setiap tahapan kegiatan, pelaksanaan kegiatan selalu melibatkan dinas terkait sehingga pelaksanaan program diharapkan dapat dikawal dengan baik.

7. **Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja**

Tabel 3.73. Efisiensi Anggaran pada Indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN (RPD) TW II	REALISASI ANGGARAN TW II	% REALISASI ANGGARAN TW II	% CAPAIAN INDIKATOR TW II	% TINGKAT EFISIENSI	KRITERIA
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	42.770.000	18.064.300	42,24	100	84	Efisien

Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar. Sebagai capaian output adalah capaian masing-masing IKU sedangkan inputnya

adalah pesentase realisasi anggaran yang mendukung IKU terkait dengan menggunakan target anggaran adalah data Rencana Penarikan Dana (RPD) RO terkait.

Target anggaran TW II pada IKU ini adalah total dari Rencana Penarikan Dana (RPD) bulan Januari-Juni 2025 yang berasal dari rincian output QDB.001 dengan persentase dukungan anggaran sebesar 100%. Persentase realisasi anggaran TW II adalah perbandingan realisasi anggaran dengan target anggaran TW II sehingga nilai persentase realisasi anggaran dipengaruhi oleh ketepatan dalam menetapkan rencana anggaran dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Maka berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran untuk pencapaian indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan termasuk efisien (84%) karena persentase realisasi anggaran (42,24%) lebih rendah daripada persentase capaian indikator (100%). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran untuk kegiatan sekolah belum dilaksanakan sesuai dengan rencana namun karena persentase capaian indikator lebih tinggi daripada persentase realisasi anggaran sehingga masih terhitung efisien.

C. JUMLAH DESA PANGAN AMAN

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Monitoring dan Evaluasi

Perhitungan dan formula :

Dihitung berdasarkan jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan dan memenuhi kategori Desa Pangan Aman

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan program berdasarkan bobot masing-masing :

- Advokasi = 25%

- Pelatihan Kader = 25%
- Bimbingan Teknis Komunitas = 20%
- Monitoring dan Evaluasi = 20%
- Pengawalan = 10%

Tabel 3.74. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Desa Pangan Aman Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET TW II	REALISASI	CAPAIAN VS TARGET TW		CAPAIAN VS TARGET TAHUNAN	
	2025			(%)	KATEGORI	(%)	KATEGORI
Jumlah desa pangan aman	6	45%	47,5%	105,56	Baik	47,5	Perlu upaya keras

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II tahun 2025

Realisasi Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 47,5%, dengan target 45%, sehingga capaian yang diperoleh pada Triwulan II tahun 2025 sebesar 100,56% dengan kategori baik.

Pada Triwulan II dengan target 47,5% dapat tercapai dengan baik melalui kegiatan Advokasi Keamanan Pangan, Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa dan Bimbingan Teknis Komunitas Keamanan pangan Desa/nagari. Pelaksanaan kegiatan program baru dapat dilakukan untuk 3 desa/nagari dari target awal 6 desa/nagari karena kondisi efisiensi anggaran sehingga persentase tahapan program pelatihan kader keamanan pangan dan bimbingan teknis komunitas keamanan pangan desa baru dapat dihitung setengah dari tahapan yang telah dilaksanakan dengan bobot total capaian 47,5%.

Tabel 3.75 Progres IKU Jumlah Desa Pangan Aman Triwulan II Tahun 2025

Bulan	Target	Advokasi	Pelatihan kader	Bimtek komunitas	Monev	Pengawalan	Realisasi
April	25	25,00	0,00				25,00
Mei	37,5	25,00	12,50				37,50
Juni	47,5	25,00	12,50	10,00	0,00	0,00	47,50

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target akhir Tahun 2025

Realisasi Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan II tahun 2025 adalah 47,5 %, bila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 100% (6 desa), maka capaian yang diperoleh sebesar 47,5% dengan kategori Perlu upaya keras. Program desa pangan aman bersifat kumulatif sehingga berdasarkan bobot tahapan program sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan diperkirakan akan dapat dicapai pada triwulan berikutnya. Efisiensi anggaran yang dilakukan berimbas pada jumlah desa pangan aman yang diintervensi menjadi 3 desa dari 6 desa yang ditargetkan.

3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 terhadap Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Tabel 3.76 Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Jumlah desa pangan aman tw II tahun 2025 terhadap tw I tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II 2025	REALISASI TW II 2025	CAPAIAN TW II 2025	TARGET TW I 2025	REALISASI TW I 2025	CAPAIAN TW I 2025
Jumlah desa pangan aman	45,00	47,50	105,56	5,00	5,00	100,00

Bila dibandingkan dengan realisasi Jumlah desa pangan aman pada Triwulan I tahun 2025 yaitu sebesar 5% maka terjadi kenaikan realisasi sebesar 42,5% dan bila dibandingkan dengan persentase capaian Triwulan I tahun 2025 yaitu sebesar 100% maka terjadi kenaikan capaian sebesar 5,56%, dapat disimpulkan terjadi peningkatan progress dan realisasi tercapai sesuai target.

4. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra 2025-2029**

Tabel 3.77 Perbandingan Jumlah desa pangan aman Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI TW I 2025	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Jumlah desa pangan aman	10	47,5%	-	-

Target akhir Renstra (Tahun 2029 Jumlah desa pangan aman di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang adalah 10, maka realisasi Triwulan II Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan target akhir Renstra 2025-2029 karena target bulanan berupa progress dari tahapan yang telah dilaksanakan, sedangkan target Renstra adalah jumlah desa pangan aman yang diintervensi.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Analisis Penyebab Keberhasilan atau peningkatan kinerja :

a. Melakukan Audiensi dan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait dengan pelaksanaan program yang dilanjutkan dengan Advokasi Keamanan Pangan terpadu untuk menjalin komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan program.
b. Menjalin komunikasi yang baik dengan dinas terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari dan Dinas Kesehatan Kabupaten Solok dalam pemilihan desa/nagari yang akan diintervensi.
c. Kondisi efisiensi anggaran yang berimbas pada pelaksanaan program desa pangan aman seperti jumlah kader yang dilatih lebih sedikit dibanding pelaksanaan tahun sebelumnya. Melalui jumlah yang tidak banyak ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak keamanan pangan di nagari masing-masing.
d. Pembentukan grup whatsapp sebagai salah satu media komunikasi kepada tim dan kader nagari pangan aman yang di-intervensi, dinas terkait dan pendampingan langsung dari petugas BBPOM di Padang.
e. Melibatkan kader keamanan pangan nagari dalam pembuatan konten edukasi sehingga menjadi motivasi kader dalam melaksanakan sosialisasi keamanan pangan di nagari masing-masing.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) :

a. Mendorong tim keamanan pangan nagari dapat melaksanakan sosialisasi keamanan pangan secara mandiri dengan memanfaatkan kegiatan-kegiatan nagari yang dapat menyelipkan penyampaian keamanan pangan kepada masyarakat agar informasi keamanan pangan dapat terus menyebar ke seluruh masyarakat.
b. Terus melakukan pengawalan dan pendampingan kepada tim dan kader keamanan pangan nagari untuk dapat melakukan sosialisasi keamanan pangan.

c. Mendorong tim dan kader keamanan pangan agar dapat melaporkan kepada BBPOM Padang setiap pelaksanaan sosialisasi keamanan pangan secara mandiri.

6. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

a. Target Triwulan II dapat tercapai melalui hal berikut :

b. Terlaksananya Advokasi Keamanan Pangan pada bulan April 2025 menjadi titik awal pelaksanaan program yang dihadiri oleh pimpinan daerah yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Kab. Solok beserta perwakilan OPD terkait dan nagari yang diintervensi. Melalui kegiatan Advokasi ini juga dilakukan pemberian Apresiasi kepada 2 nagari yang ada di Kabupaten Solok yang masih konsisten dalam penerapan keamanan pangan di nagari yaitu nagari Cupak dan Paninggahan. Pemberian apresiasi ini diharapkan dapat menumbuhkan motivasi kepada nagari lainnya untuk dapat menerapkan keamanan pangan.

c. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa/Nagari dilaksanakan secara luring dengan jumlah kader yang lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya (5 orang kader/nagari) yang bertempat di Aula Nagari Batang Barus pada bulan Mei 2025. Nagari yang diintervensi adalah Nagari Batang Barus, Aia Batumbuak dan Koto Gaek Guguak. Kepada setiap kader dibekali dengan paket edukasi keamanan pangan berupa flipchart keamanan pangan dan tas yang diharapkan dapat digunakan sebagai media yang dapat digunakan untuk edukasi kepada masyarakat karena mempertimbangkan kondisi beberapa nagari yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses internet.

d. Kader keamanan pangan nagari berkolaborasi dengan tim BBPOM Padang membuat konten edukasi keamanan pangan yang diposting melalui media sosial instagram, tiktok, facebook, dan X.

e. Pelaksanaan tahapan selanjutnya Bimbingan Teknis Komunitas Keamanan Pangan Desa/nagari yang dilaksanakan langsung di masing-masing nagari pada bulan Juni 2025. Kegiatan dihadiri oleh 20 orang komunitas dan kader keamanan pangan menyampaikan materi yang telah dibekali sebelumnya pada pelatihan kader. Komunitas yang hadir diberikan produk informasi keamanan pangan berupa leaflet/brosur edukasi keamanan pangan, cek KLIK dan cegah resistensi antimikroba.

7. Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.78. Efisiensi Anggaran pada Indikator Jumlah desa pangan aman

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN (RPD) TW II	REALISASI ANGGARAN TW II	% REALISASI ANGGARAN TW II	% CAPAIAN INDIKATOR TW II	% TINGKAT EFISIENSI	KRITERIA
Jumlah desa pangan aman	28.935.000	23.643.000	81,71	105,56	95	Efisien

Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar. Sebagai capaian output adalah capaian masing-masing IKU sedangkan inputnya adalah pesentase realisasi anggaran yang mendukung IKU terkait dengan menggunakan target anggaran adalah data Rencana Penarikan Dana (RPD) RO terkait.

Target anggaran TW II pada IKU ini adalah total dari Rencana Penarikan Dana bulan Januari-Juni yang berasal dari rincian output QDB.002 dengan persentase dukungan anggaran sebesar 100%. Persentase realisasi anggaran TW II adalah perbandingan realisasi anggaran dengan target anggaran TW II sehingga nilai persentase realisasi anggaran dipengaruhi oleh ketepatan dalam menetapkan rencana anggaran dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Maka berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran untuk pencapaian indikator Jumlah desa pangan aman termasuk efisien (95%) karena persentase realisasi anggaran (81,71%) lebih rendah daripada persentase capaian indikator (105,56%). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran untuk kegiatan desa belum dilaksanakan sesuai dengan rencana namun karena persentase capaian indikator lebih tinggi daripada persentase realisasi anggaran sehingga masih terhitung efisien.

D. JUMLAH PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD atau melalui mekanisme lainnya, sebagai tempat pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan acuan yang meliputi advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi dan/atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar

dari sisi *supply* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan dapat berupa advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.

Cara Perhitungan dan formula

Dihitung dari jumlah pasar yang mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas.

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan program berdasarkan bobot masing-masing :

- Forum Advokasi Komitmen Pemda = 25%
- Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar = 25%
- Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Komunitas Pasar = 20%
- Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring Evaluasi = 20%
- Pengawalan = 10%

Tabel 3.79 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Triwulan II Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET TW II	REALISASI	CAPAIAN VS TARGET TW (%)			CAPAIAN VS TARGET TAHUNAN	
	2024			CAPAIAN	NORMALISASI	KRITERIA	(%)	KATEGORI
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	60%	70%	116,67	110	Tidak dapat disimpulkan	70	Perlu Upaya keras

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2024

Realisasi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 70% dari target sebesar 60% sehingga capaian yang diperoleh pada Triwulan II tahun 2025 sebesar 116,67% dengan kategori tidak dapat disimpulkan.

Pada Triwulan II dengan target 70% dapat tercapai dengan baik melalui kegiatan Forum Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor pasar, Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar, Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Komunitas Pasar serta Pengawalan Pasar yang telah diintervensi sebelumnya.

Tabel 3.80. Progres IKU Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas TW II - 2025

Bulan	Target	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	Pengawalan	Realisasi
April	25	25,00	0,00				25,00
Mei	50	25,00	25,00				50,00
Juni	70	25,00	25,00	15,00		5,00	70,00

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target akhir Tahun 2025

Realisasi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan II tahun 2025 adalah 70% bila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 100% (1 pasar) maka capaian yang diperoleh sebesar 70% dengan kategori perlu upaya keras.

Realisasi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas bersifat kumulatif untuk semua tahapan program yang telah dilaksanakan, maka target akhir tahun sebesar 100% akan tercapai setelah semua tahapan kegiatan selesai dilaksanakan.

3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 terhadap Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Tabel 3.81 Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas tw II tahun 2025 terhadap tw I tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II 2025	REALISASI TW II 2025	CAPAIAN TW II 2025	TARGET TW I 2025	REALISASI TW I 2025	CAPAIAN TW I 2025
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	60,00	70,00	116,67	5,00	5,00	100,00

Bila dibandingkan dengan realisasi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas pada Triwulan I tahun 2025 yaitu sebesar 5% maka terjadi kenaikan realisasi sebesar 65% dan bila dibandingkan dengan persentase capaian Triwulan II tahun 2025 yaitu sebesar 100% maka terjadi kenaikan capaian sebesar 16,67%, dapat disimpulkan bahwa progress kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai target yang ditetapkan.

4. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra 2025-2029**

Tabel 3.82 Perbandingan Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI TW I 2025	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	2	70%	-	-

Target akhir Renstra (Tahun 2029) Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang adalah 2, maka realisasi Triwulan II Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan target akhir Renstra 2025-2029 karena target bulanan berupa progress dari tahapan yang telah dilaksanakan, sedangkan target Renstra adalah jumlah pasar.

5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Analisis Penyebab Keberhasilan atau peningkatan kinerja :

a. Melakukan Audiensi dan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait dengan pelaksanaan program yang dilanjutkan dengan Advokasi Keamanan Pangan terpadu untuk menjalin komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan program.
b. Menjalin komunikasi yang baik dengan dinas terkait seperti Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Solok dalam pemilihan pasar yang akan diintervensi.
c. Kondisi efisiensi anggaran yang berimbas pada pelaksanaan program pasar pangan aman mengalami perubahan tahapan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga beberapa tahapan dilaksanakan secara gabungan dan beberapa tahapan ada yang dihilangkan. Pelaksanaan kegiatan tidak lagi berfokus kepada pengujian sampel pangan namun pemberdayaan komunitas pasar dalam sosialisasi keamanan pangan.
d. Pembentukan grup whatsapp sebagai salah satu media komunikasi kepada petugas dan komunitas pasar yang intervensi, dinas terkait dan pendampingan langsung dari petugas BBPOM di Padang.
e. Memberikan produk informasi keamanan pangan berupa x-banner Cek KLIK dan Bahan Berbahaya sebagai media edukasi kepada komunitas pasar.

f. Melibatkan petugas pasar dan tim nagari dalam pembuatan konten edukasi sehingga menjadi motivasi dalam melaksanakan sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) :

a. Mendorong komunitas pasar agar dapat melaksanakan sosialisasi keamanan pangan secara mandiri dengan memanfaatkan berbagai media termasuk media sosial.
b. Terus melakukan pengawalan dan pendampingan kepada komunitas pasar untuk dapat melakukan sosialisasi keamanan pangan.
c. Mendorong komunitas pasar agar dapat melaporkan setiap pelaksanaan sosialisasi keamanan pangan yang dilakukan secara mandiri.

6. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Target Triwulan II dapat tercapai melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Terlaksananya Advokasi Keamanan Pangan pada bulan April 2025 menjadi titik awal pelaksanaan program yang dihadiri oleh pimpinan daerah yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Kab. Solok beserta perwakilan OPD terkait dan pasar yang diintervensi.
b. Pelaksanaan Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar yang dilaksanakan pada bulan Mei 2025 yang bertempat di Aula Kantor Walinagari Cupak. Kegiatan dihadiri oleh Sekretaris Nagari Cupak, Petugas Pasar dan Komunitas Pasar Cupak. Melalui kegiatan ini diserahkan paket informasi keamanan pangan berupa x-banner Cek KLIK dan bahan berbahaya.
c. Tahapan kegiatan selanjutnya dilaksanakan Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas pasar yang dilaksanakan oleh petugas dan komunitas pasar melalui penyebaran informasi konten edukasi dengan memanfaatkan media sosial yang nantinya.
d. Pengawalan terhadap pasar yang telah diintervensi sebelumnya dilakukan sebagai bentuk monitoring program yang dilaksanakan secara mandiri. Pengawalan dilakukan terhadap Pasar Padang Aro di Kabupaten Solok Selatan. Melalui kegiatan pengawalan ini juga dilakukan penyerahan banner Cek KLIK sebagai media edukasi kepada komunitas pasar.

7. Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.83. Efisiensi Anggaran pada Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN (RPD) TW II	REALISASI ANGGARAN TW II	% REALISASI ANGGARAN TW II	% CAPAIAN INDIKATOR TW II	% TINGKAT EFISIENSI	KRITERIA
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20.584.980	10.895.000	52,93	116,67	86	Efisien

Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar. Sebagai capaian output adalah capaian masing-masing IKU sedangkan inputnya adalah pesentase realisasi anggaran yang mendukung IKU terkait dengan menggunakan target anggaran adalah data Rencana Penarikan Dana (RPD) RO terkait.

Target anggaran TW II pada IKU ini adalah total dari Rencana Penarikan Dana (RPD) bulan Januari-Juni 2025 yang berasal dari rincian output QDB.003 dengan persentase dukungan anggaran sebesar 100%. Persentase realisasi anggaran TW II adalah perbandingan realisasi anggaran dengan target anggaran TW II sehingga nilai persentase realisasi anggaran dipengaruhi oleh ketepatan dalam menetapkan rencana anggaran dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Maka berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran untuk pencapaian indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas termasuk efisien (86%) karena persentase realisasi anggaran (52,93%) lebih rendah daripada persentase capaian indikator (116,67%). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran untuk kegiatan pasar belum dilaksanakan sesuai dengan rencana namun karena persentase capaian indikator lebih tinggi daripada persentase realisasi anggaran sehingga masih terhitung efisien.

PENILAIAN RISIKO SASARAN MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

Risiko yang teridentifikasi pada sasaran kegiatan ini adalah antara lain : Pada kegiatan KIE terdapat penggelapan penggantian uang transpor/uang harian yang diberikan kepada peserta KIE oleh pelaksana kegiatan KIE. Risiko lainnya adalah kegiatan KIE bersama tokoh masyarakat tidak terlaksana sesuai perencanaan, dan pesan pesan KIE tidak tersampaikan kepada masyarakat dengan baik. Untuk kegiatan desa pangan aman, adanya risiko penyampaian

program keamanan pangan terpadu tidak jelas dan rinci, kader keamanan pangan yang dibimtek tidak sesuai kriteria kader, program desa pangan aman tidak dilanjutkan setelah berakhirnya intervensi. Untuk kegiatan Sekolah yang melaksanakan pembudayaaan keamanan pangan adalah sekolah yang telah diintervensi tidak melanjutkan program secara mandiri di tahun pengawalan.

Kegiatan pengendalian yang dilakukan adalah : pencantuman nomor Hp pada daftar hadir untuk dihubungi secara acak dalam memastikan kesesuaian keuangan. Materi KIE dibuat dengan bahasa yang sederhana dan design menarik. Melakukan KIE secara langsung secara lebih luas kepda masyarakat dan melaksanakan audiensi kepada pemerintah daerah sebelum pelaksanaan program. Pemilihan kader keamanan pangan desa yang lebih kompeten, penandatanganan komitmen kepala desa, menyediakan link materi dan bahan edukasi keamanan pangan yang dapat diakses oleh peserta dan monitoring melalui grup whatsapp program SAPA Sekolah, desa dan pasar setiap Kabupaten/Kota yang diintervensi.

3.1.5 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN V

MENINGKATNYA PENDAMPINGAN UMKM DALAM PEMENUHAN STANDAR KEAMANAN DAN MUTU

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 indikator kinerja utama, yaitu :

PERSENTASE UMKM YANG DIDAMPINGI DAN MEMPEROLEH REKOMENDASI SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN OBA, KOS YANG BAIK DAN/ATAU IP CPPOB PANGAN OLAHAN.

UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil, UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT dan UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
- UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);

- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

Kategori UMKM yang didampingi untuk UMK Pangan Olahan adalah (a) UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan, dan (b) UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan. Tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi : KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan, Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan pelaporan.

Kategori yang didampingi untuk UMKM OBA adalah (a) Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar; (b) *Start-up* yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya *start-up* yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK); (c) UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam; (d) UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap; (e) UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/ atau Tahap 3); dan (f) UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor. Tahapan Pendampingan UMK Obat Bahan Alam yang dilakukan di UPT meliputi : Penetapan target UMKM obat tradisional, Bimbingan teknis UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator, Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator, Sertifikasi dan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Kategori UMKM yang didampingi untuk UMKM Kosmetik adalah (a) UMKM yang memproduksi kosmetik; (b) UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (*start-up*); (c) UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan (d) UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor. Tahapan Pendampingan UMK Kosmetik yang dilakukan di UPT meliputi : Penetapan target UMKM Kosmetik, Bimbingan teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator, Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator, Sertifikasi dan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Cara Perhitungan dan formula

Cara perhitungan Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB = (A + B + C)/3

Tabel 3.84 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	TARGET TW II	REALISASI	CAPAIAN VS TARGET TW		CAPAIAN VS TARGET TAHUNAN	
					(%)	KATEGORI	(%)	KATEGORI
1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80	43,33	46,83	108,08	Sangat baik	46,83 %	Perlu Upaya keras

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025

Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan 2 tahun 2025 adalah 46,83% bila dibandingkan dengan target 43,33%, maka capaian yang diperoleh adalah 108,08% dan mendapatkan kategori sangat baik.

Tabel 3.85 Hasil Perhitungan Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan pada triwulan II 2025

BULAN	TARGET	UMKM PANGAN OLAHAN	UMKM OBA	UMKM KOSMETIK	PROGRESS
April	23,32	27,00	19,50	22,50	23,00
Mei	30,84	45,00	22,50	24,50	30,67
Juni	43,33	72,50	35,00	33,00	46,83

Tahapan kegiatan pendampingan pada Triwulan 2 yang telah dilakukan adalah bimbingan teknis dan pendampingan untuk UMKM Pangan, UMKM OBA, UMKM Kosmetik. Bimbingan teknis UMKM Pangan Olahan telah dilaksanakan pada tanggal 26 - 28 Mei 2025 dan dilanjutkan pendampingan pada Bulan Juni. Fasilitasi pendampingan dan bimbingan UMKM OBA telah dilaksanakan pada pelaku usaha yang sedang mengajukan CPOTB Tahap 2, sekaligus mengikuti program Nuansa Direktorat Pengawasan Obat Tradisional. Bimbingan, fasilitasi dan pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator telah dilaksanakan dan drafting rekomendasi telah diajukan ke Direktorat Pengawasan Kosmetik.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target akhir Tahun 2025

Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan II tahun 2025 adalah 46,83% bila dibandingkan dengan target akhir tahun 2025 sebesar 80% (semua tahapan selesai 100%) maka capaian yang diperoleh adalah sebesar 46,83% dengan kategori perlu upaya keras dalam pemenuhan target tahun 2025.

3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 terhadap Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Tabel 3.86 Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan tw II tahun 2025 terhadap tw I tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II 2025	REALISASI TW II 2025	CAPAIAN TW II 2025	TARGET TW I 2025	REALISASI TW I 2025	CAPAIAN TW I 2025
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	43,33	46,83	108,08	14,50	18,00	124,14

Bila dibandingkan dengan Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan pada Triwulan I tahun 2025 yaitu sebesar 46,83% maka terjadi kenaikan realisasi sebesar 28,83% dan bila dibandingkan dengan persentase capaian Triwulan I tahun 2025 yaitu

sebesar 108,08% maka terjadi penurunan capaian sebesar 16,06%, karena pendampingan UMKM Pangan Olahan belum dilaksanakan pada semua pelaku usaha.

4. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan iI Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra 2025-2029**

Tabel 3.87 Perbandingan Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI TW II 2025	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	84%	46,83%	-	-

Target akhir Renstra (Tahun 2029) Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang adalah 84%, maka realisasi Triwulan II Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan target akhir Renstra 2025-2029 karena target bulanan berupa progress pendampingan, sedangkan target Renstra adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Analisis Penyebab Keberhasilan atau peningkatan kinerja :

a. Tahapan proses pendampingan UMKM baik UMKM pangan, OBA dan kosmetik dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal pada Triwulan II, yaitu pelaksanaan Bimbingan teknis Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, pendampingan UMKM OBA dalam mengajukan CPOTB tahap 2 yang difasilitasi dalam program Nuansa serta pendampingan UMKM Kosmetik dalam pemenuhan SPA CPKB.

b. Pendampingan berkelanjutan kepada UMKM yang sudah mengikuti KIE Keamanan Pangan dan kemudian bimbingan teknis serta fasilitasi simplifikasi pembuatan dokumen mutu CPPOB melalui aplikasi Simpelin Aja nempercepat proses pembuatan dokumen hingga terbit sertifikat IP CPPOB

c. Pendampingan dan fasilitasi yang diberikan ke UMKM OBA yang untuk bisa langsung mengajukan CPOTB tahap II tanpa memperpanjang CPOTB tahap I serta

pendampingan dan desk CAPA sertifikasi CPKB mempercepat pemenuhan persyaratan pengajuan CPOTB bertahap dan SPA CPKB.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) :

a. Melanjutkan pendampingan kepada pelaku usaha secara intensif untuk percepatan perbaikan sarana produksi pangan, OBA, kosmetik dan pemenuhan dokumen mutu, baik secara langsung ataupun on line.
b. Melakukan revisi sarana produksi yang menjadi target pendampingan jika pelaku usaha tidak memenuhi komitmennnya atau mengundurkan diri pada tahapan pendampingan UMKM
c. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor dalam rangka menjaring pelaku usaha UMKM.

6. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

a. Pada pelaksanaan bimbingan teknis dilakukan seleksi terhadap peserta bimtek dengan memastikan kesiapan sarana produksi dan kelengkapan persyaratan admistrasi yang merupakan kewenangan Instansi lain, namun mempengaruhi kelancaran proses perijinan terpadu seperti NIB, sertifikasi standar dan validitas NPWP
b. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor dalam rangka melaksanakan tahapan pendampingan UMKM. Pada proses pendampingan pembuatan dokumen beberapa instansi memiliki fasilitator UMKM yang dapat dilibatkan pada tahapan pendampingan ini.
c. Meningkatkan kompetensi SDM melalui Sosialisasi/ Bimtek/ Pelatihan agar dapat melaksanakan pendampingan terhadap UMKM menjadi lebih baik.

7. Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.88. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN (RPD) TW II	REALISASI ANGGARAN TW II	% REALISASI ANGGARAN TW II	% CAPAIAN INDIKATOR TW II	% TINGKAT EFISIENSI	KRITERIA
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	1.019.998	340.000	33,33	108,08	75	Tidak Efisien

Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar. Sebagai capaian output adalah capaian masing-masing IKU sedangkan inputnya adalah pesentase realisasi anggaran yang mendukung IKU terkait dengan menggunakan target anggaran adalah data Rencana Penarikan Dana (RPD) RO terkait.

Target anggaran TW II pada IKU ini adalah total dari Rencana Penarikan Dana (RPD) bulan Januari-Juni 2025 yang berasal dari rincian output QDG.001 dengan persentase dukungan anggaran sebesar 100%. Persentase realisasi anggaran TW II adalah perbandingan realisasi anggaran dengan target anggaran TW II sehingga nilai persentase realisasi anggaran dipengaruhi oleh ketepatan dalam menetapkan rencana anggaran dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Maka berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran untuk pencapaian indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan termasuk tidak efisien (75%) karena persentase realisasi anggaran (33,33%) lebih rendah daripada persentase capaian indikator (108,08%). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran untuk kegiatan UMKM dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana, terlihat dari realisasi anggaran lebih kecil dari rencana penarikan dana. Ketidaktepatan dalam hal perencaaan dan pelaksanaan anggaran untuk kegiatan UMKM menyebabkan indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan tidak efisien walaupun capaian indikator tercapai 108,08%. Penyebab signifikan adalah rencana anggaran untuk kegiatan pada bulan Mei dan Juni tidak terealisasi.

PENILAIAN RISIKO MENINGKATNYA PENDAMPINGAN UMKM DALAM PEMENUHAN STANDAR KEAMANAN DAN MUTU

Uraian peristiwa risiko pada sasaran ini adalah

a. Permohonan audit/ kunjungan pembinaan yang diajukan pelaku usaha tidak dapat segera ditindaklanjuti, penyampaian informasi terkait sertifikasi secara langsung oleh petugas layanan publik kurang lengkap.

Aktifitas pengendalian yang dilakukan adalah : Membuat daftar prioritas sarana produksi yang akan segera ditindaklanjuti dan segera menghubungi pelaku usaha untuk pendampingan tahap awal secara daring. Memberikan sosialisasi dan penjelasan tatacara dan persyaratan

sertifikasi kepada petugas layanan tentang persyaratan layanan yang tercantum dalam standar layanan publik.

b. Pelaksanaan audit CPOTB dan CPKB di sarana produksi dapat menimbulkan benturaan kepentingan dan pemberian gratifikasi dari pelaku usaha kepada petugas agar hasil audit memenuhi kriteria untuk direkomendasikan

Aktifitas pengendalian yang dilakukan adalah

Pengaturan petugas yang melakukan pemeriksaan sarana yang tidak memiliki benturan kepentingan, mencantumkan pada surat tugas, kalimaat "Petugas tidak diperkenankan menerima gratifikasi dalam bentuk apapun", melaksanakan rotasi penugasan pegawai ke sarana, Sosialisasi SMAP dan Whistle Blower System

3.1.6 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VI

TERLAKSANANYA PENINDAKAN KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF DI WILAYAH KERJA UPT

A. PERSENTASE KEBERHASILAN PENYIDIKAN KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI UPT

Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Capaian keberhasilan penyidikan kajahatan sediaan farmasi dan pangan olahan dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%;
2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%;
3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%; dan
4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%.

Cara Perhitungan Dan Formula

: Pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

((Jumlah perkara SPDP x 0.15 + Jumlah perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah perkara P21 x 0.85 + Jumlah perkara Tahap II x 1) / Jumlah perkara) x 100%))

Tabel 3.89 Capaian Indikator Kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN VS TARGET TW2		CAPAIAN NORMALISASI	CAPAIAN VS TARGET TAHUNAN	
	2025			(%)	KATEGORI		(%)	KRITERIA
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	90	43	50	116,26	Tidak dapat disimpulkan	110	55,56	Perlu upaya keras

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025

Berdasarkan pembobotan tersebut diatas realisasi nilai tingkat keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan II tahun 2025 adalah 50% bila dibandingkan dengan target 43,0%, maka capaian yang diperoleh adalah 116,26% dengan kategori tidak dapat disimpulkan. Penetapan target 43,00 % berdasarkan adanya carry over perkara yang sampai tahap P21 dihitung terhadap target perkara effisiensi anggaran sebanyak 1 perkara sehingga jika diperhitungkan terhadap target perkara buka blokir anggaran sebanyak 4 perkara ditambah 1 perkara carry over dengan proses tahap penyidikan yang sudah diproses yaitu 3 perkara sudah dilimpahkan Berkas Perkara ke JPU.

Pada triwulan I tahun 2025 ini, PPNS BBPOM di Padang berhasil menindak 2 perkara tindak pidana di bidang obat bahan alam yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, di Kabupaten Pasaman Barat, dan 1 Perkara berhasil menindak dibidang obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.

Tabel 3.90 Hasil Perhitungan Realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT Triwulan II tahun 2025

Bulan	Target Perkara Tahun Berjalan	Target Perkara Carry Over	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (SPDP)	Realisasi Perkara Carry Over (SPDP)	Nilai Realisasi SPDP	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap I)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap I)	Nilai Realisasi Tahap I	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (P21)	Realisasi Perkara Carry Over (P21)	Nilai Realisasi P21	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap II)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap II)	Nilai Realisasi Tahap II	% Keberhasilan Perkara
April	4	1	2	0	0,3			0		1	0,85			0	23,00
Mei	4	1	1	0	0,15	2		1,1		1	0,85			0	42,00
Juni	4	1	0	0	0	3		1,65		1	0,85			0	50,00

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target akhir Tahun 2025

Realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan II tahun 2025 adalah 50% bila dibandingkan dengan target akhir tahun 2025 sebesar 90%, maka capaian yang diperoleh adalah sebesar 55,56% dengan kategori perlu upaya keras. Selisih kedua persentase tersebut adalah 40,,00% dengan menyisakan waktu 6 bulan dari target 90 % diprediksi dapat tercapai.

3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 terhadap Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Tabel 3.91 Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan tw II tahun 2025 terhadap tw I tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II 2025	REALISASI TW II 2025	CAPAIAN TW II 2025	TARGET TW I 2025	REALISASI TW I 2025	CAPAIAN TW I 2025
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	43,00	50,00	116,28	42,50	20,00	47,06

Bila dibandingkan dengan realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada Triwulan I tahun 2025 yaitu sebesar 20% maka terjadi kenaikan realisasi sebesar 30% dan bila dibandingkan dengan persentase capaian Triwulan I tahun 2025 yaitu sebesar 47,06% maka terjadi kenaikan capaian sebesar 69,22%, dapat disimpulkan bahwa pada TWI terlaksana 1 perkara sedangkan pada TW2 terlaksana 2 perkara yang mana ke 3 perkara tersebut sudah sampai pada tahapI dimana berkas perkara diserahkan ke JPU untuk diteliti.

4. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra 2025-2029

Tabel 3.92 Perbandingan Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI TW I 2025	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	94	50	53,15%	Perlu upaya keras

Target akhir Renstra (Tahun 2029) Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang adalah 94%, maka realisasi Triwulan II Tahun 2025 belum mencapai target akhir Renstra 2025-2029 dengan capaian 53,15% termasuk kategori perlu upaya keras. Untuk itu diperlukan usaha peningkatan kerja dengan menyelesaikan tahap2 proses penyidikan yang berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.

5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

   Analisis Penyebab Keberhasilan atau peningkatan kinerja :

   Tercapainya nilai persentase Keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan disebabkan oleh perencanaan yang matang terhadap target operasi penindakan, termasuk bagaimana cara bertindak di lapangan. Kemampuan penyidik PPNS BBPOM di Padang dalam menangani Berkas Perkara berperan penting dalam mencapai keberhasilan penyidikan ini. Selain hal tersebut kerjasama dan koordinasi dengan Korwas PPNS Polda Sumbar berjalan dengan baik.

   Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) :

   Perbaikan dan penyempurnaan kinerja dapat dilakukan dengan melakukan pengembangan taktik dan teknik mengingat modus kejahatan sering berubah-rubah dan semakin canggih. Hal tersebut dapat dicapai dengan peningkatan kompetensi petugas dan menggunakan peralatan intelijen sesuai prosedur. Memperkuat jejaring dengan berbagai sumber daya yang ada.

6. **Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

   Program yang menunjang keberhasilan kerja pada triwulan II tahun 2025 adalah operasi intelijen yang dilaksanakan dengan taktik dan teknik yang tepat. Perencanaan operasi penindakan dengan cara bertindak yang matang. Pada triwulan II telah dilakukan operasi intelijen serta koordinasi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dengan petugas pengirim barang (TiKi) dengan hasil tindak lanjut berupa operasi penindakan.

7. Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.93. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN (RPD) TW II	REALISASI ANGGARAN TW II	% REALISASI ANGGARAN TW II	% CAPAIAN INDIKATOR TW II	% TINGKAT EFISIENSI	KRITERIA
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	116.824.990	123.389.000	105,62	116,28	100	Efisien

Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar. Sebagai capaian output adalah capaian masing-masing IKU sedangkan inputnya adalah pesentase realisasi anggaran yang mendukung IKU terkait dengan menggunakan target anggaran adalah data Rencana Penarikan Dana (RPD) RO terkait.

Target anggaran TW II pada IKU ini adalah total dari Rencana Penarikan Dana (RPD) bulan Januari-Juni 2025 yang berasal dari rincian output QCD.U18 dengan persentase dukungan anggaran sebesar 100%. Persentase realisasi anggaran TW II adalah perbandingan realisasi anggaran dengan target anggaran TW II sehingga nilai persentase realisasi anggaran dipengaruhi oleh ketepatan dalam menetapkan rencana anggaran dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Maka berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran untuk pencapaian indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT termasuk efisien (100%) karena persentase realisasi anggaran (105,62%) lebih rendah daripada persentase capaian indikator (116,28%). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran untuk kegiatan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan telah dilaksanakan melebihi rencana dan capaian indikator juga melebihi target sehingga masih terhitung efisien.

PENILAINAN RISIKO TERLAKSANANYA PENINDAKAN KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF DI WILAYAH KERJA UPT

Risiko yang teridentifikasi dalam sasaran ini adalah : Informasi yang diterima tidak lengkap dari petugas, personil dengan sengaja tidak melaporkan sarana yang melakukan pelanggaran tindak pidana sediaan farmasi dan pangan olahan karena adanya kepentingan pribadi dengan petugas

dan adanya benturan kepentingan. Proses penyidikan dapat dihentikan sehingga tidak bisa dilanjutkan ke tahap penyerahan tersangka dan barang bukti. Petugas pengelola Barang Bukti menghilangkan barang bukti atau barang bukti rusak dalam gudang barang bukti.

Aktifitas pengendalian yang dilakukan adalah : Melakukan penugasan bersama, dan kegiatan intelijen dilakukan berdasarkan rencana kegiatan intelijen, dilakukan oleh tim yang terdiri dari minimal 3 orang dan dilakukan rotasi terhadap anggota tim tersebut saat melakukan kegiatan intelijen. Meningkatkan koordinasi secara intens antara penyidik dengan jaksa penuntut umum, serta Kepala Balai Besar POM di Padang dengan Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri untuk kelancaran pemberkasan dan proses penyidikan. Melakukan audit terhadap penyimpanan barang bukti

3.1.7 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VII

TERLAKSANANYA KEGIATAN DETEKSI KEJAHATAN DIBIDANG SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF DI WILAYAH KERJA UPT

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 indikator kinerja utama, yaitu

PERSENTASE LAPORAN ANALISIS KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DISELESAIKAN SESUAI STANDAR

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;
b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan

Cara Perhitungan Dan Formula

: Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)
b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)
c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

Tabel 3.94 Capaian Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar triwulan II tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET TW II	REALISASI	CAPAIAN VS TARGET TW		CAPAIAN VS TARGET TAHUNAN	
	2025			(%)	KATEGORI	(%)	KATEGORI
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	50	100	Baik	55,56	Perlu upaya keras

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025

Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan II tahun 2025 adalah 50% bila dibandingkan dengan target 50%, maka capaian yang diperoleh adalah 100% dan mendapatkan kategori Baik.

Tabel 3.95 Hasil Perhitungan Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Triwulan II tahun 2025

Fungsi						Nilai			Nilai Akhir (x bobot 50%)		
Patroli Siber			Profiling								
B4	B5	B6	B4	B5	B6	1	2	3	1	2	3
T	T	T	T	T	T	100%	100%	100%	50%	50%	50%

Keterangan:

Kolom B diisikan dengan kode sebagai berikut pada setiap bulannya:

T : Tepat Waktu
L : Lewat Waktu

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target akhir Tahun 2025

Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan II tahun 2025 adalah 50% bila dibandingkan dengan target akhir tahun 2025 sebesar 90%, maka capaian yang diperoleh adalah sebesar 55,56% dengan kategori perlu upaya keras

3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 terhadap Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Tabel 3.96 Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar tw II tahun 2025 terhadap tw I tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II 2025	REALISASI TW II 2025	CAPAIAN TW II 2025	TARGET TW I 2025	REALISASI TW I 2025	CAPAIAN TW I 2025
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00

Bila dibandingkan dengan realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar pada Triwulan II tahun 2025 yaitu sebesar 50% maka tidak terdapat kenaikan realisasi dan bila dibandingkan dengan persentase capaian Triwulan I tahun 2025 yaitu sebesar 50% maka juga sama.

4. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra 2025-2029**

Tabel 3.97 Perbandingan Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI TW II 2025	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	94	50	53,19	Perlu Upaya Keras

Target akhir Renstra (Tahun 2029) Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang adalah 94%, maka realisasi Triwulan II Tahun 2025 belum mencapai target akhir Renstra 2025-2029 dengan capaian 53,19% termasuk kategori perlu upaya keras. Untuk ini

perlu dilakukan perencanaan dan program-program yang akurat untuk tercapai target Renstra.

5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

   Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja :

   Petugas yang kompeten telah melakukan pelaporan patroli siber dan profiling siber peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal secara tepat waktu dan didukung oleh sarana dan prasarana informasi teknologi yang mumpuni. Untuk pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi analisis akan terealiasasi setelah analisis diberikan oleh Direktorat Cegah Tangkal. Penyusunan rencana analisis kerawanan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan telah disusun untuk menghasilkan laporan analisis kerawanan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan.

   Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) :

   Konsisten melakukan pelaporan patroli siber dan profiling siber terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal secara tepat waktu. Membuat perencanaan untuk penyusunan analisis dan menindaklanjuti rekomendasi tindak lanjut analisis yang diberikan oleh Direktorat Cegah Tangkal

6. **Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

   Program yang menunjang kerja pada triwulan II tahun 2025 adalah patroli siber dan profiling siber yang dilaksanakan terencana dan tepat waktu.

7. **Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja**

   Tabel 3.98. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN (RPD) TW II	REALISASI ANGGARAN TW II	% REALISASI ANGGARAN TW II	% CAPAIAN INDIKATOR TW II	% TINGKAT EFISIENSI	KRITERIA
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	7.349.996	2.560.000	34,83	100	75	Tidak Efisien

Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar. Sebagai capaian output adalah capaian masing-masing IKU sedangkan inputnya adalah pesentase realisasi anggaran yang mendukung IKU terkait dengan menggunakan target anggaran adalah data Rencana Penarikan Dana (RPD) RO terkait.

Target anggaran TW II pada IKU ini adalah total dari rencana penarikan dana bulan Januari-Juni 2025 yang berasal dari rincian output AEA.001 dengan persentase dukungan anggaran sebesar 10%. Persentase realisasi anggaran TW II adalah perbandingan realisasi anggaran dengan target anggaran TW II sehingga nilai persentase realisasi anggaran dipengaruhi oleh ketepatan dalam menetapkan rencana anggaran dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Maka berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran untuk pencapaian indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar termasuk efisien (75%) karena persentase realisasi anggaran (34,83%) lebih rendah daripada persentase capaian indikator (100%). Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan analisis kejahatan dilaksanakan tidak sesuai dari rencana terlihat dari realisasi anggaran lebih rendah dari rencana penarikan dana namun capaian indikator tercapai 100% sehingga masih terhitung efisien. Penyebab signifikan rendahnya persentase realisasi anggaran adalah anggaran untuk pelaksanakan kegiatan analisis kejahatan pada bulan Maret, April, dan Juni tidak terealisasi.

PENILAIAN RISIKO TERLAKSANANYA KEGIATAN DETEKSI KEJAHATAN DIBIDANG SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF DI WILAYAH KERJA UPT

Risiko yang teridentifikasi pada sasaran kegiatan ini adalah : Informasi lengkap mengenai data dan personal pelaku peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan secara daring seringkali merupakan data fiktif dan tidak lengkap.

Aktifitas pengendalian yang dilakukan adalah : Melakukan undercover menggunakan akun palsu untuk berkomunikasi dengan pemilik akun

3.1.8 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VIII

LAYANAN PUBLIK UPT YANG PRIMA

Sasaran ini diwujudkan melalui 1 indikator utama yaitu :

INDEKS PELAYANAN PUBLIK UPT

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
2) Profesionalitas SDM (25%);
3) Sarana Prasarana (18%);
4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
6) Inovasi (12%).

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM

Cara Perhitungan dan formula

Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi.

Nilai Indeks Pelayanan Publik : 75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM, dengan kategori nilai sebagai berikut:

Range	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (dengan catatan)

2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (dengan catatan)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 - 5,00	A	Pelayanan Prima

Target Indikator Pelayanan Publik ini ditetapkan mulai dari B09 (Bulan September) sehingga di triwulan II ini belum terdapat realisasi .

Kegiatan dalam layanan publik yang dilakukan selama triwulan II :

1. Melakukan kegiatan layanan publik informasi dan pengaduan bulan April - Juni 2025

2. Melakukan kegiatan layanan pengujian pihak ketiga bulan April - Juni 2025.

3. Melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi OSS RBA bulan April - Juni 2025.

4. Melaksanakan survei pelayanan publik kepada konsumen selama triwulan II tahun 2025

6. Telah melakukan Forum Konsultasi Publik pada tanggal 15 April 2025.

6. Menyusun dan menetapkan serta mempublish standar layanan publik tahun 2025 yang telah ditetapkan.

PENILAIAN RISIKO LAYANAN PUBLIK UPT YANG PRIMA

Identifikasi risiko pada sasaran kegiatan ini adalah : Izin edar terbit dengan rekomendasi yang belum memenuhi persyaratan.Keterlambatan verifikasi dan pendelegasian pengajuan IP CPPOB. Pelaksanaan audit sarana dan Penerbitan rekomendasi CPPOB /CPOTB/ CPKB/ SMKPO/ CDOB tidak sesuai timeline yang ditetapkan. Pelaku usaha tidak dapat menggunakan aplikasi e sertifikasi BPOM dan melengkapi dokumen mutu. Hasil audit tidak segera dibuatkan surat tindaklanjut/pemberitahuan kepada pelaku usaha. Adanya pemberian gratifikasi dari pelaku usaha kepada petugas agar hasil audit memenuhi kriteria untuk direkomendasikan,

Aktifitas pengendalian yang dilakukan adalah : Evaluasi berjenjang Informasi dan Koordinasi dengan pusat terkait ketentuan dan persyaratan terbaru. Pengecekan aplikasi secara berkala. Memberikan pendampingan dalam proses penginputan data. Memberikan Sosialisasi dan Bimtek cara pengajuan IP CPPOB kepada pelaku usaha, mengkomfirmasi alamat pelaku usaha

pada e-sertifikasi dengan data oss. Melakukan monitoring wa layanan secara berkala. Monitoring timeline evaluasi pada aplikasi e-sertifikasi. Melakukan bimtek kepada pelaku usaha terkait update terbaru mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Pengaturan petugas yang melakukan pemeriksaan sarana dengan memperhatikan benturan kepentingan dan penerapan Sistem Manajemen Anti penyuapan (SMAP) kepada seluruh petugas.

3.1.9 CAPAIAN SASARAN KEGIAYAN IX

TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG YANG OPTIMAL

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 4 indikator kinerja utama, yaitu :

A. Nilai Pembangunan ZI UPT
B. Nilai AKIP UPT
C. Nilai Kinerja Anggaran
D. Indeks Manajemen Risiko

Penjelasan mengenai capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke-XI sebagai berikut :

A. NILAI PEMBANGUNAN ZI UPT

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

Perhitungan dan formula :

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan *self-assessment* dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I

Target kinerja IKU Nilai pembangunan ZI diukur pada akhir tahun sehingga belum terdapat realisasi pada Triwulan II 2025.

Kegiatan yang telah dilaksanakan sampai triwulan I 2025 antara lain: Penyusunan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Balai Besar POM di Padang dan Tim AOC. Penyusunan Rencana Kerja dan Target Prioritas. Melaksanakan penilaian mandiri (self assesment) atas pebangunan ZI dengan mengisi Lembar Kerja Evaluasi Pembangunan Zona Integritas yang telah dikirimkan pada tanggal 15 April 2025 setelah direviu oleh auditor internal. Balai Besar POM di Padang sebagai unit yang telah mendapatkan predikat WBBM, maka akan dievaluasi terhadap pengukuran capaian IKU Nilai Pembangunan ZI dan monitoring implementasi pembangunan ZI di Balai Besar POM di Padang

Realisasi IKU Nilai pembangunan ZI tahun 2024 belum tercapai, maka terhadap rekomendasi atau rencana perbaikan kinerja pada laporan kinerja 2024 telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Telah menetapkan program prioritas dalam rencana kerja pembangunan ZI pada seluruh area perubahan
2. Telah mendokumentasikan keterlibatan pimpinan secara aktif dalam monitoring dan evaluasi pembangunan ZI.
3. Telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja ZI secara bulanan
4. Telah melakukan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai dalam rangka pemenuhan kesenjangan dengan standar kompetensi
5. Telah membuat laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi dan informasi, pengukuran kinerja unit, operasional SDM dan pemberian layanan kepada publik secara berkala
6. Telah dilakukan analisis terhadap nihilnya WBS
7. Telah mengimplementasikan pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas layanan
8. Telah berupaya untuk melakukan pengembangan inovasi pada semua area perubahan

B. NILAI AKIP UPT

a. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja

Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM

Cara Perhitungan dan Formula

Penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP, yaitu: Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Kinerja Internal dan (5) Capaian Kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi, maka implementasi atas SAKIP Balai Besar POM di Padang Tahun 2024 dikategorikan A (Memuaskan) yaitu Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil. Rincian hasil evaluasi tiap komponen disajikan pada tabel berikut:

No	Komponen	Bobot	Nilai	
			2023	2024
1.	Perencanaan Kinerja	24	20,16	20,16
2.	Pengukuran Kinerja	24	18,48	18,24
3.	Pelaporan Kinerja	12	9,48	10,08
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20	16,40	16,80
5.	Capaian Kinerja	20	15,86	16,49
Nilai Hasil Evaluasi		**100**	80,38	81,77
Predikat			**A**	**A**

Realisasi IKU Nilai AKIP tahun 2024 belum tercapai, maka terhadap rekomendasi atau rencana perbaikan kinerja pada laporan kinerja 2024 telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Telah memanfaatkan subsite BBPOM di Padang sebagai media publikasi dokumen perencanaan kinerja dengan telah mengupload dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Padang Tahun 2025
2. Telah melakukan input data dan capaian indikator secara tertib dan telah dilakukan reviu berjenjang dan diverifikasi setiap bulan
3. Telah melakukan pengisian data kinerja pada aplikasi simetris secara lengkap termasuk informasi terkait kendala dan rekomnedasi dan rencana rindak lanjut.
4. Telah menetapkan kebijakan pimpinan tentang pemberian reward and punishment dan telah mengiplementasikan kebijakan tersbut.
5. Telah menyusuna laporan kinerja dengan menyajikan efisiensi peggunaan anggaran per sasarn strategis dan indikator
6. Telah menyusun kertas kerja dan perhitungan data capaian kinerja dan memasukkan dalam laporan evaluasi internal dan laporan kinerja

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Semester II adalah implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada BBPOM di Padang sesuai dengan pedoman SAKIP dan penyusunan laporan sesuai dengan pedoman serta dikirim tepat waktu. Balai Besar POM di Padang juga telah mengirimkan Tindak lanjut hasil evaluasi AKIP tahun 2024 dan menyampaikan Penilaian Mandiri Evaluasi SAKIP melalui SAPA.APIP secara tepat waktu.

C. NILAI KINERJA ANGGARAN

a. Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

c. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

   1. Revisi DIPA (bobot 10%)
   2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
   3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
   4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
   5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
   6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
   7. Capaian Output (bobot 25%)
   8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

d. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran.

e. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

   1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
   2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Cara perhitungan dan Formula

Nilai Kinerja Anggaran =

(Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Indikator Nilai Kinerja Anggaran diukur pada akhir tahun sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan II tahun 2025. Nilai EKA mencapai maksimal pada akhir tahun sedangkan nilai IKPA dihitung setiap bulan terhadap kepatuhan terhadap 8 pembentuk nilai IKPA. Pada bulan Juni 2025 Balai Besar POM di Padang mendapatkan nilai IKPA 98,06% dengan rincian Kualitas Perencanaan Anggaran dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran mendapatkan nilai maksimal

100%, sedangkan tidak semua indikator pembentuk nilai IKPA pada Kualitas Pelaksanaan Anggaran mendapat nilai 100, yaitu penyerapan anggaran yang masih mendapatkan nilai 90,30. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mendapatkan nilai Kinerja Anggaran yang tinggi antara lain :

1) Melakukan revisi DIPA sesuai dengan ketentuan dan memaksimalkan pengajuan beberapa jenis revisi dalam 1 kali pengajuan revisi.
2) Menjaga Konsistensi RPD bulan yang telah ditetapkan pada Halaman III DIPA.
3) Mempercepat pelaksanaan kegiatan barang dan jasa, Mendaftarkan data kontrak secara tepat waktu dan mempercepat pembayaran belanja kontraktual sesuai jadwal.
4) Melaporkan capaian output dengan data yang akurat dan tepat waktu
5) Menyelesaikan pertanggungjawaban UP dan TUP dengan tepat waktu
6) Melakukan efisiensi anggaran RO SBK.

E. INDEKS MANAJEMEN RISIKO

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Cara Perhitungan dan Formula :

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manejemen risiko

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan oleh evaluator Inspektorat, maka tingkat maturitas penerapan manajemen risiko pada Balai Besar POM di Padang dapat dikategorikan Risk Aware dengan nilai 2,906. Terhadap kelemahan implementasi SPIP BBPOM di Padang, Inspektorat Utama telah merekomendasikan melakukan perbaikan. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk perbaikan ini adalah : Memastikan seluruh ASN sudah ikut pelatihan Manrisk di IDEAS, menyusun kategori atau kertas kerja dalam menentukan nilai kemungkinan dan dampak, akan membuat rumusan risk event yang jelas/spesifik, akan lebih teliti membuat atribut dan aktifitas pengendalian, memastikan nilai risiko inheren dan risidu yang ditetapkan sesuai pedoman dan membuat tindakan mitigasi yang berbeda dengan pengendalian existing serta membuat daftar risiko dengan mempertimbangkan isu internal/eksternal.

Balai Besar POM di Padang telah melakukan identifikasi risiko semester I dan semester II tahun 2025 terhadap semua sasaran kegiatan yang ada, teridentifikasi sebanyak 100 risiko pada semester I dan 106 risiko pada semester II, pada semua proses bisnis yang ada di Balai Besar POM di Padang. penyusunan telah memperhatikan dan mememenuhi rekomendasi Inspektorat pada Hasil Evaluasi Maturitas Risiko BBPOM di Padang Tahun 2024.

PENILAIAN RISIKO TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG YANG OPTIMAL

Identifikasi risiko pada sasaran ini adalah : Terkait keuangan risiko yang teridentifikasi adalah pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan yang telah tertuang dalam halaman III DIPA. Adanya kelebihan bayar uang makan kepada pegawai. Terkait kearsipan risiko yang ditemui adalah Unit Pengolah (UP)belum optimal dalam mengimplementasikan persuratan tentang penulisan naskah dinas sesuai dengan Tata Naskah Dinas (TND). Pada pengelolaan kepegawaian risiko yang ditemukan adalah Tidak lengkapnya komponen pengelolaan kinerja pegawai pada aplikasi SIMAKIN. Risiko yang ditemukan dalam implementasi SAKIP adalah Ketidaktepatan dalam menetapkan target RAPK per bulan, pengumpulan dan pengolahan data yang salah, pengiriman laporan tidak tepat waktu dan terdapatnya kesalahan data pada Laporan kinerja interim. Revisi anggaran melebihi batas maksimal dalam 1 semester serta Realisasi Capaian Output lebih rendah dari target bulanan yang telah ditetapkan

Aktifitas pengendalian yang dilakukan adalah : Melakukan koordinasi dengan semua fungsi untuk mendapatkan kegiatan pengganti apabila tidak jadi dilaksanakan. Konfirmasi Kehadiran kepada seluruh pegawai oleh kepegawaian sebelum pembayaran uang makan diproses. Untuk kearsipan melakukan koordinasi antara petugas unit pengolah dengan unit kearsipan dan Sosialisasi terkait tata naskah dinas. Melakukan monev pengelolaan kinerja pegawai dan reminder kepada Ketua Tim terkait hasil monev tersebut, Ketua Tim juga melakukan reviu terhadap SKP anggota tim pada saat penilaian kinerja.

Aktifitas pengendalian terkait sistem akuntabilitas adalah Menyusun target RAPK per bulan dengan perhitungan yag akurat, memonitoring realisasi RAPK per bulan, mengajukan revisi target RAPK untuk bulan yang belum berjalan sekiranya ada estimasi tidak tercapai. Konfirmasi data kepada Katim bila ada ketidaksesuaian. Melakukan pengumpulan data dengan cermat dan tepat waktu. Verifikasi data realisasi di bit.ly RAPK oleh tim Monev TU, pengisian form perbaikan data apabila ada kesalahan data dan Pengisian data di bit.ly RHPK lebih awal melalui memo dinas Kepala BBPOM di Padang. Terkait revisi dengan meminimalkan revisi dengan menggabungkan beberapa jenis revisi dalam 1 pengajuan revisi dan mengajukan revisi target untuk bulan yang belum berjalan sekiranya ada estimasi tidak tercapai.

3.2. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI

Pada tahun 2025 di Balai Besar POM di Padang terdapat 25 Indikator Kinerja Utama dimana masing-masing IKU per Triwulan II 2025 telah dilakukan Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi, sesuai dengan tabel seperti berikut ini :

Tabel . 3.99 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Bulan April sd Juni 2025

NO.	Indikator Kegiatan	TARGET 2025	JENIS	APRIL			KONDISI AWAL	REKOMENDASI	TIMELINE PENYELESAIAN	STATUS	RENCANA AKSI		KONDISI AKHIR
				Target	Realisasi	Capaian (%)	(Kendala/Permasalahan/Capaian Terhadap Target)	(Rencana Tindak Lanjut)	(Bulan)	(Progres/Selesai)	(Rencana Aksi yang Sudah Selesai)	(Rencana Aksi yang Belum Selesai)	(Tercapainya Target/Peningkatan Kinerja)
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,75	Flat	86,75	95,34	109,90	- Kerusakan alat AAS untuk pengujian logam berat Pb, Cd dan As, menghambat pelaksanaan uji logam untuk komoditi Kosmetik, OBA dan SK	- Perbaikan alat AAS - Melakukan pengujian logam As, Pb dan Cd menggunakan alat AAS yang di kelola Lab. Pangan.	Mei	Progres (perbaikan)	- Melakukan pengujian logam As, Pb dan Cd menggunakan alat AAS yang di kelola Lab. Pangan.	- Perbaikan alat AAS	Tercapainya Target Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26,00	Akhir Tahun	-	-	-	Hasil Monev laporan melalui website e-meso, baru 4 sarana pelayanan kesehatan yang melaporkan KTD, yaitu RS Semen Padang, RS Unand RS Saanin, RSUD RSIA Restu Ibu,	`- Mengingatkan kembali tenaga kesehatan melalui WAG kolaborasi Meso `- Mengingatkan PIC Farmakovigilans untuk segera melaporkan KTD bersamaan dengan penagihan tindakan perbaikan hasil pemeriksaan sarana pelayanan kesehatan	Desember 2025	Progres	`- Telah mengingatkan kembali tenaga kesehatan melalui WAG kolaborasi Meso `-Telah Mengingatkan PIC Farmakovigilans untuk segera melaporkan KTD bersamaan dengan penagihan tindakan perbaikan hasil pemeriksaan sarana pelayanan kesehatan	Rencana aksi akan dialakukan setiap Bulan hingga tercapai angka pelaporan 26% (12 Sarana yang melaporkan KTD)	Tercapainya Target Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	Flat	85,00	92,45	108,76	*Keterbatasan ketersediaan reagensia, suku cadang dan baku pembanding sehingga terjadinya penyesuaian kategori sampling sampai tersedianya pengadaan reagensia yang dipesan *Terjadinya keterlambatan dari tindak lanjut sampel TMS disebabkan sampel yang diterima di laboratorium pada minggu ke 2 bulan Maret, kemudian dilakukan proses pengujian selama 15 HK (batas waktu pelaporan) sehingga pelaporan pengujian pada akhir bulan Maret dan tindak lanjut dilakukan pada awal bulan April 2025	*Melakukan koordinasi internal antara katim fungsi pengujian pangan degan PPK untuk melakukan percepatan pengadaan reagensia, suku cadang dan baku banding *Melakukan percepatan jadwal pelaksanaan sampling sehingga pelaporan pengujian dan tindak lanjut hasil dapat dilaksanakan pada bulan yang sama *Meningkatkan koordinasi internal dalam hal sampling dan tindak lanjut sampling	Desember 2025	Progres	*Melakukan tindak lanjut terhadap sampel yang tidak memenuhi syarat, *Meningkatkan koordinasi dengan tim internal	Tindak lanjut sampel yang perlu dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan	Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pengujian produk dan tindak lanjut terhadap sarana produksi
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	Flat	100,00	100,00	100,00	Tidak ada pengaduan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan	Terus meningkatkan koordinasi internal dalam memberikan layanan terhadap pengaduan kasus KLB	Desember 2025	Progres	Laporan Evaluasi tetap disiapkan		Realisasi Nihil karena tidak ada pengajuan KLB KP bulan April
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	Flat	85,00	100,00	117,65	*Terjadinya perubahan dari target efisiensi ke target awal sampel PIRT sebelum efisiensi sehingga perlu adanya persiapan dan penyesuaian kategori sampling dengan ketersediaan reagensia, suku cadang, baku banding dan koordinasi dengan lab regional	*Meningkatkan koordinasi internal dalam hal sampling dan tindak lanjut sampling *Melakukan koordinasi internal antara katim fungsi pengujian pangan degan PPK untuk melakukan percepatan pengadaan reagensia, suku cadang dan baku banding	Desember 2025	Progres	*Melakukan tindak lanjut terhadap sampel yang tidak memenuhi syarat , *Meningkatkan koordinasi dengan tim internal	*Meningkatkan monitoring terhadap sampel PIRT yang perlu ditindaklanjuti bersama tim internal, *Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait	Target dapat tercapai . Untuk itu perlu koordinasi dengan lintas sektor terkait

6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89,50	Flat	89,50	59,42	66,39	Terdapat kendala dalam memastikan tanggal surat TL diterima pelaku usaha/ linsek sedangkan pengumpulan rekomendasi CAPA harus berdasarkan tanggal surat TL diterima pelaku usaha/ linsek. Selain itu untuk pengumpulan dokumen CAPA membutuhkan waktu karena pengiriman CAPA yang tersebar ke nomor kontak petugas. Adanya sarana yang tidak bisa mengirimkan CAPA jika tidak ke akun khusus/ resmi instansi pemerintah (tidak termasuk .com) sehingga pelaku usahanya diarahkan untuk mengirimkan CAPAnya ke email pom.go.id	Memastikan surat TL diterima pelaku usaha/ linsek dengan selalu mengingatkan petugas untuk mengirimkan surat TLnya juga melalui media komunikasi online seperti email ataupun whatsapp. Membuat link yang berisi fasilitas mendownload format CAPA dan mengupload kembali pada form dalam link yang sama (untuk percepatan dan kerapian pengarsipan dokumen CAPA). Melakukan koordinasi dengan bagian IT jika memungkinkan untuk membuatkan akun pom.go.id khusus untuk keperluan penerimaan CAPA dari pelaku usaha	Desember 2025	Progres	Melakukan pengawalan dan desk CAPA sebagian sarana	Melakukan pengawalan dan desk CAPA sebagian sarana lainnya	Peningkatan kinerja
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	Flat	85,00	100,00	117,65	Tidak ada target sarana yang direncanakan diperiksa di bulan April	Pemeriksaan akan dilaksanakan sesuai perencanaan	Desember 2025	Progres	Melakukan pemeriksaan satu sarana sesuai pedoman pemeriksaan	Melakukan pemeriksaan lima sarana lainnya sesuai pedoman pemeriksaan	Sesuai target

8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	Flat	85,00	100	117,65	- Pelaku usaha industri pangan olahan belum menerapkan seluruh aspek CPPOB dengan baik - Pembinaan terhadap pelaku usaha pangan olahan belum dapat dilaksanakan secara maksimal.	- Melaksanakan pembinaan kepada pelaku usaha agar meningkatkan pemahaman terhadap penerapan CPPOB ddalam proses produksi sehingga menghasilkan produk pangan yang aman dan bermutu. - Melaksanakan tindak lanjut hasil inspeksi sarana secara konsisten diantaranya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha	Mei 2025	Selesai	- Melaksanakan tindak lanjut hasil inspeksi sarana secara konsisten diantaranya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha. - Telah melakukan pengawasan dan pembinaan kepada 4 sarana pangan olahan dalam penerapan cara produksi pangan olahan yang baik	- Evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha	- Telah melakukan pengawasan dan pembinaan kepada 4 sarana pangan olahan dalam penerapan cara produksi pangan olahan yang baik
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,00	Flat	92,00	99,03	107,64	Sarana distribusi sediaan farmasi belum secara konsisten melakukan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan	Melakukan pemeriksaan sarana berdasarkan analisa resiko dan pemberian Tindak lanjut sesuai ketentuan	Desember 2025	Progres	Membuat tindak lanjut hasil inspeksi sesuai timeline dan melakukan monev CAPA	Mendampingi pelaku usaha dan penyusunan CAPA dan memantau konsistensi sarana dalam penerapan CAPA yang telah dibuat	Tercapai target

10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	Flat	85,00	93,39	109,87	Pengawasan sarana distribusi pangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan surat tindak lanjut dilaksanakan sesuai ketentuan serta terdapat surat tindak lanjut yang sedang proses masih dalam rentang kendali time line surat tindak lanjut . Peningkatan koordinasi dalam tim kerja sangat dibutuhkan dalam rangkla mencapai kinerja yang maksimal.	Meningkatkan monitoring terhadap tindak lanjut hasil pengawasan dan meningkatkan koordinasi dalam tim	Desember 2025	Progres	Dilaksanakan monitroing tindak lanjut agar sesuai ketentuan	melakukan monitoring terhadap tindak lanjut hasil pengawasan sarana disribusi pangan,	Tercapainya target. Untuk itu perlu monitoring tindak lanjut hasil pengawasan distribusi pangan ditingkatkan
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	81,09	Flat	81,09	99,78	123,05	Jenis media iklan tertentu, terutama media cetak dan media penyiaran lokal, tidak selalu tersedia sehingga mempengaruhi realisasi perencanaan pengawasan iklan yang sudah dibuat. Pelaporan pengawasan iklan juga dapat terdampak karena petugas pengawasan memiliki tugas utama lainnya.	Perluasan area pengawasan iklan atau penambahan waktu pengawasan iklan khususnya pengawasan di kab/kota lain dan penjadwalan pelaksanaan pengawasan diatur pada awal bulan.	Desember 2025	Progress	Perencanaan sudah ditetapkan menyesuaikan dengan target yang ditetapkan.	Penjadwalan pengawasan iklan untuk periode triwulan dan pemantauan efektivitas pelaksanaannya	Pemantauan efektivitas pelaksanaan terhadap pencapaian target dan realisasinya.
12	Persentase cakupan sarana prod. pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	63,00	Kumulatif	63,00	100,00	158,73	Pelaku usaha industri pangan olahan belum menerapkan seluruh aspek CPPOB dengan baik	- Melaksanakan pembinaan kepada pelaku usaha sehingga meningkatkan pemahaman pelaku usaha agar menjalankan aturan dalam produksi pangan olahan sehingga makanan	Mei 2025	Progres	- Telah melaksanakan pengawasan ke 3 (tiga) sarana industri pangan dan melakukan pembinaan kepada pelaku usaha sehingga dapat menerapkan	- Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan perbaikannya, sesuai batas waktu yang telah disepakati.	- Melaksanakan pengawasan ke 3 (tiga) sarana industri pangan dan melakukan pembinaan kepada pelaku usaha sehingga dapat

								aman dan bermutu dapat dicapai. - Monitoring proses evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan perbaikannya, sesuai batas waktu yang telah disepakati. - Membuat surat pernyataan bahwa CAPA telah selesai/ closed, apabila berdasarkan hasil evaluasi tindakan perbaikan yang dilaporkan sudah sesuai.			CPPOB di sarana industri. - Telah melakukan monitoring proses evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha	- Membuat surat pernyataan bahwa CAPA telah selesai/closed, apabila berdasarkan hasil evaluasi tindakan perbaikan yang dilaporkan sudah sesuai	menerapkan CPPOB di sarana industri. - Monitoring proses evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77,00	Kumulatif Triwulan	76,70	76,70	100,00	Permasalahan : Verifikasi MA banyak yang harus dilpenuhi untuk melengkapi data kemampuan uji Capaian untuk bulan April ini masih belum dievaluasi pusat (P3OMN) karena Monev dilakukan per TW	Lab harus melakukan peningkatan Standar Ruang Lingkup dan verifikasi MA secara bertahap sesuai perencanaan yang disusun	Juni	Selesai	Verifikasi MA TW I sesuai target	Pada TW II ini (April sd Juni) diupayakan pemenuhan SRL oleh lab yang merencanakan, yaitu lab Mikrobiologi dan Kosmetik	. Untuk bulan April ini, realisasi masih sama dengan Nilai Pemenuhan target SKL TW 1 sudah terpenuhi (Target 76,7, Realisasi 81,2, Capaian 105,9%)
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88,00	Flat	88,00	85,73	97,42	- Kegiatan KIE Rutin Tahun 2025 belum terlaksana	- Melaksanakan KIE Rutin Tahun 2025	Desember	Progres	- Pelaksanaan KIE Rutin (Cegah Stunting) Locus Koto Panjang Kota Solok pada tanggal 24 April 2025	-	- Pelaksanaan kegiatan KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Padang Tahun 2025 sesuai perencanaan yang disusun. - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Padang memenuhi target.

15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	14,00	Kumulatif	25,00	25,00	100,00	Belum terlaksana Advokasi Lintas Sektor Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan secara keseluruhan, pelaksanaan sebelumnya baru sampai tahap Audiensi Program yang merupakan bagian dari tahap Advokasi	Pelaksanaan Advokasi Lintas Sektor Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	April 2025	Progress	Telah terlaksana Advokasi Lintas Sektor Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan di Kabupaten Solok pada tanggal 28 April 2025	Pelaksanaan tahapan program selanjutnya akan dilaksanakan Sosialiasasi Keamanan Pangan Sekolah dan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah yang akan dilaksanakan pada Bulan Mei 2025	Pelaksanaan kegiatan berdasarkan tahapan program sesuai dengan masing-masing timeline dengan capaian akhir 100% dan jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan sesuai target
16	Jumlah desa pangan aman	6,00	Kumulatif	25,00	25,00	100,00	Belum terlaksana Advokasi Kelembagaan Desa secara keseluruhan, pelaksanaan sebelumnya baru sampai tahap Audiensi Program yang merupakan bagian dari tahap Advokasi	Pelaksanaan Advokasi Kelembagaan Desa	April 2025	Progress	Telah terlaksana Advokasi Kelembagaan Desa di Kabupaten Solok pada tanggal 28 April 2025	Pelaksanaan tahapan program selanjutnya akan dilaksanakan Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Desa yang akan dilaksanakan pada Bulan Mei 2025	Pelaksanaan kegiatan berdasarkan tahapan program sesuai dengan masing-masing timeline dengan capaian akhir 100% dan jumlah desa pangan aman sesuai dengan target
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	Kumulatif	25,00	25,00	100,00	Belum terlaksana Forum Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar, pelaksanaan sebelumnya baru sampai tahap Audiensi Program yang merupakan bagian dari tahap Advokasi	Pelaksanaan Forum Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	April 2025	Progress	Telah terlaksana Forum Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar di Kabupaten Solok pada tanggal 28 April 2025	Pelaksanaan tahapan program selanjutnya akan dilaksanakan adalah Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar pada Bulan Mei 2025	Pelaksanaan kegiatan berdasarkan tahapan program sesuai dengan masing-masing timeline dengan capaian akhir 100% dan jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas sesuai target

18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80,00	Kumulatif	23,32	23,00	98,63	- Pelaku usaha UMKM pangan belum memahami CPPOB - Pelaku usaha UMKM OBA belum memahami CPOTB - Kemampuan pelaku usaha dalam teknologi mengakibatkan proses pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB belum dapat dilakukan secara cepat dan mandiri	- Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dalam rangka penerapan CPPOB dan CPOTB - Melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dan OBA dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB dan CPOTB bertahap di aplikasi	Mei 2025	Selesai	- Melakukan pembinaan kepada 2 (dua) pelaku usaha dalam rangka penerapan CPPOB dan 1(satu) pelaku usaha dalam rangka penerapan CPOTB - Melakukan pendampingan langsung kepada 3 (tiga) pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi	- Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha OBA dalam rangka penerapan CPOTB	- Melakukan pembinaan kepada 2 (dua) pelaku usaha dalam rangka penerapan CPPOB dan 1(satu) pelaku usaha dalam rangka penerapan CPOTB - Melakukan pendampingan langsung kepada 3 (tiga) pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	90,00	Kumulatif	42,50	23,00	54,12	Sudah didapatkan 1 perkara, namun terdapat perubahan perhitungan realisasi perkara menjadi menggunakan jumlah perkara DIPA awal (4 perkara) yang sebelumnya pada saat penetapan target menggunakan target efisiensi (1 perkara). Untuk itu sudah diusulkan perubahan target IKU ke Roren yang belum diterima balasannya. Dengan tujuan agar realisasi IKU dapat tercapai sesuai target.	Melakukan gelar perkara dan menyelesaikan proses2 tahap penyelesaian Berkas Perkara serta menunggu tanggapan usulan revisi target dari Roren	Desember 2025	Progres	3. Melakukan kegiatan intelijen sesuai pedoman intelijen. 2. Melaporkan hasil intensifikasi operasi penindakan	Penyelesaian carry over	Tercapainya target untuk Mencari dan mengumpulkan bukti untuk terangnnya suatu tindak pidana

20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90,00	Kumulatif	50,00	50,00	100,00	1. Kegiatan patroli siber dan profiling siber terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang didistribusikan secara online telah dilaksanakan. 2. Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan obat dan makanan masih menunggu dari direktorat cegah tangkal. 3. Laporan analisis kerawanan kejahatan belum dilaksanakan	1. Menyusun laporan Analisis Penelusuran Siber secara tepat waktu 2. Menyusun laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan obat dan makanan setalah dapat rekomendasi dari direktorat cegah tangkal 3. Menyusun perencanaan untuk laporan analisis kerawanan kejahatan akan dibuat perencanaan	Desember	Progres	Menyusun laporan Analisis Penelusuran Siber bulan april secara tepat waktu	1. Menyusun laporan Analisis Penelusuran Siber bulan Mei secara tepat waktu 2. Menyusun laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan obat dan makanan 3. Menyusun laporan analisis kerawanan kejahatan	Tercapainya target Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar
21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,70	Akhir Tahun	-	-	-	Mendapatkan nilai Hasil survei SPKP (Survei Persepsi Kualitas Pelayanan) bulan Maret : 3,93 dan Survei SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) : 98,34 Kemampuan pelaku usaha dalam teknologi mengakibatkan proses pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB belum dapat dilakukan secara cepat dan mandiri	1. Melakukan kegiatan layanan publik informasi dan pengaduan bulan April 2. Melakukan kegiatan layanan pengujian pihak ketiga bulan April 3. Melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi OSS RBA bulan April 4. Melaksanakan survei pelayanan publik kepada konsumen bulan April 5. Melaksanakan	Desember 2025	Progress	1. Telah melakukan kegiatan layanan publik informasi dan pengaduan bulan April 2. Telah melakukan kegiatan layanan pengujian pihak ketiga bulan April 3.Telah melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi OSS RBA bulan April 4. Telah melaksanakan survei pelayanan publik kepada konsumen	1. Melakukan kegiatan layanan publik informasi dan pengaduan bulan Mei 2. Melakukan kegiatan layanan pengujian pihak ketiga bulan Mei 3. Melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi OSS RBA bulan Mei	Tercapainya target Indeks Pelayanan Publik UPT

								kegiatan Forum Konsltasi Publik Tahun 2025.			bulan April 5. Kegiatan Forum Konsltasi Publik Tahun 2025 telah dilaksanakan	4. Melaksanakan survei pelayanan publik kepada konsumen bulan Mei 5. Membuat laporan kegiatan Forum Konsltasi Publik Tahun 2025 telah dilaksanakan	

22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)	90,00	Akhir Tahun	-	-	-	*Pemantauan terhadap rencana kerja pembangunan ZI bulan April belum dilaporkan *Program prioritas zona 1 belum terlaksana * terdapat kekurangan data dukung implementasi RB *Program prioritas zona 2 sudah dijalankan *Pemantauan/monitoring Pelaksanaan kegiatan di setiap Fungsi telah sesuai SOP Mikro, SOP Makro dan Juknis *Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja , operasional manajemen SDM dan pemberian layanan kepada publik telah dilaksankan *Monitoring dan evaluasi KIP sesuai peraturan per-UU telah dilaksankan *Penyusunan kinerja individu telah difinalisasi *Rencana bangkom belum terlaksana dikarenakan antara lain masih terkendala efisiensi anggaran *Progress Perencanaan Inovasi Googlesite Monev Kinerja masih rendah * Implementasi Sakip dalam pencapaian	*Melaksanakan pemantauan Renja ZI bulan april * Menyusun rencana pelaksanaan program prioritas tahun 2025 * melengkapi daduk implementasi RB * Melakukan monitoring penilaian kinerja individu triwulan I *Menyusun perencanaan bangkom melalui pembelajaran mandiri yang tidak berbayar misalnya melalui IDEAS *Progress pembuatan Inovasi Googlesite Monev Kinerja *Implementasi Sakip dalam pencapaian kinerja setiap bulan dengan melakukan monev bulan Maret *Input Monev online bulan Januari sd Maret *Penyusunan laporan Kinerja TW I dan evaluasi Internal TW 1 *Pembuatan Laporan Gratifikasi Triwulan I *Pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerjai pokja pelayanan publik yang berkesinambungan dan sesuai jadwal *Revieu standar pelayanan publik	Desember 2025	Progress	* Monev Bulanan Januari - Maret * daduk implementasi RB *Pelaksanaan dan Monev program prioritas zona 2 - Telah dilakukan monitoring penilaian kinerja individu triwulan I - Telah disusun perencanaan bangkom melalui pembelajaran mandiri yang tidak berbayar misalnya melalui IDEAS - Telah ditetapkan nama aplikasi dan menu2 pada aplikasi Inovasi Googlesite Monev Kinerja -Monev renja RB sd bulan Maret 2025 telah disusun - Monev kinerja per IKU bulan Maret telah dinput oleh masing-masing ketua Tim pada bulan April 2025 -Rencana Kerja RB 2025 telah ditetapkan - Input Monev online bulan Januari sd Maret telah dilaksankan di bulan April 2025 - Laporan Kinerja	* Monev Renja Bulan April * Program prioritas - Mengisi data-data pada aplikasi Inovasi Googlesite Monev Kinerja -Membuat monev renja RB sd bulan April 2025 - Monev kinerja per IKU bulan April 2025 - Implementasi Rencana Kerja RB 2025 - Input Monev online bulan April paling lambat tanggal 10 Mei - Pengembangkan inovasi pelayanan publik yang berdasarkan kebutuhan stakeholder atau hasil manajemen risiko .	Target nilai pembangunan ZI dapat tercapai *Program prioritas zona 2 terlaksana dan dimonitoring * Terlaksananya Monev Bulanan NIlai pembangunan ZI zona 4 dapat tercapai *Meningkatnya nilai Pokja Pengawasan * Program prioritas zona terlaksana dan dimonitoring * Terlaksananya Monev Bulanan *Meningkatnya nilai pokja pelayanan publik -Pelaksanaan program/ rencana kerja yang konsisten dan berkesinambungan. -Mengembangkan inovasi pelayanan publik yang berdasarkan kebutuhan stakeholder atau hasil manajemen risiko .

							kinerja untuk bulan Maret akan dievaluasi pada bulan April * Monev online bulan Januari sd Maret belum diinput karena belum finalnya DO IKU * Penyusunan laporan Kinerja dan evaluasi Internal TW 1 belum disusun * Nilai Survei SPAK (Survei Persepsi Anti Korupsi) bulan Maret mendapatkan nilai 3,98 * Laporan Gratifikasi Triwulan I belum dilaporkan * Laporan benturan kepentingan Triwulan I telah dilaporkan *Peningkatan Nilai Pokja Pelayanan Publik * Implementasi pemberian penghargaan dan sanksi belum dilaksanakan secara konsisten *Inovasi Pelayanan Publik yang berdasarkan kebutuhan stakeholder atau hasil manajemen resiko - Nilai SPKP (Survei Persepsi Kualitas Pelayanan) bulan Maret mendapatkan nilai 3,93	melalui Forum Konsultasi Publik *Pemberian penghargaan dan sanksi bulan April *Mengembangakn inovasi pelayanan publik yang berdasarkan kebutuhan stakeholder atau hasil manajemen risiko .			TW I dan Laporan evaluasi Internal TW 1 telah dikirimkan tepat waktu -Pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerjai pokja pelayanan publik yang berkesinambungan dan sesuai jadwal - Revieu standar pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik - Pemberian penghargaan dan sanksi bulan April		

23	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	82,00	Akhir Tahun	-	-	-	1. Lakip belum diupload di Subsite BBPOM di Padang 2. Realisasi IKU dan Monev online belum diinput pada bulan Januari sd Maret 2025 3. Sosialisasi SOP dan Monev Sakip belum dilaksanakan secara keseluruhan 4. Laporan Kinerja dan Laporan Evaluasi Internal TW I belum dikirim 5. Implementasi SAKIP belum maksimal dilaksanakan pada semua IKU dan fungsi terkait agar target nilai AKIP 2025 dapat tercapai	1. Upload Lakip Tahun 2024 2. Input data monev online bulan januari, februari dan Maret di aplikasi 3. Sosialisasi SOP dan pedoman Sakip monev 4. Pengisian Monev capaian kinerja oleh ka Tim Bulan Januari, Februari dan Maret 5. Implementasi SAKIP sesuai pedoman pada semua IKU agar target dapat tercapai 6. Pengiriman Laporan Kinerja dan laporan Evaluasi Internal TW 1 2025	Desember	Progress	1. Lakip dan Laptah Tahun 2024 telah diupload 2. Data monev online bulan januari, februari dan Maret telah diinput di aplikasi 3. Sosialisasi SOP dan pedoman Sakip monev dismapaikan melalui whatsup group dan memo dinas 4. Pengisian Monev capaian kinerja oleh ka Tim Bulan Januari, Februari dan Maret Tahun 2025 5. Implementasi SAKIP sesuai pedoman pada semua IKU agar target dapat tercapai 6.Pengiriman Laporan Kinerja dan laporan Evaluasi Internal TW 1 2025	1. Input data monev online bulan April di aplikasi 2. Pengisian Monev capaian kinerja oleh ka Tim Bulan April 2025 3. Implementasi SAKIP sesuai pedoman pada semua IKU agar target dapat tercapai 4. Pengisian LKE Sakip dan upload data dukung 5. Sosialisasi kepada pegawai tentang IKU 2025	Tercapaianya target nilai AKIPBBPOM di Padang
24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00	Akhir Tahun	-	-	-	Capaian Output bulan januari-maret telah dilaporkan dan memperoleh nilai 100 sehingga nilai IKPA juga mendapat nilai maksimal 100.	2. Input data monev online bulan januari, februari dan Maret di aplikasi	Desember 2025	Progres	1. Telah melakukan revisi DIPA sekaligus revisi RPD Halaman III DIPA 2. Telah menjaga konsistensi RPD bulan april yang telah ditetapkan	1. Melakukan revisi DIPA sesuai dengan ketentuan dan memaksimalkan pengajuan beberapa jenis revisi dalam 1	Tercapainya target Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Padang Tahun 2025

											pada Halaman III DIPA. 3. Telah mempercepat pelaksanaan kegiatan barang dan jasa pada bualan april. 4. Telah mendaftarkan data kontrak secara tepat waktu pada bulan april. 5. Telah mempercepat pembayaran belanja kontraktual pada bulan april. 6. Telah melaporkan capaian output bulan januari-maret secara tepat dan tepat waktu. 7. Telah menyelesaikan pertanggungjawaban UP dan TUP dengan tepat waktu pada bulan maret.	kali pengajuan revisi. 2. Menjaga Konsistensi RPD bulan mei yang telah ditetapkan pada Halaman III DIPA. 3. Mempercepat pelaksanaan kegiatan barang dan jasa untuk menacapi target realisasi anggaran TW 2. 4. Mendaftarkan data kontrak secara tepat waktu pada bulan mei. 5. Mempercepat pembayaran belanja kontraktual pada bulan mei. 6. Melaporkan capaian output bulan april secara tepat dan tepat waktu. 7. Menyelesaikan pertanggungjawaban UP dan TUP dengan tepat waktu pada bulan mei 8. Melakukan efisiensi anggaran RO SBK.	

25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,95	Akhir Tahun	-	-	-	- Masih terdapat pegawai yang belum mengikuti peltihan Manajemen Risiko - Masih terdapat pegawai yang belum memahami Manajemen Risiko sehingga perlu disosialisasikan kembali setiap periode - Belum semua identifikasi risiko telah mempertimabangkan seluruh isu internal dan eksternal yang ada - Penilaian risiko masih belum konsisten sesuai pedoman terkait rumusan, atribut pengendalian, penetapan level risiko, tindakan mitigasi risiko dan lain-lain"	1.Akan mendata pegawai yang telah mengikuti pelatihan Manajemen Risiko dan bagi yang belum untuk segera mengikuti pelatihan bagi yang belum. 2. Melakukan sosialisasi Manajemen Risiko 3. Melakukan identifikasi risiko dengan mempertimbangakan seluruh isu internal dan eksternal yang ada 4. Melakukan penilaian risiko secara konsisten sesuai pedoman terkait rumusan, atribut pengendalian, penetapan level risiko, tindakan mitigasi risiko dan lain-lain" 5. Melakukan monitoring terhadap risiko yang telah diidentifikasi	Desember	Progress	1.Telah mendata pegawai yang belum mengikuti pelatihan manrisk, pegawai tersebut sedang proses mengikuti pelatihan 2. Sosialisasi Manajemen Risiko melalui whatsup group 3. Melakukan monitoring terhadap risiko yang telah diidentifikasi	1.Memastikan seluruh pegawai telah mengikuti pelatihan Mananjemen Risiko 2. Melakukan sosialisasi Manajemen Risiko 3. Melakukan identifikasi risiko dengan mempertimbangkan seluruh isu internal dan eksternal 4. Melakukan penilaian risiko secara konsisten sesuai pedoman terkait rumusan, atribut pengendalian, penetapan level risiko, tindakan mitigasi risiko dan lain-lain" 5. Melakukan monitoring terhadap risiko yang telah diidentifikasi	Nilai Indeks Manajemen Risiko dapat tercapai

NO.	Indikator Kegiatan	TARGET 2025	JENIS	MEI			KONDISI AWAL	REKOMENDASI	TIMELINE PENYELESAIAN	STATUS	RENCANA AKSI		KONDISI AKHIR
				Target	Realisasi	Capaian (%)	(Kendala/Permasalahan/Capaian Terhadap Target)	(Rencana Tindak Lanjut)	(Bulan)	(Progres/Selesai)	(Rencana Aksi yang Sudah Selesai)	(Rencana Aksi yang Belum Selesai)	(Tercapainya Target/Peningkatan Kinerja)
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,75	Flat	86,75	95,99	110,65	- Kerusakan alat AAS untuk pengujian logam berat Pb, Cd dan As, menghambat pelaksanaan uji logam untuk komoditi Kosmetik, OBA dan SK - Adanya kebijakan efisiensi pada awal tahun serta relaksasi pada pertengahan bulan April mengakibatkan penumpukan beban kerja (beban sampling dan pengujian) pada bulan Mei hingga akhir tahun 2025 '- Tingginya jumlah sampel yang menjadi target uji laboratorium Mikrobiologi, karena peningkatan jumlah sampel untuk semua komoditi (sediaan farmasi dan pangan), melebihi kapasitas uji laboratorium sehingga pengujian tidak dapat dilaksanakan untuk semua sampel secara bersamaan, hal ini memperpanjang waktu penyelesaian pengujian.	- Perbaikan alat AAS, serta mengalihkan pelaksanaan pengujian logam As, Pb dan Cd menggunakan alat AAS yang di kelola Lab. Pangan. - Menyusun ulang rencana sampling dan pengujian untuk bulan Mei samapai akhir tahun 2025 dengan mempertimbangakan kapsitas pengujian di laboratorium. - Mengatur pelaksanaan pengujian di laboratorium dengan memperhatikan waktu masuk sampel serta batas time line pengujian, agar tidak ada sampel yang terlalu lama menunggu untuk diuji.	Juni	Progres	- Mengalihkan pelaksanaan pengujian logam As, Pb dan Cd menggunakan alat AAS yang di kelola Lab. Pangan. '- Menyusun ulang rencana sampling dan pengujian untuk bulan Mei sampai akhir tahun 2025 dengan mempertimbangakan kapsitas pengujian di laboratorium. - Mengatur pelaksanaan pengujian dilaboratorium dengan memperhatikan waktu masuk sampel serta batas time line pengujian, agar tidak ada sampel yang terlalu lama menunggu untuk di uji.	- Perbaikan alat AAS	- Parameter uji logam (Pb; Cd dan As) dapat dilaksanakan sehingga target pemenuhan parameter uji dapat d penuhi 100% - Pemenuhan Time line pengujian sampai bulan Mei dapat dipenuhi 100%

2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26,00	Akhir Tahun		-	-	Hasil Monev laporan melalui website e-meso, baru 4 sarana pelayanan kesehatan yang melaporkan KTD, yaitu RS Semen Padang, RS Unand, RS Saanin, RSIA Restu.	`- Mengingatkan kembali tenaga kesehatan melalui WAG kolaborasi Meso `- Mengingatkan PIC Farmakovigilans untuk segera melaporkan KTD bersamaan dengan penagihan tindakan perbaikan hasil pemeriksaan sarana pelayanan kesehatan	Desember 2025	Progres	`- Mengingatkan kembali tenaga kesehatan melalui WAG kolaborasi Meso `- Mengingatkan PIC Farmakovigilans untuk segera melaporkan KTD bersamaan dengan penagihan tindakan perbaikan hasil pemeriksaan sarana pelayanan kesehatan	Rencana aksi akan dialakukan setiap Bulan hingga tercapai angka pelaporan 26% (12 Sarana yang melaporkan KTD)	Tercapainya Target Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	Flat	85,00	97,49	114,69	1. Keterbatasan ketersediaan reagensia, suku cadang dan baku pembanding sehingga terjadinya penyesuaian kategori sampling sampai tersedianya pengadaan reagensia yang dipesan 2. Terjadinya keterlambatan dari tindak lanjut sampel TMS disebabkan sampel yang diterima di laboratorium pada minggu ke 2 bulan Maret, kemudian dilakukan proses pengujian selama 15 HK (batas waktu pelaporan) sehingga pelaporan pengujian pada akhir bulan Maret dan tindak lanjut dilakukan pada awal bulan April 2025	1. Melakukan koordinasi internal antara katim fungsi pengujian pangan degan PPK untuk melakukan percepatan pengadaan reagensia, suku cadang dan baku banding 2. Melakukan percepatan jadwal pelaksanaan sampling sehingga pelaporan pengujian dan tindak lanjut hasil dapat dilaksanakan pada bulan yang sama 3. Meningkatkan koordinasi internal dalam hal sampling dan tindak lanjut sampling	Desember 2025	Progres	1. Melakukan tindak lanjut terhadap sampel yang tidak memenuhi syarat 2. Meningkatkan koordinasi dengan tim internal	Tindak lanjut sampel yang perlu dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan	Tercapainya target Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	Flat	100,00	100,00	100,00	Tidak ada pengaduan KLB KP bulan April	1. Melakukan pengujian terhadap sampel KLB KP yang masuk pada bulan Mei sesuai hasil investigasi epidemiologi yang dilakukan instansi pengirim sampel 2. Terus meningkatkan koordinasi internal dan eksternal terkait pengaduan kasus KLB KP	Juni 2025	Progres	Menindaklanjuti (menguji dan melaporkan) sampel KLB KP	-	Realisasi penyelesaian sampel KLB KP yang ditindaklanjuti tercapai sesuai target (100%). Laporan evaluasi selesai tepat waktu dan sesuai standar.
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	Flat	85,00	97,50	114,71	Terjadinya perubahan dari target efisiensi ke target awal sampel PIRT sebelum efisiensi sehingga perlu adanya persiapan dan penyesuaian kategori sampling dengan ketersediaan reagensia, suku cadang, baku banding dan koordinasi dengan lab regional	1. Meningkatkan koordinasi internal dalam hal sampling dan tindak lanjut sampling 2. Melakukan koordinasi internal antara katim fungsi pengujian pangan degan PPK untuk melakukan percepatan pengadaan reagensia, suku cadang dan baku banding	Desember 2025	Progres	1. Melakukan tindak lanjut terhadap sampel yang tidak memenuhi syarat 2. Meningkatkan koordinasi dengan tim internal	1. Meningkatkan monitoring terhadap sampel PIRT yang perlu ditindaklanjuti bersama tim internal, 2. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait	Tercapainya target Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89,50	Flat	89,50	83,33	93,11	1. Telah dibuat link yang berisi fasilitas mendownload format CAPA dan mengupload kembali pada form dalam link yang sama (untuk percepatan dan kerapian pengarsipan dokumen CAPA). Link ini telah dimasukkan ke dalam narasi di format surat TL ke sarana. 2. Telah mulai terkumpul CAPA dalam satu folder sebagai hasil inputan dan upload sarana secara langsung ke link, tanpa harus melakukan chat ke nomor pribadi petugas. 3. Belum adanya persamaan persepsi dengan ketua tim terkait tentang kategori hasil pemeriksaan yang mewajibkan sarana diberikan rekomendasi tindak lanjut yang membutuhkan pengiriman CAPA atas perbaikan temuannya	1. Memastikan surat TL diterima pelaku usaha/ linsek dengan selalu mengingatkan petugas untuk mengirimkan surat TLnya juga melalui media komunikasi online seperti email ataupun whatsapp. 2. Petugas yang merekap CAPA per komoditi secara rutin, secara tidak langsung telah mengingatkan petugas untuk mengingatkan sarananya agar mengirimkan CAPA. 3. Melakukan diskusi dan mengambil kesepakatan tentang kategori sarana yang harus mengirimkan CAPA atas perbaikan temuannya. 4. Melakukan revisi RHPK atas kesepakatan tersebut di atas.	Desember 2025	Progres	1. Memastikan surat TL diterima pelaku usaha/ linsek dengan selalu mengingatkan petugas untuk mengirimkan surat TLnya juga melalui media komunikasi online seperti email ataupun whatsapp. 2. Membuat link yang berisi fasilitas mendownload format CAPA dan mengupload kembali pada form dalam link yang sama (untuk percepatan dan kerapian pengarsipan dokumen CAPA).	1. Melakukan pengawalan dan desk CAPA sebagian sarana lainnya 2. Melakukan koordinasi dengan bagian IT jika memungkinkan untuk membuatkan akun pom.go.id khusus untuk keperluan penerimaan CAPA dari pelaku usaha	Peningkatan kinerja dari periode sebelumnya

7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	Flat	85,00	100,00	117,65	Ada satu sarana yang ditargetkan di bulan Mei, namun karena padatnya kesibukan petugas yang telah ditetapkan sebelumnya pada SKP, membuat pemeriksaan ini dipending	Pemeriksaan akan dilaksanakan pada bulan berikutnya dan telah dipastikan ke petugas agar tidak ada lagi pembatalan dibulan tersebut karena sudah merupakan batas akhir pencapaian target SKP TW II	Desember 2025	Progres	Melakukan pemeriksaan satu sarana sesuai pedoman pemeriksaan	Melakukan pemeriksaan lima sarana lainnya sesuai pedoman pemeriksaan	Revisi target
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	Flat	85,00	100	117,65	Pelaku usaha industri pangan olahan belum menerapkan seluruh aspek CPPOB dengan baik	1. Melaksanakan pembinaan kepada pelaku usaha agar meningkatkan pemahaman terhadap penerapan CPPOB dalam proses produksi sehingga menghasilkan produk pangan yang aman dan bermutu. 2. Melaksanakan tindak lanjut hasil inspeksi sarana secara konsisten diantaranya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha	Mei 2025	Selesai	1. Melaksanakan tindak lanjut hasil inspeksi terhadap 8 sarana produksi pangan secara konsisten diantaranya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha. 2. Melakukan pengawasan dan pembinaan kepada 9 sarana pangan olahan dalam penerapan cara produksi pangan olahan yang baik	Evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha	Telah melakukan pengawasan dan pembinaan kepada 9 sarana pangan olahan dalam penerapan cara produksi pangan olahan yang baik

9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanju ti sesuai ketentuan	92,00	Flat	92,00	97,44	105,91	Sarana distribusi sediaan farmasi belum secara konsisten melakukan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan	Melakukan pemeriksaan sarana berdasarkan analisa resiko dan pemberian Tindak lanjut sesuai ketentuan	Desembe r 2025	Progres	Membuat tindak lanjut hasil inspeksi dan pelaporan sesuai timeline dan melakukan monev CAPA	Mendampingi pelaku usaha dan penyusunan CAPA dan memantau konsistensi sarana dalam penerapan CAPA yang telah dibuat	Tercapai target Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanju ti sesuai ketentuan	85,00	Flat	85,00	91,91	108,13	Pengawasan sarana distribusi pangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan surat tindak lanjut dilaksanakan sesuai ketentuan serta terdapat surat tindak lanjut yang sedang proses masih dalam rentang kendali time line surat tindak lanjut . Peningkatan koordinasi dalam tim kerja sangat dibutuhkan dalam rangkla mencapai kinerja yang maksimal.	1. Meningkatkan monitoring terhadap tindak lanjut hasil pengawasan. 2. Meningkatkan koordinasi dalam tim kerja pengawasan sarana distribusi pangan	Desembe r 2025	Progres	1. Melaksanakan monitoring tindak lanjut agar sesuai ketentuan. 2. Meningkatkan koordinasi dalam tim kerja pengawasan sarana distribusi pangan	1. Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut hasil pengawasan sarana distribusi pangan. 2. Terus meningkatkan koordinasi dalam tim kerja pengawasan sarana distribusi pangan	Tercapainya target Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	81,09	Flat	81,09	99,83	123,11	Jenis media iklan tertentu, terutama media cetak dan media penyiaran lokal, tidak selalu tersedia sehingga mempengaruhi realisasi perencanaan pengawasan iklan yang sudah dibuat. Pelaporan pengawasan iklan juga	Perluasan area pengawasan iklan atau penambahan waktu pengawasan iklan khususnya pengawasan di kab/kota lain dan penjadwalan pelaksanaan	Desembe r 2025	Progress	Perencanaan sudah ditetapkan menyesuaikan dengan target yang ditetapkan.	Penjadwalan pengawasan iklan untuk periode triwulan dan pemantauan efektivitas pelaksanaannya	Telah dilakukan pemantauan efektivitas pelaksanaan terhadap pencapaian target dan realisasinya.

							dapat terdampak karena petugas pengawasan memiliki tugas utama lainnya.	pengawasan diatur pada awal bulan.					
12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	63,00	Kumulatif	63,00	100,00	158,73	Pelaku usaha industri pangan olahan belum menerapkan seluruh aspek CPPOB dengan baik	- Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan perbaikannya, sesuai batas waktu yang telah disepakati. - Membuat surat pernyataan bahwa CAPA telah selesai/closed, apabila berdasarkan hasil evaluasi tindakan perbaikan yang dilaporkan sudah sesuai	Mei 2025	Selesai	- Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan perbaikannya, sesuai batas waktu yang telah disepakati. - Membuat surat pernyataan bahwa CAPA telah selesai/closed berdasarkan hasil evaluasi tindakan perbaikan yang dilaporkan sudah sesuai	-	Tercapainya target Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77,00	Kumulatif Triwulan	76,70	81,20	105,87	Untuk bulan Mei ini, realisasi masih sama dengan Nilai Pemenuhan target SKL TW 1 sudah terpenuhi (Target 76,7, Realisasi 81,2, Capaian 105,9%)	1.Lab harus melakukan pengujian dengan metoda analisa dalam SKL yang belum mampu uji untuk peningkatan Standar Ruang Lingkup dan kompetensi personil laboratorium serta verifikasi MA secara bertahap sesuai perencanaan yang disusun. 2. Percepatan pengadaan alat laboratorium untuk meningkatkan standar peralatan dalam SKL.	Desember 2025	Progres	Verifikasi MA TW I sesuai target	Pada TW II ini (April sd Juni) diupayakan pemenuhan SRL oleh lab yang merencanakan, yaitu lab Mikrobiologi dan Kosmetik	Capaian belum dapat dihitung karena perhitungan per TW. Perhitungan dapat dilakukan setelah akumulasi realisasi target sampai dengan bulan Juni. Tercapainya Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88,00	Flat	88,00	86,49	98,28	- Target kegiatan KIE Rutin sebanyak 194 peserta baru terlaksana 50 peserta (25,77 %) - Target kegiatan KIE bersama TOMAS Tahun 2025 sebanyak 15 titik @ 250 peserta belum terlaksana (0%)	- Melaksanakankegiatan KIE sesuai perencanaan yang disusun.	Desember	Progres	Melaksanakan kegiatan: * KIE Cegah Stunting 1. Locus Nagari Sikabu Kabupaten Padang Pariaman tanggal 5 Mei 2025, sebanyak 44 orang peserta. * KIE Bersama TOMAS sebanyak 4 titk @ 250 orang peserta. 1. Tgl 9 Mei 2025, Kec. Ampek ANgkek 2. Tgl 10 Mei , Kec. Akabiluru 3. Tgl 16 Mei, Kec. Sicincin 4. Tgl 17 Mei 2025, Kec. Sungai Pua	Kegiatan yang belum terlaksana -Kegiatan KIE Rutin yang belum terlaksana 2 kegiatan/ 100 peserta (48,45 %) - Kegiatan KIE bersama TOMAS yang belum terlaksana sebanyak 11 titik @ 250 peserta (73,33%)	- Pelaksanaan kegiatan KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang Tahun 2025 sesuai perencanaan yang disusun. - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang memenuhi target.

15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	14,00	Kumulatif	47,50	47,50	100,00	- Perhitungan % progress dihitung berdasarkan jumlah sekolah yang dilakukan intervensi (7 sekolah) karena kondisi efisiensi - Sebelumnya telah terlaksana kegiatan advokasi keamanan pangan di Kabupaten Solok pada bulan April dan pada bulan mei dilanjutkan dengan tahapan berikutnya	- Pelaksanaan Sosialisasi Keamanan Pangan kepada sekolah intervensi - Pelaksanaan kegiatan Bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah intervensi	Mei 2025	Progres	Melaksanakan tahapan program: - Pelaksanaan Sosialisasi Keamanan Pangan yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 7 Mei 2025 yang diikuti oleh sekolah/madrasah intervensi dan OPD terkait. - Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah/Madrasah yang diikuti oleh 7 sekolah/madrasah intervensi pada tanggal 15 Mei 2025 yang bertempat di SMAN 2 Gunung Talang, Kab. Solok dan sekaligus dilakukan pemberian paket edukasi keamanan pangan yang dapat digunakan oleh pihak sekolah/madrasah dalam melaksanakan sosialisasi keamanan pangan komunitas sekolah	Melaksanakan tahapan program selanjutnya: Sosialisasi keamanan pangan untuk sekolah cakupan perluasan, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan serta pengawalan sekolah yang telah diintervensi sebelumnya.	Pelaksanaan kegiatan berdasarkan tahapan program sesuai dengan masing-masing timeline dengan capaian akhir 100% dan jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan sesuai target

16	Jumlah desa pangan aman	6,00	Kumulatif	37,50	37,50	100,00	- Perhitungan % progress dihitung berdasarkan jumlah desa yang dilakukan intervensi (3 desa) karena kondisi efisiensi - Sebelumnya telah terlaksana kegiatan advokasi keamanan pangan di Kabupaten Solok pada bulan April dan pada bulan mei dilanjutkan dengan tahapan berikutnya	- Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) untuk desa/nagari intervensi	Mei 2025	Progres	Melaksanakan tahapan program: - Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa untuk Kader Keamanan Pangan dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2025 yang diikuti oleh 3 nagari intervensi (Nagari Aia Batumbuak, Nagari Koto Gaek Guguak, Nagari Batang Barus)	Melaksanakan tahapan program selanjutnya: Bimtek komunitas, monitoring dan evaluasi serta pengawalan desa yang telah diintervensi pada tahun sebelumnya	Pelaksanaan kegiatan berdasarkan tahapan program sesuai dengan masing-masing timeline dengan capaian akhir 100% dan jumlah desa pangan aman
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	Kumulatif	50,00	50,00	100,00	- Sebelumnya telah terlaksana kegiatan advokasi keamanan pangan di Kabupaten Solok pada bulan April dan pada bulan mei dilanjutkan dengan tahapan berikutnya	- Pelaksanaan kegiatan bimtek dan penyuluhan kepada komunitas pasar	Mei 2025	Progress	Melaksnakan tahapan program: - Bimtek dan penyuluhan kepada komunitas pasar di Pasar Cupak pada tanggal 20 Mei 2025	Melaksnakan tahapan program selanjutnya: Sosialisasi Keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi, serta pengawalan pasar yang telah diintervensi pada tahun sebelumnya	Pelaksanaan kegiatan berdasarkan tahapan program sesuai dengan masing-masing timeline dengan capaian akhir 100% dan jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80,00	Kumulatif	30,84	30,67	99,45	1. Pelaku usaha UMKM pangan belum memahami CPPOB. 2. Pelaku usaha UMKM OBA belum memahami CPOTB. 3. Kemampuan pelaku usaha dalam teknologi mengakibatkan proses pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB belum dapat dilakukan secara cepat dan mandiri.	1. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dalam rangka penerapan CPPOB dan CPOTB. 2. Melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dan OBA dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB dan CPOTB bertahap di aplikasi. 3. Melaksanakan Bimtek CPPOB kepada UMKM pangan olahan.	Desember 2025	Progres	1. Melakukan pembinaan kepada 8 pelaku usaha dalam rangka penerapan CPPOB, 1 pelaku usaha industri kosmetik dalam rangka penerapan CPKB 2. Melakukan pendampingan langsung kepada 3 (tiga) pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi 3. Menyelenggarakan Bimtek CPPOB bagi UMKM pangan olahan	Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha OBA dalam rangka penerapan CPOTB	- Telah melakukan pembinaan kepada 8 pelaku usaha dalam rangka penerapan CPPOB, 1 pelaku usaha dalam rangka penerapan CPOTB dan 1 pelaku usaha kosmetik dalam rangka penerapan CPKB. - Telah melakukan pendampingan langsung kepada 3 (tiga) pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi.
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	90,00	Kumulatif	43,00	42,00	97,67	1. Terlaksananya proses penyidikan sediaan farmasi obat dan makanan terhadap 3 perkara. 2. Belum tercapainya target Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan karena ttingginya target RAP dan usulan perubahan target RAPK tidak disetujui.	1. Mempercepat proses tahap 1 untuk perkara berikutnya. 2. Merencanakan gelar perkara untuk kasus carry over.	Desember 2025	Progress	1. Melakukan kegiatan intelijen sesuai pedoman intelijen. 2. Melaporkan hasil operasi Pangea tindak pidana obat dan makanan.	Menyelesaikan 1 Perkara sampai tahap I	Telah mencari dan mengumpulkan bukti untuk terangnnya suatu perkara tindak pidana.

20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90,00	Kumulatif	50,00	50,00	100,00	1. Kegiatan patroli siber dan profiling siber terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang didistribusikan secara online telah dilaksanakan. 2. Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan obat dan makanan masih menunggu dari direktorat cegah tangkal. 3. Laporan analisis kerawanan kejahatan belum dilaksanakan	1. Menyusun laporan Analisis Penelusuran Siber secara tepat waktu 2. Menyusun laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan obat dan makanan setalah dapat rekomendasi dari direktorat cegah tangkal 3. Menyusun perencanaan untuk laporan analisis kerawanan kejahatan	Desember 2025	Progress	Menyusun Laporan Analisis Penelusuran Siber bulan Mei secara tepat waktu	1. Menyusun laporan Analisis Penelusuran Siber bulan Juni secara tepat waktu 2. Menyusun laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan obat dan makanan 3. Menyusun laporan analisis kerawanan kejahatan	Tercapainya target Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,70	Akhir Tahun		-	-	Mendapat Hasil survei indeks pelayanan publik bulan April 3,75 dan Survey SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) : 98,98 Masukan dan saran dari peserta FKP Tahun 2025 akan ditindaklanjuti dalam penyusunan satandar layanan publik. Kemampuan pelaku usaha dalam teknologi mengakibatkan proses pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB belum dapat dilakukan secara cepat dan mandiri	1. Melakukan kegiatan layanan publik informasi dan pengaduan bulan Mei. 2. Melakukan kegiatan layanan pengujian pihak ketiga bulan Mei. 3. Melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi OSS RBA bulan Mei. 4. Melaksanakan survei pelayanan publik kepada konsumen bulan Mei. 5. Membuat laporan kegiatan Forum Konsltasi Publik Tahun 2025. 6. Menyusun dan menetapkan serta mempublish satndar layanan publik tahun 2025 yang telah ditetapkan.	Desember 2025	Progress	1. Melakukan kegiatan layanan publik informasi dan pengaduan bulan Mei. 2. Melakukan kegiatan layanan pengujian pihak ketiga bulan Mei. 3. Melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi OSS RBA bulan Mei. 4. Melaksanakan survei pelayanan publik kepada konsumen bulan Mei. 5. Menyusun laporan kegiatan Forum Konsltasi Publik Tahun 2025 .	1. Melakukan kegiatan layanan publik informasi dan pengaduan bulan Juni 2. Melakukan kegiatan layanan pengujian pihak ketiga bulan Juni 3. Melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi OSS RBA bulan Juni 4. Melaksanakan survei pelayanan publik kepada konsumen bulan Juni 5. Menyusun dan menetapkan serta mempublish standar layanan publik tahun 2025 yang telah ditetapkan	Tercapainya target Indeks Pelayanan Publik UPT

22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)	90,00	Akhir Tahun		-	-	1. Masih ada renja yang belum dilaksanakan 2. Melakukan monitoring pelksanan renja dan program prioritas 3. Program prioritas zona 2 helpdesk berjalan lancar dan selalu dimonitor 4. Pemantauan/monitoring pelaksanaan kegiatan di setiap fungsi sesuai SOP 5. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi kegiatan dalam pengukuran kinerja, operasional manajemen SDM, dan pemberian layanan kepada publik 6. Monitoring dan evaluasi KIP sesuai peraturan per-UU. 7. Progress Perencanaan Inovasi Googlesite Monev Kinerja masih rendah 8. Implementasi SAKIP dalam pencapaian kinerja untuk bulan April 2025 9. Monev kinerja ulan Januari sd Maret sudah diinput 10. Laporan Kinerja dan evaluasi Internal TW 1 telah dikirim 11. Nilai Survei SPAK (Survei Persepsi Anti Korupsi) bulan April mendapatkan nilai 3,88 12. Peningkatan Nilai Pokja	1. Melaksanakan Monev Renja Bulan April 2. Melaksnakana Program prioritas 3. Melaksanakan Renja 4. Melakukan monitoring dan evaluasi adanya review/perubahan terhadap SOP Makro maupun Mikro. 5. Menyelesaikan Inovasi Googlesite Monev Kinerja 6. Melaksanakan Monev kinerja bulan April 2025 7. Merevieu standar pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik 8. Memberi penghargaan dan sanksi kepda petugas layanan bulan April 9. Mengembangakn inovasi pelayanan publik yang berdasarkan kebutuhan stakeholder atau hasil manajemen risiko.	Desember 2025	Progress	1. Melaksanakan Monev Renja Bulan April 2. Melaksanakana Renja Bulan Mei 3. Memantau progres pelksaan program prioritas 4. Melaksanakan monev kinerja bulan April 5. Merevieu standar pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik 6. Memberikan penghargaan dan sanksi kepada petugas layanan bulan April	1. Mengevaluasi progres program prioritas hingga TW 2 2. Melaksanakan Monev Renja bulan Mei 3. Melaksanakan Renja 4. Melengkapi pengembangan Inovasi Googlesite Monev Kinerja 5. Melaksanakan Monev kinerja bulan Mei 2025 6. Mengembangkan inovasi pelayanan publik yang berdasarkan kebutuhan stakeholder atau hasil manajemen risiko .	Target nilai pembangunan ZI dapat tercapai

							Pelayanan Publik 13. Implementasi pemberian penghargaan dan sanksi belum dilaksanakan secara konsisten 14. Inovasi Pelayanan Publik yang berdasarkan kebutuhan stakeholder atau hasil manajemen resiko 15. Nilai IPP April 3,93						
23	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	82,00	Akhir Tahun		-	-	1. Lakip dan Laptah Tahun 2024 telah diupload 2. Data monev online bulan januari, februari dan Maret telah diinput di aplikasi 3. Sosialisasi SOP dan pedoman Sakip monev disampaikan melalui whatsup group dan memo dinas 4. Pengisian Monev capaian kinerja oleh ka Tim Bulan Januari, Februari dan Maret Tahun 2025 5. Implementasi SAKIP sesuai pedoman pada semua IKU agar target dapat tercapai 6.Pengiriman Laporan Kinerja dan laporan Evaluasi Internal TW 1 2025	1. Input data monev online bulan April di aplikasi 2. Pengisian Monev capaian kinerja oleh ka Tim Bulan April 2025 3. Implementasi SAKIP sesuai pedoman pada semua IKU agar target dapat tercapai 4. Pengisian LKE Sakip dan upload data dukung 5. Sosialisasi kepada pegawai tentang IKU 2025	Desember	Progress	1. Menginput data monev online bulan April 2. Mengisi Monev capaian kinerja bulan April 3. Mengimplementasikan SAKIP sesuai pedoman pada semua IKU agar target dapat tercapai 4. Menginput dan melengkapi data dukung LKE SAKIP 5. Mensosialisasikan indikator kinerja kepada pegawai pada tanggal 14 Mei 2025	1. Menginput data monev online bulan Mei 2. Mengisi Monev capaian kinerja bulan Mei 3. Mengimplementasikan SAKIP sesuai pedoman pada semua IKU agar target dapat tercapai	Tercapaianya target nilai AKIP BBPOM di Padang

24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00	Akhir Tahun		-	-	Capaian Output bulan April telah dilaporkan dan memperoleh nilai 100 namun nilai IKPA belum maksimal.	1. Melakukan revisi DIPA sesuai dengan ketentuan dan memaksimalkan pengajuan beberapa jenis revisi dalam 1 kali pengajuan revisi. 2. Menjaga Konsistensi RPD bulan mei yang telah ditetapkan pada Halaman III DIPA. 3. Mempercepat pelaksanaan kegiatan barang dan jasa untuk menacapi target realisasi anggaran TW 2. 4. Mendaftarkan data kontrak secara tepat waktu pada bulan mei. 5. Mempercepat pembayaran belanja kontraktual pada bulan mei. 6. Melaporkan capaian output bulan april secara tepat dan tepat waktu. 7. Menyelesaikan pertanggungjawaban UP dan TUP dengan tepat waktu pada bulan mei 8. Melakukan efisiensi anggaran RO SBK.	Desember 2025	Progres	1. Menjaga konsistensi RPD bulan Mei yang telah ditetapkan pada Halaman III DIPA. 2. Mempercepat pelaksanaan kegiatan barang dan jasa pada bualan Mei. 3. Mendaftarkan data kontrak secara tepat waktu pada bulan Mei. 4. Mempercepat pembayaran belanja kontraktual pada bulan Mei. 5. Melaporkan capaian output bulan April secara tepat dan tepat waktu. 6. Menyelesaikan pertanggungjawaban UP dan TUP dengan tepat waktu pada bulan Mei.	1. Melakukan revisi DIPA sesuai dengan ketentuan dan memaksimalkan pengajuan beberapa jenis revisi dalam 1 kali pengajuan revisi. 2. Menjaga Konsistensi RPD bulan Juni yang telah ditetapkan pada Halaman III DIPA. 3. Mempercepat pelaksanaan kegiatan barang dan jasa untuk menacapi target realisasi anggaran TW 2. 4. Mendaftarkan data kontrak secara tepat waktu pada bulan Juni. 5. Mempercepat pembayaran belanja kontraktual pada bulan Juni. 6. Melaporkan capaian output bulan Mei secara tepat dan tepat waktu. 7. Menyelesaikan	Tercapainya target Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Padang Tahun 2025

												pertanggungjawaban UP dan TUP dengan tepat waktu pada bulan Juni 8. Melakukan efisiensi anggaran RO SBK.	
25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,95	Akhir Tahun		-	-	- Masih terdapat pegawai yang belum mengikuti peltihan Manajemen Risiko - Masih terdapat pegawai yang belum memahami Manajemen Risiko sehingga perlu disosialisasikan kembali setiap periode - Belum semua identifikasi risiko telah mempertimbangkan seluruh isu internal dan eksternal yang ada - Penilaian risiko masih belum konsisten sesuai pedoman terkait rumusan, atribut pengendalian, penetapan level risiko, tindakan mitigasi risiko dan lain-lain"	1. Memastikan seluruh pegawai telah mengikuti pelatihan Mananjemen Risiko 2. Melakukan sosialisasi Manajemen Risiko 3. Melakukan identifikasi risiko dengan mempertimbangkan seluruh isu internal dan eksternal yang ada 4. Melakukan penilaian risiko secara konsisten sesuai pedoman terkait rumusan, atribut pengendalian, penetapan level risiko, tindakan mitigasi risiko dan lain-lain" 5. Melakukan monitoring terhadap risiko yang telah diidentifikasi	Desember	Progres	1. Mengikuti pelatihan Manajemen Risiko (seluruh pegawai telah mengikuti pelatihan dan 1 orang pegawai pindahan telah mengikuti pelatihan pada Bulan Mei) 2. Mensosialisasikan Manajemen Risiko kepada pegawai melalui whatsup group 3. Melakukan monitoring terhadap risiko yang telah diidentifikasi	1. Melakukan sosialisasi Manajemen Risiko 2. Melakukan identifikasi risiko dengan mempertimbangkan seluruh isu internal dan eksternal yg ada 3. Melakukan penilaian risiko secara konsisten sesuai pedoman terkait rumusan, atribut pengendalian, penetapan level risiko, tindakan mitigasi risiko dan lain-lain" 4. Melakukan monitoring berkelanjutan terhadap risiko yang telah diidentifikasi	Nilai Indeks Manajemen Risiko dapat tercapai

NO.	Indikator Kegiatan	TARGET 2025	JENIS	JUNI			KONDISI AWAL	REKOMENDASI	TIMELINE PENYELESAIAN	STATUS	RENCANA AKSI		KONDISI AKHIR
				Target	Realisasi	Capaian (%)	(Kendala/Permasalahan/Capaian Terhadap Target)	(Rencana Tindak Lanjut)	(Bulan)	(Progres/Selesai)	(Rencana Aksi yang Sudah Selesai)	(Rencana Aksi yang Belum Selesai)	(Tercapainya Target/Peningkatan Kinerja)
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,75	Flat	86,75	93,35	107,61	- Kerusakan alat AAS untuk pengujian logam berat Pb, Cd dan As, menghambat pelaksanaan uji logam untuk komoditi Kosmetik, OBA dan SK - Adanya kebijakan efisiensi pada awal tahun serta relaksasi pada pertengahan bulan April mengakibatkan penumpukan beban kerja (beban sampling dan pengujian) pada bulan Mei hingga akhir tahun 2025 '- Tingginya jumlah sampel yang menjadi target uji laboratorium Mikrobiologi, karena peningkatan jumlah sampel untuk semua komoditi (sediaan farmasi dan pangan), melebihi kapasitas uji laboratorium sehingga pengujian tidak dapat dilaksanakan untuk semua sampel secara bersamaan, hal ini memperpanjang waktu penyelesaian pengujian.	- Perbaikan alat AAS, serta mengalihkan pelaksanaan pengujian logam As, Pb dan Cd menggunakan alat AAS yang di kelola Lab. Pangan. - Menyusun ulang rencana sampling dan pengujian untuk bulan Mei samapai akhir tahun 2025 dengan mempertimbangakan kapasitas pengujian di laboratorium. - Mengatur pelaksanaan pengujian di laboratorium dengan memperhatikan waktu masuk sampel serta batas time line pengujian, agar tidak ada sampel yang terlalu lama menunggu untuk diuji.	Juli	Progres	- Mengalihkan pelaksanaan pengujian logam As, Pb dan Cd menggunakan alat AAS yang di kelola Lab. Pangan. '- Menyusun ulang rencana sampling dan pengujian untuk bulan Mei sampai akhir tahun 2025 dengan mempertimbangakan kapsitas pengujian di laboratorium. - Mengatur pelaksanaan pengujian dilaboratorium dengan memperhatikan waktu masuk sampel serta batas time line pengujian, agar tidak ada sampel yang terlalu lama menunggu untuk di uji.	- Perbaikan alat AAS	- Parameter uji logam (Pb; Cd dan As) dapat dilaksanakan sehingga target pemenuhan parameter uji dapat d penuhi 100%

2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26,00	Akhir Tahun	-	-	-	Hasil Monev laporan melalui website e-meso, baru 4 sarana pelayanan kesehatan yang melaporkan KTD, yaitu RS Semen Padang, RS Unand, RS Saanin, RSIA Restu.	`- Mengingatkan kembali tenaga kesehatan melalui WAG kolaborasi Meso `- Mengingatkan PIC Farmakovigilans untuk segera melaporkan KTD bersamaan dengan penagihan tindakan perbaikan hasil pemeriksaan sarana pelayanan kesehatan	Desember 2025	Progres	`- Mengingatkan kembali tenaga kesehatan melalui WAG kolaborasi Meso `- Mengingatkan PIC Farmakovigilans untuk segera melaporkan KTD bersamaan dengan penagihan tindakan perbaikan hasil pemeriksaan sarana pelayanan kesehatan	- Mengingatkan PIC akan dilaksanakan setiap Bulan hingga tercapai angka pelaporan 26% (12 Sarana yang melaporkan KTD) '- Mengadakan monitoring dan evaluasi pelaporan KTD/ESO di Bulan Agustus atau September secara luring	Tercapainya Target Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	Flat	85,00	97,64	114,87	1. Keterbatasan ketersediaan reagensia, suku cadang dan baku pembanding sehingga terjadinya penyesuaian kategori sampling sampai tersedianya pengadaan reagensia yang dipesan	1. Melakukan koordinasi internal antara katim fungsi pengujian pangan degan PPK untuk melakukan percepatan pengadaan reagensia, suku cadang dan baku banding 2. Melakukan percepatan jadwal pelaksanaan sampling sehingga pelaporan pengujian dan tindak lanjut hasil dapat dilaksanakan pada bulan yang sama 3. Meningkatkan koordinasi internal dalam hal sampling dan tindak lanjut sampling	Desember 2025	Progres	1. Melakukan tindak lanjut terhadap sampel yang tidak memenuhi syarat 2. Meningkatkan koordinasi dengan tim internal	Tindak lanjut sampel yang perlu dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan	Tercapainya target Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	Flat	100,00	100,00	100,00	Tidak ada pengaduan KLB KP bulan Juni	Terus meningkatkan koordinasi internal dan eksternal terkait pengaduan kasus KLB KP	Desember 2025	Progres	Menindaklanjuti (menguji dan melaporkan) sampel KLB KP TW 1 dan 2	-	Realisasi penyelesaian sampel KLB KP yang ditindaklanjuti tercapai sesuai target (100%). Laporan evaluasi selesai tepat waktu dan sesuai standar.
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	Flat	85,00	100,00	117,65	Terjadinya perubahan dari target efisiensi ke target awal sampel PIRT sebelum efisiensi sehingga perlu adanya persiapan dan penyesuaian kategori sampling dengan ketersediaan reagensia, suku cadang, baku banding dan koordinasi dengan lab regional	1. Meningkatkan koordinasi internal dalam hal sampling dan tindak lanjut sampling 2. Melakukan koordinasi internal antara katim fungsi pengujian pangan degan PPK untuk melakukan percepatan pengadaan reagensia, suku cadang dan baku banding	Desember 2025	Progres	1. Melakukan tindak lanjut terhadap sampel yang tidak memenuhi syarat 2. Meningkatkan koordinasi dengan tim internal	1. Meningkatkan monitoring terhadap sampel PIRT yang perlu ditindaklanjuti bersama tim internal, 2. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait	Tercapainya target Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89,50	Flat	89,50	89,38	99,87	Pengumpulan CAPA dari pelaku usaha berjalan lambat karena tidak semua sarana mengirimkan CAPAnya dengan inisiatif sendiri tanpa ditagih terlebih dahulu	1. Memastikan surat TL diterima pelaku usaha/ linsek dengan selalu mengingatkan petugas untuk mengirimkan surat TLnya juga melalui media komunikasi online seperti email ataupun whatsapp. 2. Petugas yang merekap CAPA per komoditi secara rutin, secara tidak langsung	Desember 2025	Progres	1. Memastikan surat TL diterima pelaku usaha/ linsek dengan selalu mengingatkan petugas untuk mengirimkan surat TLnya juga melalui media komunikasi online seperti email ataupun whatsapp. 2. CAPA telah mulai terarsipkan dengan rapi dalam folder respon sesuai link yang telah	1. Melakukan pengawalan dan desk CAPA sebagian sarana lainnya	Peningkatan kinerja dari periode sebelumnya

								telah mengingatkan petugas untuk mengingatkan sarananya agar mengirimkan CAPA. 3. Melakukan kegiatan yang dapat mempercepat respon dari pelaku usaha seperti mengirimkan surat penagihan CAPA ke sarana atau jika anggaran memungkinkan akan menjemput CAPA secara on site ke sarana			dimasukkan dalam setiap surat tindak lanjut ke pelaku usaha		
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	Flat	85,00	100,00	117,65	Padatnya kegiatan inspeksi menyebabkan pemeriksaan terhadap sarana target ini tertunda	Memastikan petugas dapat melakukan pemeriksaan sesuai rencana, membuat surat tindak lanjut, melaporkan secara tepat waktu melalui SIPT dan melakukan monev CAPA dari pelaku usaha	Desember 2025	Progres	Melakukan pemeriksaan tiga sarana sesuai pedoman pemeriksaan	1. Melakukan pemeriksaan dua sarana lainnya sesuai pedoman pemeriksaan 2. Melakukan monitoring surat tindak lanjut yang diberikan waktu 21 hari kerja setelah inspeksi dilakukan 3. Melakukan monitoring dan evaluasi CAPA pelaku usaha	Peningkatan kinerja dari periode sebelumnya

8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	Flat	85,00	100,00	117,65	Pelaku usaha industri pangan olahan belum menerapkan seluruh aspek CPPOB dengan baik	1. Melaksanakan pembinaan kepada pelaku usaha agar meningkatkan pemahaman terhadap penerapan CPPOB dalam proses produksi sehingga menghasilkan produk pangan yang aman dan bermutu. 2. Melaksanakan tindak lanjut hasil inspeksi sarana secara konsisten diantaranya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha	Juni 2025	Selesai	1. Melaksanakan tindak lanjut hasil inspeksi terhadap 9 sarana produksi pangan secara konsisten diantaranya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha. 2. Melakukan pengawasan dan pembinaan kepada 9 sarana pangan olahan dalam penerapan cara produksi pangan olahan yang baik	Evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha	Telah melakukan pengawasan dan pembinaan kepada 9 sarana pangan olahan dalam penerapan cara produksi pangan olahan yang baik
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,00	Flat	92,00	97,64	106,13	Sarana distribusi sediaan farmasi belum secara konsisten melakukan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan	Melakukan pemeriksaan sarana berdasarkan analisa resiko dan pemberian Tindak lanjut sesuai ketentuan	Desember 2025	Progres	Membuat tindak lanjut hasil inspeksi dan pelaporan sesuai timeline dan melakukan monev CAPA	Mendampingi pelaku usaha dan penyusunan CAPA dan memantau konsistensi sarana dalam penerapan CAPA yang telah dibuat, pelaksanaan sanksi yang lebih tegas sesuai ketentuan dan monitoring pasca penegakan sanksi bersama lintas sektor.	Tercapai target Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	Flat	85,00	88,39	103,99	1. Pengawasan sarana distribusi pangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan surat tindak lanjut dilaksanakan sesuai ketentuan serta terdapat surat tindak lanjut yang sedang proses masih dalam rentang kendali time line surat tindak lanjut . 2. Peningkatan koordinasi dalam tim kerja sangat dibutuhkan dalam rangkla mencapai kinerja yang maksimal.	1. Meningkatkan monitoring terhadap tindak lanjut hasil pengawasan. 2. Meningkatkan koordinasi dalam tim kerja pengawasan sarana distribusi pangan	Desember 2025	Progres	1. Melaksanakan monitoring tindak lanjut agar sesuai ketentuan. 2. Meningkatkan koordinasi dalam tim kerja pengawasan sarana distribusi pangan	1. Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut hasil pengawasan sarana distribusi pangan. 2. Terus meningkatkan koordinasi dalam tim kerja pengawasan sarana distribusi pangan	Tercapainya target Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	81,09	Flat	81,09	99,86	123,15	Jenis media iklan tertentu, terutama media cetak dan media penyiaran lokal, tidak selalu tersedia sehingga mempengaruhi realisasi perencanaan pengawasan iklan yang sudah dibuat. Pelaporan pengawasan iklan juga dapat terdampak karena petugas pengawasan memiliki tugas utama lainnya.	Perluasan area pengawasan iklan atau penambahan waktu pengawasan iklan khususnya pengawasan di kab/kota lain dan penjadwalan pelaksanaan pengawasan diatur pada awal bulan.	Desember 2025	Progress	Perencanaan sudah ditetapkan menyesuaikan dengan target yang ditetapkan.	Penjadwalan pengawasan iklan untuk periode triwulan dan pemantauan efektivitas pelaksanaannya	Telah dilakukan pemantauan efektivitas pelaksanaan terhadap pencapaian target dan realisasinya.

12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	63,00	Kumulatif	63,00	100,00	158,73				Selesai		-	Tercapainya target Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77,00	Kumulatif Triwulan	76,80	81,60	106,25	Verifikasi MA Lab Obat dan Pengadaan alat untuk pemenuhan standar laboratorium terkendala pengadaan yang masih dalam proses kontrak.	1.Lab harus melakukan pengujian dengan metoda analisa dalam SKL yang belum mampu uji untuk peningkatan Standar Ruang Lingkup dan kompetensi personil laboratorium serta verifikasi MA secara bertahap sesuai perencanaan yang disusun. 2. Percepatan pengadaan alat laboratorium untuk meningkatkan standar peralatan dalam SKL.	Desember 2025	Progres	Verifikasi MA TW II oleh lab Mikrobiologi sesuai target yang direncanakan dan Lab OT direalisasikan sesuai yang mampu dikerjakan walaupun sebelumnya tidak ditargetkan. Untuk SRL TW II ini, lab kosmetik mempunyai 1 item target yang sudah direalisasikan.	Pemenuhan Verifikasi MA Obat Target TW II sebanyak 1 item dan pemenuhan standar alat laboratorium yang masih dalam proses dan penyelesaian kontrak.	Capaian Nilai SKL TW II (106,25%) sudah melebihi target 76,8 sedangkan realisasi 81,6. Tercapainya Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88,00	Flat	88,00	87,37	99,28	- Target kegiatan KIE Rutin sebanyak 194 peserta baru terlaksana 94 peserta (48,45%). Kegiatan untuk 100 peserta sisanya belum dapat dilaksanakan karena terkendala anggaran. - Target kegiatan KIE bersama TOMAS Tahun 2025 sebanyak 3750 peserta (15 titik @ 250 peserta) baru terlaksana 1000 (26,66%).	- Menunggu kemungkinan revisi anggaran dari KRO yang sama (sisa kegiatan KIE bersama Tomas direvisi ke KIE Rutin). - Mempersiapkan juga kemungkinan KIE Rutin secara Daring.	Desember	Progres	Melaksanakan kegiatan: * KIE Bersama TOMAS sebanyak 4 titk @ 250 orang peserta. 1. Tgl 4 Juni 2025, Kecamatan Pariaman Tengah 2. Tgl 10 Juni 2025, Kecamatan Ampek Angkek 3. Tgl 11 Juni 2025, Kecamatan Palupuah 4. Tgl 19 Juni 2025, Kecamatan Lubuk Alung	Kegiatan yang belum terlaksana -Kegiatan KIE Rutin yang belum terlaksana 2 kegiatan/ 100 peserta (48,45 %) - Kegiatan KIE bersama TOMAS yang belum terlaksana sebanyak 7 titik @ 250 peserta (53,33%)	- Pelaksanaan kegiatan KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang Tahun 2025 sesuai perencanaan yang disusun. - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang memenuhi target.
15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	14,00	Kumulatif	47,50	47,50	100,00	- Sebelumnya telah terlaksana kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan untuk Sekolah Intervensi dan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah pada bulan Mei 2025	- Pelaksanaan Sosialisasi Keamanan Pangan kepada sekolah cakupan perluasan	Juli 2025	Progres	Pelaksanaan tahapan program sosialisasi keamanan pangan untuk cakupan perluasan akan dilaksanakan pada Bulan Juli 2025 karena mengingat pada bulan Juni bertepatan dengan masa ujian di sekolah dan dilanjutkan dengan libur sekolah.	Melaksanakan tahapan program selanjutnya: Sosialisasi keamanan pangan untuk sekolah cakupan perluasan, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan serta pengawalan sekolah yang telah diintervensi sebelumnya.	Pelaksanaan kegiatan berdasarkan tahapan program sesuai dengan masing-masing timeline dengan capaian akhir 100% dan jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan sesuai target

16	Jumlah desa pangan aman	6,00	Kumulatif	45,00	47,50	105,56	- Sebelumnya telah terlaksana kegiatan Bimtek Kader Keamanan Pangan Desa/Nagari di Kabupaten Solok pada bulan Mei 2025	- Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Komunitas Pangan Desa/Nagari di Kabupaten Solok	Juni 2025	Progres	Melaksanakan tahapan program: Bimbingan Teknis Komunitas Keamanan Pangan Desa/Nagari intevensi yaitu Nagari Batang Barus (24 Juni 2025), Nagari Aia Batumbuak (25 Juni 2025) dan Nagari Koto Gaek Guguak (26 Juni 2025)	Melaksanakan tahapan program selanjutnya: monitoring dan evaluasi serta pengawalan desa yang telah diintervensi pada tahun sebelumnya	Pelaksanaan kegiatan berdasarkan tahapan program sesuai dengan masing-masing timeline dengan capaian akhir 100% dan jumlah desa pangan aman
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	Kumulatif	60,00	70,00	116,67	- Sebelumnya telah terlaksana kegiatan bimtek dan penyuluhan komunitas pasar di Pasar Cupak Kabupaten Solok	- Pelaksanaan Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar dan Pengawalan Pasar	Juni 2025	Progress	Melaksanakan tahapan program: - Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar di Pasar Cupak yang dilakukan oleh komunitas pasar selama bulan Juni 2025 - Pengawalan pasar yang telah diintervensi sebelumnya di Pasar Padang Aro Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 28 Juni 2025	Melaksanakan tahapan program selanjutnya: Pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi, serta pengawalan pasar yang telah diintervensi pada tahun sebelumnya	Pelaksanaan kegiatan berdasarkan tahapan program sesuai dengan masing-masing timeline dengan capaian akhir 100% dan jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80,00	Kumulatif	43,33	46,83	108,08	1. Pelaku usaha UMKM pangan belum memahami CPPOB. 2. Pelaku usaha UMKM Kosmetik belum memahami CPKB 3. Kemampuan pelaku usaha dalam teknologi mengakibatkan prose pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB belum dapat dilakukan secara cepat dan mandiri.	1. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dalam rangka penerapan CPPOB dan CPKB. 2. Melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dan Kosmetik dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan	Desember 2025	Progres	1. Melakukan pembinaan kepada 5 pelaku usaha dalam rangka penerapan CPPOB, 2 pelaku usaha industri kosmetik dalam rangka penerapan CPKB 2. Melakukan pendampingan langsung kepada 2 pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan	Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha pangan dan kosmetik dalam rangka penerapan CPPOB dan CPKB	- Telah melakukan pembinaan kepada 5 pelaku usaha dalam rangka penerapan CPPOB, 2 pelaku usaha kosmetik dalam rangka penerapan CPKB. - Telah melakukan pendampingan langsung kepada 2 pelaku usaha pangan

								penerbitan sertifikat IP CPPOB dan CPKB di aplikasi. .			penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi		olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi.
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	90,00	Kumulatif	43,00	50,00	116,28	1. Terlaksananya proses penyidikan sediaan farmasi obat dan makanan terhadap 3 perkara yang sudah sampai ke tahap1 untuk ke 3 perkara. 2. Telah tercapainya target Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan dengan berkoordinasi yang baik dengan JPU. 3. Telah dilaksanakan gelar perkara dengan kesimpulan disetujuinya perkara cary over dihentikan penyidikannya (SP3)	1. Berkoordinasi dengan JPU untuk proses P21 pada perkara tsk Arf dan Toni. 2. Mengumpulkan informasi untuk mencari bukti yang cukup.	Desember 2025	Progress	1. Melakukan kegiatan intelijen sesuai pedoman intelijen. 2. Pemberitahuan SP3 ke JPU melalui Korwas PPNS Polda Sumbar.	Melengkapi berkas perkara untuk memenuhi P19 pd Perkara RN	Melengkapi Berkas perkara untuk memenuhi P19 pada kasus Arf dan TN.
20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90,00	Kumulatif	50,00	50,00	100,00	1. Kegiatan patroli siber dan profiling siber terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang didistribusikan secara online telah dilaksanakan. 2. Rekomendasi cegah tangkal kejahatan obat dan makanan dari Direktorat Cegah Tangkal diberikan ke BBPOM di Padang pada tanggal 25 Juni 2025 3. Laporan analisis kerawanan kejahatan belum dilaksanakan	1. Menyusun laporan Analisis Penelusuran Siber secara tepat waktu 2. Menyusun laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan obat dan makanan setelah dapat rekomendasi dari direktorat cegah tangkal 3. Menyusun perencanaan untuk laporan analisis kerawanan kejahatan	Desember 2025	Progress	Membuat Laporan Analisis Penelusuran Siber bulan Juni secara tepat waktu dan Membuat laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan obat dan makanan, saat ini sudah ada sebagian yang dilaksanakan	1. Menyusun laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan obat dan makanan 2. Menyusun laporan analisis kerawanan kejahatan	Tercapainya target Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,70	Akhir Tahun		-	-	Mendapat Hasil survei indeks pelayanan publik bulan Mei 3,95 dan Survey SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) : 98,98 Kemampuan pelaku usaha dalam teknologi mengakibatkan proses pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB belum dapat dilakukan secara cepat dan mandiri	1. Melakukan kegiatan layanan publik informasi dan pengaduan bulan Juni. 2. Melakukan kegiatan layanan pengujian pihak ketiga bulan Juni. 3. Melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi OSS RBA bulan Juni. 4. Melaksanakan survei pelayanan publik kepada konsumen bulan Juni. 5. Menyusun dan menetapkan serta mempublish standar layanan publik tahun 2025 yang telah ditetapkan.	Desember 2025	Progress	1. Melakukan kegiatan layanan publik informasi dan pengaduan bulan Juni. 2. Melakukan kegiatan layanan pengujian pihak ketiga bulan Juni. 3. Melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi OSS RBA bulan Juni. 4. Melaksanakan survei pelayanan publik kepada konsumen bulan Juni.	1. Melakukan kegiatan layanan publik informasi dan pengaduan bulan Juli 2. Melakukan kegiatan layanan pengujian pihak ketiga bulan Juli 3. Melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi OSS RBA bulan Juli 4. Melaksanakan survei pelayanan publik kepada konsumen bulan Juli 5. Menyusun dan menetapkan serta mempublish standar layanan publik tahun 2025 yang telah ditetapkan	Tercapainya target Indeks Pelayanan Publik UPT

22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)	90,00	Akhir Tahun		-	-	1. Masih ada renja yang belum dilaksanakan 2. Melakukan monitoring pelksanan renja dan program prioritas 3. Program prioritas zona 2 helpdesk berjalan lancar dan selalu dimonitor 4. Pemantauan/monitoring pelaksanaan kegiatan di setiap fungsi sesuai SOP 5. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi kegiatan dalam pengukuran kinerja, operasional manajemen SDM, dan pemberian layanan kepada publik 6. Monitoring dan evaluasi KIP sesuai peraturan per-UU. 7. Progress implementasi aplikasi e-magang masih terhambat, perlu pengembangan lebih lanjut. 8. Perkembangan progres Inovasi Googlesite Monev Kinerja sudah cukup signifikan 9. Implementasi SAKIP dalam pencapaian kinerja untuk bulan Mei 2025 10. Monev kinerja bulan Januari sampai Mei sudah diinput 11. Laporan Kinerja dan evaluasi Internal TW 1 telah dikirim 12. Peningkatan Nilai Pokja Pelayanan Publik 13. Implementasi	1. Melaksanakan Monev Renja 2. Melaksanakana Program prioritas 3. Melakukan monitoring dan evaluasi adanya review/perubahan terhadap SOP Makro maupun Mikro 4. Menyempurnakan aplikasi e-magang 5. Menyelesaikan Inovasi Googlesite Monev Kinerja 6. Melaksanakan Monev kinerja bulanMei 2025 7. Merevieu standar pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik 8. Memberi penghargaan dan sanksi kepda petugas layanan bulan Mei 9. Mengembangakn inovasi pelayanan publik yang berdasarkan kebutuhan stakeholder atau hasil manajemen risiko.	Desember 2025	Progress	1. Melaksanakan Monev Renja Bulan Mei 2. Melaksanakana Renja Bulan Mei 3. Memantau progres pelaksanaan program prioritas 4. Melaksanakan monev kinerja bulan Mei 5. Merevieu standar pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik 6. Memberikan penghargaan dan sanksi kepada petugas layanan bulan Mei	1. Mengevaluasi progres program prioritas hingga TW 2 2. Melaksanakan Monev Renja bulan Juni 3. Melaksanakan Renja 4. Melengkapi pengembangan Inovasi Googlesite Monev Kinerja 5. Melaksanakan Monev kinerja bulan Juni 2025 6. Mengembangkan inovasi pelayanan publik yang berdasarkan kebutuhan stakeholder atau hasil manajemen risiko .	Target nilai pembangunan ZI dapat tercapai

							pemberian penghargaan dan sanksi belum dilaksanakan secara konsisten 14. Inovasi Pelayanan Publik yang berdasarkan kebutuhan stakeholder atau hasil manajemen resiko						
23	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	82,00	Akhir Tahun		-	-	1. Masih terdapat defenisi operasional IKU dan pengisian belum kertas kerja yang belum jelas 2. Terdapat peningkatan target IKU yang telah tercapai 3. Masih ada target yang belum tercapai, namun telah diajukan revisi target pada bulan Mei 2025	1. Input data monev online bulan Mei di aplikasi 2. Pengisian Monev capaian kinerja oleh ka Tim Bulan Mei 2025 3. Implementasi SAKIP sesuai pedoman pada semua IKU agar target dapat tercapai	Desembe r	Progress	1. Menginput data monev online bulan Mei 2025 2. Mengisi Monev capaian kinerja bulan Mei 2025 3. Mengimplementasikan SAKIP sesuai pedoman pada semua IKU agar target dapat tercapai	1. Menginput data monev online bulan Juni 2. Mengisi Monev capaian kinerja bulan Juni 3. Mengimplement asikan SAKIP sesuai pedoman pada semua IKU agar target dapat tercapai 4. Menyusun Laporan Kinerja dan Evaluasi Internal TW II 2025	Tercapaianya target nilai AKIP BBPOM di Padang
24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00	Akhir Tahun		-	-	Capaian Output bulan Mei telah dilaporkan dan memperoleh nilai 100 namun nilai IKPA belum maksimal.	1. Melakukan revisi DIPA sesuai dengan ketentuan dan memaksimalkan pengajuan beberapa jenis revisi dalam 1 kali pengajuan revisi. 2. Menjaga Konsistensi	Desembe r 2025	Progres	1. Menjaga konsistensi RPD bulan Juni yang telah ditetapkan pada Halaman III DIPA. 2. Mempercepat pelaksanaan kegiatan barang dan jasa pada bualan Juni.	1. Melakukan revisi DIPA sesuai dengan ketentuan dan memaksimalkan pengajuan beberapa jenis revisi dalam 1 kali pengajuan	Tercapainya target Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Padang Tahun 2025

								RPD bulan mei yang telah ditetapkan pada Halaman III DIPA. 3. Mempercepat pelaksanaan kegiatan barang dan jasa untuk menacapi target realisasi anggaran TW 2. 4. Mendaftarkan data kontrak secara tepat waktu pada bulan Juni. 5. Mempercepat pembayaran belanja kontraktual pada bulan Juni. 6. Melaporkan capaian output bulan Mei secara tepat dan tepat waktu. 7. Menyelesaikan pertanggungjawaban UP dan TUP dengan tepat waktu pada bulan Juni. 8. Melakukan efisiensi anggaran RO SBK.			3. Mendaftarkan data kontrak secara tepat waktu pada bulan Juni. 4. Mempercepat pembayaran belanja kontraktual pada bulan Juni. 5. Melaporkan capaian output bulan Mei secara tepat dan tepat waktu. 6. Menyelesaikan pertanggungjawaban UP dan TUP dengan tepat waktu pada bulan Juni	revisi. 2. Menjaga Konsistensi RPD bulan Juli yang telah ditetapkan pada Halaman III DIPA. 3. Mempercepat pelaksanaan kegiatan barang dan jasa untuk menacapi target realisasi anggaran TW 3. 4. Mendaftarkan data kontrak secara tepat waktu pada bulan Juli. 5. Mempercepat pembayaran belanja kontraktual pada bulan Juli. 6. Melaporkan capaian output bulan Juni secara tepat dan tepat waktu. 7. Menyelesaikan pertanggungjawaban UP dan TUP dengan tepat waktu pada bulan Juli 8. Melakukan efisiensi anggaran RO SBK.	

25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,95	Akhir Tahun		-	-	- Masih terdapat pegawai yang belum mengikuti pelatihan Manajemen Risiko - Masih terdapat pegawai yang belum memahami Manajemen Risiko sehingga perlu disosialisasikan kembali setiap periode - Belum semua identifikasi risiko telah mempertimbangkan seluruh isu internal dan eksternal yang ada - Penilaian risiko masih belum konsisten sesuai pedoman terkait rumusan, atribut pengendalian, penetapan level risiko, tindakan mitigasi risiko dan lain-lain" - Belum semua IKU diidentifikasi risikonya	1. Memastikan seluruh pegawai telah mengikuti pelatihan Mananjemen Risiko 2. Melakukan sosialisasi Manajemen Risiko 3. Melakukan identifikasi risiko dengan mempertimbangkan seluruh isu internal dan eksternal yang ada 4. Melakukan penilaian risiko secara konsisten sesuai pedoman terkait rumusan, atribut pengendalian, penetapan level risiko, tindakan mitigasi risiko dan lain-lain" 5. Melakukan monitoring terhadap risiko yang telah diidentifikasi 6. Menyusun Daftar risiko dengan berdasarkan IKU yang telah ditetapkan	Desember	Progres	1.Mengikuti pelatihan Manajemen Risiko (semua pegawai telah mengikuti pelatihan kecuali PPPK yang baru dilantik bulan Juni 2025) 2. Melakukan monitoring terhadap risiko yang telah diidentifikasi (risiko yang dimitigasi yaitu penindakan)	1. Membuat memorandum kepada PPPK untuk mengikuti pelatihan Manajemen Risiko pegawai 2. Melakukan identifikasi risiko dengan mempertimbangkan seluruh isu internal dan eksternal yang ada 3. Melakukan penilaian risiko secara konsisten sesuai pedoman terkait rumusan, atribut pengendalian, penetapan level risiko, tindakan mitigasi risiko dan lain-lain 4. Melakukan monitoring berkelanjutan terhadap risiko yang telah diidentifikasi 5. Melakukan identifikasi risiko terhadap semua IKU yang telah ditetapkan	Nilai Indeks Manajemen Risiko dapat tercapai

3.3. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Manfaat dari Laporan Kinerja adalah untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan sehingga memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategis/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Pemanfaatan Informasi dapat berupa :

1. Penyesuaian aktifitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja
2. Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja
3. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikunya

Pemanfaatan Informasi Kinerja terhadap capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Triwulan I sebagai berikut :

1. IKU Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

   IKU ini baru muncul pada target Renstra 2025-2029. Pada defenisi operasional dinyatakan bahwa tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan sampling, pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil uji. UPT juga harus melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan sampel banyak faktor yang harus menjadi perhatian dan harus dilaksanakan karena menjadi penentu realisasi IKU tersebut. Hal-hal yang harus dilakukan antara lain dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pemenuhan masing-masing komponen penilaian. Target IKU ini dapat tercapai, hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampel sediaan farmasi telah dilakukan sesuai pedoman.
2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO.

   Realisasi IKU ini dihitung pada akhir tahun, namun progress sudah bisa dihitung setelah diberikan KIE Farmakovigilans berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM. Untuk mendapatkan capaian kinerja yang tinggi maka diperlukan koordinasi dan komunikasi yang intens untuk

meningingatkan kembali tenaga kesehatan/piv farmakovigilans untuk segera melaporkan KTD

3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

   Yang dimaksud ditindaklnajuti sesuai ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling, serta ditindaklanjuti sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan antara lain terhadap produk TIE, rusak, kadaluarsa, TMS pemgujian, pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi, pemeriksaan terkait hasil pengujian TMS, koordinasi dengan pusat terkait sampel TMS dan Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak/ kedaluwarsa.

   Dari hasil triwulan 3 yang tidak mencapai target menunjukkan bahwa perlunya pelaksanaan tahap-tahap pengelolaan sampel sesuai defenisi operasional dengan ketepatan waktu penyelesaian pengujian dan sampling, percepatan sampling dan pengujian serta tindak lanjut hasil laporan pengujian yang tidak memenuhi syarat (TMS). Dapat dimulai dengan melakukan proses pelaksanaan sampling pada minggu pertama setiap bulan sehingga laporan pengujian dan tindak lanjut juga dapat terealisasi pada bulan yang sama

4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

   Yang dimaksud sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB. Sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Dapat disimpulkan bahwa penanganan sampel KLB melibatkan berbagai pihak oleh karena itu perlu meningkatkan koordinasi internal dalam memberikan layanan terhadap pengaduan kasus KLB. Nilai IKU ini dapat tercapai pada triwulan II tahun 2025 dengan realisasi sebesar 100%.

5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

   Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Usaha yag dilakukan untuk pencapaian target ini adalah dengan melakukan percepatan sampling, pengujian dan tindak lanjut hasil laporan pengujian yang tidak memenuhi syarat (TMS) yang dimulai dengan melakukan proses pelaksanaan sampling pada minggu 1 sehingga laporan pengujian dan tindak lanjut juga dapat terealisasi pada bulan yang sama serta

melakukan koordinasi dan meningkatkan kerjasama antara fungsi pemeriksaan dan pengujian

6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder.

   Belum tercapainya target kinerja ini disebabkan pada masih belum semua sarana mengirimkan CAPA nya, dimana sarana masih membutuhkan waktu untuk melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan. diperlukan pengawalan secara rutin dan berkala kepada pelaku usaha dan lintas sektor terkait, agar segera melakukan tindakan perbaikan atau pencegahan sesuai dengan rekomendasi keputusan tindak lanjut yang diberikan. Namun dengan adanya tindak lanjut terhadap evaluasi yang dilakukan, realisasi target ini meningkat signifikan pada triwulan II tahun 2025.

7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

   Tercapainya kinerja ini disebabkan telah terpenuhinya dengan baik semua parameter penilaian dalam pemeriksaan sarana yang dilakukan. Diperlukan komitmen petugas yang ditunjuk agar semua parameter pemeriksaan terpenuhi secara konsisten. Selain itu diperlukan kerjasama tim yang solid.

8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

   Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan. Keberhasilan pencapaian IKU ini belum terlihat karena realisasi belum dihitung, karena masih ada pembahasan defenisi operasional oleh unti pengampu

9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

   Kriteria diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Target realisasi IKU ini pada triwulan II dapat tercapai, hal ini menunjukkan bahwa tahap2 pelaksanaan kegiatan pemeriksaan telah dilakukan dengan baik dan sesuai pedoman.

10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

    Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi: Pemenuhan target sarana distribusi

pangan olahan yang diperiksa, Ketepatan waktu pelaporan, Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana. Target realisasi IKU ini pada triwulan II dapat tercapai, hal ini menunjukkan bahwa tahap2 pelaksanaan kegiatan pemeriksaan telah dilakukan dengan baik dan sesuai pedoman

11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

    Berdasarkan rumusan perhitungan IKU ini dapat diketahui bahwa kualitas hasil pengawasan iklan pada masing-masing komoditi mempengaruhi nilai capaian kinerja pengawasan iklan secara keseluruhan. Perencanaan yang disusun telah mempertimbangkan ketentuan-ketentuan pengawasan spesifik yang ditetapkan pada masing-masing komoditi, sehingga target IKU ini datap tercapai pada triwulan II tahun 2025

12. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

    Indikator ini mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. Sarana pangan fortifikasi yang diperiksa pada triwulan II telah memenuhi target yang ditetapkan. Terdapat kesalahan dalam menetapkan target IKU ini yang semula frekuensi bulanan bersifat flat menjadi komulatif, sehingga dilakukan perbaikan target untuk menyesuaikan dengan manual IKU dan perhitungan target yang baru berdasarkan jumlah sarana yang telah diperiksa dan diselesaikan pada triwulan I yaitu sebanyak 2 sarana. Pada Triwulan II telah melaksanakan pemeriksaan terhadap 3 sarana sehingga semua sarana yang ada pada Tahun 2025 ini telah diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

13. Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar

    Standar Kemampuan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Standar Ruang Lingkup, standar peralatan laboratorium, Standar Kompetensi Laboratorium dan Standar Metoda Analisa yang Terverifikasi. Capaian diperoleh sangat baik disebabkan rencana pemenuhan SKL di TW 2 yang meliputi pemenuhan Standar MA yang Terverifikasi, semuanya terealisasi dengan baik dan target terealisasi sesuai perencanaan serta karena kolaborasi pengawalan dan kerja

sama tim laboratorium untuk meningkatkan kinerja, kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian.

14. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

    Belum tercapai target Indeks Efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Padang pada Triwulan II tahun 2025 di sebabkan oleh beberapa faktor anatara lain terdapat efisiensi anggaran sehingga kegiatan belum bisa dilaksanakan secara optimal dan perlunya penyusunan ulang perencanaan untuk menyesuaikan target dengan anggaran yang masih tersedia. Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan nilai IKU ini adalah dengan Mengoptimalkan KIE melalui media sosial. meningkatkan kualitas materi yang akan disampaikan, Meningkatkan interaksi dengan peserta KIE dengan mengadakan: kuis, tanya jawab, menggunakan alat peraga pada saat sosialisasi dan Meningkatkan kompetensi petugas.

15. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

    Realisasi bulanan IKU ini dihitung berdasarkan progress tahapan program berdasarkan bobot masing-masingnya. Pada Triwulan II ini kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau target yang ditetapkan. Telah dilakukan revisi target sebanyak 2 kali, revisi yang pertama disebabkan adanya kebijakan dari pusat perubahan tahapan dan waktu pelaksanaan program sebagai akibat efisiensi anggaran. Pelaksanaan kegiatan telah menyesuaikan dengan kebijakan baru tersebut sehingga progress kegiatan yang telah dilaksankan dapat memenuhi target revisi ini. Kemudian dilakukan kembali revisi target pada triwulan 2, hal ini disebabkan karena perhitungan target awal berdasarkan jumlah sekolah yang dapat dilaksanakan intervensi oleh BBPOM di Padang sesuai anggaran setelah efisiensi, namun sesuai arahan dari pengampu bahwa progress RHPK tetap harus berdasarkan target pada rancangan RENSTRA 2025-2029 maka perlu dilakukan revisi target bulanan berdasarkan perhitungan terhadap target jumlah sekolah dan desa sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Target yang ditetapkan pada triwulan II ini dapat dipenuhi dengan capaian 100%.

16. Jumlah desa pangan aman

    Realisasi bulanan IKU ini dihitung berdasarkan progress tahapan program berdasarkan bobot masing-masingnya. Pada Triwulan II ini kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau target yang ditetapkan. Telah dilakukan revisi target pada triwulan I yang disebabkan adanya kebijakan dari pusat perubahan tahapan dan waktu pelaksanaan program sebagai akibat efisiensi anggaran.

Pelaksanaan kegiatan telah menyesuaikan dengan kebijakan baru tersebut sehingga progress kegiatan yang telah dilaksanakan dapat memenuhi target revisi ini. Kemudian dilakukan kembali revisi target pada triwulan 2, hal ini disebabkan karena perhitungan target awal berdasarkan jumlah desa yang dapat dilaksanakan intervensi oleh BBPOM di Padang sesuai anggaran setelah efisiensi, namun sesuai arahan dari pengampu bahwa progress RHPK tetap harus berdasarkan target pada rancangan RENSTRA 2025-2029 maka perlu dilakukan revisi target bulanan berdasarkan perhitungan terhadap target desa sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Target yang ditetapkan pada triwulan II ini dapat dipenuhi dengan capaian 105,56%.

17. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

    Realisasi bulanan IKU ini dihitung berdasarkan progress tahapan program berdasarkan bobot masing-masingnya. Pada Triwulan II kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau target yang ditetapkan. Telah dilakukan revisi target pada triwulan I yang disebabkan adanya kebijakan dari pusat perubahan tahapan dan waktu pelaksanaan program sebagai akibat efisiensi anggaran. Pelaksanaan kegiatan telah menyesuaikan dengan kebijakan baru tersebut sehingga progress kegiatan yang telah dilaksanakan dapat memenuhi target revisi ini pada triwulan II tahun 2025 dengan capaian 116,67%

18. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

    UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil, UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT dan UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B. Keberhasilan Pencapaian Indikator ini adalah karena Penetapan target sarana UMKM pangan. OBA dan kosmetik yang akan di dampingi telah dilakukan dengan memastikan komitmen masing-masing pelaku usaha akan melaksanakan tahapan pendampingan secara konsisten. Tahapan proses pendampingan UMKM baik UMKM pangan, OBA dan kosmetik dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal pada Triwulan II, yaitu pelaksanaan Bimbingan teknis Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, pendampingan UMKM OBA dalam mengajukan CPOTB tahap 2 yang difasilitasi dalam program Nuansa serta pendampingan UMKM Kosmetik dalam pemenuhan SPA CPKB.

19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

    Telah dilakukan revisi target pada triwulan II 2025. Penyebab dilakukan revisi target karena terdapatnya perubahan perhitungan penetapan target, dimana pada target awal sesuai arahan pengampu bahwa disusun berdasarkan perhitungan terhadap 1 perkara, yaitu jumlah target perkara setelah adanya efisiensi anggaran. Setelah relaksasi anggaran maka terjadi perubahan kembali target perkara menjadi sama dengan target POK awal yaitu 4 perkara dan 1 perkara carry over, untuk itu dilakukan perhitungan kembali target bulanan sampai November 2025. Target pada triwulan II ini dapat dipenuhi dengan capaian sebesar 116,28%.

20. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

    Nilai IKU ini terdiri dari Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan dan Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan. Nilai Balai Besar POM di Padang pada triwulan II ini mendapatkan 50% sesuai dengan target yang ditetapkan, menunjukkan bahwa Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dan jumlah laporan analisis penelusuran siber BBPOM di Padang telah sesuai kualitas analisanya nya dan dikirimkan tepat waktu.

21. Indeks Pelayanan Publik UPT

    Nilai Indeks Pelayanan baru dihitung pada akhir tahun. Berdasarkan nilai IPP tahun 2024 dapat dilakukan perbaikan dan evaluasi terhadap nilai yang masih rendah dan pemenuhan data dukung.

22. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM.

    Nilai Pembangunan ZI dihitung pada akhir tahun. Berdasarkan nilai Indeks RB BBPOM di Padang Tahun 2024 belum memenuhi syarat untuk WBBM (90), untuk itu telah dilakukan tindak lanjut atas evaluasi Inspektorat nilai RB tahun 2024 yang dituangkan dalam penilaian Mandiri Lembar Kerja Evaluasi RB 2025.

23. Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)

    Nilai AKIP dihitung pada akhir tahun. Berdasarkan evaluasi Inspektorat atas nilai AKIP tahun 2024 maka telah dilakukan perbaikan terhadap rekomendasi atas hasil penilaian AKIP 2024 dan perbaikan dan pengisian lembar kerja Evaluasi Sakip Tahun 2025

24. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Nilai Kinerja Anggaran dihitung pada akhir tahun, namun untuk nilai IKPA dihitung setiap bulan. Untuk itu ditargetkan BBPOM di Padang mendapatkan nilai IKPA maksimal pada setiap bulan. Untuk mendapatkan nilai IKPA yang tinggi diperlukan perencanaan, program, dan pelaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman dan butir-butir indikator pembentuk nilai IKPA.

25. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Nilai Indeks Manajemen Risiko diukur pada akhir tahun. Nilai Maturitas Risiko BBPOM di Padang belum mencapai 3 dengan nilai 2,906. Untuk itu perlu perbaikan penerapan manajemen risiko di Balai Besar POM di Padang supaya mendapatkan nilai 3 dengan Tingkat maturitas risk defined. Balai Besar POM di Padang telah melakukan identifikasi Risiko Semester I dan II 2025 dengan memperhatikan serta menindaklanjuti rekomendasi pada hasil evaluasi penilaian maturitas Risiko Tahun 2024.

3.4. REALISASI ANGGARAN

Untuk melaksanakan program pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di Provinsi Sumatera Barat pada Triwulan I Tahun 2025 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang memperoleh anggaran dengan pagu awal sebesar Rp.36.739.481.000 (termasuk blokir sebesar Rp.4.867.946.000) sesuai yang telah ditetapkan pada DIPA Nomor: SP DIPA- 063.01.2.432810/2025 tanggal 02 Desember 2024. Kemudian terdapat perubahan dan pergeseran pagu sebagai berikut:

1. Pemblokiran mandiri dalam rangka Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara pada belanja barang dan belanja modal dengan total sebesar Rp.17.106.396.000 yang ditetapkan pada DIPA Revisi ke 01 tanggal 22 Februari 2025.
2. Pemanfaatan belanja modal dari rincian output pengadaan alat laboratorium ke rincian output layanan perkantoran dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggaran gaji PPNPN sampai Desember 2025 sebesar Rp.272.970.000 yang ditetapkan pada DIPA Revisi ke 02 tanggal 21 Maret 2025.
3. Pembukaan blokir relaksasi anggaran pada belanja barang sebesar Rp.4.562.382.000 yang ditetapkan pada DIPA Revisi ke 03 tanggal 09 April 2025.
4. Revisi anggaran dan rencana penarikan dana yang ditetapkan pada DIPA Revisi ke 04 tanggal 23 April 2025.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengelola anggaran sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara tepat sasaran dan efisien. Kemudian dalam rangka kebijakan relaksasi anggaran dengan pembukaan blokir maka telah dilakukan penyesuaian kembali target output yang akan dicapai pada triwulan II tahun 2025. Pagu anggaran akhir pada triwulan II tahun 2025 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang sebesar Rp.36.739.481.000 dengan total blokir pada belanja barang dan belanja modal sebesar Rp.12.544.014.000 sesuai dengan DIPA Revisi ke 04tanggal 23 April 2025. Realisasi anggaran triwulan II tahun 2025 sebesar Rp.8.234.697.639 atau 22,41%. Adapun realisasi setelah dikurangi pagu blokir sebesar 34,03%, dengan rincian sebagai berikut

Tabel 3.100. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Triwulan II Tahun 2025

JENIS BELANJA	PAGU (Rp.)	PAGU BLOKIR (Rp.)	REALISASI (Rp.)*	PERSENTASE REALISASI (%)	
				SEBELUM DIKURANGI BLOKIR	SETELAH DIKURANGI BLOKIR
Belanja Pegawai	9,087,481,000	-	4,738,209,154	52.14%	52.14%
Belanja Barang	22,525,838,000	11,660,882,00	2,827,188,485	52.14%	52.14%
Belanja Modal	5,126,162,000	883,132,000	669,300,000	12.55%	12.55%
Total	**36,739,481,000**	**12,544,014,000**	**8,234,697,639**	**26.02%**	**26.02%**

*Ket: *SAKTI Basis SP2D*

Realisasi anggaran triwulan II tahun 2025 yang telah mencapai target anggaran per jenis belanja adalah belanja pegawai sedangkan untuk belanja barang dan belanja modal belum mencapai target.

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk pencapaian kinerja organisasi sesuai dokumen penetapan kinerja yang terdiri dari 25 indikator kinerja dengan 9 sasaran kegiatan serta 23 rincian output sebagai berikut :

a. Realisasi Anggaran per Kinerja

Tabel 3.101 Realisasi Anggaran per Indikator Triwulan II Tahun 2025

NO.	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR							ANGGARAN		
		TARGET		JUNI		CAPAIAN TERHADAP TARGET (%)			2025		
		RENSTRA 2029	TAHUN 2025	TARGET	REALISASI	BULANAN	TAHUNAN	RENSTRA	PAGU*	REALISASI*	CAPAIAN (%)
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,75	86,75	86,75	93,35	107,61	107,61	99,57	586.056.000	132.601.639	22,63
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	30,00	26,00	-	-	-	-	-	36.100.000	2.000.000	5,54
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,00	85,00	85,00	97,64	114,87	114,87	104,99	399.354.650	264.928.442	66,34
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	100,00	100	100	100,00	100,00	100,00	32.888.030	21.817.636	66,34
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,00	85,00	85,00	100,00	117,65	117,65	105,26	37.586.320	24.934.442	66,34
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91,50	89,50	89,50	89,38	99,87	99,87	97,68	27.412.110	3.681.427	13,43
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	85,00	85,00	100,00	117,65	117,65	109,89	5.350.560	1.327.500	24,81

8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	85,00	85,00	100	117,65	117,65	133,33	39.237.440	9.735.000	24,81
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,00	92,00	92,00	97,64	106,13	106,13	101,71	557.379.570	74.855.677	13,43
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,00	85,00	85,00	88,39	103,99	103,99	93,04	301.533.210	40.495.694	13,43
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89,09	81,09	81,09	99,86	123,15	123,15	112,09	27.412.110	3.681.427	13,43
12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	63,00	63,00	100,00	158,73	158,73	133,33	5.033.000	1.700.000	33,78
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	85,90	76,70	76,80	81,60	106,25	106,39	94,99	7.518.001.000	802.143.240	10,67
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	91,52	88,00	88,00	87,37	99,28	99,28	95,47	8.429.205.000	513.915.125	6,10
15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	21,00	14,00	47,50	47,50	100,00	339,29	226,19	574.628.000	18.064.300	3,14
16	Jumlah desa pangan aman	10,00	6,00	45,00	47,50	105,56	791,67	475,00	882.108.000	23.643.000	2,68
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	2,00	1,00	60,00	70,00	116,67	7000,00	3500,0	120.163.000	10.895.000	9,07

18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	84,00	80,00	43,33	46,83	108,08	58,54	55,75	40.082.000	340.000	0,85
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	94,00	90,00	43,00	50,00	116,28	55,56	53,19	480.364.000	123.389.000	25,69
20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	94,00	90,00	50,00	50,00	100,00	55,56	53,19	144.506.000	2.560.000	1,77
21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,90	4,70	-	-	-	-	-	124.228.000	18.480.000	14,88
22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)	90,20	90,00	-	-	-	-	-	4.092.713.250	1.535.320.961	37,51
23	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	84,00	82,00	-	-	-	-	-	4.092.713.250	1.535.320.961	37,51
24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00	5,00	-	-	-	-	-	4.092.713.250	1.535.320.961	37,51
25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,15	2,95	-	-	-	-	-	4.092.713.250	1.535.320.961	37,51
TOTAL									**36.739.481.000**	**8.236.472.392**	**22,42**

Ket:
**Pagu termasuk pagu blokir*
**Realisasi termasuk pengembalian belanja*

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja tertinggi sebesar 158,73% yaitu pada indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan realisasi anggaran sebesar 33,78%. Sedangkan untuk capaian kinerja terendah sebesar 99,28% yaitu pada indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan realisasi anggaran sebesar 6,10%.

Kemudian untuk realisasi anggaran per indikator tertinggi sebesar 66,34% yaitu pada indikator:

1. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian indikator 114,87%.
2. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar dengan capaian indikator100%.
3. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian indikator 117,65%.

Sedangkan untuk realisasi anggaran terendah sebesar 0,85% yaitu pada indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan dengan capaian indikator 108,08%.

b. Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis

Tabel 3.102 Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Nilai Capaian (Rata-Rata Indikator)	ANGGARAN		
			Pagu 2025*	Realisasi*	%
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	110,86	2.050.310.000	580.058.883	28,29
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	158,73	5.033.000	1.700.000	33,78
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	106,25	7.518.001.000	802.143.240	10,67
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	105,38	10.006.104.000	566.517.425	5,66
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	108,08	40.082.000	340.000	0,85
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	116,28	480.364.000	123.389.000	25,69
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	100,00	144.506.000	2.560.000	1,77
8	Layanan Publik UPT yang prima	-	124.228.000	18.480.000	14,88
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	-	16.370.853.000	6.141.283.844	37,51
Total		**115,08**	**36.739.481.000**	**8.236.472.392**	**22,42**

Ket:
**Pagu termasuk pagu blokir*
**Realisasi termasuk pengembalian belanja*

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai capaian sasaran kegiatan tertinggi 158,73% yaitu pada sasaran kegiatan Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi dengan realisasi anggaran sebesar 33,78%. Sedangkan nilai capaian sasaran kegiatan terendah 100% yaitu pada sasaran kegatan Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT dengan realisasi anggaran sebesar 1,77%.

Kemudian realisasi anggaran sasaran kegiatan tertinggi sebesar 37,51% yaitu pada sasaran strategis Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal dengan nilai capaian sasaran kegiatan belum dapat diukur. Sedangkan realisasi anggaran sasaran kegiatan terendah sebesar 0,85% yaitu pada sasaran strategis kegiatan Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu dengan nilai capaian sasaran 108,08%.

c. Realisasi Anggaran per Kegiatan

Tabel 3.103 Realisasi Anggaran per Kegiatan Triwulan II Tahun 2025

Program	Kegiatan	Pagu 2025*	Realisasi	%
Program Pengawasan Obat dan Makanan	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	22,135,067,000	2,120,917,353	9.58
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	14,604,414,000	6,113,780,286	41.86
Total		**36,739,481,000**	**8,234,697,639**	**22.41**

*Ket: *Total pagu termasuk pagu blokir*

Tabel 3.104 Realisasi Anggaran per Rincian Output Triwulan II Tahun 2025

No	Kegiatan	KRO /RO	Uraian RO	Keluaran (Data Sakti)					Belanja (Data OMSPAN)		
				Target	Satuan	S.d Bulan Juni			Pagu*	Realisasi*	%
						RVRO	TPCRO (%)	PCRO (%)			
1	3165	AEA001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	kegiatan	6	42.84	42.84	144,506,000	2,560,000	1.77
2	3165	BAH001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	791	dokumen	267	42.59	42.72	124,228,000	18,480,000	14.88

3	3165	BDC001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	27194	Orang	2244	2.36	8.25	8,287,390,000	507,115,125	6.12
4	3165	BKB001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	laporan	0	49.98	49.98	884,000,000	25,728,805	2.91
5	3165	BMB001	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	33	kegiatan	22	63.63	66.66	141,815,000	6,800,000	4.96
6	3165	CAB001	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	Unit	0	0	1	121,000,000	0	0
7	3165	CAN001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	10	Unit	0	0	1	100,000,000	0	0
8	3165	CBV001	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1	Unit	0	0	1	661,439,000	0	0
9	3165	PDD001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	Lembaga	0	49.98	49.98	3,274,278,000	132,843,240	4.06
10	3165	QCDU18	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PADANG	4	Perkara	3	50	50	480,364,000	123,389,000	25.69
11	3165	QDB001	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	14	Lembaga	0	70	70	574,628,000	18,064,300	3.14
12	3165	QDB002	Desa Pangan Aman	6	Lembaga	0	70	70	882,108,000	23,643,000	2.68
13	3165	QDB003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	Lembaga	0	70	70	120,163,000	10,895,000	9.07
14	3165	QDC001	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	45	Orang	45	100	100	36,100,000	2,000,000	5.54
15	3165	QDG001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	13	UMKM	0	47.67	55.39	40,082,000	340,000	0.85
16	3165	QIA001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	528	Produk	274	49.05	51.90	469,829,000	311,680,520	66.34

17	3165	QIA002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	1034	Produk	483	46.92	47.98	586,056,000	132,601,639	22.63
18	3165	QIC001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	51	Lembaga	33	43.12	64.70	44,588,000	11,062,500	24.81
19	3165	QIC003	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	5	Lembaga	5	100	100	5,033,000	1,700,000	33.78
20	3165	QIC004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	682	Lembaga	358	49.99	52.49	913,737,000	122,714,224	13.43
21	3165	RAB001	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	Paket	0	40	47	4,243,723,000	669,300,000	15.77
22	6384	EBA956	Layanan BMN	1	Layanan	0	49.98	49.98	8,000,000	5,970,000	74.63
23	6384	EBA994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	0	49.98	49.98	14,596,414,000	6,109,585,039	41.86
Total				**30432**	**-**	**3740**			**36,739,481,000**	**8,236,472,392**	**22.42**

Ket:
**Total pagu termasuk pagu blokir*
**Realisasi termasuk pengembalian belanja*

Tabel di atas menunjukkan rincian output dengan progres tertinggi 100% yaitu pada rincian output Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans dengan realisasi anggaran sebesar 5,54% atas pagu total dan 100% atas pagu setelah dikurangi blokir. Kemudian realisasi anggaran tertinggi sebesar 74,63% yaitu pada rincian output Layanan BMN dengan capaian rincian output 49,98%.

d. Pengukuran Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Yang menjadi fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar, atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar; atau persentase capaian *output* sama atau lebih tinggi dari pada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\%\ \text{Capaian Output}}{\%\ \text{Capaian Input}}$$

Sedangkan Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE), mengikuti formula logika sebagai berikut :

Jika IE ≥ SE : kegiatan efisien

Apabila IE < SE : kegiatan tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Pengukuran efisiensi secara lengkap dapat dilihat pada tabel Nilai efisiensi masing-masing Indikator kinerja utama sebagai berikut :

Pada triwulan I tahun 2025 telah terdapat 19 indikator yang dapat diukur dari 25 indikator, dan 11 indikator yang dapat dihitung efisiensinya. Dari 19 indikator berdasarkan tingkat efisiensi maka 12 indikator dikategorikan efisien dengan persentase 80%-100% dan 7 indikator tidak efisien. Jadi secara secara total tingkat efisien 95% dengan nilai tingkat efisiensi 0,21.

Tabel 3.105 Nilai Efisiensi Indikator Kinerja Triwulan II Tahun 2025

No	Indikator	Output (Indikator)			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kriteria
		T	R	%	T*	R	%				
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yg ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,75	93,35	107,61	183.586.257	132.601.639	72,23	**1,49**	**0,49**	**92 %**	Efisien
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	4.000.000	2.000.000	50,00	-	-	-	-
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yg ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	97,64	114,87	122.521.351	264.928.442	216,23	**0,53**	**-0,47**	Tidak Efisien	
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	100,00	100,00	10.089.994	21.817.636	216,23	**0,46**	**-0,54**	Tidak Efisien	
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	100,00	117,65	11.531.421	24.934.442	216,23	**0,54**	**-0,46**	Tidak Efisien	
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89,50	89,38	99,87	7.262.715	3.681.427	50,69	**1,97**	**0,97**	**88 %**	Efisien
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	100,00	117,65	428.400	1.327.500	309,87	**0,38**	**-0,62**	Tidak Efisien	
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	100,00	117,65	3.141.600	9.735.000	309,87	**0,38**	**-0,62**	Tidak Efisien	
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,00	97,64	106,13	147.675.202	74.855.677	50,69	**2,09**	**1,09**	**86 %**	Efisien

10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	88,39	103,99	79.889.863	40.495.694	50,69	**2,05**	**1,05**	**86 %**	Efisien
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	81,09	99,86	123,15	7.262.715	3.681.427	50,69	**2,43**	**1,43**	**80 %**	Efisien
12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	63,00	100,00	158,73	2.040.000	1.700.000	83,33	**1,90**	**0,90**	**88 %**	Efisien
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai StandarKemampuan Laboratorium	76,80	81,60	106,25	1.130.331.995	802.143.240	70,97	**1,50**	**0,50**	**92 %**	Efisien
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88,00	87,37	99,28	319.753.997	513.915.125	160,72	**0,62**	**-0,38**	Tidak Efisien	
15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	47,50	47,50	100,00	42.770.000	18.064.300	42,24	**2,37**	**1,37**	**84 %**	Efisien
16	Jumlah desa pangan aman	45,00	47,50	105,56	28.935.000	23.643.000	81,71	**1,29**	**0,29**	**95 %**	Efisien
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	60,00	70,00	116,67	20.584.980	10.895.000	52,93	**2,20**	**1,20**	**86%**	Efisien
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	43,33	46,83	108,08	1.019.998	340.000	33,33	**3,24**	**2,24**	**75 %**	Tidak Efisien
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	43,00	50,00	116,28	116.824.990	123.389.000	105,62	**1,10**	**0,10**	**100 %**	Efisien
20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50,00	50,00	100,00	7.349.996	2.560.000	34,83	**2,87**	**1,87**	**75 %**	Efisien

21	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	24.440.000	18.480.000	75,61	-	-	-	-
22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (BB/BPOM)	-	-	-	1.477.392.811	1.535.320.961	103,92	-	-	-	-
23	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	-	-	-	1.477.392.811	1.535.320.961	103,92	-	-	-	-
24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	1.477.392.811	1.535.320.961	103,92	-	-	-	-
25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	1.477.392.811	1.535.320.961	103,92	-	-	-	-
TOTAL					**8.181.011.719**	**8.236.472.392**	**100,68**				
RATA-RATA EFISIENSI				**112**	**118.052.657**	**109.195.187**	**92,50**	**1,21**	**0,21**	**95%**	**Efisien**

Tabel 3.106 Nilai Efisiensi Sasaran Kegiatan Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Output (Target%)	Input (Anggaran %)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
SK1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	110,86	154,34	**0,72**	**-0,28**	Tidak Efisien	
SK2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	158,73	83,33	**1,90**	**0,90**	**88 %**	Efisien
SK3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	106,25	70,97	**1,50**	**0,50**	**92 %**	Efisien
SK4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	105,38	84,40	**1,25**	**0,25**	**95 %**	Efisien
SK5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	108,08	33,33	**3,24**	**2,24**	**75 %**	Tidak Efisien
SK6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	116,28	105,62	**1,10**	**0,10**	**100 %**	Efisien
SK7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	100,00	34,83	**2,87**	**1,87**	**75 %**	Tidak Efisien
SK8	Layanan Publik UPT yang prima	-	75,61	-	-	-	-
SK9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	-	103,92	-	-	-	-
RATA-RATA EFISIENSI		**115,08**	**80,97**	**1,42**	**0,42**	**92 %**	**Efisien**

Berdasarkan tabel di atas maka 4 sasaran kegiatan efisiensi, 3 sasaran kegiatan tidak efisien, dan 2 sasaran kegiatan belum dapat diukur.

Analisa untuk tingkat efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Realisasi anggaran pada sasaran kegiatan Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT adalah Rp580.058.883 dari pagu RPD triwulan II Rp.577.389.518. dengan persentase capaian anggaran 100,46%. Tingginya persentase realisasi anggaran ini karena adanya pembayaran pengadaan reagen pada bulan Mei yang lebih besar daripada rencana.

   Sasaran kegiatan ini memiliki 11 indikator namun tingkat efisiensi yang telah bisa diukur adalah 10 indikator. Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi memperoleh nilai tidak efisiensi dengan TE -0,28, capaian sasaran kegiatan lebih rendah daripada persentase realisasi anggaran sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2025. Hal ini menunjukkan rencana penggunaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan sampel dan sarana sediaan farmasi dan pangan olahan yang mendukung tercapainya sasaran kegiatan tidak tepat.

2. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

   Realisasi anggaran pada sasaran Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah Rp.1.700.000 dari pagu RPD triwulan II Rp.2.040.000 dengan persentase capaian anggaran 83,33%. Sasaran kegiatan ini memiliki 1 indikator dan berdasarkan hasil pengukuran efisiensi memperoleh nilai efisiensi 88% dengan TE 0,90, capaian sasaran kegiatan lebih tinggi daripada persentase realisasi anggaran sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2025. Hal ini menunjukkan anggaran telah digunakan dengan optimal untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan sarana produksi fortifikasi yang mendukung tercapainya sasaran kegiatan.

3. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

   Realisasi anggaran pada sasaran Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT adalah Rp.802.143.240 dari pagu RPD triwulan II Rp.1.130.331.995 dengan persentase capaian anggaran 70,97%. Rendahnya persentase realisasi anggaran ini karena pengadaan alat laboratorium (upgrade HPLC) yang direncanakan dilakukan pembayaran pada bulan Mei (172 Juta) belum dapat dilaksanakan karena software dan hardware belum datang (produk impor) sehingga belum dapat dilakukan pembayaran.

Sasaran strategis ini memiliki 1 indikator dan berdasarkan hasil pengukuran efisiensi memperoleh nilai efisiensi 92% dengan TE 0,50, capaian sasaran kegiatan lebih tinggi daripada persentase realisasi anggaran sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2025. Hal ini menunjukkan anggaran telah digunakan dengan optimal untuk pelaksanaan kegiatan laboratorium yang mendukung tercapainya sasaran kegiatan.

4. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

   Realisasi anggaran pada sasaran Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT adalah Rp.566.517.425 dari pagu RPD triwulan II Rp.412.043.977. dengan persentase capaian anggaran 137,49%. Tingginya persentase realisasi anggaran ini karena pelaksanaan kegiatan KIE Tomas yang direncanakan pada bulan Mei untuk 2 titik (kali) kegiatan namun terlaksana 4 titik (kali) kegiatan) sehingga dengan realisasi anggaran lebih besar dari rencana penggunaan angagran triwulan II tahun 2025.

   Sasaran kegiatan ini memiliki 4 indikator dan berdasarkan hasil pengukuran efisiensi memperoleh nilai efisiensi 95% dengan TE 0,25, capaian sasaran kegiatan lebih tinggi daripada persentase realisasi anggaran sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2025. Hal ini menunjukkan anggaran telah digunakan dengan optimal untuk pelaksanaan kegiatan KIE, Sekolah, Desa, dan Pasar pangan aman yang mendukung tercapainya sasaran kegiatan.

5. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu di masing-masing wilayah kerja UPT

   Realisasi anggaran pada sasaran Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu di masing-masing wilayah kerja UPT adalah Rp.340.00 dari pagu RPD triwulan II Rp.1.019.998 dengan persentase capaian anggaran 33,33%. Rendahnya persentase realisasi anggaran ini karena rencana anggaran untuk kegiatan pada bulan Mei dan Juni tidak terealisasi.

   Sasaran kegiatan ini memiliki 1 indikator dan berdasarkan hasil pengukuran efisiensi memperoleh nilai efisiensi 75% dengan TE 2,24, capaian sasaran kegiatan lebih tinggi daripada persentase realisasi anggaran sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2025. Hal ini menunjukkan rencana penggunaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan UMKM yang mendukung tercapainya sasaran kegiatan tidak tepat.

6. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

   Realisasi anggaran pada sasaran Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT adalah Rp.123.389.000 dari pagu RPD triwulan II Rp.116.824.990 dengan persentase capaian anggaran 105,62%. Sasaran kegiatan ini memiliki 1 indikator dan berdasarkan hasil pengukuran efisiensi memperoleh nilai efisiensi 100% dengan TE 0,10, capaian sasaran kegiatan lebih tinggi daripada persentase realisasi anggaran sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2025. Hal ini menunjukkan anggaran telah digunakan dengan optimal untuk pelaksanaan kegiatan penyidikan yang mendukung tercapainya sasaran kegiatan.

7. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

   Realisasi anggaran pada sasaran Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT adalah Rp.2.560.000 dari pagu RPD triwulan II Rp.7.349.996 dengan persentase capaian anggaran 34,83%. Rendahnya persentase realisasi anggaran ini karena anggaran yang direncanakan untuk pelaksanaan kegiatan analisis kejahatan pada bulan Maret, April, dan Juni tidak terealisasi. Sasaran kegiatan ini memiliki 1 indikator dan berdasarkan hasil pengukuran efisiensi memperoleh nilai tidak efisiensi 75% dengan TE 1,87, capaian sasaran kegiatan lebih tinggi daripada persentase realisasi anggaran sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2025. Hal ini menunjukkan rencana penggunaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan analisis kejahatan yang mendukung tercapainya sasaran kegiatan tidak tepat.

Upaya yang dilakukan untuk dapat meningkatkan tingkat efisiensi adalah dengan melaksanakan kegiatan dengan menggunakan anggaran sesuai dengan rencana penarikan dana dan memaksimalkan ketercapaian target kinerja. Secara rata-rata per sasaran kegiatan nilai efisiensi anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang adalah 92% dengan nilai TE 0,42. Jadi dengan sumber daya anggaran yang ada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tetap dapat mencapai sasaran kegiatan bahkan melebihi yang ditargetkan. Dalam konteks ini, pengukuran tingkat efisiensi bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output kinerja dan input dalam bentuk anggaran (rencana penarikan dana).

BAB IV

Penutup

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar POM di Padang Triwulan II Tahun 2025 BBOM di Padang merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pencapaian pelaksanaan kegiatan dan program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Pengukuran pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025. Dalam laporan Akuntabilitas Kinerja ini tergambar target, capaian, tantangan, kendala sekaligus peluang dalam pencapaian kinerja 9 (sembilan) sasaran kegiatan yang diukur dengan 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Besar POM di Padang.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari periode Rencana Strategis 2025-2029. Pada Tahun 2025 Balai Besar POM di Padang telah melaksanakan 25 (Dua puluh lima) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) BBPOM di Padang tahun 2025.

Balai Besar POM di Padang telah melaksanakan kegiatan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan, yaitu:

1. Dari hasil pengukuran capaian kinerja Balai Besar POM di Padang dengan membandingkan realisasi Triwulan II Tahun 2025 terhadap target (rencana) yang telah ditetapkan maka diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Balai Besar POM di Padang pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 106,15% dengan kategori Istimewa.

2. Balai Besar POM di Padang mencapai 4 sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dengan kriteria Sangat Baik, 1 sasaran dengan kategori baik, dan 2 sasaran kegiatan dengan kategori tidak dapat disimpulkan.

3. Dari 25 indikator kinerja dalam analisa capaian kinerja terhadap target Triwulan II Tahun 2024, terdapat 6 indikator yang nilai capaian kinerja diantara 100% < s.d ≤ 110% dengan kategori Sangat Baik, 5 indikator yang nilai capaian kinerja 90% < s.d ≤ 100% dengan kategori Baik, serta 8 indikator mempunyai capaian melebihi 110% dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan.

4. Terdapat perbedaan target indikator yang terdapat pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK), hal ini dikarenakan adanya perubahan target indikator dari unit pengampu indikator terkait dan berdasarkan kesepakatan antara unit pengampu, Biro perencanaan dan Keuangan serta Balai Besar POM di Padang.

5. Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja 9 (sembilan) sasaran kegiatan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan telah menyerap anggaran DIPA Balai Besar POM di Padang sampai tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 8.234.697.639 (Delapan milyar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuah enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) atau sebesar 22,41% dari total pagu anggaran Tahun 2025 awal yaitu sebesar RP. 36.739.481.000 (Tiga puluh enama milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan 34,03% dari total pagu anggaran setelah blokir yaitu sebesar Rp. 24.195.467.000 (Dua puluh empat milyar seratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) per 30 Juni 2025.

6. Dari perhitungan efisiensi penggunaan anggaran apabila dibandingkan dengan capaian persentase realisasi anggaran masing-masing sasaran kegiatan dengan persentase capaian masing-masing sasaran kegiatan BBPOM di Padang maka diperoleh kegiatan yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang telah efisien dengan nilai capaian efisiensi sebesar 92%.

.

Pernyataan pencapaian setiap sasaran kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Pada Triwulan II Tahun 2025 Balai Besar POM di Padang Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan nilai capaian sasaran kegiatan 106,76% (Baik)
2. Pada Triwulan II Tahun 2025 Balai Besar POM di Padang Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan nilai capaian sasaran kegiatan 158,73% dinormalisasi menjadi 110% (Tidak dapat disimpulkan)
3. Pada Triwulan II Tahun 2025 Balai Besar POM di Padang Menguatkan Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan nilai capaian sasaran kegiatan 106,25% (Sangat Baik).

4. Pada Triwulan II Tahun 2025 Balai Besar POM di Padang Meningkatkan efektivitas KIE di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dengan nilai capaian sasaran kegiatan 103,71% (Sangat baik)
5. Pada Triwulan II Tahun 2025 Balai Besar POM di Padang Meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan tandar keamanan dan mutu, nilai capaian sasaran kegiatan 108,08% (Sangat baik)
6. Pada Triwulan II Tahun 2025 Balai Besar POM di Padang Melaksanakan Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dengan nilai capaian sasaran kegiatan 116,28% dinormalisasi menjadi 100% (Tidak dapat disimpulkan)
7. Pada Triwulan II Tahun 2025 Balai Besar POM di Padang Melaksankan kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dengan nilai capaian sasaran kegiatan 100,00% (Baik)
8. Pada Triwulan II Tahun 2025 Balai Besar POM di Padang Mewujudkan Layanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang prima, dengan capaian belum dihitung pada Triwulan II 2025
9. Pada Triwulan II Tahun 2025 Balai Besar POM di Padang Mewujudkan tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal dengan capaian belum dihitung pada Triwulan II 2025

Capaian kinerja terhadap 19 IKU yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

a. Indikator dengan kriteria Sangat Baik (dengan capaian 100% < x ≤ 110%) sebanyak Indikator Kinerja Utama, yaitu :

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 107,61%
2. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 106,13%
3. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 103,99%
4. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan capaian 106,25%
5. Jumlah desa pangan aman dengan capaian 105,56%

6. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan dengan capaian 108,08%

b. Indikator dengan kriteria Baik (dengan capaian 90% < x ≤ 110%) sebanyak 5 Indikator Kinerja Utama yaitu :

1. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar dengan capaian 100%
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dengan capaian 99,87%
3. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dengan capaian 99,28%
4. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dengan capaian 100%
5. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar dengan capaian 100%

c. Indikator dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan (dengan capaian > 110%) sebanyak 8 Indikator Kinerja Utama, yaitu :

1. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 114,87%
2. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 117,65%
3. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 117,65%
4. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 117,65%
5. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dengan capaian 123,15%
6. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 158,73%
7. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dengan capaian 116,67%
8. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT dengan capaian 116,28%

Persentase capaian target indikator kinerja BBPOM di Padang pada Tahun 2024 berkisar antara 99,28% sampai dengan 158,73%. Persentase capaian indikator kinerja terendah pada indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dan Persentase capaian indikator tertinggi adalah Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

4.2 RENCANA PERBAIKAN KINERJA

Capaian kinerja dan realisasi anggaran dari 9 (sembilan) sasaran strategis yang diperoleh Balai Besar POM di Padang pada Triwulan II Tahun 2025 sudah dilaksanakan dengan baik, diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap capaian tersebut, terutama untuk realisasi yang belum tercapai pada Triwuan II Tahun 2025. Hal ini diperlukan untuk rencana perbaikan kinerja Balai Besar POM di Padang pada periode berikutnya.

Rencana perbaikan kinerja terhadap target indikator yang tidak tercapai adalah sebagai berikut:

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

    a. Pengawalan secara rutin dan berkala kepada pelaku usaha dan lintas sektor terkait, agar segera melakukan tindakan perbaikan atau pencegahan sesuai dengan rekomendasi keputusan tindak lanjut yang diberikan.
    b. Selalu mengingatkan petugas sarana terkait agar berkomunikasi terus menerus untuk pengawalan pelaku usaha agar segera mengirimkan CAPA
    c. Melaksanakan koordinasi dan jika diperluka berkolaborasi dengan lintas sektor terkait agar segera melakukan pembinaan kepada pelaku usaha daerah binaannya. Pembinaan ini merupakan suatu output CAPA yang dapat dikirimkan lintas sektor terkait dan dapat dihitung sebagai respon tindak lanjut lintas sektor
    d. Memastikan tersedianya sistem yang dapat memastikan keputusan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana sampai ke pelaku usaha atau lintas sektor terkait secara tepat waktu.
    e. Memudahkan pelaku usaha dalam mengirimkan CAPA dengan tersedianya softcopy CAPA dalam format word atau excel sehingga memudahkan pelaku usaha dalam menyusun CAPA dan dapat secara tepat waktu mengirimkan melalui link yang telah dicantumkan dalam surat keputusan.

2. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Rencana perbaikan kinerja agar dapat mencapai tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang antara lain:

a. Mengoptimalkan KIE melalui media sosial.
b. Meningkatkan kerja sama dengan stakeholder terkait dalam menyebarkan informasi keamanan Obat dan Makanan.
c. Meningkatkan kualitas materi yang akan disampaikan dengan melalukan reviu terhadap materi KIE.
d. Meningkatkan kompetensi petugas.
e. Meningkatkan interaksi dengan peserta KIE dengan mengadakan: kuis, tanya jawab, dsb.
f. Meningkatkan pemahaman peserta dengan menggunakan alat peraga seperti: contoh produk, poster, brosur, dll

Lampiran

Lampiran 1

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG
Jl. Gajah Mada Padang - Sumatera Barat 25137
Telp. (0751) 7054280, 7055213, Fax. (0751) 7055213, 445241
Email : bpom_padang@pom.go.id, Website : https://padang.pom.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

NOMOR HK.02.3A.09.24.266 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

Menimbang :

a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2025;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Reoublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG TAHUN 2025.
Kesatu	:	Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Kedua	:	Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.
Ketiga	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 September 2024
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG



ABDUL RAHIM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG
NOMOR HK.02.3A.09.24.266 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG TAHUN 2024

RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBATDAN MAKANAN DI PADANG

TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
	distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	96,70
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	14
		Jumlah desa pangan aman	6
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	96,83
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	91

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
	efektif di wilayah kerja UPT		
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90
		Nilai AKIP UPT BPOM	81,97
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	90
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,2

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

ABDUL RAHIM

Lampiran 2

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN RESNTRA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG 2025-2029

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia									**36.739.444**	**35.759.891**	**36.277.256**	**37.061.185**	**37.825.306**	
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Kerja UPT		Provinsi Sumatera Barat											Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Provinsi Sumatera Barat	89,25	90,50	91,75	93,00	94,25						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Provinsi Sumatera Barat	26,00	27,00	28,00	29,00	30,00						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Provinsi Sumatera Barat	89,00	90,00	91,00	92,00	93,00						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	Provinsi Sumatera Barat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Provinsi Sumatera Barat	85,00	87,00	89,00	92,00	95,00						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Provinsi Sumatera Barat	89,50	90,00	90,25	91,00	91,25						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Provinsi Sumatera Barat	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Provinsi Sumatera Barat	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Provinsi Sumatera Barat	93,75	95,00	96,25	97,25	98,25						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Provinsi Sumatera Barat	85,00	87,00	89,00	92,00	95,00						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Provinsi Sumatera Barat	91,60	92,60	93,60	94,80	96,00						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	Provinsi Sumatera Barat	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT	Provinsi Sumatera Barat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	14	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Provinsi Sumatera Barat	11,11	22,22	33,33	44,44	66,67						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	15	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Provinsi Sumatera Barat	77,00	81,50	82,80	84,40	85,90						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	RO 1: Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans		Provinsi Sumatera Barat	45	45	45	45	45						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT		Provinsi Sumatera Barat	528	528	528	528	528						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT		Provinsi Sumatera Barat	1034	1039	1089	1142	1199						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		Provinsi Sumatera Barat	51	53	61	66	73						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		Provinsi Sumatera Barat	682	729	781	839	910						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	RO 6: Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM		Provinsi Sumatera Barat	-	204	204	216	216						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	RO 7: Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia		Provinsi Sumatera Barat	1	1	1	1	1						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 8: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		Provinsi Sumatera Barat	1	1	1	1	1						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	RO 9: Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		Provinsi Sumatera Barat	1	1	1	1	1						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi		Provinsi Sumatera Barat											Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Provinsi Sumatera Barat	63,00	63,00	63,00	75,00	75,00						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	RO 1: Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT		Provinsi Sumatera Barat	5	5	5	6	6						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT		Provinsi Sumatera Barat											Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Provinsi Sumatera Barat	88,00	88,88	89,76	90,64	91,52						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Provinsi Sumatera Barat	14	16	19	20	21						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	3	Jumlah desa pangan aman	Provinsi Sumatera Barat	6	8	10	10	10						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Provinsi Sumatera Barat	1	2	2	2	2						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE		Provinsi Sumatera Barat	27194	27300	27360	27432	27518						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT		Provinsi Sumatera Barat	33	16	18	21	23						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 3: Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman		Provinsi Sumatera Barat	14	16	19	20	21						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	RO 4: Desa Pangan Ama		Provinsi Sumatera Barat	6	8	10	10	10						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas		Provinsi Sumatera Barat	1	2	2	2	2						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu		Provinsi Sumatera Barat											Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Provinsi Sumatera Barat	15,85	32,93	52,44	74,39	100,00						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT		Provinsi Sumatera Barat	13	14	16	18	21						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT		Provinsi Sumatera Barat											Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Provinsi Sumatera Barat	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	RO 1: Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Padang		Provinsi Sumatera Barat	4	4	4	4	4						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT		Provinsi Sumatera Barat											Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Provinsi Sumatera Barat	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		Provinsi Sumatera Barat	14	14	15	15	15						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	Layanan Publik UPT yang Prima		Provinsi Sumatera Barat											Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	1	Indeks Pelayanan Publik UPT	Provinsi Sumatera Barat	4,70	4,75	4,80	4,85	4,90						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT		Provinsi Sumatera Barat	791	900	910	933	957						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal		Provinsi Sumatera Barat											Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Provinsi Sumatera Barat	90,00	90,05	90,10	90,15	90,20						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	2	Nilai AKIP UPT BPOM	Provinsi Sumatera Barat	82,00	82,50	83,00	83,50	84,00						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Provinsi Sumatera Barat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Provinsi Sumatera Barat	2.95	3,00	3,05	3,10	3,15						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		Provinsi Sumatera Barat	1	1	1	1	1						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia		Provinsi Sumatera Barat	1	1	1	1	1						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi		Provinsi Sumatera Barat	10	32	32	32	32						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 4: Layanan BMN	Provinsi Sumatera Barat	1	1	1	1	1						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang
	RO 5: Layanan Perkantoran	Provinsi Sumatera Barat	1	1	1	1	1						Balai Besar Pengas Obat dan Makanan di Padang

Lampiran 3

BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

Jl. Gajah Mada PO Box 172 Padang - Sumbar 25137
Telp. (0751) 7054280, 7055213,Fax. (0751) 7055213, 445241
Email : bpom_padang@pom.go.id,bbpom_padang@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PADANG
NOMOR HK.02.02.3A.02.25.48 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PADANG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk mengukur keberhasilan peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/ M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 930);
10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG TENTANG PENETEPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG TAHUN 2025-2029.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Padang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Padang sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2025

PLT. KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG,



HILDA MURNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESA PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PADANG
NOMOR HK.02.02.3A.02.25.48 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PADANG TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG
TAHUN 2025-2029

SK 1	**Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT**
1.1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
1.3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT
1.5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
1.7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
SK 2	**Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi**
2.1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
SK 3	**Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT**
3.1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

SK 4	**Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT**
4.1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
4.2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
4.3	Jumlah desa pangan aman
4.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
SK 5	**Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu**
5.1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan
SK 6	**Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT**
6.1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT
SK 7	**Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT**
7.1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar
SK 8	**Layanan Publik UPT yang prima**
8.1	Indeks Pelayanan Publik UPT
SK 9	**Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal**
9.1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
9.2	Nilai AKIP UPT BPOM
9.3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
9.4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

PLT. KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG,

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
BADAN POM
DIPADANG

HILDA MURNI

Lampiran 4

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI PADANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: HILDA MURNI
Jabatan	: Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, 12 Februari 2025

Pihak Pertama Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Pihak Kedua Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
HILDA MURNI	TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI PADANG

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.75 Persen
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persen
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persen
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 Persen
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persen
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89.5 Persen
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persen
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persen
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92 Persen
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persen
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	81.09 Persen

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	63 Persen
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77 Nilai
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88 Persen
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	14 Jumlah
		03 - Jumlah desa pangan aman	6 Jumlah
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Jumlah
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80 Persen
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	90 Persen
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persen
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7 Indeks
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	82 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.95 Indeks

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 36,739,481,000 (Tiga Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	22,408,037,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	14,331,444,000

Padang, 12 Februari 2025

Pihak Pertama
Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

HILDA MURNI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

Lampiran 5

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI PADANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	586.056.000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	36.100.000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	399.354.650
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	32.888.030
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	37.586.320
		06 - Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		89.5	89.5	89.5	89.5	89.5	89.5	89.5	89.5	89.5	89.5	89.5	27.412.110
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	5.350.560

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		ditindaklanjuti sesuai ketentuan													
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	39.237.440
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	557.379.570
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	301.533.210
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	81.09	81.09	81.09	81.09	81.09	81.09	81.09	81.09	81.09	81.09	81.09	81.09	27.412.110
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	40	40	40	63	63	63	63	63	63	63	63	63	5.033.000
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			76.7	76.7	76.7	76.8	76.8	76.8	76.9	76.9	76.9	77	7.790.971.000
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di			88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	8.429.205.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	UPT	wilayah kerja UPT													
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0	0	5	25	47.5	47.5	50	60	70	88	93	14	574.628.000
		03 - Jumlah desa pangan aman	0	0	5	25	37.5	45	45	55	73	83	95	6	882.108.000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0	0	5	25	50	60	100	100	100	100	100	1	120.163.000
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	4.16	10.33	14.5	23.32	30.84	43.33	52.5	60	68.5	71	79.17	80	40.082.000
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	42.5	42.5	42.5	42.5	43	43	45	65	70	80	83	90	480.364.000
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	144.506.000
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.7	124.228.000
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												90	4.520.550.000
	Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM												82	3.859.111.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	3.859.111.000
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2.95	3.859.111.000
														Total	36.739.481.000

Padang , 01 July 2025

Plt. Kepala Balai Besar POM di Padang

Aria Bogorianti Asgul, S.Si, Apt

Lampiran 6

NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO) BALAI BESAR POM DI PADANG
TRIWULAN II TAHUN 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025	TARGET TW II	REALISASI	CAPAIAN TERHADAP TARGET TW II (%)	CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUNAN (%)	CAPAIAN NORMALISASI (%)	KATEGORI
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	86,75	86,75	93,35	107,61	107,61	107,61	Sangat Baik
2	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	%	26	-	-				-
3	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	85,00	85,00	97,64	114,87	114,87	110,00	Tidak dapat disimpulkan
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	Baik
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	85,00	85,00	100,00	117,65	117,65	110,00	Tidak dapat disimpulkan
6	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	%	89,50	89,50	89,38	99,87	99,87	99,87	Baik
7	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	85,00	85,00	100,00	117,65	117,65	110,00	Tidak dapat disimpulkan
8	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	85,00	85,00	100	110,00	117,65	110,00	Tidak dapat disimpulkan
9	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	92,00	92,00	97,64	106,13	106,13	106,13	Sangat Baik

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025	TARGET TW II	REALISASI	CAPAIAN TERHADAP TARGET TW II (%)	CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUNAN (%)	CAPAIAN NORMALISASI (%)	KATEGORI
10	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	85,00	85,00	88,39	103,99	103,99	103,99	Sangat Baik
11	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	%	81,09	81,09	99,86	123,15	123,15	110,00	Tidak dapat disimpulkan
12	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	63,00	63,00	100,00	158,73	158,73	110,00	Tidak dapat disimpulkan
13	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai	77,00	76,80	81,60	106,25	105,97	106,25	Sangat Baik
14	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai	88,00	88,00	87,37	99,28	99,28	99,28	Baik
15	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Sekolah	14,00	47,50	47,50	100,00	47,50	100,00	Baik
16	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah desa pangan aman	Desa	6,00	45,00	47,50	105,56	47,50	105,56	Sangat Baik
17	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Pasar	1,00	60,00	70,00	116,67	70,00	110,00	Tidak dapat disimpulkan
18	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	%	80,00	43,33	46,83	108,08	108,08	108,08	Sangat Baik
19	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	%	90,00	43,00	50,00	116,28	55,56	110,00	Tidak dapat disimpulkan
20	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	%	90,00	50,00	50,00	100,00	55,56	100,00	Baik

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025	TARGET TW II	REALISASI	CAPAIAN TERHADAP TARGET TW II (%)	CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUNAN (%)	CAPAIAN NORMALISASI (%)	KATEGORI
21	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	%							
22	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)	Nilai							
23	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	Nilai							
24	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Nilai							
25	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	%							
TOTAL CAPAIAN PK							**2111,75**		**2016,76**	
NILAI KINERJA ORGANISASI (RATA-RATA CAPAIAN PK)							**111,14**		**106,15**	
PREDIKAT NKO							**ISTIMEWA**			

Lampiran 7

PENCAPAIAN KINERJA BESAR POM DI PADANG
BULAN APRIL TAHUN 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2025	TARGET BULAN APRIL	REALISASI	CAPAIAN TERHADAP TARGET APRIL (%)	CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUNAN (%)	CAPAIAN NORMALISASI (%)	KATEGORI
SS1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	86,75	86,75	95,95	110,61	110,61	110,00	Tidak dapat disimpulkan
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	%	26	-					-
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	85,00	85,00	93,24	109,69	109,69	109,69	Sangat Baik
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	Baik
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	85,00	85,00	94,44	111,11	111,11	110,00	Tidak dapat disimpulkan
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	%	89,50	89,50	83,33	93,11	93,11	93,11	Baik
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	85,00	85,00	100,00	117,65	117,65	110,00	Tidak dapat disimpulkan
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	85,00	85,00	100	117,65	117,65	110,00	Tidak dapat disimpulkan
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	92,00	92,00	99,03	107,64	107,64	107,64	Sangat Baik
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	85,00	85,00	99,55	117,12	117,12	110,00	Tidak dapat disimpulkan
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	%	81,09	81,09	99,78	123,05	123,05	110,00	Tidak dapat disimpulkan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2025	TARGET BULAN APRIL	REALISASI	CAPAIAN TERHADAP TARGET APRIL (%)	CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUNAN (%)	CAPAIAN NORMALISASI (%)	KATEGORI
SS2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	63,00	63,00	100,00	158,73	158,73	110,00	Tidak dapat disimpulkan

NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025	TARGET BULAN APRIL	REALISASI	CAPAIAN TERHADAP TARGET APRIL (%)	CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUNAN (%)	CAPAIAN NORMALISASI (%)	KATEGORI
SS3	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai	77,00	76,70	81,20	105,87	105,45	105,87	Sangat Baik
SS4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai	88,00	88,00	85,73	97,42	97,42	97,42	Baik
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Sekolah	14,00	25,00	25,00	100,00	25,00	100,00	Baik
		16	Jumlah desa pangan aman	Desa	6,00	25,00	25,00	100,00	25,00	100,00	Baik

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2025	TARGET BULAN APRIL	REALISASI	CAPAIAN TERHADAP TARGET APRIL (%)	CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUNAN (%)	CAPAIAN NORMALISASI (%)	KATEGORI
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Pasar	1,00	25,00	25,00	100,00	25,00	100,00	Baik
SS5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	%	80,00	23,32	23,00	98,63	23,00	98,63	Baik
SS6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	%	90,00	42,50	23,00	54,12	25,56	54,12	Kurang
SS7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	%	90,00	50,00	50,00	100,00	55,56	100,00	Baik
SS8	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	%							
SS9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)	Nilai							
		23	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	Nilai							
		24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Nilai							
		25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	%							

Lampiran 8

PENCAPAIAN KINERJA BESAR POM DI PADANG
BULAN MEI TAHUN 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2025	TARGET BULAN MEI	REALISASI	CAPAIAN TERHADAP TARGET MEI (%)	CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUNAN (%)	CAPAIAN NORMALISASI (%)	KATEGORI
SS1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	86,75	86,75	95,99	110,65	110,65	110,00	Tidak dapat disimpulkan
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	%	26	-					-
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	85,00	85,00	97,49	114,69	114,69	110,00	Tidak dapat disimpulkan
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	Baik
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	85,00	85,00	97,50	114,71	114,71	110,00	Tidak dapat disimpulkan
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	%	89,50	89,50	83,33	93,11	93,11	93,11	Baik
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	85,00	85,00	100,00	117,65	117,65	110,00	Tidak dapat disimpulkan
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	85,00	85,00	100	117,65	117,65	110,00	Tidak dapat disimpulkan
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	92,00	92,00	97,44	105,91	105,91	105,91	Sangat Baik
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	85,00	85,00	91,91	108,13	108,13	108,13	Sangat Baik
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	%	81,09	81,09	99,83	123,11	123,11	110,00	Tidak dapat disimpulkan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2025	TARGET BULAN MEI	REALISASI	CAPAIAN TERHADAP TARGET MEI (%)	CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUNAN (%)	CAPAIAN NORMALISASI (%)	KATEGORI
SS2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	63,00	63,00	100,00	158,73	158,73	110,00	Tidak dapat disimpulkan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2025	TARGET BULAN MEI	REALISASI	CAPAIAN TERHADAP TARGET MEI (%)	CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUNAN (%)	CAPAIAN NORMALISASI (%)	KATEGORI
SS3	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai	77,00	76,70	81,20	105,87	105,45	105,87	Sangat Baik
SS4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai	88,00	88,00	86,49	98,28	98,28	98,28	Baik
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Sekolah	14,00	47,50	47,50	100,00	47,50	100,00	Baik
		16	Jumlah desa pangan aman	Desa	6,00	37,50	37,50	100,00	47,50	100,00	Baik

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2025	TARGET BULAN MEI	REALISASI	CAPAIAN TERHADAP TARGET MEI (%)	CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUNAN (%)	CAPAIAN NORMALISASI (%)	KATEGORI
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Pasar	1,00	50,00	50,00	100,00	50,00	100,00	Baik
SS5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	%	80,00	30,84	30,67	99,45	30,67	99,45	Sangat Baik
SS6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	%	90,00	43,00	42,00	97,67	46,67	97,67	Baik
SS7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	%	90,00	50,00	50,00	100,00	55,56	100,00	Baik
SS8	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	%							
SS9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)	Nilai							
		23	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	Nilai							
		24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Nilai							
		25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	%							

Lampiran 9

PENCAPAIAN KINERJA BESAR POM DI PADANG
BULAN JUNI TAHUN 2025

NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025	TARGET BULAN JUNI	REALISASI	CAPAIAN TERHADAP TARGET JUNI (%)	CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUNAN (%)	CAPAIAN NORMALISASI (%)	KATEGORI
SS1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	86,75	86,75	93,35	107,61	107,61	107,61	Sangat Baik
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	%	26	-	-				-
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	85,00	85,00	97,64	114,87	114,87	110,00	Tidak dapat disimpulkan
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	Baik
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	85,00	85,00	100,00	117,65	117,65	110,00	Tidak dapat disimpulkan
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	%	89,50	89,50	89,38	99,87	99,87	99,87	Baik
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	85,00	85,00	100,00	117,65	117,65	110,00	Tidak dapat disimpulkan
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	85,00	85,00	100	117,65	117,65	110,00	Tidak dapat disimpulkan
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	92,00	92,00	97,64	106,13043	106,13043	106,13	Sangat Baik
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	85,00	85,00	88,39	103,99	103,99	103,99	Sangat Baik
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	%	81,09	81,09	99,86	123,15	123,15	110,00	Tidak dapat disimpulkan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2025	TARGET BULAN JUNI	REALISASI	CAPAIAN TERHADAP TARGET JUNI (%)	CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUNAN (%)	CAPAIAN NORMALISASI (%)	KATEGORI
SS2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	63,00	63,00	100,00	158,73	158,73	110,00	Tidak dapat disimpulkan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2025	TARGET BULAN JUNI	REALISASI	CAPAIAN TERHADAP TARGET JUNI (%)	CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUNAN (%)	CAPAIAN NORMALISASI (%)	KATEGORI
SS3	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai	77,00	76,80	81,60	106,25	105,97	106,25	Sangat Baik
SS4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai	88,00	88,00	87,37	99,28	99,28	99,28	Baik
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Sekolah	14,00	47,50	47,50	100,00	47,50	100,00	Baik
		16	Jumlah desa pangan aman	Desa	6,00	45,00	47,50	105,56	47,50	105,56	Sangat Baik

NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025	TARGET BULAN JUNI	REALISASI	CAPAIAN TERHADAP TARGET JUNI (%)	CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUNAN (%)	CAPAIAN NORMALISASI (%)	KATEGORI
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Pasar	1,00	60,00	70,00	116,67	110,00	110,00	Tidak dapat disimpulkan
SS5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	%	80,00	43,33	46,83	108,08	46,83	108,08	Sangat Baik
SS6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	%	90,00	43,00	50,00	116,28	55,56	110,00	Tidak dapat disimpulkan
SS7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	%	90,00	50,00	50,00	100,00	55,56	100,00	Baik
SS8	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	%							
SS9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)	Nilai							
		23	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	Nilai							
		24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Nilai							
		25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	%							

Lampiran 10

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Rincian Output s.d Bulan April 2025

No	Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO	Keluaran (Data Sakti)					Belanja (Data OMSPAN)		
				Target	Satuan	S.d Bulan Ini			Pagu	Realisasi*	%
						RVRO	TPCRO (%)	PCRO (%)			
1	3165	AEA001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	kegiatan	4	28,56	28,56	144.506.000	-	0,00
2	3165	BAH001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	791	dokumen	174	23,13	28,69	124.228.000	10.920.000	0,09
3	3165	BDC001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	27194	Orang	200	0,18	0,73	8.292.110.000	-	0,00
4	3165	BKB001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	laporan	0	33,32	33,32	884.000.000	14.443.805	0,02
5	3165	BMB001	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	33	kegiatan	12	36,36	36,36	137.095.000	600.000	0,00
6	3165	CAB001	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	Unit	0	0	1	121.000.000	-	0,00
7	3165	CAN001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	10	Unit	0	0	1	100.000.000	-	0,00
8	3165	CBV001	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1	Unit	0	0	1	661.439.000	-	0,00
9	3165	PDD001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	Lembaga	0	33,32	33,32	3.274.278.000	38.339.240	0,01

No	Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO	Keluaran (Data Sakti)					Belanja (Data OMSPAN)		
				Target	Satuan	S.d Bulan Ini			Pagu	Realisasi*	%
						RVRO	TPCRO (%)	PCRO (%)			
10	3165	QCDU18	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PADANG	4	Perkara	2	20	25	480.364.000	14.729.000	0,03
11	3165	QDB001	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	14	Lembaga	0	25	25	574.628.000	-	0,00
12	3165	QDB002	Desa Pangan Aman	6	Lembaga	0	25	25	882.108.000	-	0,00
13	3165	QDB003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	Lembaga	0	25	25	120.163.000	-	0,00
14	3165	QDC001	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	45	Orang	45	100	100	36.100.000	2.000.000	0,06
15	3165	QDG001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	13	UMKM	0	37,67	37,9	40.082.000	340.000	0,01
16	3165	QIA001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	528	Produk	132	24,43	25	469.829.000	16.449.790	0,04
17	3165	QIA002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	1034	Produk	234	21,96	22,63	586.056.000	23.890.978	0,04
18	3165	QIC001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	51	Lembaga	13	23,52	25,48	44.588.000	1.700.000	0,04
19	3165	QIC003	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	5	Lembaga	5	100	100	5.033.000	680.000	0,14

No	Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO	Keluaran (Data Sakti)					Belanja (Data OMSPAN)		
				Target	Satuan	S.d Bulan Ini			Pagu	Realisasi*	%
						RVRO	TPCRO (%)	PCRO (%)			
20	3165	QIC004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	682	Lembaga	148	21,4	21,69	913.737.000	68.527.000	0,07
21	3165	RAB001	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	Paket	0	15	20	4.243.723.000	-	0,00
22	6384	EBA956	Layanan BMN	1	Layanan	0	33,32	33,32	8.000.000	5.970.000	0,75
23	6384	EBA994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	0	33,32	33,32	14.596.414.000	3.795.186.374	0,26
Total				**30432**	**-**	**969**			**36.739.481.000**	**3.993.776.187**	**10,87**

Lampiran 11

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Rincian Output s.d Bulan Mei 2025

No	Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO	Keluaran (Data Sakti)					Belanja (Data OMSPAN)		
				Target	Satuan	S.d Bulan Ini			Pagu	Realisasi*	%
						RVRO	TPCRO (%)	PCRO (%)			
1	3165	AEA001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	kegiatan	5	35,7	35,7	144.506.000	2.560.000	0,02
2	3165	BAH001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	791	dokumen	208	32,86	32,99	124.228.000	16.930.000	0,14
3	3165	BDC001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	27194	Orang	1244	0,34	4,57	8.292.110.000	287.327.405	0,03
4	3165	BKB001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	laporan	0	41,65	41,65	884.000.000	18.933.805	0,02
5	3165	BMB001	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	33	kegiatan	18	51,51	54,54	137.095.000	6.800.000	0,05
6	3165	CAB001	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	Unit	0	0	1	121.000.000	-	0,00
7	3165	CAN001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	10	Unit	0	0	1	100.000.000	-	0,00
8	3165	CBV001	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1	Unit	0	0	1	661.439.000	-	0,00
9	3165	PDD001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	Lembaga	0	41,65	41,65	3.274.278.000	54.164.240	0,02

No	Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO	Keluaran (Data Sakti)					Belanja (Data OMSPAN)		
				Target	Satuan	S.d Bulan Ini			Pagu	Realisasi*	%
						RVRO	TPCRO (%)	PCRO (%)			
10	3165	QCDU18	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PADANG	4	Perkara	3	40	40	480.364.000	78.750.000	0,16
11	3165	QDB001	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	14	Lembaga	0	45	45	574.628.000	15.405.000	0,03
12	3165	QDB002	Desa Pangan Aman	6	Lembaga	0	50	50	882.108.000	23.643.000	0,03
13	3165	QDB003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	Lembaga	0	45	50	120.163.000	10.895.000	0,09
14	3165	QDC001	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	45	Orang	45	100	100	36.100.000	2.000.000	0,06
15	3165	QDG001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	13	UMKM	0	42,67	50,39	40.082.000	340.000	0,01
16	3165	QIA001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	528	Produk	204	36,74	38,64	469.829.000	49.751.370	0,11
17	3165	QIA002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	1034	Produk	340	32,7	32,88	586.056.000	66.326.862	0,11
18	3165	QIC001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	51	Lembaga	21	33,32	41,17	44.588.000	5.602.500	0,13
19	3165	QIC003	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	5	Lembaga	5	100	100	5.033.000	1.700.000	0,34

No	Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO	Keluaran (Data Sakti)					Belanja (Data OMSPAN)		
				Target	Satuan	S.d Bulan Ini			Pagu	Realisasi*	%
						RVRO	TPCRO (%)	PCRO (%)			
20	3165	QIC004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	682	Lembaga	244	35,33	35,77	913.737.000	94.505.724	0,10
21	3165	RAB001	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	Paket	0	25	30	4.243.723.000	-	0,00
22	6384	EBA956	Layanan BMN	1	Layanan	0	41,65	41,65	8.000.000	5.970.000	0,75
23	6384	EBA994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	0	41,65	41,65	14.596.414.000	4.698.739.790	0,32
Total				**30432**	**-**	**2337**			**36.739.481.000**	**5.440.344.696**	**14,81**

Lampiran 12

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Rincian Output s.d Bulan Juni 2025

No	Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO	Keluaran (Data Sakti)					Belanja (Data OMSPAN)		
				Target	Satuan	S.d Bulan Ini			Pagu	Realisasi*	%
						RVRO	TPCRO (%)	PCRO (%)			
1	3165	AEA001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	kegiatan	6	42,84	42,84	144.506.000	2.560.000	0,02
2	3165	BAH001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	791	dokumen	267	42,59	42,72	124.228.000	18.480.000	0,15
3	3165	BDC001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	27194	Orang	2244	2,36	8,25	8.292.110.000	507.115.125	0,06
4	3165	BKB001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	laporan	0	49,98	49,98	884.000.000	25.728.805	0,03
5	3165	BMB001	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	33	kegiatan	22	63,63	66,66	137.095.000	6.800.000	0,05
6	3165	CAB001	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	Unit	0	0	1	121.000.000	-	0,00
7	3165	CAN001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	10	Unit	0	0	1	100.000.000	-	0,00
8	3165	CBV001	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1	Unit	0	0	1	661.439.000	-	0,00
9	3165	PDD001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	Lembaga	0	49,98	49,98	3.274.278.000	132.843.240	0,04

No	Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO	Keluaran (Data Sakti)					Belanja (Data OMSPAN)		
				Target	Satuan	S.d Bulan Ini			Pagu	Realisasi*	%
						RVRO	TPCRO (%)	PCRO (%)			
10	3165	QCDU18	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PADANG	4	Perkara	3	50	50	480.364.000	123.389.000	0,26
11	3165	QDB001	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	14	Lembaga	0	70	70	574.628.000	18.064.300	0,03
12	3165	QDB002	Desa Pangan Aman	6	Lembaga	0	70	70	882.108.000	23.643.000	0,03
13	3165	QDB003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	Lembaga	0	70	70	120.163.000	10.895.000	0,09
14	3165	QDC001	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	45	Orang	45	100	100	36.100.000	2.000.000	0,06
15	3165	QDG001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	13	UMKM	0	47,67	55,39	40.082.000	340.000	0,01
16	3165	QIA001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	528	Produk	274	49,05	51,9	469.829.000	311.680.520	0,66
17	3165	QIA002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	1034	Produk	483	46,92	47,98	586.056.000	132.601.639	0,23
18	3165	QIC001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	51	Lembaga	33	43,12	64,7	44.588.000	11.062.500	0,25
19	3165	QIC003	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	5	Lembaga	5	100	100	5.033.000	1.700.000	0,34

No	Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO	Keluaran (Data Sakti)					Belanja (Data OMSPAN)		
				Target	Satuan	S.d Bulan Ini			Pagu	Realisasi*	%
						RVRO	TPCRO (%)	PCRO (%)			
20	3165	QIC004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	682	Lembaga	358	49,99	52,49	913.737.000	122.714.224	0,13
21	3165	RAB001	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	Paket	0	40	47	4.243.723.000	669.300.000	0,16
22	6384	EBA956	Layanan BMN	1	Layanan	0	49,98	49,98	8.000.000	5.970.000	0,75
23	6384	EBA994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	0	49,98	49,98	14.596.414.000	6.109.585.039	0,42
Total				**30432**	**-**	**3740**			**36.739.481.000**	**8.236.472.392**	**22,42**

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja s.d Bulan April 2025

NO.	SASARAN KEGIATAN	NO.	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR							ANGGARAN		
				TARGET		APRIL		CAPAIAN TERHADAP TARGET (%)			2025		CAPAIAN (%)
				RENSTRA 2029	TAHUN 2025	TARGET	REALISASI	BULANAN	TAHUNAN	RENSTRA	PAGU*	REALISASI*	
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,75	86,75	86,75	95,95	110,61	110,61	102,35	586.056.000	23.890.978	4,08
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	30,00	26,00	-			-	-	36.100.000	2.000.000	5,54
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,00	85,00	85,00	93,24	109,69	109,69	100,26	399.354.650	13.982.322	3,50
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	100,00	100	100	100	100,00	100,00	32.888.030	1.151.485	3,50
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,00	85,00	85,00	94,44	111,11	111,11	99,41	37.586.320	1.315.983	3,50
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91,50	89,50	89,50	83,33	93,11	93,11	91,07	27.412.110	2.055.810	7,50
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	85,00	85,00	100,00	117,65	117,65	109,89	5.350.560	204.000	3,81
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	85,00	85,00	100	117,65	117,65	133,33	39.237.440	1.496.000	3,81
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,00	92,00	92,00	99,03	107,64	107,64	103,16	557.379.570	41.801.470	7,50
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,00	85,00	85,00	99,55	117,12	117,12	104,79	301.533.210	22.613.910	7,50
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89,09	81,09	81,09	99,78	123,05	123,05	112,00	27.412.110	2.055.810	7,50
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	63,00	63,00	100,00	158,73	158,73	133,33	5.033.000	680.000	13,51
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	85,90	76,70	76,70	81,20	105,87	105,87	94,53	7.518.001.000	38.339.240	0,51
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	91,52	88,00	88,00	85,73	97,42	97,42	93,67	8.429.205.000	600.000	0,01
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	21,00	14,00	25,00	25,00	100,00	178,57	119,05	574.628.000		0,00
		16	Jumlah desa pangan aman	10,00	6,00	25,00	25,00	100,00	416,67	250,00	882.108.000		0,00

NO.	SASARAN KEGIATAN	NO.	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR							ANGGARAN		
				TARGET		APRIL		CAPAIAN TERHADAP TARGET (%)			2025		CAPAIAN (%)
				RENSTRA 2029	TAHUN 2025	TARGET	REALISASI	BULANAN	TAHUNAN	RENSTRA	PAGU*	REALISASI*	
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	2,00	1,00	25,00	25,00	100,00	2500,00	1250,00	120.163.000		0,00
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	84,00	80,00	23,32	23,00	98,63	28,75	27,38	40.082.000	340.000	0,85
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	94,00	90,00	42,50	23,00	54,12	25,56	24,47	480.364.000	14.729.000	3,07
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	94,00	90,00	50,00	50,00	100,00	55,56	53,19	144.506.000	-	0,00
8	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,90	4,70				-	-	124.228.000	10.920.000	8,79
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)	90,20	90,00				-	-	4.092.713.250	953.900.045	23,31
		23	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	84,00	82,00				-	-	4.092.713.250	953.900.045	23,31
		24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00	5,00				-	-	4.092.713.250	953.900.045	23,31
		25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,15	2,95				-	-	4.092.713.250	953.900.045	23,31
TOTAL		**TOTAL**									**36.739.481.000**	**3.993.776.187**	**10,87**

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja s.d Bulan Mei 2025

NO.	SASARAN KEGIATAN	NO.	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR							ANGGARAN		
				TARGET		MEI		CAPAIAN TERHADAP TARGET (%)			2025		CAPAIAN (%)
				RENSTRA 2029	TAHUN 2025	TARGET	REALISASI	BULANAN	TAHUNAN	RENSTRA	PAGU*	REALISASI*	
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,75	86,75	86,75	95,99	110,65	110,65	102,39	586.056.000	66.326.862	11,32
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	30,00	26,00	-			-	-	36.100.000	2.000.000	5,54
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,00	85,00	85,00	97,49	114,69	114,69	104,83	399.354.650	42.288.665	10,59
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	100,00	100	100	100	100,00	100,00	32.888.030	3.482.596	10,59
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,00	85,00	85,00	97,50	114,71	114,71	102,63	37.586.320	3.980.110	10,59
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91,50	89,50	89,50	83,33	93,11	93,11	91,07	27.412.110	2.835.172	10,34
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	85,00	85,00	100,00	117,65	117,65	109,89	5.350.560	672.300	12,57
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	85,00	85,00	100	117,65	117,65	133,33	39.237.440	4.930.200	12,57
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,00	92,00	92,00	97,44	105,91	105,91	101,50	557.379.570	57.648.492	10,34
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,00	85,00	85,00	91,91	108,13	108,13	96,75	301.533.210	31.186.889	10,34
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89,09	81,09	81,09	99,83	123,11	123,11	112,06	27.412.110	2.835.172	10,34
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	63,00	63,00	100,00	158,73	158,73	133,33	5.033.000	1.700.000	33,78
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	85,90	76,70	76,70	81,20	105,87	105,87	94,53	7.518.001.000	54.164.240	0,72
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	91,52	88,00	88,00	86,49	98,28	98,28	94,50	8.429.205.000	294.127.405	3,49
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	21,00	14,00	47,50	47,50	100,00	339,29	226,19	574.628.000	15.405.000	2,68
		16	Jumlah desa pangan aman	10,00	6,00	37,50	37,50	100,00	625,00	375,00	882.108.000	23.643.000	2,68

NO.	SASARAN KEGIATAN	NO.	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR							ANGGARAN		
				TARGET		MEI		CAPAIAN TERHADAP TARGET (%)			2025		CAPAIAN (%)
				RENSTRA 2029	TAHUN 2025	TARGET	REALISASI	BULANAN	TAHUNAN	RENSTRA	PAGU*	REALISASI*	
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	2,00	1,00	50,00	50,00	100,00	5000,00	2500,00	120.163.000	10.895.000	9,07
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	84,00	80,00	30,84	30,67	99,45	38,34	36,51	40.082.000	340.000	0,85
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	94,00	90,00	43,00	42,00	97,67	46,67	44,68	480.364.000	78.750.000	16,39
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	94,00	90,00	50,00	50,00	100,00	55,56	53,19	144.506.000	2.560.000	1,77
8	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,90	4,70				-	-	124.228.000	16.930.000	13,63
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)	90,20	90,00				-	-	4.092.713.250	1.180.910.899	28,85
		23	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	84,00	82,00				-	-	4.092.713.250	1.180.910.899	28,85
		24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00	5,00				-	-	4.092.713.250	1.180.910.899	28,85
		25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,15	2,95				-	-	4.092.713.250	1.180.910.899	28,85
TOTAL		**TOTAL**									**36.739.481.000**	**5.440.344.696**	**14,81**

Lampiran 15

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja s.d Bulan Juni 2025

NO.	SASARAN KEGIATAN	NO.	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR							ANGGARAN		
				TARGET		JUNI		CAPAIAN TERHADAP TARGET (%)			2025		CAPAIAN (%)
				RENSTRA 2029	TAHUN 2025	TARGET	REALISASI	BULANAN	TAHUNAN	RENSTRA	PAGU*	REALISASI*	
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,75	86,75	86,75	93,35	107,61	107,61	99,57	586.056.000	132.601.639	22,63
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	30,00	26,00	-	-	-	-	-	36.100.000	2.000.000	5,54
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,00	85,00	85,00	97,64	114,87	114,87	104,99	399.354.650	264.928.442	66,34
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	100,00	100	100	100,00	100,00	100,00	32.888.030	21.817.636	66,34
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,00	85,00	85,00	100,00	117,65	117,65	105,26	37.586.320	24.934.442	66,34
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91,50	89,50	89,50	89,38	99,87	99,87	97,68	27.412.110	3.681.427	13,43
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	85,00	85,00	100,00	117,65	117,65	109,89	5.350.560	1.327.500	24,81
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	85,00	85,00	100	117,65	117,65	133,33	39.237.440	9.735.000	24,81
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,00	92,00	92,00	97,64	106,13	106,13	101,71	557.379.570	74.855.677	13,43
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,00	85,00	85,00	88,39	103,99	103,99	93,04	301.533.210	40.495.694	13,43
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89,09	81,09	81,09	99,86	123,15	123,15	112,09	27.412.110	3.681.427	13,43
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	63,00	63,00	100,00	158,73	158,73	133,33	5.033.000	1.700.000	33,78
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	85,90	76,70	76,80	81,60	106,25	106,39	94,99	7.518.001.000	802.143.240	10,67
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	91,52	88,00	88,00	87,37	99,28	99,28	95,47	8.429.205.000	513.915.125	6,10
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	21,00	14,00	47,50	47,50	100,00	339,29	226,19	574.628.000	18.064.300	3,14
		16	Jumlah desa pangan aman	10,00	6,00	45,00	47,50	105,56	791,67	475,00	882.108.000	23.643.000	2,68

NO.	SASARAN KEGIATAN	NO.	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR							ANGGARAN		
				TARGET		JUNI		CAPAIAN TERHADAP TARGET (%)			2025		CAPAIAN (%)
				RENSTRA 2029	TAHUN 2025	TARGET	REALISASI	BULANAN	TAHUNAN	RENSTRA	PAGU*	REALISASI*	
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	2,00	1,00	60,00	70,00	116,67	7000,00	3500,00	120.163.000	10.895.000	9,07
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	84,00	80,00	43,33	46,83	108,08	58,54	55,75	40.082.000	340.000	0,85
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	94,00	90,00	43,00	50,00	116,28	55,56	53,19	480.364.000	123.389.000	25,69
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	94,00	90,00	50,00	50,00	100,00	55,56	53,19	144.506.000	2.560.000	1,77
8	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,90	4,70	-	-	-	-	-	124.228.000	18.480.000	14,88
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)	90,20	90,00	-	-	-	-	-	4.092.713.250	1.535.320.961	37,51
		23	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	84,00	82,00	-	-	-	-	-	4.092.713.250	1.535.320.961	37,51
		24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00	5,00	-	-	-	-	-	4.092.713.250	1.535.320.961	37,51
		25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,15	2,95	-	-	-	-	-	4.092.713.250	1.535.320.961	37,51
TOTAL		**TOTAL**									**36.739.481.000**	**8.236.472.392**	**22,42**

Lampiran 16

CAPAIAN TINGKAT EFISIENSI INDIKATOR KINERJA UTAMA TRIWULAN II TAHUN 2025
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

No	Indikator	Output (Indikator)			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kriteria
		T	R	%	T*	R	%				
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,75	93,35	107,61	183.586.257	132.601.639	72,23	**1,49**	**0,49**	**92 %**	Efisien
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	4.000.000	2.000.000	50,00	-	-	-	-
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	97,64	114,87	122.521.351	264.928.442	216,23	**0,53**	**-0,47**	Tidak Efisien	
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	100,00	100,00	10.089.994	21.817.636	216,23	**0,46**	**-0,54**	Tidak Efisien	
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	100,00	117,65	11.531.421	24.934.442	216,23	**0,54**	**-0,46**	Tidak Efisien	
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89,50	89,38	99,87	7.262.715	3.681.427	50,69	**1,97**	**0,97**	**88 %**	Efisien
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	100,00	117,65	428.400	1.327.500	309,87	**0,38**	**-0,62**	Tidak Efisien	
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	100,00	117,65	3.141.600	9.735.000	309,87	**0,38**	**-0,62**	Tidak Efisien	
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,00	97,64	106,13	147.675.202	74.855.677	50,69	**2,09**	**1,09**	**86 %**	Efisien
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	88,39	103,99	79.889.863	40.495.694	50,69	**2,05**	**1,05**	**86 %**	Efisien
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	81,09	99,86	123,15	7.262.715	3.681.427	50,69	**2,43**	**1,43**	**80 %**	Efisien
12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	63,00	100,00	158,73	2.040.000	1.700.000	83,33	**1,90**	**0,90**	**88 %**	Efisien

No	Indikator	Output (Indikator)			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kriteria
		T	R	%	T*	R	%				
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	76,80	81,60	106,25	1.130.331.995	802.143.240	70,97	**1,50**	**0,50**	**92 %**	Efisien
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88,00	87,37	99,28	319.753.997	513.915.125	160,72	**0,62**	**-0,38**	Tidak Efisien	

No	Indikator	Output (Indikator)			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kriteria
		T	R	%	T*	R	%				
15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	47,50	47,50	100,00	42.770.000	18.064.300	42,24	**2,37**	**1,37**	**84 %**	Efisien
16	Jumlah desa pangan aman	45,00	47,50	105,56	28.935.000	23.643.000	81,71	**1,29**	**0,29**	**95 %**	Efisien
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	60,00	70,00	116,67	20.584.980	10.895.000	52,93	**2,20**	**1,20**	**86%**	Efisien
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	43,33	46,83	108,08	1.019.998	340.000	33,33	**3,24**	**2,24**	**75 %**	Tidak Efisien
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	43,00	50,00	116,28	116.824.990	123.389.000	105,62	**1,10**	**0,10**	**100 %**	Efisien
20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50,00	50,00	100,00	7.349.996	2.560.000	34,83	**2,87**	**1,87**	**75 %**	Efisien
21	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	24.440.000	18.480.000	75,61	-	-	-	-
22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)	-	-	-	1.477.392.811	1.535.320.961	103,92	-	-	-	-
23	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	-	-	-	1.477.392.811	1.535.320.961	103,92	-	-	-	-
24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	1.477.392.811	1.535.320.961	103,92	-	-	-	-
25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	1.477.392.811	1.535.320.961	103,92	-	-	-	-
TOTAL					**8.181.011.719**	**8.236.472.392**	**100,68**				
RATA-RATA EFISIENSI				**112**	**118.052.657**	**109.195.187**	**92,50**	**1,21**	**0,21**	**95%**	**Efisien**

*Ket: * Target Anggaran TW 2 sesuai RPD Januari-Juni*

Lampiran 17

CAPAIAN TINGKAT EFISIENSI SASARAN KEGIATAN TRIWULAN II TAHUN 2025
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

No	Sasaran Strategis	Output (Target%)	Input (Anggaran %)	IE	TE	Capaian TE	Kategori
SK1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	110,86	154,34	**0,72**	**-0,28**	Tidak Efisien	
SK2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	158,73	83,33	**1,90**	**0,90**	**88 %**	Efisien
SK3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	106,25	70,97	**1,50**	**0,50**	**92 %**	Efisien
SK4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	105,38	84,40	**1,25**	**0,25**	**95 %**	Efisien
SK5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	108,08	33,33	**3,24**	**2,24**	**75 %**	Tidak Efisien
SK6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	116,28	105,62	**1,10**	**0,10**	**100 %**	Efisien
SK7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	100,00	34,83	**2,87**	**1,87**	**75 %**	Tidak Efisien
SK8	Layanan Publik UPT yang prima	-	75,61	**-**	**-**	**-**	**-**
SK9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	-	103,92	**-**	**-**	**-**	**-**
RATA-RATA EFISIENSI		**115,08**	**80,97**	**1,42**	**0,42**	**92 %**	**Efisien**

Lampiran 18

Capaian Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Triwulan II tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Nilai Rata-Rata Indikator	ANGGARAN		
			Pagu 2025*	Realisasi*	%
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	110,86	2.050.310.000	580.058.883	28,29
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	158,73	5.033.000	1.700.000	33,78
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	106,25	7.518.001.000	802.143.240	10,67
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	105,38	10.006.104.000	566.517.425	5,66
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	108,08	40.082.000	340.000	0,85
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	116,28	480.364.000	123.389.000	25,69
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	100,00	144.506.000	2.560.000	1,77
8	Layanan Publik UPT yang prima	-	124.228.000	18.480.000	14,88
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	-	16.370.853.000	6.141.283.844	37,51
Total		**115,08**	**36.739.481.000**	**8.236.472.392**	**22,42**

Ket:
**Pagu termasuk pagu blokir*
**Realisasi termasuk pengembalian belanja*



KERTAS KERJA INDIKATOR TW 2 TAHUN 2025

BALAI BESAR POM DI PADANG

1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Sampel Sediaan Farmasi	Target Indikator (%)	% Sampel Obat Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (Bobot 60%)	% Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Kosmetik Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi (%)
3A	Balai Besar POM di P	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti	Januari	62,00	86.75	100,00	#DIV/0!	84,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di P	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti	Februari	79,00	86,75	95,73	94,44	92,00	98,57	95,19
3A	Balai Besar POM di P	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti	Maret	95,00	86.75	95,88	100,00	92,00	97,62	96,38
3A	Balai Besar POM di P	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti	April	182,00	86.75	96,30	96,43	95,61	96,17	96,13
3A	Balai Besar POM di P	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti	Mei	338,00	86.75	97,66	83,22	100,00	95,64	94,13
3A	Balai Besar POM di P	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti	Juni	481,00	86.75	98,72	89,30	92,65	92,72	93,35

2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD_ESO ke BPOM
Diukur akhir Tahun

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE	jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM	Realisasi (%)
3A	Balai Besar POM di Pa	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah r	Desember	26,00			#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Pa	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah r	Desember				#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Pa	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah r	Desember				#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Pa	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah r	Desember				#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Pa	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah r	Desember				#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Pa	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah r	Desember				#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Pa	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah r	Desember				#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Pa	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah r	Desember				#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Pa	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah r	Desember				#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Pa	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah r	Desember				#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Pa	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah r	Desember				#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Pa	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah r	Desember				#DIV/0!

3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Sampel Pangan Olahan	Target Indikator (%)	Kesesuaian Target Sampel (Bobot 20%)	Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (Bobot 20%)	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot 10%)	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (Bobot 10%)	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya	Realisasi (%)
3A	Balai Besar I	3	Persentase samp	Januari	38,00	0,00	52,73	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	70,55
		3	Persentase samp	Februari	45,00	85,00	88,73	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	77,75
		3	Persentase samp	Maret	55,00	85,00	94,51	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	78,90
		3	Persentase samp	April	111,00	85,00	76,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	95,21
		3	Persentase samp	Mei	161,00	85,00	87,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,49
		3	Persentase samp	Juni	231,00	85,00	88,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,64
		3	Persentase samp	Juli			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
		3	Persentase samp	Agustus			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
		3	Persentase samp	September			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
		3	Persentase samp	Oktober			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
		3	Persentase samp	November			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
		3	Persentase samp	Desember			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00

4. Persentase sample KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT
   Indikator tidak dihitung

5. Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Pemenuhan Target Sampel PIRT (Bobot 20%)	% Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	% Ketepatan pengambilan kesimpulan (Bobot 20%)	% Ketepatan waktu pengambilan sampel (Bobot 10%)	% Ketepatan waktu pelaporan (Bobot 10%)	% Tindak lanjut sampel PIRT (Bobot 20%)	Realisasi (%)
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari	85,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari	85,00	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret	85,00	93,75	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	78,75
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	April	85,00	72,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	94,44
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Mei	85,00	87,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,50
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juni	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

6. Persentase Keputusan Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Realisasi (%)
3A	Balai Besar POM di Padang	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Januari	89,50	20,00	100,00	60,00
3A	Balai Besar POM di Padang	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Februari	89,50	40,00	33,33	36,67
3A	Balai Besar POM di Padang	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Maret	89,50	46,43	33,33	39,88
3A	Balai Besar POM di Padang	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	April	89,50	100,00	66,67	83,33
3A	Balai Besar POM di Padang	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Mei	89,50	100,00	66,67	83,33
3A	Balai Besar POM di Padang	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Juni	89,50	91,25	87,50	89,38

7. Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	% Sarprod Obat	% Sarprod OBA & SK	% Sarprod Kosmetik	% Sarprod SF
3A	Balai Besar POM di Padang	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	85,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Padang	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Februari	85,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Padang	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	85,00	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	100,00
3A	Balai Besar POM di Padang	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April	85,00	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	100,00
3A	Balai Besar POM di Padang	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei	85,00	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	100,00
3A	Balai Besar POM di Padang	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	85,00	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	100,00

8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Jumlah sarana yang ditindaklanjuti dengan tepat	Jumlah sarana yang diperiksa	% Ketepatan tindak lanjut	Jumlah sarana yang diberikan grading dengan tepat	jumlah sarana yang diperiksa	% Evaluasi Ketepatan Grading	Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa	% Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
3A	Balai Besar POM di Padang	8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Padang	8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Padang	8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Padang	8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	April	8,00	8,00	100,00	8,00	8,00	100,00	8,00	8,00	100,00
3A	Balai Besar POM di Padang	8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Mei	21,00	21,00	100,00	21,00	21,00	100,00	21,00	21,00	100,00
3A	Balai Besar POM di Padang	8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juni	30,00	30,00	100,00	30,00	30,00	100,00	30,00	30,00	100,00
3A	Balai Besar POM di Padang	8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juli			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!

9. Persentase fasilitas distribusi sedian farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

3A	Balai Besar POM di Padang	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	100,00	#DIV/0!	100,00	100,00	#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Padang	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Februari	98,21	100,00	100,00	100,00	99,55
3A	Balai Besar POM di Padang	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	96,25	100,00	100,00	100,00	99,06
3A	Balai Besar POM di Padang	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April	96,11	100,00	100,00	100,00	99,03
3A	Balai Besar POM di Padang	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei	95,36	96,59	100,00	97,79	97,44
3A	Balai Besar POM di Padang	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	95,27	96,67	100,00	98,61	97,64
3A	Balai Besar POM di Padang	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juli	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Padang	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Agustus	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Padang	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Padang	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Oktober	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Padang	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	November	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Padang	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Desember	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Jumlah Sarana yang Diperiksa	Target Jumlah Sarana yang Diperiksa sesuai Renlak	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 20%)	Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Ketepatan Tindak Lanjut (Bobot 70%)	Jumlah Sarana yang Diperiksa dan Dilaporkan Tepat Waktu	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 10%)	% Sardis PO
3A	Balai Besar POM di Padang	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Januari	85	10	10	20,00	7	10	49,00	10	10	10,00	79,00
3A	Balai Besar POM di Padang	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Februari	85	20	19	21,05	19	20	66,50	18	20	9,00	96,55
3A	Balai Besar POM di Padang	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Maret	85	50	58	17,24	26	50	36,40	49	50	9,80	63,44
3A	Balai Besar POM di Padang	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	April	85	66	66	20,00	66	66	70,00	63	66	9,55	99,55
3A	Balai Besar POM di Padang	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Mei	85	89	89	20,00	80	89	62,92	80	89	8,99	91,91
3A	Balai Besar POM di Padang	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Juni		111	125	17,76	97	111	61,17	105	111	9,46	88,39
3A	Balai Besar POM di Padang	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Juli			145	0,00			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Padang	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Agustus			166	0,00			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Padang	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	September			176	0,00			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Padang	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Oktober			189	0,00			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Padang	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	November			194	0,00			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Padang	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Desember			194	0,00			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!

11. Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	% Iklan Obat	% Iklan Kos	% Iklan OBA	% Iklan SK	% Iklan PO	% Iklan SF dan PO
3A	Balai Besar POM di Padang	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Januari	81,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3A	Balai Besar POM di Padang	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Februari	81,09	100,00	100,00	98,41	100,00	100,00	99,68
3A	Balai Besar POM di Padang	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Maret	81,09	100,00	100,00	98,89	100,00	100,00	99,78
3A	Balai Besar POM di Padang	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	April	81,09	100,00	100,00	99,15	100,00	99,78	99,78
3A	Balai Besar POM di Padang	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Mei	81,09	100,00	100,00	99,32	100,00	99,82	99,83
3A	Balai Besar POM di Padang	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Juni	81,09	100,00	100,00	99,43	100,00	99,86	99,86

12. Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

3A	Balai Besar POM di Padang	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari	2	2	5	40,00
3A	Balai Besar POM di Padang	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari	2	2	5	40,00
3A	Balai Besar POM di Padang	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret	2	2	5	40,00
3A	Balai Besar POM di Padang	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	April	3	5	5	100,00
3A	Balai Besar POM di Padang	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Mei	5	5	5	100,00
3A	Balai Besar POM di Padang	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juni	5	5	5	100,00
3A	Balai Besar POM di Padang	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juli	5		5	0,00
3A	Balai Besar POM di Padang	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Agustus	5		5	0,00
3A	Balai Besar POM di Padang	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	September	5		5	0,00
3A	Balai Besar POM di Padang	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Oktober	5		5	0,00
3A	Balai Besar POM di Padang	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	November	5		5	0,00
3A	Balai Besar POM di Padang	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Desember	5		5	0,00

13. Nilai Pemenuhan Lab. Pengujian SF dan Pangan Olahan UPT Sesuai SKL

IV. HASIL MONITORING DAN EVALUASI SKL BALAI BESAR/BALAI POM TINGKAT 3 DAN TINGKAT 4

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Monev SKL Balai Besar POM Tingkat 4 Triwulan 2 Tahun 2025.

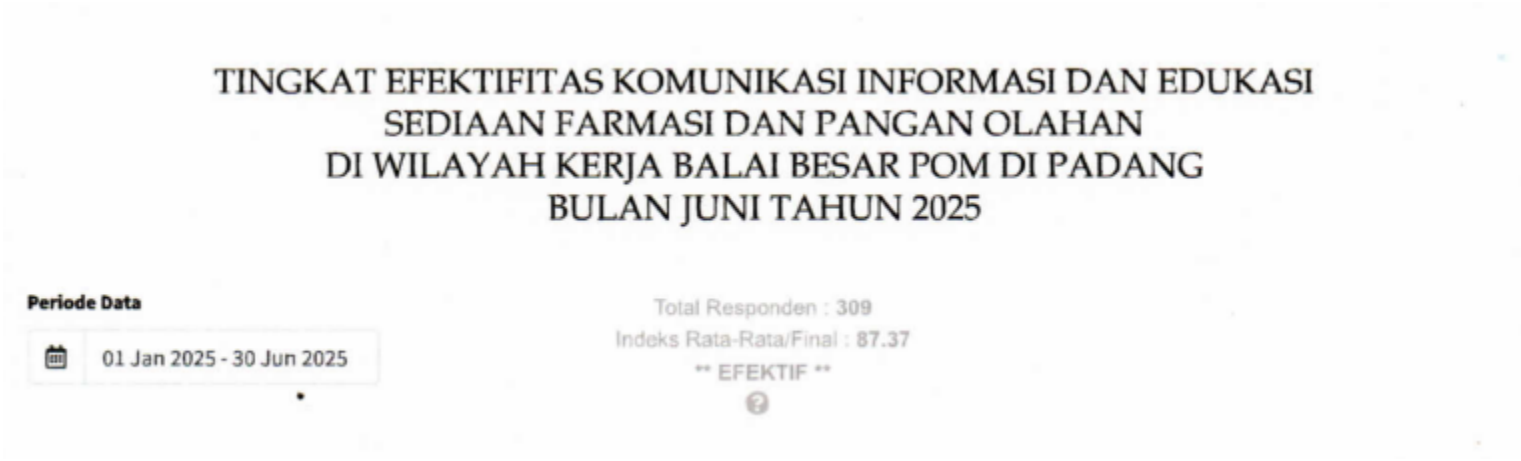
No.	Balai Besar POM	Target Nilai SKL Tahun 2025 (%)	Nilai Pemenuhan Komponen SKL(%)				Nilai Pemenuhan SKL TW 2 (%)	Target Nilai SKL TW 2 (%)	Capaian thd Target TW 2 (%)	Capaian thd Target Tahun 2025 (%)
			SRL	Standar Peralatan	Standar Kompetensi Laboratorium	Standar Metode Terverifikasi				
1	BBPOM di Medan	70,1	79.3	86.0	70	42.7	75.2	69.5	108.2	107.3
2	BBPOM di Pekanbaru	75,1	78.9	83.9	80	47.7	77	74	104	102.5
3	BBPOM di Semarang	79,7	85.4	85.8	70	49.1	78.8	72.87	108.1	98.8
4	BBPOM di Surabaya	80,4	78.5	89.1	60	50.7	74.1	72.69	102	92.2
5	BBPOM di Samarinda	58,9	78.6	79.4	60	24.2	69.6	56.5	123.2	118.2
6	BBPOM di Manado	68,7	76.7	86.5	90	35.5	77.2	68	113.6	112.4
7	BBPOM di Makassar	73,3	83.4	85.6	80	31.6	78	72.3	107.8	106.4
Rata-rata		**72.3**	**80.1**	**85.2**	**72.9**	**40.2**	**75.7**			

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Monev SKL Balai Besar/Balai POM Tingkat 3 Triwulan 2 Tahun 2025.

No.	Balai Besar/Balai POM	Target Nilai SKL Tahun 2025 (%)	Nilai Pemenuhan Komponen SKL (%)				Nilai Pemenuhan SKL TW 2 (%)	Target Nilai SKL TW 2 (%)	Capaian thd Target TW 2 (%)	Capaian thd Target Tahun 2025 (%)
			SRL	Standar Peralatan	Standar Kompetensi Laboratorium	Standar Metode Terverifikasi				
1	BBPOM di Banda Aceh	73	83.8	80.2	50	46.5	72.6	71.5	101.5	99.4
2	BBPOM di Padang	77	83.6	87.6	100	22.3	81.6	76.8	106.2	106.0
3	Balai POM di Batam	67.3	82.1	82.3	30	26.9	66.2	64.4	102.8	98.4
4	Balai POM di Bengkulu	71.1	79.0	91.8	70	21.2	74	70.5	104.9	104.0
5	BBPOM di Bandar Lampung	77.2	79.0	81.1	80	46	76.3	76.2	100.1	98.8
6	BBPOM di Palembang	64.8	78.2	82.1	50	26.6	68.2	63	108.2	105.2
7	Balai POM di Jambi	59.1	79.1	86.4	20	17.5	62.6	58.3	107.4	105.9
8	Balai POM di Pangkalpinang	73.7	82.2	86.6	70	31	75.5	73.1	103.3	102.5
9	BBPOM di Bandung	81.7	85.3	88.2	80	67.2	83	80	103.7	101.6
10	BBPOM di Jakarta	72.8	82.3	85.9	50	72.8	75.6	69.9	108.1	103.8

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

14. Tingkat efektifitas KIE SF dan Pangan Olahan diWilayah Kerja UPT



TINGKAT EFEKTIFITAS KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI
SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN
DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR POM DI PADANG
BULAN JUNI TAHUN 2025

Periode Data

01 Jan 2025 - 30 Jun 2025

Total Responden : 309
Indeks Rata-Rata/Final : 87.37
** EFEKTIF **

15. Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	Sosialisasi Keamanan Pangan (Sesuai Batch)	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah (Sesuai Batch)	Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Pengawalan	Realisasi	Total Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan
3A	Balai Besar POM di Padang	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Januari	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3A	Balai Besar POM di Padang	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Februari	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3A	Balai Besar POM di Padang	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Maret	5	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
3A	Balai Besar POM di Padang	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	April	25	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
3A	Balai Besar POM di Padang	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Mei	47,5	25,00	10,00	12,50	0,00	0,00	47,50	
3A	Balai Besar POM di Padang	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Juni	47,5	25,00	10,00	12,50	0,00	0,00	47,50	
3A	Balai Besar POM di Padang	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Juli	50						0,00	
3A	Balai Besar POM di Padang	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Agustus	60						0,00	
3A	Balai Besar POM di Padang	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	September	70						0,00	
3A	Balai Besar POM di Padang	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Oktober	88						0,00	
3A	Balai Besar POM di Padang	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	November	93						0,00	
3A	Balai Besar POM di Padang	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Desember	14						100,00	14

16. Jumlah Desa Pangan Aman

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Advokasi	Pelatihan kader	Bimtek komunitas	Monev	Pengawalan	Realisasi	Jumlah Desa Pangan Aman
3A	Balai Besar POM di Padang	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Januari	0	0,00	0,00				0,00	
3A	Balai Besar POM di Padang	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Februari	0	0,00	0,00				0,00	
3A	Balai Besar POM di Padang	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Maret	5	5,00	0,00				5,00	
3A	Balai Besar POM di Padang	16	Jumlah Desa Pangan Aman	April	25	25,00	0,00				25,00	
3A	Balai Besar POM di Padang	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Mei	37,5	25,00	12,50				37,50	
3A	Balai Besar POM di Padang	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Juni	47,5	25,00	12,50	10,00	0,00	0,00	47,50	
3A	Balai Besar POM di Padang	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Juli	47,5						0,00	
3A	Balai Besar POM di Padang	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Agustus	55						0,00	
3A	Balai Besar POM di Padang	16	Jumlah Desa Pangan Aman	September	73						0,00	
3A	Balai Besar POM di Padang	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Oktober	83						0,00	
3A	Balai Besar POM di Padang	16	Jumlah Desa Pangan Aman	November	95						0,00	
3A	Balai Besar POM di Padang	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Desember	6						100,00	6

17. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	Pengawalan	Realisasi	Total Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas
3A	Balai Besar POM di Padang	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Januari	0	0,00	0,00				0,00	
3A	Balai Besar POM di Padang	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Februari	5	0,00	0,00				0,00	
3A	Balai Besar POM di Padang	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Maret	10	5,00	0,00				5,00	
3A	Balai Besar POM di Padang	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	April	25	25,00	0,00				25,00	
3A	Balai Besar POM di Padang	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Mei	50	25,00	25,00				50,00	
3A	Balai Besar POM di Padang	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Juni	70	25,00	25,00	15,00		5,00	70,00	
3A	Balai Besar POM di Padang	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Juli	100						0,00	
3A	Balai Besar POM di Padang	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Agustus	100						0,00	
3A	Balai Besar POM di Padang	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	September	100						0,00	
3A	Balai Besar POM di Padang	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Oktober	100						0,00	
3A	Balai Besar POM di Padang	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	November	100						0,00	
3A	Balai Besar POM di Padang	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Desember	1						100,00	1,00

18. Persentase UMKM memperoleh rekomendasi sertifikat CP OBA, Kos dan atau IP-CPPOB

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	% UMKM Pangan Olahan	% UMKM OBA	% UMKM Kosmetik	Realisasi
3A	Balai Besar POM di Padang	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Januari	4,16	4,00	0,00	0,00	4,00
3A	Balai Besar POM di Padang	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Februari	10,33	9,00	13,00	13,00	11,67
3A	Balai Besar POM di Padang	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Maret	14,5	22,00	15,50	16,50	18,00
3A	Balai Besar POM di Padang	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	April	23,32	27,00	19,50	22,50	23,00
3A	Balai Besar POM di Padang	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Mei	30,84	45,00	22,50	24,50	30,67
3A	Balai Besar POM di Padang	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Juni	43,33	72,50	35,00	33,00	46,83
3A	Balai Besar POM di Padang	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Juli	52,5	0,00	0,00	0,00	
3A	Balai Besar POM di Padang	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Agustus	60	0,00	0,00	0,00	
3A	Balai Besar POM di Padang	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	September	68,5	0,00	0,00	0,00	
3A	Balai Besar POM di Padang	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Oktober	71	0,00	0,00	0,00	
3A	Balai Besar POM di Padang	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	November	79,17	0,00	0,00	0,00	
3A	Balai Besar POM di Padang	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Desember	80	100,00	100,00	100,00	100,00

19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Perkara Tahun Berjalan	Target Perkara Carry Over	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (SPDP)	Realisasi Perkara Carry Over (SPDP)	Nilai Realisasi SPDP	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap I)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap I)	Nilai Realisasi Tahap I	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (P21)	Realisasi Perkara Carry Over (P21)	Nilai Realisasi P21	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap II)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap II)	Nilai Realisasi Tahap II	% Keberhasilan Perkara
3A	Balai Besar POM di Padang	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Januari	4	1	0	0	0			0	1		0,85			0	17,00
3A	Balai Besar POM di Padang	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Februari	4	1	0	0	0			0	1		0,85			0	17,00
3A	Balai Besar POM di Padang	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Maret	4	1	1	0	0,15			0	1		0,85			0	20,00
3A	Balai Besar POM di Padang	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	April	4	1	2	0	0,3			0	1		0,85			0	23,00
3A	Balai Besar POM di Padang	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Mei	4	1	1	0	0,15	2		1,1	1		0,85			0	42,00
3A	Balai Besar POM di Padang	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Juni	4	1	0	0	0	3		1,65	1		0,85			0	50,00
3A	Balai Besar POM di Padang	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Juli					0			0			0			0	#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Padang	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Agustus					0			0			0			0	#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Padang	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	September					0			0			0			0	#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Padang	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Oktober					0			0			0			0	#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Padang	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	November					0			0			0			0	#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Padang	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Desember					0			0			0			0	#DIV/0!

20. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar

No	UPT	Data Masuk	Data Disetujui	Data Ditolak		Persentase Data Disetujui (%)
				Perlu Perbaikan	Tidak Perlu Perbaikan	
		a	*b*	*C*	*d*	*f = b/(a-d)*
12	Balai Besar POM di Padang	8	8	0	0	100,00%

21. Nilai Pembangunan ZI UPT
Indikator diukur akhir Tahun

22. Nilai AKIP UPT
Indikator diukur akhir Tahun

23. Nilai Kinerja Anggaran UPT
Indikator diukur akhir Tahun

24. Indeks Manajemen Risiko UPT
Indikator diukur akhir Tahun

Lampiran 20

MATRIKS TINDAK LANJUT REKOMENDASI BULAN APRIL SD JUNI 2025

NO.	Indikator Kegiatan	TARGET 2025	JENIS	APRIL			KONDISI AWAL	REKOMENDASI	TIMELINE PENYELESAIAN	STATUS	RENCANA AKSI		KONDISI AKHIR
				Target	Realisasi	Capaian (%)	(Kendala/Permasalahan/Capaian Terhadap Target)	(Rencana Tindak Lanjut)	(Bulan)	(Progres/ Selesai)	(Rencana Aksi yang Sudah Selesai)	(Rencana Aksi yang Belum Selesai)	(Tercapainya Target/Peningkatan Kinerja)
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,75	Flat	86,75	95,34	109,90	- Kerusakan alat AAS untuk pengujian logam berat Pb, Cd dan As, menghambat pelaksanaan uji logam untuk komoditi Kosmetik, OBA dan SK	- Perbaikan alat AAS - Melakukan pengujian logam As, Pb dan Cd menggunakan alat AAS yang di kelola Lab. Pangan.	Mei	Progres (perbaikan)	- Melakukan pengujian logam As, Pb dan Cd menggunakan alat AAS yang di kelola Lab. Pangan.	- Perbaikan alat AAS	Tercapainya Target Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26,00	Akhir Tahun	-	-	-	Hasil Monev laporan melalui website e-meso, baru 4 sarana pelayanan kesehatan yang melaporkan KTD, yaitu RS Semen Padang, RS Unand RS Saanin, RSUD RSIA Restu Ibu,	`- Mengingatkan kembali tenaga kesehatan melalui WAG kolaborasi Meso `- Mengingatkan PIC Farmakovigilans untuk segera melaporkan KTD bersamaan dengan penagihan tindakan perbaikan hasil pemeriksaan sarana pelayanan kesehatan	Desember 2025	Progres	`- Telah mengingatkan kembali tenaga kesehatan melalui WAG kolaborasi Meso `-Telah Mengingatkan PIC Farmakovigilans untuk segera melaporkan KTD bersamaan dengan penagihan	Rencana aksi akan dialakukan setiap Bulan hingga tercapai angka pelaporan 26% (12 Sarana yang melaporkan KTD)	Tercapainya Target Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

											tindakan perbaikan hasil pemeriksaan sarana pelayanan kesehatan		
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	Flat	85,00	92,45	108,76	*Keterbatasan ketersediaan reagensia, suku cadang dan baku pembanding sehingga terjadinya penyesuaian kategori sampling sampai tersedianya pengadaan reagensia yang dipesan *Terjadinya keterlambatan dari tindak lanjut sampel TMS disebabkan sampel yang diterima di laboratorium pada minggu ke 2 bulan Maret, kemudian dilakukan proses pengujian selama 15 HK (batas waktu pelaporan) sehingga pelaporan pengujian pada akhir bulan Maret dan tindak lanjut dilakukan pada awal bulan April 2025	*Melakukan koordinasi internal antara katim fungsi pengujian pangan degan PPK untuk melakukan percepatan pengadaan reagensia, suku cadang dan baku banding *Melakukan percepatan jadwal pelaksanaan sampling sehingga pelaporan pengujian dan tindak lanjut hasil dapat dilaksanakan pada bulan yang sama *Meningkatkan koordinasi internal dalam hal sampling dan tindak lanjut sampling	Desember 2025	Progres	*Melakukan tindak lanjut terhadap sampel yang tidak memenuhi syarat, *Meningkatkan koordinasi dengan tim internal	Tindak lanjut sampel yang perlu dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan	Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pengujian produk dan tindak lanjut terhadap sarana produksi

4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	Flat	100,00	100,00	100,00	Tidak ada pengaduan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan	Terus meningkatkan koordinasi internal dalam memberikan layanan terhadap pengaduan kasus KLB	Desember 2025	Progres	Laporan Evaluasi tetap disiapkan		Realisasi Nihil karena tidak ada pengajuan KLB KP bulan April
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	Flat	85,00	100,00	117,65	*Terjadinya perubahan dari target efisiensi ke target awal sampel PIRT sebelum efisiensi sehingga perlu adanya persiapan dan penyesuaian kategori sampling dengan ketersediaan reagensia, suku cadang, baku banding dan koordinasi dengan lab regional	*Meningkatkan koordinasi internal dalam hal sampling dan tindak lanjut sampling *Melakukan koordinasi internal antara katim fungsi pengujian pangan degan PPK untuk melakukan percepatan pengadaan reagensia, suku cadang dan baku banding	Desember 2025	Progres	*Melakukan tindak lanjut terhadap sampel yang tidak memenuhi syarat , *Meningkatkan koordinasi dengan tim internal	*Meningkatkan monitoring terhadap sampel PIRT yang perlu ditindaklanjuti bersama tim internal, *Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait	Target dapat tercapai . Untuk itu perlu koordinasi dengan lintas sektor terkait
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89,50	Flat	89,50	59,42	66,39	Terdapat kendala dalam memastikan tanggal surat TL diterima pelaku usaha/ linsek sedangkan pengumpulan rekomendasi CAPA harus berdasarkan tanggal surat TL diterima pelaku usaha/ linsek. Selain itu untuk pengumpulan dokumen CAPA membutuhkan waktu karena pengiriman	Memastikan surat TL diterima pelaku usaha/ linsek dengan selalu mengingatkan petugas untuk mengirimkan surat TLnya juga melalui media komunikasi online seperti email ataupun whatsapp. Membuat link yang berisi fasilitas mendownload format CAPA dan mengupload kembali pada form dalam link	Desember 2025	Progres	Melakukan pengawalan dan desk CAPA sebagian sarana	Melakukan pengawalan dan desk CAPA sebagian sarana lainnya	Peningkatan kinerja

							CAPA yang tersebar ke nomor kontak petugas. Adanya sarana yang tidak bisa mengirimkan CAPA jika tidak ke akun khusus/ resmi instansi pemerintah (tidak termasuk .com) sehingga pelaku usahanya diarahkan untuk mengirimkan CAPAnya ke email pom.go.id	yang sama (untuk percepatan dan kerapian pengarsipan dokumen CAPA). Melakukan koordinasi dengan bagian IT jika memungkinkan untuk membuatkan akun pom.go.id khusus untuk keperluan penerimaan CAPA dari pelaku usaha					
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	Flat	85,00	100,00	117,65	Tidak ada target sarana yang direncanakan diperiksa di bulan April	Pemeriksaan akan dilaksanakan sesuai perencanaan	Desember 2025	Progres	Melakukan pemeriksaan satu sarana sesuai pedoman pemeriksaan	Melakukan pemeriksaan lima sarana lainnya sesuai pedoman pemeriksaan	Sesuai target

8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	Flat	85,00	100	117,65	- Pelaku usaha industri pangan olahan belum menerapkan seluruh aspek CPPOB dengan baik - Pembinaan terhadap pelaku usaha pangan olahan belum dapat dilaksanakan secara maksimal.	- Melaksanakan pembinaan kepada pelaku usaha agar meningkatkan pemahaman terhadap penerapan CPPOB ddalam proses produksi sehingga menghasilkan produk pangan yang aman dan bermutu. - Melaksanakan tindak lanjut hasil inspeksi sarana secara konsisten diantaranya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha	Mei 2025	Selesai	- Melaksanakan tindak lanjut hasil inspeksi sarana secara konsisten diantaranya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha. - Telah melakukan pengawasan dan pembinaan kepada 4 sarana pangan olahan dalam penerapan cara produksi pangan olahan yang baik	- Evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha	- Telah melakukan pengawasan dan pembinaan kepada 4 sarana pangan olahan dalam penerapan cara produksi pangan olahan yang baik
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanju	92,00	Flat	92,00	99,03	107,64	Sarana distribusi sediaan farmasi belum secara konsisten melakukan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan	Melakukan pemeriksaan sarana berdasarkan analisa resiko dan pemberian Tindak lanjut sesuai ketentuan	Desember 2025	Progres	Membuat tindak lanjut hasil inspeksi sesuai timeline dan melakukan monev CAPA	Mendampingi pelaku usaha dan penyusunan CAPA dan memantau konsistensi sarana dalam	Tercapai target

	ti sesuai ketentuan											penerapan CAPA yang telah dibuat	
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	Flat	85,00	93,39	109,87	Pengawasan sarana distribusi pangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan surat tindak lanjut dilaksanakan sesuai ketentuan serta terdapat surat tindak lanjut yang sedang proses masih dalam rentang kendali time line surat tindak lanjut . Peningkatan koordinasi dalam tim kerja sangat dibutuhkan dalam rangkla mencapai kinerja yang maksimal.	Meningkatkan monitoring terhadap tindak lanjut hasil pengawasan dan meningkatkan koordinasi dalam tim	Desember 2025	Progres	Dilaksanakan monitroing tindak lanjut agar sesuai ketentuan	melakukan monitoring terhadap tindak lanjut hasil pengawasan sarana disribusi pangan,	Tercapainya target. Untuk itu perlu monitoring tindak lanjut hasil pengawasan distribusi pangan ditingkatkan
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	81,09	Flat	81,09	99,78	123,05	Jenis media iklan tertentu, terutama media cetak dan media penyiaran lokal, tidak selalu tersedia sehingga mempengaruhi realisasi perencanaan pengawasan iklan yang sudah dibuat. Pelaporan pengawasan iklan juga dapat terdampak karena petugas	Perluasan area pengawasan iklan atau penambahan waktu pengawasan iklan khususnya pengawasan di kab/kota lain dan penjadwalan pelaksanaan pengawasan diatur pada awal bulan.	Desember 2025	Progress	Perencanaan sudah ditetapkan menyesuaikan dengan target yang ditetapkan.	Penjadwalan pengawasan iklan untuk periode triwulan dan pemantauan efektivitas pelaksanaannya	Pemantauan efektivitas pelaksanaan terhadap pencapaian target dan realisasinya.

							pengawasan memiliki tugas utama lainnya.						
12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	63,00	Kumulatif	63,00	100,00	158,73	Pelaku usaha industri pangan olahan belum menerapkan seluruh aspek CPPOB dengan baik	- Melaksanakan pembinaan kepada pelaku usaha sehingga meningkatkan pemahaman pelaku usaha agar menjalankan aturan dalam produksi pangan olahan sehingga makanan aman dan bermutu dapat dicapai. - Monitoring proses evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan perbaikannya, sesuai batas waktu yang telah disepakati. - Membuat surat pernyataan bahwa CAPA telah selesai/closed, apabila berdasarkan hasil evaluasi tindakan perbaikan yang dilaporkan sudah sesuai.	Mei 2025	Progres	- Telah melaksanakan pengawasan ke 3 (tiga) sarana industri pangan dan melakukan pembinaan kepada pelaku usaha sehingga dapat menerapkan CPPOB di sarana industri. - Telah melakukan monitoring proses evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha	- Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan perbaikannya, sesuai batas waktu yang telah disepakati. - Membuat surat pernyataan bahwa CAPA telah selesai/closed, apabila berdasarkan hasil evaluasi tindakan perbaikan yang dilaporkan sudah sesuai	- Melaksanakan pengawasan ke 3 (tiga) sarana industri pangan dan melakukan pembinaan kepada pelaku usaha sehingga dapat menerapkan CPPOB di sarana industri. - Monitoring proses evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha

13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77,00	Kumulatif Triwulan	76,70	76,70	100,00	Permasalahan : Verifikasi MA banyak yang harus dilpenuhi untuk melengkapi data kemampuan uji Capaian untuk bulan April ini masih belum dievaluasi pusat (P3OMN) karena Monev dilakukan per TW	Lab harus melakukan peningkatan Standar Ruang Lingkup dan verifikasi MA secara bertahap sesuai perencanaan yang disusun	Juni	Selesai	Verifikasi MA TW I sesuai target	Pada TW II ini (April sd Juni) diupayakan pemenuhan SRL oleh lab yang merencanakan, yaitu lab Mikrobiologi dan Kosmetik	. Untuk bulan April ini, realisasi masih sama dengan Nilai Pemenuhan target SKL TW 1 sudah terpenuhi (Target 76,7, Realisasi 81,2, Capaian 105,9%)
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88,00	Flat	88,00	85,73	97,42	- Kegiatan KIE Rutin Tahun 2025 belum terlaksana	- Melaksanakan KIE Rutin Tahun 2025	Desember	Progres	- Pelaksanaan KIE Rutin (Cegah Stunting) Locus Koto Panjang Kota Solok pada tanggal 24 April 2025	-	- Pelaksanaan kegiatan KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang Tahun 2025 sesuai perencanaan yang disusun. - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang memenuhi target.

15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	14,00	Kumulatif	25,00	25,00	100,00	Belum terlaksana Advokasi Lintas Sektor Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan secara keseluruhan, pelaksanaan sebelumnya baru sampai tahap Audiensi Program yang merupakan bagian dari tahap Advokasi	Pelaksanaan Advokasi Lintas Sektor Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	April 2025	Progress	Telah terlaksana Advokasi Lintas Sektor Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan di Kabupaten Solok pada tanggal 28 April 2025	Pelaksanaan tahapan program selanjutnya akan dilaksanakan Sosialiasasi Keamanan Pangan Sekolah dan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah yang akan dilaksanakan pada Bulan Mei 2025	Pelaksanaan kegiatan berdasarkan tahapan program sesuai dengan masing-masing timeline dengan capaian akhir 100% dan jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan sesuai target
16	Jumlah desa pangan aman	6,00	Kumulatif	25,00	25,00	100,00	Belum terlaksana Advokasi Kelembagaan Desa secara keseluruhan, pelaksanaan sebelumnya baru sampai tahap Audiensi Program yang merupakan bagian dari tahap Advokasi	Pelaksanaan Advokasi Kelembagaan Desa	April 2025	Progress	Telah terlaksana Advokasi Kelembagaan Desa di Kabupaten Solok pada tanggal 28 April 2025	Pelaksanaan tahapan program selanjutnya akan dilaksanakan Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Desa yang akan dilaksanakan pada Bulan Mei 2025	Pelaksanaan kegiatan berdasarkan tahapan program sesuai dengan masing-masing timeline dengan capaian akhir 100% dan jumlah desa pangan aman sesuai dengan target

17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	Kumulatif	25,00	25,00	100,00	Belum terlaksana Forum Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar, pelaksanaan sebelumnya baru sampai tahap Audiensi Program yang merupakan bagian dari tahap Advokasi	Pelaksanaan Forum Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	April 2025	Progress	Telah terlaksana Forum Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar di Kabupaten Solok pada tanggal 28 April 2025	Pelaksanaan tahapan program selanjutnya akan dilaksanakan adalah Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar pada Bulan Mei 2025	Pelaksanaan kegiatan berdasarkan tahapan program sesuai dengan masing-masing timeline dengan capaian akhir 100% dan jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas sesuai target
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80,00	Kumulatif	23,32	23,00	98,63	- Pelaku usaha UMKM pangan belum memahami CPPOB - Pelaku usaha UMKM OBA belum memahami CPOTB - Kemampuan pelaku usaha dalam teknologi mengakibatkan proses pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB belum dapat dilakukan secara cepat dan mandiri	- Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dalam rangka penerapan CPPOB dan CPOTB - Melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dan OBA dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB dan CPOTB bertahap di aplikasi	Mei 2025	Selesai	- Melakukan pembinaan kepada 2 (dua) pelaku usaha dalam rangka penerapan CPPOB dan 1(satu) pelaku usaha dalam rangka penerapan CPOTB - Melakukan pendampingan langsung kepada 3 (tiga) pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen	- Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha OBA dalam rangka penerapan CPOTB	- Melakukan pembinaan kepada 2 (dua) pelaku usaha dalam rangka penerapan CPPOB dan 1(satu) pelaku usaha dalam rangka penerapan CPOTB - Melakukan pendampingan langsung kepada 3 (tiga) pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen

											mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi		mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	90,00	Kumulatif	42,50	23,00	54,12	Sudah didapatkan 1 perkara, namun terdapat perubahan perhitungan realisasi perkara menjadi menggunakan jumlah perkara DIPA awal (4 perkara) yang sebelumnya pada saat penetapan target menggunakan target efisiensi (1 perkara). Untuk itu sudah diusulkan perubahan target IKU ke Roren yang belum diterima balasannya. Dengan tujuan agar realisasi IKU dapat tercapai sesuai target.	Melakukan gelar perkara dan menyelesaikan proses2 tahap penyelesaian Berkas Perkara serta menunggu tanggapan usulan revisi target dari Roren	Desember 2025	Progres	3. Melakukan kegiatan intelijen sesuai pedoman intelijen. 2. Melaporkan hasil intensifikasi operasi penindakan	Penyelesaian carry over	Tercapainya target untuk Mencari dan mengumpulkan bukti untuk terangnnya suatu tindak pidana
20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90,00	Kumulatif	50,00	50,00	100,00	1. Kegiatan patroli siber dan profiling siber terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang didistribusikan secara online telah dilaksanakan. 2. Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal	1. Menyusun laporan Analisis Penelusuran Siber secara tepat waktu 2. Menyusun laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan obat dan makanan setalah dapat rekomendasi dari direktorat cegah	Desember	Progres	Menyusun laporan Analisis Penelusuran Siber bulan april secara tepat waktu	1. Menyusun laporan Analisis Penelusuran Siber bulan Mei secara tepat waktu 2. Menyusun laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal	Tercapainya target Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan

							kejahatan obat dan makanan masih menunggu dari direktorat cegah tangkal. 3. Laporan analisis kerawanan kejahatan belum dilaksanakan	tangkal 3. Menyusun perencanaan untuk laporan analisis kerawanan kejahatan akan dibuat perencanaan				kejahatan obat dan makanan 3. Menyusun laporan analisis kerawanan kejahatan	sesuai standar
21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,70	Akhir Tahun	-	-	-	Mendapatkan nilai Hasil survei SPKP (Survei Persepsi Kualitas Pelayanan) bulan Maret : 3,93 dan Survei SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) : 98,34 Kemampuan pelaku usaha dalam teknologi mengakibatkan proses pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB belum dapat dilakukan secara cepat dan mandiri	1. Melakukan kegiatan layanan publik informasi dan pengaduan bulan April 2. Melakukan kegiatan layanan pengujian pihak ketiga bulan April 3. Melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi OSS RBA bulan April 4. Melaksanakan survei pelayanan publik kepada konsumen bulan April 5. Melaksanakan kegiatan Forum Konsltasi Publik Tahun 2025.	Desember 2025	Progress	1. Telah melakukan kegiatan layanan publik informasi dan pengaduan bulan April 2. Telah melakukan kegiatan layanan pengujian pihak ketiga bulan April 3.Telah melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi OSS	1. Melakukan kegiatan layanan publik informasi dan pengaduan bulan Mei 2. Melakukan kegiatan layanan pengujian pihak ketiga bulan Mei 3. Melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi OSS RBA bulan Mei 4.	Tercapainya target Indeks Pelayanan Publik UPT

											RBA bulan April 4. Telah melaksanakan survei pelayanan publik kepada konsumen bulan April 5. Kegiatan Forum Konsltasi Publik Tahun 2025 telah dilaksanakan	Melaksanakan survei pelayanan publik kepada konsumen bulan Mei 5. Membuat laporan kegiatan Forum Konsltasi Publik Tahun 2025 telah dilaksanakan	

22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)	90,00	Akhir Tahun	-	-	-	*Pemantauan terhadap rencana kerja pembangunan ZI bulan April belum dilaporkan *Program prioritas zona 1 belum terlaksana * terdapat kekurangan data dukung implementasi RB *Program prioritas zona 2 sudah dijalankan *Pemantauan/monitoring Pelaksanaan kegiatan di setiap Fungsi telah sesuai SOP Mikro, SOP Makro dan Juknis *Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja , operasional manajemen SDM dan pemberian layanan kepada publik telah dilaksankan *Monitoring dan evaluasi KIP sesuai peraturan per-UU telah dilaksankan *Penyusunan kinerja individu telah difinalisasi *Rencana bangkom belum terlaksana	*Melaksanakan pemantauan Renja ZI bulan april * Menyusun rencana pelaksanaan program prioritas tahun 2025 * melengkapi daduk implementasi RB * Melakukan monitoring penilaian kinerja individu triwulan I *Menyusun perencanaan bangkom melalui pembelajaran mandiri yang tidak berbayar misalnya melalui IDEAS *Progress pembuatan Inovasi Googlesite Monev Kinerja *Implementasi Sakip dalam pencapaian kinerja setiap bulan dengan melakukan monev bulan Maret *Input Monev online bulan Januari sd Maret *Penyusunan laporan Kinerja TW I dan evaluasi Internal TW 1 *Pembuatan Laporan Gratifikasi Triwulan I	Desember 2025	Progress	* Monev Bulanan Januari - Maret * daduk implementasi RB *Pelaksanaan dan Monev program prioritas zona 2 - Telah dilakukan monitoring penilaian kinerja individu triwulan I - Telah disusun perencanaan bangkom melalui pembelajaran mandiri yang tidak berbayar misalnya melalui IDEAS - Telah ditetapkan nama aplikasi dan menu2 pada aplikasi Inovasi Googlesite Monev Kinerja	* Monev Renja Bulan April * Program prioritas - Mengisi data-data pada aplikasi Inovasi Googlesite Monev Kinerja -Membuat monev renja RB sd bulan April 2025 - Monev kinerja per IKU bulan April 2025 - Implementasi Rencana Kerja RB 2025 - Input Monev online bulan April paling lambat tanggal 10 Mei - Pengembangkan inovasi pelayanan publik yang berdasarkan kebutuhan	Target nilai pembangunan ZI dapat tercapai *Program prioritas zona 2 terlaksana dan dimonitoring * Terlaksanany a Monev Bulanan NIlai pembangunan ZI zona 4 dapat tercapai *Meningkatny a nilai Pokja Pengawasan * Program prioritas zona terlaksana dan dimonitoring * Terlaksanany a Monev Bulanan *Meningkatny a nilai pokja pelayanan publik -Pelaksanaan program/ rencana kerja yang

							dikarenakan antara lain masih terkendala efisiensi anggaran *Progress Perencanaan Inovasi Googlesite Monev Kinerja masih rendah * Implementasi Sakip dalam pencapaian kinerja untuk bulan Maret akan dievaluasi pada bulan April * Monev online bulan Januari sd Maret belum diinput karena belum finalnya DO IKU * Penyusunan laporan Kinerja dan evaluasi Internal TW 1 belum disusun * Nilai Survei SPAK (Survei Persepsi Anti Korupsi) bulan Maret mendapatkan nilai 3,98 * Laporan Gratifikasi Triwulan I belum dilaporkan * Laporan benturan kepentingan Triwulan I telah dilaporkan *Peningkatan Nilai Pokja Pelayanan Publik * Implementasi pemberian penghargaan dan sanksi belum dilaksanakan secara	*Pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerjai pokja pelayanan publik yang berkesinambungan dan sesuai jadwal *Revieu standar pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik *Pemberian penghargaan dan sanksi bulan April *Mengembangakn inovasi pelayanan publik yang berdasarkan kebutuhan stakeholder atau hasil manajemen risiko .			-Monev renja RB sd bulan Maret 2025 telah disusun - Monev kinerja per IKU bulan Maret telah dinput oleh masing-masing ketua Tim pada bulan April 2025 -Rencana Kerja RB 2025 telah ditetapkan - Input Monev online bulan Januari sd Maret telah dilaksankan di bulan April 2025 - Laporan Kinerja TW I dan Laporan evaluasi Internal TW 1 telah dikirimkan tepat waktu -Pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerjai pokja pelayanan	stakeholder atau hasil manajemen risiko .	konsisten dan berkesinambungan. - Mengembangkan inovasi pelayanan publik yang berdasarkan kebutuhan stakeholder atau hasil manajemen risiko .

							konsisten *Inovasi Pelayanan Publik yang berdasarkan kebutuhan stakeholder atau hasil manajemen resiko - Nilai SPKP (Survei Persepsi Kualitas Pelayanan) bulan Maret mendapatkan nilai 3,93				publik yang berkesinambungan dan sesuai jadwal - Revieu standar pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik - Pemberian penghargaan dan sanksi bulan April		

23	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	82,00	Akhir Tahun	-	-	-	1. Lakip belum diupload di Subsite BBPOM di Padang 2. Realisasi IKU dan Monev online belum diinput pada bulan Januari sd Maret 2025 3. Sosialisasi SOP dan Monev Sakip belum dilaksanakan secara keseluruhan 4. Laporan Kinerja dan Laporan Evaluasi Internal TW I belum dikirim 5. Implementasi SAKIP belum maksimal dilaksanakan pada semua IKU dan fungsi terkait agar target nilai AKIP 2025 dapat tercapai	1. Upload Lakip Tahun 2024 2. Input data monev online bulan januari, februari dan Maret di aplikasi 3. Sosialisasi SOP dan pedoman Sakip monev 4. Pengisian Monev capaian kinerja oleh ka Tim Bulan Januari, Februari dan Maret 5. Implementasi SAKIP sesuai pedoman pada semua IKU agar target dapat tercapai 6. Pengiriman Laporan Kinerja dan laporan Evaluasi Internal TW 1 2025	Desember	Progress	1. Lakip dan Laptah Tahun 2024 telah diupload 2. Data monev online bulan januari, februari dan Maret telah diinput di aplikasi 3. Sosialisasi SOP dan pedoman Sakip monev dismapaikan melalui whatsup group dan memo dinas 4. Pengisian Monev capaian kinerja oleh ka Tim Bulan Januari, Februari dan Maret Tahun 2025 5. Implementasi SAKIP sesuai pedoman pada semua IKU agar target dapat tercapai 6.Pengiriman	1. Input data monev online bulan April di aplikasi 2. Pengisian Monev capaian kinerja oleh ka Tim Bulan April 2025 3. Implementasi SAKIP sesuai pedoman pada semua IKU agar target dapat tercapai 4. Pengisian LKE Sakip dan upload data dukung 5. Sosialisasi kepada pegawai tentang IKU 2025	Tercapaianya target nilai AKIPBBPOM di Padang

											Laporan Kinerja dan laporan Evaluasi Internal TW 1 2025		
24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00	Akhir Tahun	-	-	-	Capaian Output bulan januari-maret telah dilaporkan dan memperoleh nilai 100 sehingga nilai IKPA juga mendapat nilai maksimal 100.	2. Input data monev online bulan januari, februari dan Maret di aplikasi	Desember 2025	Progres	1. Telah melakukan revisi DIPA sekaligus revisi RPD Halaman III DIPA 2. Telah menjaga konsistensi RPD bulan april yang telah ditetapkan pada Halaman III DIPA. 3. Telah mempercepat pelaksanaan kegiatan barang dan jasa pada bualan april. 4. Telah mendaftarkan data kontrak secara tepat waktu pada bulan april. 5. Telah mempercepat pembayaran	1. Melakukan revisi DIPA sesuai dengan ketentuan dan memaksimalkan pengajuan beberapa jenis revisi dalam 1 kali pengajuan revisi. 2. Menjaga Konsistensi RPD bulan mei yang telah ditetapkan pada Halaman III DIPA. 3. Mempercepat pelaksanaan kegiatan barang dan jasa untuk menacapi target realisasi anggaran TW 2. 4.	Tercapainya target Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Padang Tahun 2025

											belanja kontraktual pada bulan april. 6. Telah melaporkan capaian output bulan januari-maret secara tepat dan tepat waktu. 7. Telah menyelesaikan pertanggungjawaban UP dan TUP dengan tepat waktu pada bulan maret.	Mendaftarkan data kontrak secara tepat waktu pada bulan mei. 5. Mempercepat pembayaran belanja kontraktual pada bulan mei. 6. Melaporkan capaian output bulan april secara tepat dan tepat waktu. 7. Menyelesaikan pertanggungjawaban UP dan TUP dengan tepat waktu pada bulan mei 8. Melakukan efisiensi anggaran RO SBK.	

25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,95	Akhir Tahun	-	-	-	- Masih terdapat pegawai yang belum mengikuti peltihan Manajemen Risiko - Masih terdapat pegawai yang belum memahami Manajemen Risiko sehingga perlu disosialisasikan kembali setiap periode - Belum semua identifikasi risiko telah mempertimabangkan seluruh isu internal dan eksternal yang ada - Penilaian risiko masih belum konsisten sesuai pedoman terkait rumusan, atribut pengendalian, penetapan level risiko, tindakan mitigasi risiko dan lain-lain"	1.Akan mendata pegawai yang telah mengikuti pelatihan Manajemen Risiko dan bagi yang belum untuk segera mengikuti pelatihan bagi yang belum. 2. Melakukan sosialisasi Manajemen Risiko 3. Melakukan identifikasi risiko dengan mempertimbangakan seluruh isu internal dan eksternal yang ada 4. Melakukan penilaian risiko secara konsisten sesuai pedoman terkait rumusan, atribut pengendalian, penetapan level risiko, tindakan mitigasi risiko dan lain-lain" 5. Melakukan monitoring terhadap risiko yang telah diidentifikasi	Desember	Progress	1.Telah mendata pegawai yang belum mengikuti pelatihan manrisk, pegawai tersebut sedang proses mengikuti pelatihan 2. Sosialisasi Manajemen Risiko melalui whatsup group 3. Melakukan monitoring terhadap risiko yang telah diidentifikasi	1.Memastikan seluruh pegawai telah mengikuti pelatihan Mananjemen Risiko 2. Melakukan sosialisasi Manajemen Risiko 3. Melakukan identifikasi risiko dengan mempertimbangkan seluruh isu internal dan eksternal 4. Melakukan penilaian risiko secara konsisten sesuai pedoman terkait rumusan, atribut pengendalian, penetapan level risiko, tindakan mitigasi risiko dan lain-lain" 5. Melakukan monitoring terhadap risiko yang telah diidentifikasi	Nilai Indeks Manajemen Risiko dapat tercapai

NO.	Indikator Kegiatan	TARGET 2025	JENIS	MEI			KONDISI AWAL	REKOMENDASI	TIMELINE PENYELESAIAN	STATUS	RENCANA AKSI		KONDISI AKHIR
				Target	Realisasi	Capaian (%)	(Kendala/Permasalahan/Capaian Terhadap Target)	(Rencana Tindak Lanjut)	(Bulan)	(Progres/Selesai)	(Rencana Aksi yang Sudah Selesai)	(Rencana Aksi yang Belum Selesai)	(Tercapainya Target/Peningkatan Kinerja)
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,75	Flat	86,75	95,99	110,65	- Kerusakan alat AAS untuk pengujian logam berat Pb, Cd dan As, menghambat pelaksanaan uji logam untuk komoditi Kosmetik, OBA dan SK - Adanya kebijakan efisiensi pada awal tahun serta relaksasi pada pertengahan bulan April mengakibatkan penumpukan beban kerja (beban sampling dan pengujian) pada bulan Mei hingga akhir tahun 2025 '- Tingginya jumlah sampel yang menjadi target uji laboratorium Mikrobiologi, karena peningkatan jumlah sampel untuk semua	- Perbaikan alat AAS, serta mengalihkan pelaksanaan pengujian logam As, Pb dan Cd menggunakan alat AAS yang di kelola Lab. Pangan. - Menyusun ulang rencana sampling dan pengujian untuk bulan Mei samapai akhir tahun 2025 dengan mempertimbangakan kapsitas pengujian di laboratorium. - Mengatur pelaksanaan pengujian di laboratorium dengan	Juni	Progres	- Mengalihkan pelaksanaan pengujian logam As, Pb dan Cd menggunakan alat AAS yang di kelola Lab. Pangan. '- Menyusun ulang rencana sampling dan pengujian untuk bulan Mei sampai akhir tahun 2025 dengan mempertimbangakan kapsitas pengujian di laboratorium. - Mengatur pelaksanaan pengujian dilaboratorium dengan memperhatikan waktu masuk	- Perbaikan alat AAS	- Parameter uji logam (Pb; Cd dan As) dapat dilaksanakan sehingga target pemenuhan parameter uji dapat d penuhi 100% - Pemenuhan Time line pengujian sampai bulan Mei dapat dipenuhi 100%

							komoditi (sediaan farmasi dan pangan), melebihi kapasitas uji laboratorium sehingga pengujian tidak dapat dilaksanakan untuk semua sampel secara bersamaan, hal ini memperpanjang waktu penyelesaian pengujian.	memperhatikan waktu masuk sampel serta batas time line pengujian, agar tidak ada sampel yang terlalu lama menunggu untuk diuji.			sampel serta batas time line pengujian, agar tidak ada sampel yang terlalu lama menunggu untuk di uji.		
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26,00	Akhir Tahun		-	-	Hasil Monev laporan melalui website e-meso, baru 4 sarana pelayanan kesehatan yang melaporkan KTD, yaitu RS Semen Padang, RS Unand, RS Saanin, RSIA Restu.	`- Mengingatkan kembali tenaga kesehatan melalui WAG kolaborasi Meso `- Mengingatkan PIC Farmakovigilans untuk segera melaporkan KTD bersamaan dengan penagihan tindakan perbaikan hasil pemeriksaan sarana pelayanan kesehatan	Desember 2025	Progres	`- Mengingatkan kembali tenaga kesehatan melalui WAG kolaborasi Meso `- Mengingatkan PIC Farmakovigilans untuk segera melaporkan KTD bersamaan dengan penagihan tindakan perbaikan hasil pemeriksaan sarana pelayanan kesehatan	Rencana aksi akan dialakukan setiap Bulan hingga tercapai angka pelaporan 26% (12 Sarana yang melaporkan KTD)	Tercapainya Target Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanj	85,00	Flat	85,00	97,49	114,69	1. Keterbatasan ketersediaan reagensia, suku cadang dan baku pembanding sehingga terjadinya penyesuaian kategori sampling sampai tersedianya pengadaan reagensia yang dipesan	1. Melakukan koordinasi internal antara katim fungsi pengujian pangan degan PPK untuk melakukan percepatan pengadaan reagensia, suku	Desember 2025	Progres	1. Melakukan tindak lanjut terhadap sampel yang tidak memenuhi syarat 2. Meningkatkan koordinasi dengan tim internal	Tindak lanjut sampel yang perlu dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan	Tercapainya target Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanj

	uti sesuai ketentuan						2. Terjadinya keterlambatan dari tindak lanjut sampel TMS disebabkan sampel yang diterima di laboratorium pada minggu ke 2 bulan Maret, kemudian dilakukan proses pengujian selama 15 HK (batas waktu pelaporan) sehingga pelaporan pengujian pada akhir bulan Maret dan tindak lanjut dilakukan pada awal bulan April 2025	cadang dan baku banding 2. Melakukan percepatan jadwal pelaksanaan sampling sehingga pelaporan pengujian dan tindak lanjut hasil dapat dilaksanakan pada bulan yang sama 3. Meningkatkan koordinasi internal dalam hal sampling dan tindak lanjut sampling					uti sesuai ketentuan
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	Flat	100,00	100,00	100,00	Tidak ada pengaduan KLB KP bulan April	1. Melakukan pengujian terhadap sampel KLB KP yang masuk pada bulan Mei sesuai hasil investigasi epidemiologi yang dilakukan instansi pengirim sampel 2. Terus meningkatkan koordinasi internal dan eksternal terkait pengaduan kasus KLB KP	Juni 2025	Progres	Menindaklanjuti (menguji dan melaporkan) sampel KLB KP	-	Realisasi penyelesaian sampel KLB KP yang ditindaklanjuti tercapai sesuai target (100%). Laporan evaluasi selesai tepat waktu dan sesuai standar.

5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	Flat	85,00	97,50	114,71	Terjadinya perubahan dari target efisiensi ke target awal sampel PIRT sebelum efisiensi sehingga perlu adanya persiapan dan penyesuaian kategori sampling dengan ketersediaan reagensia, suku cadang, baku banding dan koordinasi dengan lab regional	1. Meningkatkan koordinasi internal dalam hal sampling dan tindak lanjut sampling 2. Melakukan koordinasi internal antara katim fungsi pengujian pangan degan PPK untuk melakukan percepatan pengadaan reagensia, suku cadang dan baku banding	Desember 2025	Progres	1. Melakukan tindak lanjut terhadap sampel yang tidak memenuhi syarat 2. Meningkatkan koordinasi dengan tim internal	1. Meningkatkan monitoring terhadap sampel PIRT yang perlu ditindaklanjuti bersama tim internal, 2. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait	Tercapainya target Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89,50	Flat	89,50	83,33	93,11	1. Telah dibuat link yang berisi fasilitas mendownload format CAPA dan mengupload kembali pada form dalam link yang sama (untuk percepatan dan kerapian pengarsipan dokumen CAPA). Link ini telah dimasukkan ke dalam narasi di format surat TL ke sarana. 2. Telah mulai terkumpul CAPA dalam satu folder sebagai hasil inputan dan upload sarana secara langsung ke link, tanpa harus melakukan chat ke nomor pribadi	1. Memastikan surat TL diterima pelaku usaha/ linsek dengan selalu mengingatkan petugas untuk mengirimkan surat TLnya juga melalui media komunikasi online seperti email ataupun whatsapp. 2. Petugas yang merekap CAPA per komoditi secara rutin, secara tidak langsung telah mengingatkan petugas untuk mengingatkan sarananya agar	Desember 2025	Progres	1. Memastikan surat TL diterima pelaku usaha/ linsek dengan selalu mengingatkan petugas untuk mengirimkan surat TLnya juga melalui media komunikasi online seperti email ataupun whatsapp. 2. Membuat link yang berisi fasilitas mendownload format CAPA dan mengupload kembali pada form dalam link yang sama (untuk percepatan dan	1. Melakukan pengawalan dan desk CAPA sebagian sarana lainnya 2. Melakukan koordinasi dengan bagian IT jika memungkinkan untuk membuatkan akun pom.go.id khusus untuk keperluan penerimaan CAPA dari pelaku usaha	Peningkatan kinerja dari periode sebelumnya

							petugas. 3. Belum adanya persamaan persepsi dengan ketua tim terkait tentang kategori hasil pemeriksaan yang mewajibkan sarana diberikan rekomendasi tindak lanjut yang membutuhkan pengiriman CAPA atas perbaikan temuannya	mengirimkan CAPA. 3. Melakukan diskusi dan mengambil kesepakatan tentang kategori sarana yang harus mengirimkan CAPA atas perbaikan temuannya. 4. Melakukan revisi RHPK atas kesepakatan tersebut di atas.			kerapian pengarsipan dokumen CAPA).		
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	Flat	85,00	100,00	117,65	Ada satu sarana yang ditargetkan di bulan Mei, namun karena padatnya kesibukan petugas yang telah ditetapkan sebelumnya pada SKP, membuat pemeriksaan ini dipending	Pemeriksaan akan dilaksanakan pada bulan berikutnya dan telah dipastikan ke petugas agar tidak ada lagi pembatalan dibulan tersebut karena sudah merupakan batas akhir pencapaian target SKP TW II	Desember 2025	Progres	Melakukan pemeriksaan satu sarana sesuai pedoman pemeriksaan	Melakukan pemeriksaan lima sarana lainnya sesuai pedoman pemeriksaan	Revisi target
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanj	85,00	Flat	85,00	100	117,65	Pelaku usaha industri pangan olahan belum menerapkan seluruh aspek CPPOB dengan baik	1. Melaksanakan pembinaan kepada pelaku usaha agar meningkatkan pemahaman terhadap penerapan CPPOB dalam proses produksi sehingga	Mei 2025	Selesai	1. Melaksanakan tindak lanjut hasil inspeksi terhadap 8 sarana produksi pangan secara konsisten diantaranya melakukan monitoring dan	Evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha	Telah melakukan pengawasan dan pembinaan kepada 9 sarana pangan olahan

	uti sesuai ketentuan							menghasilkan produk pangan yang aman dan bermutu. 2. Melaksanakan tindak lanjut hasil inspeksi sarana secara konsisten diantaranya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha			evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha. 2. Melakukan pengawasan dan pembinaan kepada 9 sarana pangan olahan dalam penerapan cara produksi pangan olahan yang baik		dalam penerapan cara produksi pangan olahan yang baik
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,00	Flat	92,00	97,44	105,91	Sarana distribusi sediaan farmasi belum secara konsisten melakukan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan	Melakukan pemeriksaan sarana berdasarkan analisa resiko dan pemberian Tindak lanjut sesuai ketentuan	Desember 2025	Progres	Membuat tindak lanjut hasil inspeksi dan pelaporan sesuai timeline dan melakukan monev CAPA	Mendampingi pelaku usaha dan penyusunan CAPA dan memantau konsistensi sarana dalam penerapan CAPA yang telah dibuat	Tercapai target Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	Flat	85,00	91,91	108,13	Pengawasan sarana distribusi pangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan surat tindak lanjut dilaksanakan sesuai ketentuan serta terdapat surat tindak lanjut yang sedang proses masih dalam rentang kendali time line surat tindak lanjut . Peningkatan koordinasi dalam tim kerja sangat dibutuhkan dalam rangkla mencapai kinerja yang maksimal.	1. Meningkatkan monitoring terhadap tindak lanjut hasil pengawasan. 2. Meningkatkan koordinasi dalam tim kerja pengawasan sarana distribusi pangan	Desember 2025	Progres	1. Melaksanakan monitoring tindak lanjut agar sesuai ketentuan. 2. Meningkatkan koordinasi dalam tim kerja pengawasan sarana distribusi pangan	1. Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut hasil pengawasan sarana distribusi pangan. 2. Terus meningkatkan koordinasi dalam tim kerja pengawasan sarana distribusi pangan	Tercapainya target Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	81,09	Flat	81,09	99,83	123,11	Jenis media iklan tertentu, terutama media cetak dan media penyiaran lokal, tidak selalu tersedia sehingga mempengaruhi realisasi perencanaan pengawasan iklan yang sudah dibuat. Pelaporan pengawasan iklan juga dapat terdampak karena petugas pengawasan memiliki tugas utama lainnya.	Perluasan area pengawasan iklan atau penambahan waktu pengawasan iklan khususnya pengawasan di kab/kota lain dan penjadwalan pelaksanaan pengawasan diatur pada awal bulan.	Desember 2025	Progress	Perencanaan sudah ditetapkan menyesuaikan dengan target yang ditetapkan.	Penjadwalan pengawasan iklan untuk periode triwulan dan pemantauan efektivitas pelaksanaannya	Telah dilakukan pemantauan efektivitas pelaksanaan terhadap pencapaian target dan realisasinya.

12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	63,00	Kumulatif	63,00	100,00	158,73	Pelaku usaha industri pangan olahan belum menerapkan seluruh aspek CPPOB dengan baik	- Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan perbaikannya, sesuai batas waktu yang telah disepakati. - Membuat surat pernyataan bahwa CAPA telah selesai/closed, apabila berdasarkan hasil evaluasi tindakan perbaikan yang dilaporkan sudah sesuai	Mei 2025	Selesai	- Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan perbaikannya, sesuai batas waktu yang telah disepakati. - Membuat surat pernyataan bahwa CAPA telah selesai/closed berdasarkan hasil evaluasi tindakan perbaikan yang dilaporkan sudah sesuai	-	Tercapainya target Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77,00	Kumulatif Triwulan	76,70	81,20	105,87	Untuk bulan Mei ini, realisasi masih sama dengan Nilai Pemenuhan target SKL TW 1 sudah terpenuhi (Target 76,7, Realisasi 81,2, Capaian 105,9%)	1.Lab harus melakukan pengujian dengan metoda analisa dalam SKL yang belum mampu uji untuk peningkatan Standar Ruang Lingkup dan kompetensi personil laboratorium serta verifikasi MA secara bertahap sesuai perencanaan yang disusun. 2. Percepatan pengadaan alat	Desember 2025	Progres	Verifikasi MA TW I sesuai target	Pada TW II ini (April sd Juni) diupayakan pemenuhan SRL oleh lab yang merencanakan, yaitu lab Mikrobiologi dan Kosmetik	Capaian belum dapat dihitung karena perhitungan per TW. Perhitungan dapat dilakukan setelah akumulasi realisasi target sampai dengan bulan Juni.

								laboratorium untuk meningkatkan standar peralatan dalam SKL.					Tercapainya Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88,00	Flat	88,00	86,49	98,28	- Target kegiatan KIE Rutin sebanyak 194 peserta baru terlaksana 50 peserta (25,77 %) - Target kegiatan KIE bersama TOMAS Tahun 2025 sebanyak 15 titik @ 250 peserta belum terlaksana (0%)	- Melaksanakankegiatan KIE sesuai perencanaan yang disusun.	Desember	Progres	Melaksanakan kegiatan: * KIE Cegah Stunting 1. Locus Nagari Sikabu Kabupaten Padang Pariaman tanggal 5 Mei 2025, sebanyak 44 orang peserta. * KIE Bersama TOMAS sebanyak 4 titk @ 250 orang peserta. 1. Tgl 9 Mei 2025, Kecamatan Ampek ANgkek 2. Tgl 10 Mei 2025, Kecamatan Akabiluru 3. Tgl 16 Mei 2025,	Kegiatan yang belum terlaksana -Kegiatan KIE Rutin yang belum terlaksana 2 kegiatan/ 100 peserta (48,45 %) - Kegiatan KIE bersama TOMAS yang belum terlaksana sebanyak 11 titik @ 250 peserta (73,33%)	- Pelaksanaan kegiatan KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang Tahun 2025 sesuai perencanaan yang disusun. - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan

											Kecamatan Sicincin 4. Tgl 17 Mei 2025, Kecamatan Sungai Pua		Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang memenuhi target.
15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	14,00	Kumulatif	47,50	47,50	100,00	- Perhitungan % progress dihitung berdasarkan jumlah sekolah yang dilakukan intervensi (7 sekolah) karena kondisi efisiensi - Sebelumnya telah terlaksana kegiatan advokasi keamanan pangan di Kabupaten Solok pada bulan April dan pada bulan mei dilanjutkan dengan tahapan berikutnya	- Pelaksanaan Sosialisasi Keamanan Pangan kepada sekolah intervensi - Pelaksanaan kegiatan Bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah intervensi	Mei 2025	Progres	Melaksanakan tahapan program: - Pelaksanaan Sosialisasi Keamanan Pangan yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 7 Mei 2025 yang diikuti oleh sekolah/madrasah intervensi dan OPD terkait. - Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah/Madrasah yang diikuti oleh 7 sekolah/madrasah intervensi pada tanggal 15 Mei 2025 yang bertempat di SMAN 2 Gunung Talang, Kab. Solok dan sekaligus dilakukan pemberian paket edukasi keamanan pangan yang dapat	Melaksanakan tahapan program selanjutnya: Sosialisasi keamanan pangan untuk sekolah cakupan perluasan, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan serta pengawalan sekolah yang telah diintervensi sebelumnya.	Pelaksanaan kegiatan berdasarkan tahapan program sesuai dengan masing-masing timeline dengan capaian akhir 100% dan jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan sesuai target

											digunakan oleh pihak sekolah/madrasah dalam melaksanakan sosialisasi keamanan pangan komunitas sekolah		
16	Jumlah desa pangan aman	6,00	Kumulatif	37,50	37,50	100,00	- Perhitungan % progress dihitung berdasarkan jumlah desa yang dilakukan intervensi (3 desa) karena kondisi efisiensi - Sebelumnya telah terlaksana kegiatan advokasi keamanan pangan di Kabupaten Solok pada bulan April dan pada bulan mei dilanjutkan dengan tahapan berikutnya	- Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) untuk desa/nagari intervensi	Mei 2025	Progres	Melaksanakan tahapan program: - Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa untuk Kader Keamanan Pangan dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2025 yang diikuti oleh 3 nagari intervensi (Nagari Aia Batumbuak, Nagari Koto Gaek Guguak, Nagari Batang Barus)	Melaksanakan tahapan program selanjutnya: Bimtek komunitas, monitoring dan evaluasi serta pengawalan desa yang telah diintervensi pada tahun sebelumnya	Pelaksanaan kegiatan berdasarkan tahapan program sesuai dengan masing-masing timeline dengan capaian akhir 100% dan jumlah desa pangan aman
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	Kumulatif	50,00	50,00	100,00	- Sebelumnya telah terlaksana kegiatan advokasi keamanan pangan di Kabupaten Solok pada bulan April dan pada bulan mei dilanjutkan dengan tahapan berikutnya	- Pelaksanaan kegiatan bimtek dan penyuluhan kepada komunitas pasar	Mei 2025	Progress	Melaksnakan tahapan program: - Bimtek dan penyuluhan kepada komunitas pasar di Pasar Cupak pada tanggal 20 Mei 2025	Melaksnakan tahapan program selanjutnya: Sosialisasi Keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan	Pelaksanaan kegiatan berdasarkan tahapan program sesuai dengan masing-masing timeline

												keamanan pangan dan monitoring evaluasi, serta pengawalan pasar yang telah diintervensi pada tahun sebelumnya	dengan capaian akhir 100% dan jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80,00	Kumulatif	30,84	30,67	99,45	1. Pelaku usaha UMKM pangan belum memahami CPPOB. 2. Pelaku usaha UMKM OBA belum memahami CPOTB. 3. Kemampuan pelaku usaha dalam teknologi mengakibatkan proses pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB belum dapat dilakukan secara cepat dan mandiri.	1. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dalam rangka penerapan CPPOB dan CPOTB. 2. Melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dan OBA dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB dan CPOTB bertahap di aplikasi. 3. Melaksanakan Bimtek CPPOB kepada UMKM pangan olahan.	Desember 2025	Progres	1. Melakukan pembinaan kepada 8 pelaku usaha dalam rangka penerapan CPPOB, 1 pelaku usaha industri kosmetik dalam rangka penerapan CPKB 2. Melakukan pendampingan langsung kepada 3 (tiga) pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi 3. Menyelenggarakan Bimtek CPPOB bagi UMKM pangan olahan	Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha OBA dalam rangka penerapan CPOTB	- Telah melakukan pembinaan kepada 8 pelaku usaha dalam rangka penerapan CPPOB, 1 pelaku usaha dalam rangka penerapan CPOTB dan 1 pelaku usaha kosmetik dalam rangka penerapan CPKB. - Telah melakukan pendampin

													gan langsung kepada 3 (tiga) pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi.
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	90,00	Kumulatif	43,00	42,00	97,67	1. Terlaksananya proses penyidikan sediaan farmasi obat dan makanan terhadap 3 perkara. 2. Belum tercapainya target Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan karena ttingginya target RAP dan usulan perubahan target RAPK tidak disetujui.	1. Mempercepat proses tahap 1 untuk perkara berikutnya. 2. Merencanakan gelar perkara untuk kasus carry over.	Desember 2025	Progress	1. Melakukan kegiatan intelijen sesuai pedoman intelijen. 2. Melaporkan hasil operasi Pangea tindak pidana obat dan makanan.	Menyelesaikan 1 Perkara sampai tahap I	Telah mencari dan mengumpulkan bukti untuk terangnnya suatu perkara tindak pidana.

20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90,00	Kumulatif	50,00	50,00	100,00	1. Kegiatan patroli siber dan profiling siber terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang didistribusikan secara online telah dilaksanakan. 2. Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan obat dan makanan masih menunggu dari direktorat cegah tangkal. 3. Laporan analisis kerawanan kejahatan belum dilaksanakan	1. Menyusun laporan Analisis Penelusuran Siber secara tepat waktu 2. Menyusun laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan obat dan makanan setalah dapat rekomendasi dari direktorat cegah tangkal 3. Menyusun perencanaan untuk laporan analisis kerawanan kejahatan	Desember 2025	Progress	Menyusun Laporan Analisis Penelusuran Siber bulan Mei secara tepat waktu	1. Menyusun laporan Analisis Penelusuran Siber bulan Juni secara tepat waktu 2. Menyusun laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan obat dan makanan 3. Menyusun laporan analisis kerawanan kejahatan	Tercapainya target Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,70	Akhir Tahun		-	-	Mendapat Hasil survei indeks pelayanan publik bulan April 3,75 dan Survey SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) : 98,98 Masukan dan saran dari peserta FKP Tahun 2025 akan ditindaklanjuti dalam penyusunan satandar layanan publik. Kemampuan pelaku usaha dalam teknologi mengakibatkan proses pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB belum dapat dilakukan secara cepat dan mandiri	1. Melakukan kegiatan layanan publik informasi dan pengaduan bulan Mei. 2. Melakukan kegiatan layanan pengujian pihak ketiga bulan Mei. 3. Melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi OSS RBA bulan Mei. 4. Melaksanakan survei pelayanan publik kepada konsumen bulan Mei. 5. Membuat laporan kegiatan Forum Konsltasi Publik Tahun 2025. 6. Menyusun dan menetapkan serta mempublish satndar layanan publik tahun 2025	Desember 2025	Progress	1. Melakukan kegiatan layanan publik informasi dan pengaduan bulan Mei. 2. Melakukan kegiatan layanan pengujian pihak ketiga bulan Mei. 3. Melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi OSS RBA bulan Mei. 4. Melaksanakan survei pelayanan publik kepada konsumen bulan Mei. 5. Menyusun laporan kegiatan Forum Konsltasi Publik Tahun 2025 .	1. Melakukan kegiatan layanan publik informasi dan pengaduan bulan Juni 2. Melakukan kegiatan layanan pengujian pihak ketiga bulan Juni 3. Melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi OSS RBA bulan Juni 4. Melaksanakan survei pelayanan publik kepada konsumen bulan Juni 5. Menyusun dan menetapkan	Tercapainya target Indeks Pelayanan Publik UPT

								yang telah ditetapkan.				serta mempublish standar layanan publik tahun 2025 yang telah ditetapkan	

22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)	90,00	Akhir Tahun		-	-	1. Masih ada renja yang belum dilaksanakan 2. Melakukan monitoring pelksanan renja dan program prioritas 3. Program prioritas zona 2 helpdesk berjalan lancar dan selalu dimonitor 4. Pemantauan/monitoring pelaksanaan kegiatan di setiap fungsi sesuai SOP 5. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi kegiatan dalam pengukuran kinerja, operasional manajemen SDM, dan pemberian layanan kepada publik 6. Monitoring dan evaluasi KIP sesuai peraturan per-UU. 7. Progress Perencanaan Inovasi Googlesite Monev Kinerja masih rendah 8. Implementasi SAKIP dalam pencapaian kinerja untuk bulan April 2025 9. Monev kinerja ulan	1. Melaksanakan Monev Renja Bulan April 2. Melaksnakana Program prioritas 3. Melaksanakan Renja 4. Melakukan monitoring dan evaluasi adanya review/perubahan terhadap SOP Makro maupun Mikro. 5. Menyelesaikan Inovasi Googlesite Monev Kinerja 6. Melaksanakan Monev kinerja bulan April 2025 7. Merevieu standar pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik 8. Memberi penghargaan dan sanksi kepda petugas layanan bulan April 9. Mengembangakn inovasi pelayanan publik yang berdasarkan kebutuhan stakeholder atau	Desember 2025	Progress	1. Melaksanakan Monev Renja Bulan April 2. Melaksanakana Renja Bulan Mei 3. Memantau progres pelksaan program prioritas 4. Melaksanakan monev kinerja bulan April 5. Merevieu standar pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik 6. Memberikan penghargaan dan sanksi kepada petugas layanan bulan April	1. Mengevaluasi progres program prioritas hingga TW 2 2. Melaksanakan Monev Renja bulan Mei 3. Melaksanakan Renja 4. Melengkapi pengembangan Inovasi Googlesite Monev Kinerja 5. Melaksanakan Monev kinerja bulan Mei 2025 6. Mengembangkan inovasi pelayanan publik yang berdasarkan kebutuhan stakeholder atau hasil manajemen risiko .	Target nilai pembangunan ZI dapat tercapai

							Januari sd Maret sudah diinput 10. Laporan Kinerja dan evaluasi Internal TW 1 telah dikirim 11. Nilai Survei SPAK (Survei Persepsi Anti Korupsi) bulan April mendapatkan nilai 3,88 12. Peningkatan Nilai Pokja Pelayanan Publik 13. Implementasi pemberian penghargaan dan sanksi belum dilaksanakan secara konsisten 14. Inovasi Pelayanan Publik yang berdasarkan kebutuhan stakeholder atau hasil manajemen resiko 15. Nilai IPP April 3,93	hasil manajemen risiko.					

23	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	82,00	Akhir Tahun		-	-	1. Lakip dan Laptah Tahun 2024 telah diupload 2. Data monev online bulan januari, februari dan Maret telah diinput di aplikasi 3. Sosialisasi SOP dan pedoman Sakip monev disampaikan melalui whatsup group dan memo dinas 4. Pengisian Monev capaian kinerja oleh ka Tim Bulan Januari, Februari dan Maret Tahun 2025 5. Implementasi SAKIP sesuai pedoman pada semua IKU agar target dapat tercapai 6.Pengiriman Laporan Kinerja dan laporan Evaluasi Internal TW 1 2025	1. Input data monev online bulan April di aplikasi 2. Pengisian Monev capaian kinerja oleh ka Tim Bulan April 2025 3. Implementasi SAKIP sesuai pedoman pada semua IKU agar target dapat tercapai 4. Pengisian LKE Sakip dan upload data dukung 5. Sosialisasi kepada pegawai tentang IKU 2025	Desember	Progress	1. Menginput data monev online bulan April 2. Mengisi Monev capaian kinerja bulan April 3. Mengimplementasikan SAKIP sesuai pedoman pada semua IKU agar target dapat tercapai 4. Menginput dan melengkapi data dukung LKE SAKIP 5. Mensosialisasikan indikator kinerja kepada pegawai pada tanggal 14 Mei 2025	1. Menginput data monev online bulan Mei 2. Mengisi Monev capaian kinerja bulan Mei 3. Mengimplementasikan SAKIP sesuai pedoman pada semua IKU agar target dapat tercapai	Tercapaiannya target nilai AKIP BBPOM di Padang

24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00	Akhir Tahun		-	-	Capaian Output bulan April telah dilaporkan dan memperoleh nilai 100 namun nilai IKPA belum maksimal.	1. Melakukan revisi DIPA sesuai dengan ketentuan dan memaksimalkan pengajuan beberapa jenis revisi dalam 1 kali pengajuan revisi. 2. Menjaga Konsistensi RPD bulan mei yang telah ditetapkan pada Halaman III DIPA. 3. Mempercepat pelaksanaan kegiatan barang dan jasa untuk menacapi target realisasi anggaran TW 2. 4. Mendaftarkan data kontrak secara tepat waktu pada bulan mei. 5. Mempercepat pembayaran belanja kontraktual pada bulan mei. 6. Melaporkan capaian output bulan april secara tepat dan tepat waktu. 7. Menyelesaikan pertanggungjawaba	Desember 2025	Progres	1. Menjaga konsistensi RPD bulan Mei yang telah ditetapkan pada Halaman III DIPA. 2. Mempercepat pelaksanaan kegiatan barang dan jasa pada bualan Mei. 3. Mendaftarkan data kontrak secara tepat waktu pada bulan Mei. 4. Mempercepat pembayaran belanja kontraktual pada bulan Mei. 5. Melaporkan capaian output bulan April secara tepat dan tepat waktu. 6. Menyelesaikan pertanggungjawaban UP dan TUP dengan tepat waktu pada bulan Mei.	1. Melakukan revisi DIPA sesuai dengan ketentuan dan memaksimalkan pengajuan beberapa jenis revisi dalam 1 kali pengajuan revisi. 2. Menjaga Konsistensi RPD bulan Juni yang telah ditetapkan pada Halaman III DIPA. 3. Mempercepat pelaksanaan kegiatan barang dan jasa untuk menacapi target realisasi anggaran TW 2. 4. Mendaftarkan data kontrak secara tepat waktu pada bulan Juni. 5. Mempercepat pembayaran	Tercapainya target Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Padang Tahun 2025

								n UP dan TUP dengan tepat waktu pada bulan mei 8. Melakukan efisiensi anggaran RO SBK.				belanja kontraktual pada bulan Juni. 6. Melaporkan capaian output bulan Mei secara tepat dan tepat waktu. 7. Menyelesaikan pertanggungjawaban UP dan TUP dengan tepat waktu pada bulan Juni 8. Melakukan efisiensi anggaran RO SBK.	
25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,95	Akhir Tahun		-	-	- Masih terdapat pegawai yang belum mengikuti peltihan Manajemen Risiko - Masih terdapat pegawai yang belum memahami Manajemen Risiko sehingga perlu disosialisasikan kembali setiap periode - Belum semua identifikasi risiko telah mempertimbangkan	1. Memastikan seluruh pegawai telah mengikuti pelatihan Mananjemen Risiko 2. Melakukan sosialisasi Manajemen Risiko 3. Melakukan identifikasi risiko dengan mempertimbangkan seluruh isu internal	Desember	Progres	1. Mengikuti pelatihan Manajemen Risiko (seluruh pegawai telah mengikuti pelatihan dan 1 orang pegawai pindahan telah mengikuti pelatihan pada Bulan Mei) 2. Mensosialisasikan Manajemen Risiko kepada pegawai	1. Melakukan sosialisasi Manajemen Risiko 2. Melakukan identifikasi risiko dengan mempertimbangkan seluruh isu internal dan eksternal yang ada 3. Melakukan	Nilai Indeks Manajemen Risiko dapat tercapai

							seluruh isu internal dan eksternal yang ada - Penilaian risiko masih belum konsisten sesuai pedoman terkait rumusan, atribut pengendalian, penetapan level risiko, tindakan mitigasi risiko dan lain-lain"	dan eksternal yang ada 4. Melakukan penilaian risiko secara konsisten sesuai pedoman terkait rumusan, atribut pengendalian, penetapan level risiko, tindakan mitigasi risiko dan lain-lain" 5. Melakukan monitoring terhadap risiko yang telah diidentifikasi			melalui whatsup group 3. Melakukan monitoring terhadap risiko yang telah diidentifikasi	penilaian risiko secara konsisten sesuai pedoman terkait rumusan, atribut pengendalian, penetapan level risiko, tindakan mitigasi risiko dan lain-lain" 4. Melakukan monitoring berkelanjutan terhadap risiko yang telah diidentifikasi	

NO.	Indikator Kegiatan	TARGET 2025	JENIS	JUNI			KONDISI AWAL	REKOMENDASI	TIMELINE PENYELESAIAN	STATUS	RENCANA AKSI		KONDISI AKHIR
				Target	Realisasi	Capaian (%)	(Kendala/Permasalahan/Capaian Terhadap Target)	(Rencana Tindak Lanjut)	(Bulan)	(Progres/Selesai)	(Rencana Aksi yang Sudah Selesai)	(Rencana Aksi yang Belum Selesai)	(Tercapainya Target/Peningkatan Kinerja)
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,75	Flat	86,75	93,35	107,61	- Kerusakan alat AAS untuk pengujian logam berat Pb, Cd dan As, menghambat pelaksanaan uji logam untuk komoditi Kosmetik, OBA dan SK - Adanya kebijakan efisiensi pada awal tahun serta relaksasi pada pertengahan bulan April mengakibatkan penumpukan beban kerja (beban sampling dan pengujian) pada bulan Mei hingga akhir tahun 2025 '- Tingginya jumlah sampel yang menjadi target uji laboratorium Mikrobiologi, karena peningkatan jumlah sampel untuk semua komoditi (sediaan farmasi dan pangan), melebihi kapasitas uji laboratorium sehingga pengujian tidak dapat dilaksanakan untuk semua sampel secara	- Perbaikan alat AAS, serta mengalihkan pelaksanaan pengujian logam As, Pb dan Cd menggunakan alat AAS yang di kelola Lab. Pangan. - Menyusun ulang rencana sampling dan pengujian untuk bulan Mei samapai akhir tahun 2025 dengan mempertimbangakan kapasitas pengujian di laboratorium. - Mengatur pelaksanaan pengujian di laboratorium dengan memperhatikan waktu masuk sampel serta batas time line pengujian, agar tidak ada sampel yang terlalu	Juli	Progres	- Mengalihkan pelaksanaan pengujian logam As, Pb dan Cd menggunakan alat AAS yang di kelola Lab. Pangan. '- Menyusun ulang rencana sampling dan pengujian untuk bulan Mei sampai akhir tahun 2025 dengan mempertimbangakan kapsitas pengujian di laboratorium. - Mengatur pelaksanaan pengujian dilaboratorium dengan memperhatikan waktu masuk sampel serta batas time line pengujian, agar tidak ada sampel yang terlalu lama	- Perbaikan alat AAS	- Parameter uji logam (Pb; Cd dan As) dapat dilaksanakan sehingga target pemenuhan parameter uji dapat d penuhi 100%

							bersamaan, hal ini memperpanjang waktu penyelesaian pengujian.	lama menunggu untuk diuji.			menunggu untuk di uji.		
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26,00	Akhir Tahun	-	-	-	Hasil Monev laporan melalui website e-meso, baru 4 sarana pelayanan kesehatan yang melaporkan KTD, yaitu RS Semen Padang, RS Unand, RS Saanin, RSIA Restu.	`- Mengingatkan kembali tenaga kesehatan melalui WAG kolaborasi Meso `- Mengingatkan PIC Farmakovigilans untuk segera melaporkan KTD bersamaan dengan penagihan tindakan perbaikan hasil pemeriksaan sarana pelayanan kesehatan	Desember 2025	Progres	`- Mengingatkan kembali tenaga kesehatan melalui WAG kolaborasi Meso `- Mengingatkan PIC Farmakovigilans untuk segera melaporkan KTD bersamaan dengan penagihan tindakan perbaikan hasil pemeriksaan sarana pelayanan kesehatan	- Mengingatkan PIC akan dilaksanakan setiap Bulan hingga tercapai angka pelaporan 26% (12 Sarana yang melaporkan KTD) '- Mengadakan monitoring dan evaluasi pelaporan KTD/ESO di Bulan Agustus atau September secara luring	Tercapainya Target Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	Flat	85,00	97,64	114,87	1. Keterbatasan ketersediaan reagensia, suku cadang dan baku pembanding sehingga terjadinya penyesuaian kategori sampling sampai tersedianya pengadaan reagensia yang dipesan	1. Melakukan koordinasi internal antara katim fungsi pengujian pangan degan PPK untuk melakukan percepatan pengadaan reagensia, suku cadang dan baku banding 2. Melakukan percepatan jadwal pelaksanaan sampling sehingga pelaporan pengujian dan tindak lanjut hasil dapat dilaksanakan pada bulan yang sama 3. Meningkatkan koordinasi internal dalam hal sampling dan tindak lanjut sampling	Desember 2025	Progres	1. Melakukan tindak lanjut terhadap sampel yang tidak memenuhi syarat 2. Meningkatkan koordinasi dengan tim internal	Tindak lanjut sampel yang perlu dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan	Tercapainya target Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	Flat	100,00	100,00	100,00	Tidak ada pengaduan KLB KP bulan Juni	Terus meningkatkan koordinasi internal dan eksternal terkait pengaduan kasus KLB KP	Desember 2025	Progres	Menindaklanjuti (menguji dan melaporkan) sampel KLB KP TW 1 dan 2	-	Realisasi penyelesaian sampel KLB KP yang ditindaklanjuti tercapai sesuai target (100%). Laporan evaluasi selesai tepat waktu dan sesuai standar.

5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	Flat	85,00	100,00	117,65	Terjadinya perubahan dari target efisiensi ke target awal sampel PIRT sebelum efisiensi sehingga perlu adanya persiapan dan penyesuaian kategori sampling dengan ketersediaan reagensia, suku cadang, baku banding dan koordinasi dengan lab regional	1. Meningkatkan koordinasi internal dalam hal sampling dan tindak lanjut sampling 2. Melakukan koordinasi internal antara katim fungsi pengujian pangan degan PPK untuk melakukan percepatan pengadaan reagensia, suku cadang dan baku banding	Desember 2025	Progres	1. Melakukan tindak lanjut terhadap sampel yang tidak memenuhi syarat 2. Meningkatkan koordinasi dengan tim internal	1. Meningkatkan monitoring terhadap sampel PIRT yang perlu ditindaklanjuti bersama tim internal, 2. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait	Tercapainya target Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89,50	Flat	89,50	89,38	99,87	Pengumpulan CAPA dari pelaku usaha berjalan lambat karena tidak semua sarana mengirimkan CAPAnya dengan inisiatif sendiri tanpa ditagih terlebih dahulu	1. Memastikan surat TL diterima pelaku usaha/ linsek dengan selalu mengingatkan petugas untuk mengirimkan surat TLnya juga melalui media komunikasi online seperti email ataupun whatsapp. 2. Petugas yang merekap CAPA per komoditi secara rutin, secara tidak langsung telah mengingatkan petugas untuk mengingatkan sarananya agar mengirimkan CAPA. 3. Melakukan kegiatan yang dapat	Desember 2025	Progres	1. Memastikan surat TL diterima pelaku usaha/ linsek dengan selalu mengingatkan petugas untuk mengirimkan surat TLnya juga melalui media komunikasi online seperti email ataupun whatsapp. 2. CAPA telah mulai terarsipkan dengan rapi dalam folder respon sesuai link yang telah dimasukkan dalam setiap surat tindak lanjut ke pelaku usaha	1. Melakukan pengawalan dan desk CAPA sebagian sarana lainnya	Peningkatan kinerja dari periode sebelumnya

								mempercepat respon dari pelaku usaha seperti mengirimkan surat penagihan CAPA ke sarana atau jika anggaran memungkinkan akan menjemput CAPA secara on site ke sarana					
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	Flat	85,00	100,00	117,65	Padatnya kegiatan inspeksi menyebabkan pemeriksaan terhadap sarana target ini tertunda	Memastikan petugas dapat melakukan pemeriksaan sesuai rencana, membuat surat tindak lanjut, melaporkan secara tepat waktu melalui SIPT dan melakukan monev CAPA dari pelaku usaha	Desember 2025	Progres	Melakukan pemeriksaan tiga sarana sesuai pedoman pemeriksaan	1. Melakukan pemeriksaan dua sarana lainnya sesuai pedoman pemeriksaan 2. Melakukan monitoring surat tindak lanjut yang diberikan waktu 21 hari kerja setelah inspeksi dilakukan 3. Melakukan monitoring dan evaluasi CAPA pelaku usaha	Peningkatan kinerja dari periode sebelumnya

8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	Flat	85,00	100,00	117,65	Pelaku usaha industri pangan olahan belum menerapkan seluruh aspek CPPOB dengan baik	1. Melaksanakan pembinaan kepada pelaku usaha agar meningkatkan pemahaman terhadap penerapan CPPOB dalam proses produksi sehingga menghasilkan produk pangan yang aman dan bermutu. 2. Melaksanakan tindak lanjut hasil inspeksi sarana secara konsisten diantaranya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha	Juni 2025	Selesai	1. Melaksanakan tindak lanjut hasil inspeksi terhadap 9 sarana produksi pangan secara konsisten diantaranya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha. 2. Melakukan pengawasan dan pembinaan kepada 9 sarana pangan olahan dalam penerapan cara produksi pangan olahan yang baik	Evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha	Telah melakukan pengawasan dan pembinaan kepada 9 sarana pangan olahan dalam penerapan cara produksi pangan olahan yang baik
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,00	Flat	92,00	97,64	106,13	Sarana distribusi sediaan farmasi belum secara konsisten melakukan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan	Melakukan pemeriksaan sarana berdasarkan analisa resiko dan pemberian Tindak lanjut sesuai ketentuan	Desember 2025	Progres	Membuat tindak lanjut hasil inspeksi dan pelaporan sesuai timeline dan melakukan monev CAPA	Mendampingi pelaku usaha dan penyusunan CAPA dan memantau konsistensi sarana dalam penerapan CAPA yang telah dibuat, pelaksanaan sanksi yang lebih tegas sesuai	Tercapai target Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

												ketentuan dan monitoring pasca penegakan sanksi bersama lintas sektor.	
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	Flat	85,00	88,39	103,99	1. Pengawasan sarana distribusi pangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan surat tindak lanjut dilaksanakan sesuai ketentuan serta terdapat surat tindak lanjut yang sedang proses masih dalam rentang kendali time line surat tindak lanjut . 2. Peningkatan koordinasi dalam tim kerja sangat dibutuhkan dalam rangkla mencapai kinerja yang maksimal.	1. Meningkatkan monitoring terhadap tindak lanjut hasil pengawasan. 2. Meningkatkan koordinasi dalam tim kerja pengawasan sarana distribusi pangan	Desember 2025	Progres	1. Melaksanakan monitoring tindak lanjut agar sesuai ketentuan. 2. Meningkatkan koordinasi dalam tim kerja pengawasan sarana distribusi pangan	1. Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut hasil pengawasan sarana distribusi pangan. 2. Terus meningkatkan koordinasi dalam tim kerja pengawasan sarana distribusi pangan	Tercapainya target Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	81,09	Flat	81,09	99,86	123,15	Jenis media iklan tertentu, terutama media cetak dan media penyiaran lokal, tidak selalu tersedia sehingga mempengaruhi realisasi perencanaan pengawasan iklan yang sudah dibuat. Pelaporan pengawasan	Perluasan area pengawasan iklan atau penambahan waktu pengawasan iklan khususnya pengawasan di kab/kota lain dan penjadwalan pelaksanaan pengawasan diatur pada awal bulan.	Desember 2025	Progress	Perencanaan sudah ditetapkan menyesuaikan dengan target yang ditetapkan.	Penjadwalan pengawasan iklan untuk periode triwulan dan pemantauan efektivitas pelaksanaannya	Telah dilakukan pemantauan efektivitas pelaksanaan terhadap pencapaian target dan realisasinya.

							iklan juga dapat terdampak karena petugas pengawasan memiliki tugas utama lainnya.						
12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	63,00	Kumulatif	63,00	100,00	158,73				Selesai		-	Tercapainya target Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77,00	Kumulatif Triwulan	76,80	81,60	106,25	Verifikasi MA Lab Obat dan Pengadaan alat untuk pemenuhan standar laboratorium terkendala pengadaan yang masih dalam proses kontrak.	1.Lab harus melakukan pengujian dengan metoda analisa dalam SKL yang belum mampu uji untuk peningkatan Standar Ruang Lingkup dan kompetensi personil laboratorium serta verifikasi MA secara bertahap sesuai perencanaan yang disusun. 2. Percepatan pengadaan alat laboratorium untuk meningkatkan	Desember 2025	Progres	Verifikasi MA TW II oleh lab Mikrobiologi sesuai target yang direncanakan dan Lab OT direalisasikan sesuai yang mampu dikerjakan walaupun sebelumnya tidak ditargetkan. Untuk SRL TW II ini, lab kosmetik mempunyai 1 item target yang sudah direalisasikan.	Pemenuhan Verifikasi MA Obat Target TW II sebanyak 1 item dan pemenuhan standar alat laboratorium yang masih dalam proses dan penyelesaian kontrak.	Capaian Nilai SKL TW II (106,25%) sudah melebihi target 76,8 sedangkan realisasi 81,6. Tercapainya Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

								standar peralatan dalam SKL.					
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88,00	Flat	88,00	87,37	99,28	- Target kegiatan KIE Rutin sebanyak 194 peserta baru terlaksana 94 peserta (48,45%). Kegiatan untuk 100 peserta sisanya belum dapat dilaksanakan karena terkendala anggaran. - Target kegiatan KIE bersama TOMAS Tahun 2025 sebanyak 3750 peserta (15 titik @ 250 peserta) baru terlaksana 1000 (26,66%).	- Menunggu kemungkinan revisi anggaran dari KRO yang sama (sisa kegiatan KIE bersama Tomas direvisi ke KIE Rutin). - Mempersiapkan juga kemungkinan KIE Rutin secara Daring.	Desember	Progres	Melaksanakan kegiatan: * KIE Bersama TOMAS sebanyak 4 titk @ 250 orang peserta. 1. Tgl 4 Juni 2025, Kecamatan Pariaman Tengah 2. Tgl 10 Juni 2025, Kecamatan Ampek Angkek 3. Tgl 11 Juni 2025, Kecamatan Palupuah 4. Tgl 19 Juni 2025, Kecamatan Lubuk Alung	Kegiatan yang belum terlaksana -Kegiatan KIE Rutin yang belum terlaksana 2 kegiatan/ 100 peserta (48,45 %) - Kegiatan KIE bersama TOMAS yang belum terlaksana sebanyak 7 titik @ 250 peserta (53,33%)	- Pelaksanaan kegiatan KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang Tahun 2025 sesuai perencanaan yang disusun. - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang memenuhi target.
15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	14,00	Kumulatif	47,50	47,50	100,00	- Sebelumnya telah terlaksana kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan untuk Sekolah Intervensi dan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah pada bulan Mei 2025	- Pelaksanaan Sosialisasi Keamanan Pangan kepada sekolah cakupan perluasan	Juli 2025	Progres	Pelaksanaan tahapan program sosialisasi keamanan pangan untuk cakupan perluasan akan dilaksanakan pada Bulan Juli 2025 karena mengingat pada bulan Juni bertepatan dengan masa ujian di sekolah dan	Melaksanakan tahapan program selanjutnya: Sosialisasi keamanan pangan untuk sekolah cakupan perluasan, Monitoring dan Sertifikasi	Pelaksanaan kegiatan berdasarkan tahapan program sesuai dengan masing-masing timeline dengan capaian akhir 100% dan jumlah sekolah yang

											dilanjutkan dengan libur sekolah.	Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan serta pengawalan sekolah yang telah diintervensi sebelumnya.	melaksanakan pembudayaan keamanan pangan sesuai target
16	Jumlah desa pangan aman	6,00	Kumulatif	45,00	47,50	105,56	- Sebelumnya telah terlaksana kegiatan Bimtek Kader Keamanan Pangan Desa/Nagari di Kabupaten Solok pada bulan Mei 2025	- Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Komunitas Pangan Desa/Nagari di Kabupaten Solok	Juni 2025	Progres	Melaksanakan tahapan program: Bimbingan Teknis Komunitas Keamanan Pangan Desa/Nagari intevensi yaitu Nagari Batang Barus (24 Juni 2025), Nagari Aia Batumbuak (25 Juni 2025) dan Nagari Koto Gaek Guguak (26 Juni 2025)	Melaksanakan tahapan program selanjutnya: monitoring dan evaluasi serta pengawalan desa yang telah diintervensi pada tahun sebelumnya	Pelaksanaan kegiatan berdasarkan tahapan program sesuai dengan masing-masing timeline dengan capaian akhir 100% dan jumlah desa pangan aman
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	Kumulatif	60,00	70,00	116,67	- Sebelumnya telah terlaksana kegiatan bimtek dan penyuluhan komunitas pasar di Pasar Cupak Kabupaten Solok	- Pelaksanaan Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar dan Pengawalan Pasar	Juni 2025	Progress	Melaksanakan tahapan program: - Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar di Pasar Cupak yang dilakukan oleh komunitas pasar selama bulan Juni 2025 - Pengawalan pasar yang telah	Melaksanakan tahapan program selanjutnya: Pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi, serta pengawalan pasar yang telah	Pelaksanaan kegiatan berdasarkan tahapan program sesuai dengan masing-masing timeline dengan capaian akhir 100% dan jumlah pasar pangan aman

											diintervensi sebelumnya di Pasar Padang Aro Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 28 Juni 2025	diintervensi pada tahun sebelumnya	berbasis komunitas
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80,00	Kumulatif	43,33	46,83	108,08	1. Pelaku usaha UMKM pangan belum memahami CPPOB. 2. Pelaku usaha UMKM Kosmetik belum memahami CPKB 3. Kemampuan pelaku usaha dalam teknologi mengakibatkan prose pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB belum dapat dilakukan secara cepat dan mandiri.	1. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dalam rangka penerapan CPPOB dan CPKB. 2. Melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dan Kosmetik dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB dan CPKB di aplikasi. .	Desember 2025	Progres	1. Melakukan pembinaan kepada 5 pelaku usaha dalam rangka penerapan CPPOB, 2 pelaku usaha industri kosmetik dalam rangka penerapan CPKB 2. Melakukan pendampingan langsung kepada 2 pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi	Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha pangan dan kosmetik dalam rangka penerapan CPPOB dan CPKB	- Telah melakukan pembinaan kepada 5 pelaku usaha dalam rangka penerapan CPPOB, 2 pelaku usaha kosmetik dalam rangka penerapan CPKB. - Telah melakukan pendampingan langsung kepada 2 pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi.

19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	90,00	Kumulatif	43,00	50,00	116,28	1. Terlaksananya proses penyidikan sediaan farmasi obat dan makanan terhadap 3 perkara yang sudah sampai ke tahap1 untuk ke 3 perkara. 2. Telah tercapainya target Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan dengan berkoordinasi yang baik dengan JPU. 3. Telah dilaksanakan gelar perkara dengan kesimpulan disetujuinya perkara cary over dihentikan penyidikannya (SP3)	1. Berkoordinasi dengan JPU untuk proses P21 pada perkara tsk Arf dan Toni. 2. Mengumpulkan informasi untuk mencari bukti yang cukup.	Desember 2025	Progress	1. Melakukan kegiatan intelijen sesuai pedoman intelijen. 2. Pemberitahuan SP3 ke JPU melalui Korwas PPNS Polda Sumbar.	Melengkapi berkas perkara untuk memenuhi P19 pd Perkara RN	Melengkapi Berkas perkara untuk memenuhi P19 pada kasus Arf dan TN.
20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90,00	Kumulatif	50,00	50,00	100,00	1. Kegiatan patroli siber dan profiling siber terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang didistribusikan secara online telah dilaksanakan. 2. Rekomendasi cegah tangkal kejahatan obat dan makanan dari Direktorat Cegah Tangkal diberikan ke BBPOM di Padang pada tanggal 25 Juni 2025 3. Laporan analisis	1. Menyusun laporan Analisis Penelusuran Siber secara tepat waktu 2. Menyusun laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan obat dan makanan setelah dapat rekomendasi dari direktorat cegah tangkal 3. Menyusun perencanaan untuk laporan analisis kerawanan kejahatan	Desember 2025	Progress	Membuat Laporan Analisis Penelusuran Siber bulan Juni secara tepat waktu dan Membuat laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan obat dan makanan, saat ini sudah ada sebagian yang dilaksanakan	1. Menyusun laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan obat dan makanan 2. Menyusun laporan analisis kerawanan kejahatan	Tercapainya target Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

							kerawanan kejahatan belum dilaksanakan						
21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,70	Akhir Tahun		-	-	Mendapat Hasil survei indeks pelayanan publik bulan Mei 3,95 dan Survey SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) : 98,98 Kemampuan pelaku usaha dalam teknologi mengakibatkan proses pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB belum dapat dilakukan secara cepat dan mandiri	1. Melakukan kegiatan layanan publik informasi dan pengaduan bulan Juni. 2. Melakukan kegiatan layanan pengujian pihak ketiga bulan Juni. 3. Melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi OSS RBA bulan Juni. 4. Melaksanakan survei pelayanan publik kepada konsumen bulan Juni. 5. Menyusun dan menetapkan serta mempublish standar layanan publik tahun 2025 yang telah ditetapkan.	Desember 2025	Progress	1. Melakukan kegiatan layanan publik informasi dan pengaduan bulan Juni. 2. Melakukan kegiatan layanan pengujian pihak ketiga bulan Juni. 3. Melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi OSS RBA bulan Juni. 4. Melaksanakan survei pelayanan publik kepada konsumen bulan Juni.	1. Melakukan kegiatan layanan publik informasi dan pengaduan bulan Juli 2. Melakukan kegiatan layanan pengujian pihak ketiga bulan Juli 3. Melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi OSS RBA bulan Juli 4. Melaksanakan survei pelayanan publik kepada	Tercapainya target Indeks Pelayanan Publik UPT

												konsumen bulan Juli 5. Menyusun dan menetapkan serta mempublish standar layanan publik tahun 2025 yang telah ditetapkan	

22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)	90,00	Akhir Tahun		-	-	1. Masih ada renja yang belum dilaksanakan 2. Melakukan monitoring pelksanan renja dan program prioritas 3. Program prioritas zona 2 helpdesk berjalan lancar dan selalu dimonitor 4. Pemantauan/monitoring pelaksanaan kegiatan di setiap fungsi sesuai SOP 5. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi kegiatan dalam pengukuran kinerja, operasional manajemen SDM, dan pemberian layanan kepada publik 6. Monitoring dan evaluasi KIP sesuai peraturan per-UU. 7. Progress implementasi aplikasi e-magang masih terhambat, perlu pengembangan lebih lanjut. 8. Perkembangan progres Inovasi Googlesite Monev Kinerja sudah cukup signifikan 9. Implementasi SAKIP	1. Melaksanakan Monev Renja 2. Melaksanakana Program prioritas 3. Melakukan monitoring dan evaluasi adanya review/perubahan terhadap SOP Makro maupun Mikro 4. Menyempurnakan aplikasi e-magang 5. Menyelesaikan Inovasi Googlesite Monev Kinerja 6. Melaksanakan Monev kinerja bulanMei 2025 7. Merevieu standar pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik 8. Memberi penghargaan dan sanksi kepda petugas layanan bulan Mei 9. Mengembangakn inovasi pelayanan publik yang berdasarkan kebutuhan stakeholder atau hasil manajemen risiko.	Desember 2025	Progress	1. Melaksanakan Monev Renja Bulan Mei 2. Melaksanakana Renja Bulan Mei 3. Memantau progres pelaksanaan program prioritas 4. Melaksanakan monev kinerja bulan Mei 5. Merevieu standar pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik 6. Memberikan penghargaan dan sanksi kepada petugas layanan bulan Mei	1. Mengevaluasi progres program prioritas hingga TW 2 2. Melaksanakan Monev Renja bulan Juni 3. Melaksanakan Renja 4. Melengkapi pengembangan Inovasi Googlesite Monev Kinerja 5. Melaksanakan Monev kinerja bulan Juni 2025 6. Mengembangkan inovasi pelayanan publik yang berdasarkan kebutuhan stakeholder atau hasil manajemen risiko .	Target nilai pembangunan ZI dapat tercapai

							dalam pencapaian kinerja untuk bulan Mei 2025 10. Monev kinerja bulan Januari sampai Mei sudah diinput 11. Laporan Kinerja dan evaluasi Internal TW 1 telah dikirim 12. Peningkatan Nilai Pokja Pelayanan Publik 13. Implementasi pemberian penghargaan dan sanksi belum dilaksanakan secara konsisten 14. Inovasi Pelayanan Publik yang berdasarkan kebutuhan stakeholder atau hasil manajemen resiko						

23	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	82,00	Akhir Tahun		-	-	1. Masih terdapat defenisi operasional IKU dan pengisian belum kertas kerja yang belum jelas 2. Terdapat peningkatan target IKU yang telah tercapai 3. Masih ada target yang belum tercapai, namun telah diajukan revisi target pada bulan Mei 2025	1. Input data monev online bulan Mei di aplikasi 2. Pengisian Monev capaian kinerja oleh ka Tim Bulan Mei 2025 3. Implementasi SAKIP sesuai pedoman pada semua IKU agar target dapat tercapai	Desember	Progress	1. Menginput data monev online bulan Mei 2025 2. Mengisi Monev capaian kinerja bulan Mei 2025 3. Mengimplementasikan SAKIP sesuai pedoman pada semua IKU agar target dapat tercapai	1. Menginput data monev online bulan Juni 2. Mengisi Monev capaian kinerja bulan Juni 3. Mengimplementasikan SAKIP sesuai pedoman pada semua IKU agar target dapat tercapai 4. Menyusun Laporan Kinerja dan Evaluasi Internal TW II 2025	Tercapaianya target nilai AKIP BBPOM di Padang

24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00	Akhir Tahun		-	-	Capaian Output bulan Mei telah dilaporkan dan memperoleh nilai 100 namun nilai IKPA belum maksimal.	1. Melakukan revisi DIPA sesuai dengan ketentuan dan memaksimalkan pengajuan beberapa jenis revisi dalam 1 kali pengajuan revisi. 2. Menjaga Konsistensi RPD bulan mei yang telah ditetapkan pada Halaman III DIPA. 3. Mempercepat pelaksanaan kegiatan barang dan jasa untuk menacapi target realisasi anggaran TW 2. 4. Mendaftarkan data kontrak secara tepat waktu pada bulan Juni. 5. Mempercepat pembayaran belanja kontraktual pada bulan Juni. 6. Melaporkan capaian output bulan Mei secara tepat dan tepat waktu. 7. Menyelesaikan pertanggungjawaban UP dan TUP dengan tepat waktu pada bulan Juni.	Desember 2025	Progres	1. Menjaga konsistensi RPD bulan Juni yang telah ditetapkan pada Halaman III DIPA. 2. Mempercepat pelaksanaan kegiatan barang dan jasa pada bualan Juni. 3. Mendaftarkan data kontrak secara tepat waktu pada bulan Juni. 4. Mempercepat pembayaran belanja kontraktual pada bulan Juni. 5. Melaporkan capaian output bulan Mei secara tepat dan tepat waktu. 6. Menyelesaikan pertanggungjawaban UP dan TUP dengan tepat waktu pada bulan Juni	1. Melakukan revisi DIPA sesuai dengan ketentuan dan memaksimalkan pengajuan beberapa jenis revisi dalam 1 kali pengajuan revisi. 2. Menjaga Konsistensi RPD bulan Juli yang telah ditetapkan pada Halaman III DIPA. 3. Mempercepat pelaksanaan kegiatan barang dan jasa untuk menacapi target realisasi anggaran TW 3. 4. Mendaftarkan data kontrak secara tepat	Tercapainya target Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Padang Tahun 2025

								8. Melakukan efisiensi anggaran RO SBK.				waktu pada bulan Juli. 5. Mempercepat pembayaran belanja kontraktual pada bulan Juli. 6. Melaporkan capaian output bulan Juni secara tepat dan tepat waktu. 7. Menyelesaikan pertanggungjawaban UP dan TUP dengan tepat waktu pada bulan Juli 8. Melakukan efisiensi anggaran RO SBK.	

25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,95	Akhir Tahun		-	-	- Masih terdapat pegawai yang belum mengikuti pelatihan Manajemen Risiko - Masih terdapat pegawai yang belum memahami Manajemen Risiko sehingga perlu disosialisasikan kembali setiap periode - Belum semua identifikasi risiko telah mempertimbangkan seluruh isu internal dan eksternal yang ada - Penilaian risiko masih belum konsisten sesuai pedoman terkait rumusan, atribut pengendalian, penetapan level risiko, tindakan mitigasi risiko dan lain-lain" - Belum semua IKU diidentifikasi risikonya	1. Memastikan seluruh pegawai telah mengikuti pelatihan Mananjemen Risiko 2. Melakukan sosialisasi Manajemen Risiko 3. Melakukan identifikasi risiko dengan mempertimbangkan seluruh isu internal dan eksternal yang ada 4. Melakukan penilaian risiko secara konsisten sesuai pedoman terkait rumusan, atribut pengendalian, penetapan level risiko, tindakan mitigasi risiko dan lain-lain" 5. Melakukan monitoring terhadap risiko yang telah diidentifikasi 6. Menyusun Daftar risiko dengan berdasarkan IKU yang telah ditetapkan	Desember	Progres	1.Mengikuti pelatihan Manajemen Risiko (semua pegawai telah mengikuti pelatihan kecuali PPPK yang baru dilantik bulan Juni 2025) 2. Melakukan monitoring terhadap risiko yang telah diidentifikasi (risiko yang dimitigasi yaitu penindakan)	1. Membuat memorandum kepada PPPK untuk mengikuti pelatihan Manajemen Risiko pegawai 2. Melakukan identifikasi risiko dengan mempertimbangkan seluruh isu internal dan eksternal yang ada 3. Melakukan penilaian risiko secara konsisten sesuai pedoman terkait rumusan, atribut pengendalian, penetapan level risiko, tindakan mitigasi risiko dan lain-lain 4. Melakukan monitoring berkelanjutan terhadap risiko yang	Nilai Indeks Manajemen Risiko dapat tercapai

												telah diidentifikasi 5. Melakukan identifikasi risiko terhadap semua IKU yang telah ditetapkan	

BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

Jl. Gajah Mada PO Box 172 Padang - Sumbar 25137
Telp. (0751) 7054280, 7055213,Fax. (0751) 7055213, 445241
Email : bpom_padang@pom.go.id,bbpom_padang@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI PADANG
NOMOR HK.02.02.3A.04.25.64 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PADANG

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka terwujudnya visi dan misi Badan POM RI, dipandang perlu membuat rencana strategis dan rencana kerja yang terarah dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai informasi kinerja yang telah dicapai;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Keputusan Presiden RI No. 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden No.09 tahun 2004;
3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;

4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2025 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG.

Pertama : Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Padang tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang sebagai berikut :

Penanggungjawab	: Kepala Balai Besar POM di Padang
Ketua	: Kepala Bagian Tata Usaha
Sekretaris	: Vera Sribanon, S.Si., Apt.
Anggota	
Elyunaida, S.Si, Apt, M.Farm	: IKU 22,23,24,25
Linda Gusrini Fadri, S.Si, Apt.,M.Farm	: IKU 21
Dra. Patria Dehelen, Apt	: IKU 19

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Rina Syukrina, S.Farm, Apt	: IKU 9,IKU 22
Aria Bogorianti Asgul, S.Si, Apt	: IKU 8,12,18
Fitria, S.Si, Apt	: IKU 3,4,5,10
Fitra Yelli, S.Farm, Apt.,M.Farm	: IKU 6,7
Mutiara Yulanda, S.Farm, Apt	: IKU 1
Yelvina, S.Si, Apt	: IKU 4,13
Azfrianty, STP., M.Farm	: IKU 14,22
Reni Sepriyanti, S.Farm, Apt	: IKU 15,16,17
Thu Desy Cameryta, S.Farm, Apt, M.Farm	: IKU 3
Ade Cahyana, S.Si, Apt., M.Pharm	: IKU 11
Dilla Shavera, S.Si, Apt. M.Biomed	: IKU 2
Nining, M.H., S.Farm, Apt,	: IKU 20
Vera Sribanon, S.Si, Apt	: Tata Usaha
Bambang Hermanto, SM., M.M	: Tata Usaha
Nery Revisa, S.E., M.Sc.	: Tata Usaha
Sony Aulia Dwita AM, SE	: Tata Usaha
Airin Muchlis, SE	: Tata Usaha
Editor	: Yuni Tri Wahyuni, S.Kom., M. Eng.
	: Taruna Wadi, S.Kom

Kedua : Tugas tim adalah Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Interim Triwulan I sd III 2025 dan Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 19 Maret 2025
PLT. KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG,



HILDA MURNI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran
Pembentukan Tim Penyusun Laporan
Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025
Nomor : HK.02.02.3A.04.25.64
Tanggal : 19 Maret 2025

DAFTAR INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	Nomor IKU	Daftar Nama IKU
1	Indikator Kinerja Utama 1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
2	Indikator Kinerja Utama 2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
3	Indikator Kinerja Utama 3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
4	Indikator Kinerja Utama 4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT
5	Indikator Kinerja Utama 5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
6	Indikator Kinerja Utama 6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
7	Indikator Kinerja Utama 7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
8	Indikator Kinerja Utama 8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
9	Indikator Kinerja Utama 9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
10	Indikator Kinerja Utama 10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
11	Indikator Kinerja Utama 11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
12	Indikator Kinerja Utama 12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
13	Indikator Kinerja Utama 13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
14	Indikator Kinerja	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

	Utama 14	Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
15	Indikator Kinerja Utama 15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
16	Indikator Kinerja Utama 16	Jumlah desa pangan aman
17	Indikator Kinerja Utama 17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
18	Indikator Kinerja Utama 18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan
19	Indikator Kinerja Utama 19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT
20	Indikator Kinerja Utama 20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar
21	Indikator Kinerja Utama 21	Indeks Pelayanan Publik
22	Indikator Kinerja Utama 22	Nilai Pembangunan ZI
23	Indikator Kinerja Utama 23	Nilai AKIP UPT BPOM
24	Indikator Kinerja Utama 24	Nilai Kinerja Anggaran
25	Indikator Kinerja Utama 25	Indeks Manajemen Risiko

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 19 Maret 2025
PLT. KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG,

HILDA MURNI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BBPOM DI PADANG

Jln. Gajah Mada, Gunung Pangilun
Padang - Sumatera Barat
https://padang.pom.go.id - https://bbpompadang,id